LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Nr 2, 1950. KONPERENSI MEDJA BUNDAR. Pengumuman dokumen-dokumen Konperensi Medja Bundar.

KEPUTUSAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.
Nr 33 TAHUN 1950.

Presiden Republik Indonesia Serikat,

M e n i m b a n g: bahwa hasil-hasil Konperensi Medja Bundar oleh semua fihak telah diterima;

M e n i m b a n g: bahwa penjerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat dan penjerahan kedaulatan dari Keradjaan Belanda kepada R.I.S. telah terdjadi;

M e n i m b a n g: bahwa oleh karena itu segala sesuatu harus diumumkan setjara resmi.

M e m u t u s k a n:

Mengumumkan dengan menempatkan di Lembaran-Negara agar supaja setiap orang dapat mengetahui, dokumen-dokumen jang mengenai:

A. 1. Induk Persetudjuan,
   2. Piagam Penjerahan Kedaulatan,
   3. Statuut-Uni dengan persetudjuan-persetudjuan lampirannja,
   4. Persetudjuan Perpindahan dengan persetudjuan-persetudjuan lampirannja,
   5. Pertukaran surat.

B. 1. Maklumat Presiden Republik Indonesia dan Komite Nasional Pusat tertanggal 14 Desember 1949,
   2. Protokol di Amsterdam,

3. Akte Penjerahan Kedaulatan serta Pengakuan oleh Keradjaan Belanda,
4. Protokol Peletakan Djabatan Wakil Tinggi Mahkota di Indonesia dan penerimaan Pemerintahan Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 21 Djanuari 1950.

Presiden Republik Indonesia Serikat,

SOEKARNO.

Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat,

SOEPOMO.

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 24 Djanuari 1950.

Menteri Kehakiman,

SOEPOMO.

INDUK-PERSETUDJUAN.

Delegasi-delegasi:

1. Pemerintah Republik Indonesia,
2. Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federaal Overleg),
3. Keradjaan Nederland,

menimbang bahwa mereka telah bersidang dalam Konperensi Medja Bundar supaja selekas mungkin ditjapai perdamaian jang baik dan kekal dalam pertikaian Indonesia dengan djalan memperoleh persetudjuan antara peserta-peserta tentang tjara bagaimana akan diserahkan kedaulatan jang sesungguh-sungguhnja, sempurna dan tiada bersjarat kepada Republik Indonesia Serikat sesuai dengan asas-asas Renville;

menimbang bahwa mereka telah mentjapai tudjuan itu dalam kerdjasama jang baik;

menimbang bahwa Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia dalam peristiwa itu telah memberikan bantuan jang berharga;

telah memutuskan sebagai berikut:

I. Sekalian hasil Konperensi Medja Bundar termaktublah dalam rantjangan-rantjangan persetudjuan dan surat-surat; segala dokumen itu dilampirkan pada resolusi ini;

II. A. Rantjangan-rantjangan persetudjuan sebagai berikut:

   1. Rantjangan Piagam penjerahan kedaulatan;
   2. Rantjangan Statut-Uni, termasuk pula lampiran dan persetudjuan-persetudjuan chusus tentang pokok-pokok jang terpenting hal kerdjasama dikemudian hari;
   3. Rantjangan persetudjuan Perpindahan, termasuk persetudjuan-persetudjuan chusus berisi peraturan pokok-pokok jang perlu diurus sebagai akibat penjerahan kedaulatan.

B. Tentang beberapa soal jang tersendiri, Delegasi-delegasi telah saling mempermaklumkan masing-masing pendirian dengan surat-menjurat.

III. Dokumen-dokumen jang disebut pada A dan B disusun dalam bahasa Indonesia dan Belanda.
Kedua naskah itu mempunjai kekuatan jang sama.
Adalah pula dibuat naskah resmi berbahasa Inggeris; naskah itulah jang akan menentukan djikalau ada terdapat perbedaan arti antara naskah Indonesia dan naskah Belanda.

IV. Penerimaan resolusi ini oleh daerah-daerah jang berhimpun dalam Republik Indonesia Serikat dipihak jang satu dan oleh Keradjaan Nederland dipihak jang lain akan dipandang ratipikasi dokumen-dokumen jang dilampirkan pada resolusi ini. Ratipikasi oleh salah satu pihak tidak akan mempunjai kekuatan, djika salah satu dari pihak jang lain tidak meratipikasi resolusi ini.

V. Persetudjuan-persetudjuan jang disebut pada II akan mulai berlaku pada saat penjerahan kedaulatan; penjerahan itu akan dilangsungkan dengan segala upatjara pada sidang di Amsterdam, selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949.

VI. Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia atau suatu badan Perserikatan Bangsa-bangsa jang lain akan mengawasi di Indonesia penepatan segala persetudjuan tertjapai dalam Konperensi Medja Bundar.

Delegasi Pemerintah Republik Indonesia,

MOHAMMAD HATTA,
Ketua.

Delegasi Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal, (Bijeenkomst voor Federaal Overleg)

HAMID,
Ketua.

Ketua Konperensi Medja Bundar,

W. DREES.

Sekertaris-Umum Konperensi Medja Bundar,

M. J. PRINSEN.

Delegasi Keradjaan Nederland,

J. .H VAN MAARSEVEEN,
Ketua.

Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia,

R. HERREMANS,
Ketua-minggu.

H. MERLE COCHRAN,
Anggota.

TH. K. CRITCHLEY,
Anggota.

J. A. ROMANOS,
Sekertaris I.

Tjatatan. Naskah induk-persetudjuan berbahasa Belanda pertama-tama ditandatangani oleh Ketua Delegasi Keradjaan Nederland, naskah berbahasa Indonesia pertama-tama oleh Ketua Delegasi Republik Indonesia dan naskah berbahasa Inggeris pertama-tama oleh Ketua Delegasi Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal.

RANTJANGAN PIAGAM PENJERAHAN KEDAULATAN.

Pasal 1.

1. Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dengan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara jang merdeka dan berdaulat.

2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja; rantjangan konsitusi itu telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland.

3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949.

Pasal 2.

Tentang keresidenan Irian (Nieuw-Guinea) telah tertjapai persetudjuan sebagai berikut:

a. disebabkan hal persesuaian antara pendirian masing-masing pihak tentang Irian belum dapat ditjapai, sehingga soal itu masih mendjadi pokok pertikaian;

b. disebabkan keharusan Konperensi Medja Bundar diachiri dengan berhasil pada tanggal 2 Nopember 1949;

c. mengingat faktor penting-penting jang harus diperhatikan pada pemetjahan masalah Irian itu;

d. mengingat singkatnja penjelidikan jang telah dapat diadakan dan diselesaikan perihal soal-soal jang bersangkutan dengan masalah Irian itu;

e. mengingat sukarnja tugas-kewadjiban jang akan dihadapi dengan segera oleh peserta Uni, dan

f. mengingat kebulatan hati pihak-pihak jang bersangkutan hendak mempertahankan asas supaja semua perselisihan jang mungkin ternjata kelak atau timbul diselesaikan dengan djalan patut dan rukun,

maka status quo keresidenan Irian (Nieuw-Guinea) tetap berlaku seraja ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penjerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat masalah kedudukan-kenegaraan Irian akan diselesaikan dengan djalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland.

RANTJANGAN STATUT-UNI.

Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland,

telah memutus mengadakan kerdjasama dengan persahabatan atas dasar kesukarelaan, persamaan dan kemerdekaan sepenuh-penuhnja dan membentuk Uni Indonesia-Nederland, ja'ni dengan maksud mewudjudkan kerdjasama itu dimasa depan,

telah sepakat akan meletakkan dasar perhubungannja sebagai negara-negara jang merdeka dan berdaulat pada Statut-Uni ini,

seraja berpendapatan bahwa tidak suatu apa pada Statut-Uni boleh ditafsirkan begini, bahwa diketjualikan sesuatu tjara kerdjasama jang tidak disebut padanja ataupun kerdjasama di sesuatu lapangan jang tidak disebut padanja, jang sekiranja dirasa perlu oleh kedua peserta dimasa depan.

TJORAK UNI.

Pasal 1.

1. Uni Indonesia-Nederland mewudjudkan kerdjasama berbadan-perlengkapan jang teratur antara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland atas dasar sukarela dan persamaan status dengan hak-hak jang sama.

2. Uni tidak memperkurang status tiap-tiap peserta sebagai negara jang merdeka dan berdaulat.

MAKSUD UNI.

Pasal 2.

1. Maksud Uni ialah kerdjasama kedua peserta guna mengurus kepentingannja jang bersama.

2. Kerdjasama itu akan berlangsung terutama dalam hal-hal dilapangan perhubungan luar negeri, pertahanan dan sekadar perlu keuangan, serta pula dalam hal-hal jang bertjorak perekonomian dan kebudajaan.

Pasal 3.

1. Kedua peserta berdjandji akan memperdasarkan ketatanegaraannja pada asas-asas kerakjatan dan akan mengusahakan mengedjar pengadilan jang bebas.

2. Kedua peserta akan mengakui hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia jang termaktub pada lampiran Statut ini.

TJARA UNI BERLAKU.

Pasal 4.

Semua keputusan dalam Uni diambil atas persetudjuan antara kedua peserta.

KEPALA UNI.

Pasal 5.

1. Dipuntjak Uni adalah Seri Baginda Ratu Juliana, Puteri Oranje-Nassau, dan, pada pergantian-Tachta, ahliwaris Baginda jang sah pada Mahkota Nederalnd turun-temurun.

2. Apabila Kepala Uni belum dewasa atau apabila Kepala Uni tidak sanggup lagi menjelenggarakan djabatannja, begitupun djikalau Kepala Uni meletakkan djabatannja untuk perwakilannja.

Dengan semupakat bolehlah peraturan sedemikian itu diadakan lebih dahulu.

Pasal 6.

Kepala Uni mendjelmakan lambang kerdjasama dengan sukarela dan jang landjut-lama antara kedua peserta.

BADAN-BADAN PERLENGKAPAN UNI.

Pasal 7.

Untuk melaksanakan Uni maka dua kali setahun, lagi pula seberapa kali dianggap perlu oleh kedua peserta, diadakanlah konperensi oleh menteri-menteri atau orang-orang

jang mempunjai pertanggungan-djawab jang sama atau serupa menurut ketatanegaraan peserta itu; menteri-menteri dan orang-orang itu ditundjukkan oleh masing-masing peserta.

Ketjuali djika sudah bermupakat lain, maka dari tiap-tiap peserta tiga orang menteri akan menghadiri konperensi itu.

Pasal 8.

Menteri-menteri jang menghadiri konperensi tetap bertanggung-djawab kepada badan-badan perlengkapan peserta masing-masing, menurut ketatanegaraan masing-masing peserta.

Pasal 9.

Konperensi menteri itu menbentuk panitia-panitia sekadar perlu; jang diangkat mendjadi anggota panitia tadi diangkat oleh kedua peserta dengan angka jang sama.

Pasal 10.

1. Kedua peserta akan mengadakan hubungan berpadanan dan kerdjasama jang tetap antara parlemen-parlemen peserta masing-masing.

2. Perundingan pertama para wakil parlemen-parlemen akan diadakan didalam waktu delapan bulan setelah parlemen sementara Republik Indonesia terbentuk.

Pasal 11.

1. Uni mempunjai sekertariat jang tetap. Tiap-tiap peserta menundjuk seorang sekertaris-umum; seorang diantaranja memegang pimpinan sekertariat bergiliran setahun seorang.

2. Sekalian pegawai lain diangkat dengan sepakat kedua sekertaris-umum menurut seputjuk instruksi jang disusun bersama-sama oleh kedua peserta.

KEPUTUSAN DAN PERATURAN BERSAMA.

Pasal 12.

1. Pada konperensi menteri tersebut diambil keputusan dengan sepakat perwakilan Republik Indonesia Serikat pada suatu pihak dan perwakilan Keradjaan Nederland pada pihak jang lain.

2. Keputusan konperensi dapat diperlakukan menurut atjara sebagai berikut.

3. Keputusan-keputusan hendak mengadakan peraturan-peraturan bersama jang diambil pada konperensi menteri perlu disahkan oleh parlemen peserta masing-masing. Setelah keputusan itu disahkan oleh kedua parlemen, maka Kepala Uni akan mentjatat (konstatir) bahwa adalah persetudjuan antara kedua peserta dan selandjutnja peraturan bersama itu akan diumumkan dalam Surat-berita Negara resmi masing-masing peserta. Kerena pengumuman itu maka peraturan bersama mendapat kekuatan hukum. Peraturan-peraturan bersama tidak boleh dibanding (onschendbaar).

4. Tentang keputusan konperensi jang lain maka atas permohonan konperensi dapat pula Kepala Uni mentjatat bahwa sudah ada persetudjuan antara kedua peserta.

MAHKAMAH-ARBITRASI UNI.

Pasal 13.

1. Ada sebuah Mahkamah-Arbitrasi Uni jang mendjalankan pengadilan atas nama Kepala Uni.

2. Mahkamah itu mengadili pertikaian hukum jang dihadapkan kepadanja oleh salah satu peserta terhadap peserta jang lain ataupun oleh kedua peserta bersama dan jang timbul dari pada Statut-Uni, dari pada sesuatu persetudjuan antara peserta atau dari pada peraturan bersama.

Pasal 14.

1. Mahkamah-Arbitrasi Uni beranggota tiga orang jang diangkat mendjadi anggota oleh Republik Indonesia Serikat dan lagi tiga orang jang diangkat mendjadi anggota oleh Keradjaan Nederland.

2. Anggota-anggota Mahkamah diangkat mendjadi anggota untuk masa sepuluh tahun lamanja. Apabila sudah berusia 65 tahun tak boleh tidak mereka harus meletakkan djabatannja.

3. Bergiliran seorang Indonesia dan seorang Belanda maka tiap-tiap tahun seorang diantara anggota Mahkamah tersebut dipilih mendjadi ketua oleh Mahkamah itu.

4. Sebelum memangku djabatannja maka anggota-anggota Mahkamah itu bersumpah atau berdjandji menurut agamanja dihadapan Kepala Uni bahwa mereka akan memenuhi segala kewadjiban djabatannja dengan djudjur, teliti dan adil dan tengah mendjalankan kewadjibannja akan bertingkah-laku dengan patut, sebagaimana seharusnja bagi seorang anggota Mahkamah-Arbitrasi Uni jang baik.

Pasal 15.

1. Mahkamah-Arbitrasi Uni mengambil keputusan dengan suara terbanjak.

2. Djika suara jang berlawanan sama banjaknja, maka — ketjuali djika kedua peserta meminta lain — Mahkamah itu akan menghadapkan permintaan kepada Presiden Mahkamah Djustisi Internasional atau kepada badan internasional lain jang ditundjuk dengan suara terbanjak, supaja diangkat seorang berkebangsaan lain mendjadi anggota luar biasa pada Mahkamah-Arbitrasi Uni; anggota itu akan turut mengulangi bermusjawarat tentang pertikaian hukum itu serta memutuskannja, ialah dengan segala hak anggota biasa.

Pasal 16.

Ketentuan-ketentuan landjut tentang atjara Mahkamah-Arbitarasi Uni dan hal menjusun dan mengatur pekerdjaan Mahkamah itu akan ditetapkan dengan peraturan bersama. Selama peraturan bersama sedemikian itu belum ada, maka Mahkamah sendirilah jang mengatur atjara, susunan dan aturan pekerdjaannja. Djika hal itu Mahkamah tadi tidak dapat mentjapai persetudjuan, maka berlakulah ajat kedua pasal tadi.

Pasal 17.

Kedua peserta berdjandji akan menurut keputusan Mahkamah-Arbitrasi Uni; mereka akan mendjalankan keputusan itu atas kuasa dan tanggung-djawab sendiri, masing-masing didalam lingkungan daerah-hukumnja.

Pasal 18.

Djika ketentuan-ketentuan pada hukuman salah satu peserta atau pada hukum badan-badan hukum-publik didalam

lingkungan daerah-hukumnja dipihak satu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pada Statut-Uni, pada sesuatu persetudjuan antara peserta ataupun pada sesuatu peraturan bersama dipihak lain, maka jang akan diutamakan ialah golongan ketentuan jang tersebut kudian itu.

Pasal 19.

Kedua peserta tidaklah kehilangan keleluasan mendjalankan segala hak jang ada padanja menurut hukum bangsa-bangsa atau lain-lain perihal meminta keputusan sesuatu hakim atau hakim internasional dalam hal-hal Mahkamah-Arbitrasi Uni itu menurut pendapat kedua peserta tidak berkuasa ataupun dalam hal-hal Mahkamah itu menjatakan dirinja tidak berkuasa.

Pasal 20.

Aturan mengenai kerdjasama kedua peserta di lapangan perhubungan luar negeri diberikan pada persetudjuan jang dilampirkan pada Statut ini.

PERTAHANAN.

Pasal 21.

Aturan mengenai kerdjasama kedua peserta di lapangan pertahanan diberikan pada persetudjuan jang dilampirkan pada Statut ini.

PERHUBUNGAN KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN.

Pasal 22.

Aturan mengenai kerdjasama kedua peserta di lapangan perhubungan keuangan dan perekonomian diberikan pada persetudjuan jang dilampirkan pada Statut ini.

PERHUBUNGAN KEBUDAJAAN.

Pasal 23.

Aturan mengenai kerdjasama kedua peserta di lapangan kebudajaan diberikan pada persetudjuan jang dilampirkan pada Statut ini.

KEWARGANEGARAAN.

Pasal 24.

1. Dengan tidak mengurangi segala apa jang sudah atau lagi akan ditentukan pada persetudjuan chusus-chusus antara kedua peserta, maka hal hak-hak kenegaraan dan lain-lain didjalankan oleh warganegara peserta jang satu didaerah-hukum peserta jang lain, akan berlaku jang ditentukan dibawah ini:

a. kebangsaan warganegara peserta jang satu tidak akan mendjadi halangan hal berdjabatan didaerah-hukum peserta jang lain, melainkan terhadap kepada:

1°. djabatan-djabatan jang pemangkunja bertanggung-djawab kepada suatu badan perwakilan, melainkan jang sekiranja diketjualikan undang-undang;

2°. segala djabatan politik, berkuasa, kehakiman dan jang bersifat pemimpin jang ditundjukkan undang-undang;

b. hal mendjalankan hak-hak sipil dan bekerdja dilapangan kemasjarakatan, tiap-tiap peserta senantiasa akan mengindahkan sepenuh-penuhnja segala kepentingan chusus didalam lingkungan daerah-hukumnja jang ada pada warganegara dan badan-badan hukum peserta jang lain, dan karena itu tidaklah seberapa ia akan membedakan antara warganegara dan badan-badan hukum masing-masing peserta, dengan tidak mengurangi kekuasaan tiap-tiap peserta akan menetapkan peraturan-peraturan jang perlu, baik guna mendjaga kepentingannja jang bersifat kebangsaan, maupun guna melindungi golongan-golongan jang lemah perekonomiannja.

2. Sekali-kali tidak boleh terdjadi warganegara dan badan-badan hukum peserta jang satu didaerah-hukum peserta jang lain dibawah setjara jang kurang sempurna dari pada tjara membawa warganegara dan badan-badan hukum Negara asing.

KETENTUAN-KETENTUAN CHUSUS.

Pasal 25.

Untuk mengurus kepentingan peserta jang satu didaerah-hukum peserta jang lain Pemerintah peserta mengangkat

Komisaris Agung. Mereka itu berkedudukan wakil diplomatik serta berpangkat Duta Besar (Ambassadeur).

Pasal 26.

1. Sekadar tidak ada persetudjuan jang menetapkan lain, maka belandja Uni seperdua ditanggung tiap-tiap peserta.

2. Aturan-aturan landjut mengenai belandja Uni akan ditetapkan dengan peraturan bersama. Selama belum diadakan peraturan bersama sedemikian, maka konperensi menteri itu akan mengadakan aturan-aturan seperlunja.

Pasal 27.

1. Semua surat-surat resmi jang terbit dari pada konperensi menteri dan badan-badan perlengkapan Uni akan dikarang berbahasa-bahasa Indonesia dan Belanda.

2. Kedua naskah itu sama kekuatannja.

Statut-Uni dan persetudjuan-persetudjuan jang bersangkutan, serta peraturan-peraturan bersama dan persetudjuan-persetudjuan jang akan diadakan, boleh dikirimkan ke Sekertariat Perserikatan Bangsa-bangsa untuk didaftarkan sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa pasal 102.

LAMPIRAN PADA RANTJANGAN STATUT-UNI.

Hak-hak dan kebebasan dasar manusia jang diakui kedua peserta karena pasal 3 Statut-Uni dan jang mendjadi hak setiap orang mendjalankannja dan mengalaminja dengan tidak diadakan perbedaan apa djuapun karena bangsa, warna kulit, laki-perempuan, bahasa, agama, kebangsaan mula dan asal-usul, kemampuan atau keturunan, adalah sebagai berikut:

1. (1) Setiap orang diakui manusia peribadi terhadap Undang-undang.
   (2) Semua orang berhak menuntut diperlakukan sama dan dilindungi sama oleh Undang-undang.
   (3) Semua orang berhak menuntut perlindungan jang sama dari segala pembelakangan dan segala penghasutan jang bertudjuan pembelakangan demikian itu.
2. Semua orang jang ada didaerah Negara sama berhak menuntut perlindungan dirinja dan harta-bendanja.
3. (1) Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan berdiam didalam perbatasan negara.
   (2) Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan — asal warganegara atau penduduk — kembali kesitu.
4. Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan melainkan atas perintah kekuasaan jang sah menurut peraturan-peraturan undang-undang, lagi dalam hal-hal dan dengan tjara tersebut padanja.
5. (1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggugugat.
   (2) Masuk halaman-rumah atau memasuki tempat kediaman orang tidak dengan seizin sipenghuni hanja diperboleh dalam hal-hal jang ditetapkan pada aturan-hukum jang berlaku atasnja.
6. Kebebasan surat-menjurat dan rahasia-surat tidak boleh dilanggar, ketjuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain jang dinjatakan sah oleh peraturan-peraturan undang-undang dalam hal-hal termaktub pada peraturan-peraturan itu.

7. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama; hak itu mengandung pula kebebasan bersalin agama atau kejakinan, lagi pula kebebasan menganut agama atau kejakinannja, baik seorang diri maupun berdjama'ah, baik dimuka umum maupun didalam lingkungannja sendiri, dengan djalan mengadjarkannja, mengamalkannja, beribadat, mendjundjung tinggi suruhan dan larangan agama dan mendidik anak-anak menurut agama atau kejakinan orang-tuanja.
8. Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan melahirkan pendapat.
9. Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat setjara damai diakui dan sekadar perlu didjamin pada peraturan-peraturan undang-undang.
10. (1) Setiap orang berhak mempunjai milik, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain.
    (2) Tak seorangpun boleh dirampas miliknja dengan tiada semena-mena.
11. (1) Dengan diperhatikan sjarat-sjarat ketjakapan, setiap orang berhak atas pekerdjaan jang ada, atas kebebasan untuk memilih pekerdjaan dan atas sjarat-sjarat perburuhan jang adil.
    (2) Setiap pekerdja berhak atas upah jang berpadanan sehingga didjamin kepadanja dan kepada keluarganja kehidupan jang patut bagi seorang manusia.
12. Setiap orang berhak mendirikan serikat sekerdja ataupun turut serta dalam serikat sekerdja untuk melindungi kepentingannja.
13. (1) Pengadjaran bebas diberikan, dengan tidak mengurangi pengawasan Pemerintah menurut peraturan-peraturan undang-undang.
    (2) Peladjaran bebas dipilih.
14. Pemerintah sesanggupnja memadjukan kepastian sosial; terutama dimadjukannja memberi kepastian dan djaminan atas sjarat-sjarat dan keadaan perburuhan jang baik, mentjegah dan membasmi pengangguran dan memadjukan mengadakan persediaan untuk haritua dan memelihara djanda-piatu.

15. (1) Hal meninggikan deradjat kemakmuran rakjat senantiasa diperhatikan Pemerintah dengan sehimmat-himmatnja, sedang jang selalu ditjita-tjitakannja ialah supaja bagi setiap orang dan bagi keluarganja terdjaminlah hendaknja deradjat kehidupan jang patut bagi seorang manusia.

(2) Dengan tidak mengurangi pembatasan jang akan ditentukan untuk keperluan umum dengan peraturan-peraturan undang-undang, maka kepada semua orang sedapat mungkin diberi kesempatan jang sama akan turut serta mengusahakan sumber kemakmuran negeri, ialah sesuai dengan tabiat, pembawaan dan ketjakapannja.

16. Keluarga berhak mendapat perlindungan masjarakat dan Negara.

17. (1) Pemerintah berusaha sedapat-dapatnja akan memadjukan ketjerdasan rakjat, baik rohani maupun djasmani.

(2) Dimana dirasa perlu, Pemerintah menjediakan pengadjaran umum; pengadjaran umum itu diberikan atas dasar tenggang-menenggang dan penghormatan jang sama terhadap kejakinan agama tiap-tiap orang dan dengan kesempatan memberikan pengadjaran agama diwaktu djam-peladjaran biasa, sesuai dengan kehendak orang tua si murid.

(3) Murid-murid sekolah partikelir mempunjai hak jang sama dengan murid-murid sekolah umum, ja'ni djikalau sekolah partikelir itu mentjukupi sjarat-sjarat kebaikan pengadjaran jang ditentukan bagi pengadjaran umum.

(4) Diakuilah kebebasan akan mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan sosial dan amal, akan menbentuk organisasi untuk itu dan untuk pengadjaran partikelir, pun djuga akan memperoleh serta mempunjai harta untuk maksud itu.

18. Hal memadjukan kesehatan umum (openbare hygiëne) dan kesehatan rakjat senantiasa diperhatikan Pemerintah dengan sehimmat-himmatnja.

19. Pemerintah memberi perlindungan jang sama kepada semua persekutuan dan organisasi-organisasi agama jang diakui.

Tiap-tiap peserta didaerah-hukumnja mempertahankan pelaksanaan bebas hak-hak dan kebebasan dasar manusia jang terdaftar pada lampiran ini, sambil memperhatikan perdjandjian-perdjandjian internasional dan asas-asas hukum jang diakui internasional mengenai pelaksanaan itu.

Pelaksanaan hak-hak dan kebebasan-kebebasan jang terdaftar pada lampiran ini tidak boleh dibatasi melainkan dengan maksud supaja dapat diperhatikan hak-hak dan kebebasan orang lain, kesusilaan, ketenteraman dan kesedjahteraan umum dalam ketertiban-hukum demokrasi belaka.

RANTJANGAN PERSETUDJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN KERADJAAN NEDERLAND AKAN MENGATUR KERDJASAMA MEREKA DALAM LAPANGAN PERHUBUNGAN LUAR NEGERI.

Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland sama-sama berkeinginan hendak mentjapai kerdjasama di lapangan perhubungan luar-negerinja,

telah memutuskan mengadakan persetudjuan berikut akan mengatur kerdjasama itu.

Pasal 1.

Uni Indonesia-Nederland mewudjudkan kerdjasama di lapangan perhubungan luar negeri.

Djikalau kedua peserta berpendapat bahwa mereka berkepentingan dua-duanja serta memutuskan sedemikian itu, maka konperensi menteri dapat mengadakan perwakilan bersama atau gabungan perwakilan pada melaksanakan perhubungan-hukum internasional.

Pasal 2.

Dengan mendahulukan asas bahwa masing-masing peserta menjelenggarakan perhubungan luar-negerinja sendiri dan menentukan politik luar-negerinja sendiri, maka mereka akan berusaha agar supaja kebidjaksanaan luar-negerinja sebanjak mungkin akan dikoordinir serta diadakan permusjawaratan tentang hal itu hendaknja.

Pasal 3.

Salah satu peserta tidak mengadakan perdjandjian (treaty), pun tidak melakukan perbuatan-hukum internasional lain jang mengenai kepentingan peserta jang lain, melainkan sesudah bermusjawarat dengan peserta itu.

Pasal 4.

Djikalau oleh salah satu peserta tidak diakkreditir perwakilan diplomatik pada sesuatu negara asing, maka

kepentingannja sebaiknja akan diserahkannja untuk diurus oleh perwakilan diplomatik peserta jang lain pada negara asing itu.

Pasal 5.

Djikalau salah satu peserta meminta bantuan teknis atau bantuan lain untuk menjelenggarakan perhubungan luar-negerinja, maka peserta jang lain akan memberi bantuan itu dengan sesanggup-sanggupnja.

RANTJANGAN PERSETUDJUAN UNTUK MELAKSANAKAN PASAL 2 DAN 21 STATUT-UNI.

Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland memenuhi jang ditentukan pada pasal 2 dan 21 Statut-Uni, telah bersetudju sebagai berikut:

Pasal 1.

Peserta masing-masing bertanggung djawab sepenuhnja atas pertahanan daerahnja sendiri.

Tindakan-tindakan untuk itu diatur oleh mereka masing-masing.

Pasal 2.

Peraturan-peraturan bersama, sebagai termaksud pada Statut-Uni pasal 12, dilaksanakan sendiri oleh masing-masing peserta didaerah-hukumnja sendiri.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi jang ditentukan pada pasal 2, kerdjasama mungkin dinjatakan dengan bantuan jang diberikan peserta jang satu kepada peserta jang lain atas permintaannja, sekadar bantuan jang diminta itu menurut pendapatnja sesuai dengan kesanggupannja dan keperluannja sendiri, terutama djuga dengan kepentingan-kepentingan pertahanannja sendiri.

Pasal 4.

Bantuan jang termaksud pada pasal 3 antara lain dapat diberi berupa:

a. pelatihan dan pelatihan lebih tinggi bagi opsir-opsir, kader, tenaga-tenaga istimewa militer dan tenaga-bantuan sipil;

b. memperbantukan pegawai-pegawai;

c. mempersediakan alat-alat;

d. memberikan kesempatan akan dan bantuan pada pemeliharaan dan pembetulan alat-alat peserta jang lain.

Pasal 5.

Djikalau salah satu peserta meminta supaja bagian-bagian tentara peserta jang lain dibantukan kepadanja didaerah-hukumnja, maka kedua peserta boleh mengadakan persetudjuan tentang itu.

Pasal 6.

Djikalau peserta bantu-membantu menurut pasal 4 dan 5, maka ongkos-ongkos bantuan itu mendjadi tanggungan peserta jang meminta bantuan itu, ketjuali djika dalam hal-hal jang chusus diadakan persetudjuan jang lain.

Pasal 7.

Peserta akan bertukaran missi militer. Sjarat-sjarat jang berlaku dalam hal itu, demikian djuga susunan dan penetapan tugas-kewadjiban missi itu, akan diatur oleh Pemerintah peserta dengan djalan permusjawaratan.

Peserta jang berkehendak meminta atau menerima missi militer Negara lain harus bermusjawarat tentang hal itu lebih dahulu dengan peserta jang lain.

Pasal 8.

Djika ada bahaja antjaman serangan terhadap peserta keduanja atau terhadap salah satu antara mereka, maka peserta lalu bermusjawarat.

Pasal 9.

Djika salah satu antara peserta hendak membeli alat-alat untuk tentaranja diluar daerahnja, maka sedapat mungkin ia bermusjawarat dengan peserta jang lain tentang tjara dapat mereka bantu-membantu dalam hal itu.

Pasal 10.

Djika peserta jang satu memberikan keterangan tentang pertahanannja kepada peserta jang lain, maka peserta itu — pun terhadap sesuatu negara sekutu — berwadjib merahasiakannja, ketjuali djika kewadjiban merahasiakan itu ditiadakan dengan tegas oleh peserta jang tersebut mula-mula.

Djika pegawai peserta jang satu karena kerdjasama sebagai jang diatur dalam persetudjuan ini diizinkan masuk kedalam daerah-hukum atau kedalam organisasi peserta jang lain, maka peserta jang tersebut mula-mula akan berusaha sedapat-dapatnja, agar supaja pegawai itu merahasiakan segala urusan-pertahanan peserta jang lain jang mungkin diketahuinja.

Pasal 11.

Kedua peserta akan mengadakan peraturan hukum-pidana dan hukum-tatatertib formil dan materiil, jang didjalankan terhadap kaum militer peserta jang satu jang karena kerdjasama berada didaerah-hukum perserta jang lain.

Mengatur hal itu kedua peserta akan memperhatikan peraturan-peraturan sedemikian jang berlaku di negeri-negeri asing.

Pasal 12.

Djika tidak diadakan persetudjuan jang lain, dan apabila salah satu peserta ada tersangkut dalam peperangan atau terantjam tersangkut dalam peperangan, maka kapal-kapal dagang dan kapal-kapal udara sipil dibawah bendera suatu peserta hanja dapat diambil setjara paksa atau dimiliterisir oleh peserta itu, dan tidak dapat diambil setjara paksa oleh peserta jang lain, dengan tidak diindahkan dimasa kapal dan kapal-udara itu berada. Akan tetapi dalam hal itu peserta jang satu akan bermusjawarat dengan peserta jang lain, djika kapal-dagang atau kapal-udara sipil itu berada didaerah-hukum peserta jang disebut kudian itu.

Pasal 13.

Kedua peserta akan mengadakan peraturan tentang ketentuan jang akan berlaku djika satuan-satuan angkatan laut atau kapal-kapal udara militer peserta jang satu berada di atau dekat daerah-hukum peserta jang lain dan singgah pelabuhan atau lapangan-terbang di daerah-hukum itu.

Pasal 14.

Sambil menunggu peraturan kedua peserta tentang kewadjiban-milisi kaulanegara kedua belah pihak, maka kaulanegara peserta jang satu tidak seorangpun akan diwadjibkan masuk bekerdja pada tentara peserta jang lain.

Selama bagi seseorang penduduk di kedua peserta masih terluang hak-opsi tentang kebangsaannja dibelakang hari menurut ketentuan-ketentuan jang telah diterima pada Konperensi Medja Bundar, maka jang bersangkutan tidak akan dikerahkan memenuhi kewadjiban milisi oleh salah satu peserta.

Pasal 15.

Persetudjuan ini tiada menjinggung hak-hak dan kewadjiban-kewadjiban jang disebabkan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa bagi kedua peserta ataupun oleh peraturan-peraturan internasional jang berdasarkan Piagam itu.

Pasal 16.

Dengan selekas mungkin peserta akan bermusjawarat hendak melaksanakan lebih landjut asas-asas jang termaktub pada pasal-pasal diatas dan mereka berdjandji akan bertindak selaku dalam permusjawaratan bersama oleh Pemerintah jang bersangkutan dianggap perlu untuk mentjapai tudjuan-tudjuan Statut-Uni dan persetudjuan ini dilapangan pertahanan dengan setepatnja.

RANTJANGAN PERSETUDJUAN KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN.

Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland, berkeinginan hendak mengatur perhubungan baru di lapangan keuangan dan perekonomian jang terdjadi karena penjerahan kedaulatan dan hendak mentjapai kerdjasama di lapangan itu;

Mengingat pasal 2 dan 22 Statut-Uni;

Telah memutuskan mengadakan persetudjuan sebagai berikut.

BAGIAN A.

HAK, KONSESI, IZIN DAN MENDJALANKAN PERUSAHAAN.

Pasal 1.

1. Terhadap pengakuan dan pemulihan hak, konsesi dan izin, jang diberikan dengan sah menurut hukum Hindia-Belanda (Indonesia) dan jang pada waktu penjerahan kedaulatan masih berlaku, maka Republik Indonesia Serikat berpangkal pada pendirian bahwa hak, konsesi dan izin itu diakui dan bahwa jang berhak — sekadar ini belum terlangsung — akan dipulihkan kedalam pelaksanaan haknja dengan perbuatan, segala-galanja dengan mengindahkan jang tersebut pada ajat-ajat pasal ini jang berikut.

2. Republik Indonesia Serikat tidak melepaskan hak mengadakan penjelidikan hal hak, konsesi dan izin penting-penting jang diberikan sesudah 1 Maret 1942 dan jang dapat mempengaruhi politik perekonomian Republik Indonesia Serikat, dengan maksud menjelidiki apakah pasal 2 harus didjalankan.

3. Akan diperhatikanlah:

a. bahwa selama pendudukan Djepang dan kemudian selama masa-revolusi telah terdjadi bahwa tanah-tanah onderneming jang sudah dibongkar tanamannja untuk dipergunakan akan pertanian atau pekarangan, telah diduduki rakjat — selama masa pendudukan Djepang dengan izin pembesar-

pembesar Djepang — dan bahwa pada hal-hal jang tertentu, djika tanah itu ditjabut kembali dari pada tangan rakjat jang berkepentingan dengan begitu sadja lalu dikembalikan kepada onderneming jang bersangkutan, akan timbul kegelisahan jang amat sangat sehingga pengembalian tanah itu pada kebanjakan hal tidak mungkin terdjadi. Tiap-tiap keadaan akan dipertimbangkan tersendiri dan akan diusahakanlah penjelesaian jang dapat diterima oleh segala pihak;

b. bahwa milik partikelir jang tertentu perlulah terus dipergunakan (diambil) setjara paksa buat sementara, ialah untuk keperluan Negara guna sesuatu djabatan pemerintah, dengan mengganti kerugian;

c. bahwa dengan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1948 Nr 13 hak-hak konversi di keresidenan Jogjakarta dan Surakarta telah ditjabut karena terdorong berubahnja keadaan umumnja dan karena berubahnja paham rakjat pada chususnja. Pada hal tersebut Republik Indonesia Serikat akan (menjuruh) mengadakan tindakan dengan atau karena undang-undang jang perlu supaja perusahaan jang berkepentingan diberi djaminan sebesar mungkin akan mendapat tanah jang diperlukannja.

4. Kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan untuk kepentingan umum, misalnja kereta api dan tram partikelir dan perusahaan listrik dan gas, akan dinasionalisir oleh Republik Indonesia Serikat — jang, djika sekiranja terdjadi, akan terlangsung dengan djalan mentjabut hak atau „naasting" — tidak akan mempengaruhi pemulihan jang berhak kedalam pelaksanaan haknja dengan perbuatan. Akan tetapi bolehlah pemulihan-hak itu didjalankan dengan memperhatikan tjorak urusan kereta api dan tram pada waktu penjerahan kedaulatan.

Pasal 2.

Hak, konsesi dan izin termaksud pada pasal 1 ajat 1 hanja akan dapat dikurangi untuk keperluan umum, termasuk kepentingan rakjat, dengan djalan perdamaian dengan jang berhak, dan seandainja perdamaian tidak tertjapai, dengan djalan pentjabutan hak untuk kepentingan umum, menurut jang ditetapkan pada pasal 3.

Pasal 3.

Tindakan mentjabut hak, menasionalisir, menghapuskan, menjuruh melepaskan atau memindahkan setjara paksa benda atau hak, hanja akan didjalankan untuk keperluan umum menurut atjara jang ditetapkan dengan peraturan undang-undang dan — djika tidak dapat persetudjuan antara pihak-pihak jang berkepentingan — dengan pengganti kerugian jang diterimakan atau didjamin lebih dahulu dan jang ditetapkan hakim menurut harga sebenarnja benda atau hak jang diambil itu, segala-galanja itu menurut aturan-aturan jang ditetapkan undang-undang. Sjarat bahwa pengganti kerugian itu harus diterimakan atau didjamin lebih dahulu tidaklah berlaku djika benda atau hak itu perlu diambil dengan sesegeranja karena keadaan perang, bahaja perang, pemberontakan, kebakaran, bandjir, gempa bumi, gunung meletus atau lain-lain kedjadian jang mendesak.

Pasal 4.

Untuk perusahaan-perusahaan dan onderneming-onderneming jang telah ada atau jang baru akan diadakan kemungkinan memperpandjang ataupun memperbaharui atau memberikan hak, konsesi dan izin jang perlu untuk mendjalankan perusahaannja dengan sjarat-sjarat, untuk masa dan pada waktu jang ditetapkan sedemikian hingga — dipandang dari sudut ekonomi-perusahaan — hal meneruskannja atau mendirikannja dapat dipertanggung-djawabkan, lagi hingga terdjaminlah kepada jang berhak kelandjutan-bekerdja jang memberi kemungkinan kepadanja memasukkan modal baru jang diharuskan untuk mendjalankan perusahaan setjara biasa sementara masa jang lama, ja'ni ketjuali djika bertentangan dengan sesuatu kepentingan umum termasuk djuga politik perekonomian umum Republik Indonesia Serikat.

Pasal 5.

Perusahaan-perusahaan dan onderneming-onderneming akan turut kerdjasama dengan modal Indonesia dan menerima modal itu ikut-serta dalam perusahaan kadar dipandang sehat dari sudut perusahaan.

Pasal 6.

Republik Indonesia Serikat akan bertindak seberapa perlu supaja terdjaminlah hal jang berhak melaksanakan hak, konsesi dan izin termaksud pada pasal 1 ajat 1, ialah untuk menggiatkan usaha dalam lapangan perekonomian mulai berdjalankembali dengan landjut. Akan tetapi djangan dilupakan hendaknja bahwa politik perekonomian umum jang akan dipeluk Republik Indonesia Serikat terutamalah akan ditudjukan kepada pembangunan perekonomian masjarakat Indonesia seluruhnja, ja'ni dengan pengertian bahwa kepentingan dan kemadjuan djasmani dan rohani bangsa Indonesia sebaik-baiknjalah diusahakan dengan djalan mengadakan kekuatan-beli rakjat jang sungguh lagi terbesar dan menpertinggi deradjat kehidupan rakjat.

Pasal 7.

Terhadap semua hak, konsesi dan izin termaksud pada pasal 1, ajat 1, jang tidak dapat dilaksanakan disebabkan peperangan, pendudukan dan keadaan luar biasa kemudian dari pada itu, diadakanlah kemungkinan memperpandjang waktunja dengan masa jang sama dengan kehilangan waktu tadi, ialah atas permintaan jang berhak, ja'ni ketjuali djika bertentangan dengan sesuatu keperluan umum, termasuk djuga politik perekonomian umum Republik Indonesia Serikat.

Pasal 8.

Beban jang dipikul perusahaan-perusahaan karena aturan-aturan fiskal, aturan-aturan sosial dan lain-lainnja jang lazim dinegara jang modern akan diberi perbatasan jang berpadanan, sehingga dalam keadaan biasa perusahaan-perusahaan dapat didjalankan setjara memberi laba jang berpadanan untuk modal jang dipergunakan.

Pasal 9.

Tjara mendjalankan perusahaan dan kebebasan perniagaan, perusahaan dan perdjalanan uang, hanja akan dibatasi dengan peraturan undang-undang.

Pasal 10.

Kedua pihak mengakui bahwa perlulah diadakan pengadilan fiskal jang bebas. Mereka akan mengadakan peraturan-peraturan pentjegah padjak berlipat.

Pasal 11.

Warganegara dan badan-badan hukum Nederland, hasil-hasil, kapal-kapal dan lain-lain benda Belanda tidak akan dibawa di Indonesia setjara jang kurang sempurna dari pada tjara membawa warganegara, badan-badan hukum, hasil-hasil, kapal-kapal dan lain-lain benda dari pada negeri asing mana djuapun.

Orang asing dari segala bangsa akan memiliki hak jang sama akan mengikut serta dalam perdagangan dengan Indonesia dan dalam kegiatan perekonomian dan perkembangan industri di Indonesia. Akan tetapi Republik Indonesia Serikat mengakui bahwa kepentingan istimewa warganegara dan badan-badan hukum Nederland di Indonesia harus mendapat perhatian sepenuhnja, lagi pula bahwa terhadap kepentingan-kepentingan itu tidak akan dibeda-bedakan, dengan tidak mengurangi hak Republik Indonesia Serikat akan mengadakan peraturan-peraturan jang perlu untuk mendjaga kepentingan nasional atau melindungi golongan-golongan jang lemah perekonomiannja.

Jang disetudjui pada pasal ini untuk keperluan Nederland berlaku setjara timbal-balik antara Indonesia dan Nederland.

Pasal 12.

1. Selain dari pada jang diwadjibkan pada umumnja, ialah bahwa kaum ondernemer pada perusahaannja harus tunduk kepada undang-undang negeri, maka untuk ketenteraman dan ketertiban sosial dan untuk memperbaiki keadaan-keadaan sosial wadjiblah perusahaan-perusahaan (onderneming-onderneming) membantu pada tindakan-tindakan sebagai tersebut dibawah ini:

a. berusaha akan mentjapai perundingan teratur (georganiseerd overleg) antara madjikan dan buruh di segala lapangan perburuhan:

b. berichtiar akan lambat-laun tertjapainja kepentingan bersama (belangengemeenschap) antara kaum ondernemer dan buruh, djika berhubungan djuga jang mempunjai tanah, sehingga kepentingan-kepentingan jang diichtiarkan mentjapainja mendjadi satu dan sehingga buruh dan jang mempunjai tanah jang bersangkutan mentjapai deradjat kehidupan jang lebih tinggi hendaknja;

c. memperbaiki perumahan dan lain-lain persediaan sosial bagi buruh;

d. setjepat mungkin memasukkan orang bangsa Indonesia jang tjakap kedalam pimpinan (djuga direksi-direksi) dan staf perusahaan-perusahaan dan membantu menjusun pendidikan jang tudjuannja agar dalam waktu jang berpadanan kebanjakan warganegara Indonesialah jang memangku djabatan pegawai-pemimpin staf pada perusahaan-perusahaan itu;

e. menempatkan di Indonesia badan-badan perlengkapan jang berkuasa penuh, ialah kadar perusahaan-perusahaan jang terutama bekerdja di Indonesia.

2. Terhadap hal-hal tersebut pada ajat *a* s/d *d* kaum ondernemer menampakkan djuga inisiatipnja, itupun atas djandji bahwa sjarat-sjarat jang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap kepada modal dari luar negeri tidak akan lebih berat dari pada sjarat-sjarat mengenai perusahaan-perusahaan Indonesia jang sama tjoraknja dan besarnja.

Pasal 13.

Djikalau sekiranja peraturan agraris akan diubah karena keperluan umum, maka kepentingan orang-orang jang berhak dan pada chususnja kepastian hal-ichwal perusahaan akan diindahkan.

BAGIAN B.

PERHUBUNGAN KEUANGAN.

Pasal 14.

Republik Indonesia Serikat dan Nederland masing-masing akan mengichtiarkan tata keuangan (monetair systeem) jang sehat, sambil berdasarkan asas-asas jang termaktub pada

Persetudjuan-persetudjuan Bretton Woods. Karena itu perlulah antara lain bahwa di tiap-tiap negara itu hanja akan bekerdja satu bank-sirkulasi. Politik keuangan kedua negara masing-masing akan berketudjuan mentjapai dan mempertahankan harga mata-uang jang tetap, kedalam maupun keluar, dan memadjukan kesempatan bajar-membajar dengan bebas (vrij betalingsverkeer).

Pasal 15.

Republik Indonesia Serikat akan mengindahkan aturan-aturan jang harus diindahkan anggota International Monetary Fund, pun selama ia belum mendjadi anggota Fund itu. Lagi pula Republik Indonesia Serikat dan Nederland akan bermusjawarat supaja dengan selekas mungkin Republik Indonesia Serikat didjadikan anggota Fund itu.

Pasal 16.

Tentang perubahan perbandingan harga (wisselkoers) mata-uang Republik Indonesia Serikat dan Nederland lebih dahulu akan diadakan permusjawaratan.

Pasal 17.

Selama keadaan luar atau dalam-negeri memerlukan (deviezen-regime", maka baik Republik Indonesia Serikat maupun Nederland akan mempermusjawaratkan pasal-pasal kebidjaksanaan deviezennja jang penting benar bagi pihak jang lain.

Pasal 18.

1. Dengan tidak mengurangi jang ditentukan pada ajat 5, maka Republik Indonesia Serikat mengizinkan pemindahan uang ke Negeri Belanda:

a. untuk keperluan perusahaan jang bertjorak permasukan modal Belanda jang aktip, guna:

I. biaja jang perlu di Negeri Belanda untuk kepentingan perusahaan di Indonesia;

II. juran pada fonds untuk pensiun, ketjelakaan (invaliditeit), djanda-piatu dan lain-lain persediaan sosial untuk

kepentingan si pekerdja; itupun sekadar premi dan juran itu diperlukan untuk menutup pembajaran pada orang Belanda;

III. bunga dan pengangsuran karena perdjandjian dari uang jang dipindjam di Negeri Belanda untuk keperluan perusahaan di Indonesia;

IV. laba dan pengurangan penilaian (afschrijvingen) tahunan sebagai lazim pada seorang saudagar jang baik;

b. guna dividend, itupun karena pemasukan modal setjara passip dari Negeri Belanda;

c. kepada maskapai-maskapai assuransi-djiwa, guna premi serta pula kepada fonds untuk pensiun, ketjelakaan (invaliditeit, djanda-piatu dan lain-lain persediaan sosial, guna juran, baik dari madjikan maupun dari buruh, itupun sekadar premi dan juran itu diperlukan untuk menutup pembajaran kepada orang Belanda;

d. kepada orang Belanda jang bekerdja atau pernah bekerdja di Indonesia untuk uang-tabungannja serta pula guna belandja untuk penghidupan orang-orang diluar Indonesia jang mendjadi tanggungannja karena hukum atau kewadjiban kesusilaan budi;

e. untuk keperluan orang Belanda jang bekerdja atau pernah bekerdja di Indonesia c.q. ahli-warisnja jang berada diluar Indonesia untuk pensiun, gadji-perlop dan lain pembajaran sosial berkala, itupun sekadar tidak dibajar dari fonds-fonds tersebut pada *a* dan *c;*

f. untuk bunga dan pengangsuran pindjaman-obligasi atau pindjaman dibawah tangan jang dikeluarkan oleh persekutuan-hukum bawahan ataupun badan-hukum jang didirikan oleh kekuasaan agung, itupun sekadar pembajaran bunga dan pengangsuran itu tidak telah ditunda atau ditunda karena peraturan undang-undang berhubung dengan keadaan keuangan persekutuan-hukum atau badan-hukum termaksud tadi.

2. Jang ditetapkan pada ajat 1 itu dapat diatur lebih landjut oleh kedua pihak untuk hal jang tertentu atau untuk golongan hal bersamaan jang tertentu.

3. Dengan tidak mengurangi jang ditetapkan pada ajat 1 dan 2, maka Republik Indonesia Serikat akan mengizinkan pemindahan uang ke Negeri Belanda dan kenegeri asing menurut ketentuan-ketentuan persetudjuan International Monetary Fund.

4. Atas perusahaan jang bekerdja di Indonesia dengan mempergunakan untuk sebagian modal Indonesia, peraturan-peraturan tersebut pada ajat-ajat tadi akan berlaku kadar diperlukan keadaan jang njata.

5. Republik Indonesia Serikat tidaklah kehilangan keleluasaan memperbatasi pemindahan uang termaksud pada ajat 1 sebagaimana dipandang perlu berhubung dengan keadaan deviezennja. Tentang pembatasan sedemikian itu lebih dahulu antara Republik Indonesia Serikat dan Nederland akan diadakan permusjawaratan, ialah — djika tidak disetudjui lain — dengan djalan panitia teknis jang akan dibentuk.

6. Pemindahan bunga dan pengangsuran karena hutang jang diterima mendjadi hutang Republik Indonesia Serikat pada saat penjerahan kedaulatan terlangsunglah atas sjarat-sjarat perdjandjian jang telah atau akan dibuat tentang hutang itu.

7. Jang ditetapkan pada ajat tadi sedemikian itu pula berlaku atas pemindahan uang dari Negeri Belanda ke Indonesia.

8. Pada mentjabut hak, nasionalisasi dll. c.q. „naasting". Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengizinkan pemindahan uang pengganti kerugian c.q. harga „naasting" dalam tempoh tiga tahun setelah hak atas uang pengganti kerugian c.q. harga „naasting" terdjadi.

Djika Republik Indonesia Serikat menganggap tidak mungkin uang pengganti kerugian c.q. harga „naasting" itu dipindahkan didalam tempoh tiga tahun, maka wadjiblah Republik Indonesia Serikat menjatakan sedemikian sebelum mendjalankan pentjabutan hak, nasionalisasi dll. itu. Sebuah panitia-arbitrasi jang anggotanja ialah seorang wakil Republik Indonesia Serikat, seorang wakil jang berhak dan seorang anggota lagi jang ditundjuk sesudah bermusjawarat oleh kedua wakil tersebut tadi, akan memberikan keputusan jang mengikat tentang soal apakah dan sampai kemanakah ketentuan tentang tempoh tiga tahun itu boleh dilaini. Djika pemindahan uang tidak didjalankan dengan segera, maka uang pengganti kerugian c.q. harga „naasting" jang ditetapkan dengan uang Indonesia akan dikreditir dengan valuta negara modal itu berasal dari padanja menurut perbandingan uang (wisselkoers) pada hari hak itu terdjadi.

Pasal 19.

1. Selama Republik Indonesia Serikat berhutang pada Nederland — termasuk djuga djaminan jang diberikan oleh Nederland mengenai hutang Indonesia —, maka Republik Indonesia Serikat akan bermusjawarat lebih dahulu dengan Nederland, baik djika bermaksud ia hendak mengubah Undang-undang Mata-uang dan Undang-undang Javase Bank jang berlaku pada saat penjerahan kedaulatan, baik djika bermaksud ia hendak membuat Undang-undang Mata-uang baru dan Undang-undang Bank-sirkulasi baru, maupun djika sekiranja bermaksud ia hendak mengubah pula Undang-undang tersebut. Lagi pula, selama hutang-piutang tersebut diatas belum selesai, maka Republik Indonesia Serikat pada umumnja akan bermusjawarat lebih dahulu, djika dipertimbangkannja tindakan penting-penting di lapangan mata-uang dan keuangan, sekadar tersangkut padanja kepentingan Nederland.

2. Hutang dan djaminan termaksud pada ajat 1 ialah telah ada pada saat penjerahan kedaulatan.

3. Republik Indonesia Serikat akan bermusjawarat lebih dahulu dengan Nederland pasal mengangkat dan memperhatikan presiden dan direktur-direktur bank-sirkulasi dan pasal bank-sirkulasi memberi kredit kepada Pemerintah, ialah sampai saat Undang-undang Bank-sirkulasi jang baru mulai berlaku.

4. Agar supaja permusjawaratan termaksud pada ajat 1 berdjalan dengan selantjar-lantjarnja, maka seorang penasehat hal uang serta hal bank-sirkulasi jang ditundjukkan oleh Pemerintah Nederland akan diperbantukan kepada staf Komisaris Agung di Indonesia.

BAGIAN C.

PERHUBUNGAN DAN KERDJASAMA HAL POLITIK-PERNIAGAAN.

Pasal 20.

1. Sesuai dengan asas-asas kemerdekaan dan kedaulatan, Pemerintah-pemerintah Republik Indonesia Serikat dan

Nederland masing-masinglah jang pada udjudnja menanggung-djawabkan politik-perniagaannja, baik kedalam maupun keluar-negeri.

2. Berdasarkan asas-asas itu maka kerdjasama setjara sukarela antara kedua negara itu hal perhubungan perniagaannja keluar-negeri dapatlah menghasilkan keuntungan bersama bagi kedua negara itu. Kerdjasama itu akan dimadjukan dengan mempererat hubungan dan perundingan jang tak putus-putus antara kedua negara itu pasal pelbagai tindjauan perniagaan keluar-negeri. Sekadar dipandang bermaanfaat lagi berguna bagi kedua belah pihak, maka mereka akan bertindak bersama. Tiap-tiap pihak akan memperhatikan dengan tjermat kepentingan-kepentingan ekonomi jang ditanggung-djawabkan oleh pihak jang lain.

3. Harus diingat bahwa setjara ekonomi, alam dan politik, Negeri Belanda masuk lingkungan benua Eropah sedang Indonesia masuk lingkungan benua Asia. Didalam sedjarah maka sampai dewasa ini senantiasa adalah perhubungan ekonomi jang rapat antara benua Eropah dan benua Asia pada umumnja dan antara Negeri Belanda dan Indonesia pada chususnja. Sebagai akibat perdjalanan sedjarah maka Negeri Belanda mempunjai kepentingan besar-besar di lapangan ekonomi dan keuangan di Indonesia. Republik Indonesia Serikat sungguh-sungguh akan mempertenggang kepentingan itu.

Pasal 21.

1. Perhubungan Negeri Belanda hal perniagaan keluar-negeri dengan negara-negara lain akan diatur dan diawasi oleh Pemerintah Nederland atau oleh alat-alat perlengkapannja jang lajak, semata-mata karena kuasa Pemerintah itu sendiri ataupun karena kuasa alat-alat itu sendiri.

Perhubungan Indonesia hal perniagaan keluar-negeri dengan negara-negara lain akan diatur dan diawasi oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat atau oleh alat-alat perlengkapannja jang lajak, semata-mata karena kuasa Pemerintah itu sendiri ataupun karena kuasa alat-alat itu sendiri.

2. Terhadap kepada negara-negara Eropah maka Indonesia dan Nederland akan kerdjasama di lapangan politik-perniagaan. Pada tribulan terachir tahun 1950 akan diadakan perundingan lagi tentang hal melandjutkan dan tjara melan-

djutkan kerdjasama, sedang pada perundingan itu kedua belah pihak boleh menentukan sikapnja kembali dengan leluasa.

3. Kedua belah pihak masing-masing tetap berhak pada udjudnja menentukan tentang dan — dalam arti politik-perniagaan — tetap mempunjai hasil-hasil sendiri, lagipula sendirilah ia menentukan hasil-hasil manakah dan berapa banjaknja jang akan ditawarkannja serta pula imbangan apakah jang akan dikehendakinja.

Hal itu berarti pula bahwa pada hal jang tertentu salah satu pihak boleh mengambil bagian jang ketjil sadja atau sekalipun sama sekali tidak turut serta pada suatu persetudjuan dagang jang tertentu; dalam pada itu pada hal jang tersebut kudian itu maka pihak jang lain karena kepentingannja sendiri berhak mengadakan persetudjuan djuga.

Akan tetapi pihak jang tidak turut serta itu pada hal itu tidak boleh membuat persetudjuan dagang dengan negara ketiga itu pada sendirinja.

Apabila suatu persetudjuan dagang bersama telah dibuat, maka salah satu pihak tidak boleh mengadakan perubahan dengan tiada permusjawaratan lebih dahulu.

4. Pada perundingan dengan negara-negara lain maka Republik Indonesia Serikat dan Nederland, walaupun berdelegasi dua, akan bertindak sedjadjar terhadap negara lain itu. Sebelum itu haruslah ada persetudjuan tentang kebidjaksanaan bersama.

5. Persetudjuan dagang itu akan ditanda-tangani dipihak satu oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Nederland dan dipihak lain oleh negara ketiga itu.

6. Lebih dahulu akan ditentukan siapa jang akan bertindak atas nama delegasi jang sedjadjar itu. Pada hal itu jang boleh didjadikan garis petundjuk ialah bahwa jang akan ditundjukkan itu ialah ketua delegasi jang terutama berkepentingan pada perundingan itu.

7. Persetudjuan-persetudjuan dagang dan hal uang jang berlaku pada saat penjerahan kedaulatan sekadar mengenai Indonesia akan diterima mendjadi persetudjuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan akan didjalankan olehnja. Persetudjuan-persetudjuan itu didaftarkan pada daftar lampiran.

Pasal 22.

1. Bersedialah kedua negara akan menpertimbangkan sebuah sistim saling mengutamakan kepentingan hal perhubungan perniagaan antara Indonesia dan Nederland. Sistim jang demikian harus menperuntungi kedua pihak dan tidak boleh bertentangan dengan persetudjuan internasional.

2. Pada asasnja kedua negara berpendirian bahwa mereka tidak akan bajar-membajar harga jang lebih tinggi dari pada jang dibajar ditempat lain dalam keadaan jang sama.

3. Mengenai barang masuk kedalam kedua negara, baik Republik Indonesia Serikat maupun Nederland, masing-masing akan membuat daftar keperluan impor sesuai dengan keperluan tiap-tiap negeri akan barang-barang konsumsi dan barang-barang rehabilitasi dan pembangunan kembali bagi tiap-tiap negeri dan berdasarkan deviezen jang sedia.
Mengenai barang keluar dari pada kedua negeri itu Republik Indonesia Serikat dan Nederland akan mengasingkan dan menguntukkan barang-barang ekspor bagi jang lain.

4. Berdasarkan ajat 1 dan 3 pasal ini maka kedua pihak mengadakan persetudjuan mengenai perhubungan perniagaan timbal balik tiap-tiap kali untuk waktu jang akan ditentukan. Modus vivendi (sekarang harus disebut persetudjuan perniagaan) untuk masa antara tanggal 1 Oktober 1949 sampai 1 Oktober 1950 untuk sementara diterima dahulu oleh kedua negara. Dalam tribulan pertama tahun 1950 kedua pihak akan merundingkan tjara persetudjuan itu telah berdjalan dan perubahannja jang sekiranja akan didjadikan.

5. Selama masa untuk beberapa barang masih ada contingentnja maka pada asasnja tidak akan ditolak permintaan untuk mendapat izin memasukkan atau mengeluarkan barang atau izin deviezen, sekadar mengenai perdjandjian djual-beli didalam perbatasan contingent jang disetudjui itu. Djika perlu menjimpang daripada asas itu karena keadaan chusus maka akan diadakan permusjawaratan lebih dahulu dengan pihak jang lain.

6. Mengenai perhubungan perniagaan dan hal-hal jang berhubungan dengan itu maka Indonesia dan Nederland boleh saling meminta bantuan dan pertolongan. Kedua pihak

menjetudjui bahwa tiap-tiap pihak akan memberikan pertolongan itu djika diperlukan dan dianggap pada tempatnja.

7. Djika sekiranja dianggap perlu diadakan perubahan atau amendemen dalam contingent jang telah disetudjui itu, maka kedua pihak akan memutuskan hal itu sesudah dipermusjawaratkannja.

Pasal 23.

1. Peraturan jang ada antara Indonesia dan Nederland dan jang bunjinja bahwa perhubungan bajar-membajar antara kedua negara itu dan dengan beberapa negara lain sekadar perlu diselesaikan dengan suatu commerciele rekening jang diberi bernama „C-rekening nieuwe stijl", akan terus berlaku untuk sementara sesudah penjerahan kedaulatan.

2. Pada perundingan jang karena pasal 22, ajat 4, akan diadakan antara kedua negara pada tribulan pertama tahun 1950 akan dipermusjawaratkan soal apakah perlu diadakan perubahan pada sistim jang berlaku dan, djika ija, perubahan-perubahan apakah.

Sekadar perubahan jang sekiranja akan diadakan boleh diatur antara Republik Indonesia Serikat dan Nederland maka perubahan itu akan mulai berlaku selekas mungkin; sekadar perubahan itu mengenai perhubungan dengan negara-negara asing maka hal itu akan dipermusjawaratkan didalam lingkungan persetudjuan jang ada.

Pasal 24.

Diandjurkanlah supaja Nederland mengadakan perwakilan guna perniagaan pada Komisaris Agung Nederland di Indonesia untuk mewakili Pemerintahnja, menjelenggarakan hubungan jang rapat dengan badan-badan perlengkapan ekonomi Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan untuk memberi bantuan kepada badan-badan itu, djika bilamana dianggap perlu atau pada tempatnja.

Diandjurkanlah supaja Republik Indonesia Serikat mengadakan perwakilan guna perniagaan pada Komisaris Agung Indonesia di Nederland untuk mewakili Pemerintahnja, menjelenggarakan hubungan jang rapat dengan badan-badan perlengkapan ekonomi Pemerintah Nederland dan untuk memberi bantuan kepada badan-badan itu, djika dan bilamana dianggap perlu dan pada tempatnja.

2. Urusan contingenten barang masuk dan keluar dan izin pembajaran jang bersangkutan di Nederlandlah dikuasai Pemerintah Nederland dan badan-badan perlengkapan jang ditundjukkannja untuk itu; urusan itu di Indonesialah dikuasai Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan badan-badan perlengkapan jang ditundjukkannja untuk itu.

BAGIAN D.

PENJELESAIAN HUTANG-PIUTANG.

Pasal 25.

Jang mendjadi tanggungan Republik Indonesia Serikat ialah:

A. Hutang bersifat geconsolideerd tersebut dibawah ini, terhitung pada tanggal 31 Desember 1949:

1. Hutang Hindia-Belanda 1935 dengan bunga 3½% [dikeluarkan karena Undang-undang Hutang Hindia-Belanda 1934] (*Staatsblad* no. 588) j°. Undang-undang Conversielening Hindia-Belanda 1934 (*Staatsblad* no. 425), sebagai diubah dengan undang-undang 1 Nopember 1934 (*Staatsblad* no. 559). Djumlah pada tanggal 31 Desember 1949 ƒ 36 650 000.—. Masih berdjalan 21 tahun.

2. Hutang Conversielening Hindia-Belanda 1937 dengan bunga 3% [dikeluarkan karena Undang-undang Conversielening Hindia-Belanda 1934, (*Staatsblad* no. 425)]. Djumlah pada tanggal 31 Desember 1949 ƒ 90 000 000.—. Masih berdjalan 18 tahun.

3. Hutang Hindia-Belanda 1937 A dengan bunga 3% [dikeluarkan karena Undang-undang Conversielening Hindia-Belanda 1937 (*Staatsblad* no. 904)]. Djumlah pada tanggal 31 Desember 1949 ƒ 616 250 000.—. Masih berdjalan 25 htaun.

4. Bagian Indonesia dalam Nationale Werkelijke Schuld Nederland 1896 dengan bunga 3% [Undang-undang 30 Desember 1895 (*Staatsblad* no. 236)]. Djumlah pada tanggal 31 Desember 1949 ƒ 3 300 000.—. Masih berdjalan 3 tahun.

5. Hutang Indonesia 1962—64 3% (persetudjuan tanggal 19 Mei/8 Djuni 1949) merupakan bagian Indonesia, dalam

Hutang-negara Nederland 1938 3—3½%, jang dikonversi karena pasal 4, ajat 2 pada persetudjuan tanggal 8/14 April 1938. Hutang-negara Nederland 1938 itu telah dikonversi karena Undang-undang Conversielening 1948 (*Staatsblad* no. I 115) dan Undang-undang Hutang 1949 (*Staatsblad* no. G 143), diubah dengan undang-undang tanggal 23 Nopember 1946 (*Staatsblad* no. G 333) dan tanggal 12 Pebruari 1948 (*Staatsblad* no. I 52). Djumlah pada tanggal 31 Desember 1949 ƒ 79 912 000.—; djumlah itu pada tanggal 1 Djuni 1964 harus dibajar lunas.

6. Hutang pada „Nederlandsche Bank" dan „Javasche Bank", dengan bunga 3% (perdjandjian 14 dan 16 Djanuari 1932, kemudian diubah pada tanggal 28 Desember 1932). Untuk hutang itu digadaikan „Nederlandsche Schatkistbiljetten" jang disediakan kepada Indonesia karena undang-undang 25 Djuli 1932 (*Staatsblad* no. 393), kemudian diubah dengan undang-undang 15 Maret 1933 (*Staatsblad* no. 99). Djumlah pada tanggal 31 Desember 1949 ƒ 44 624 775.—. Masih berdjalan 13½ tahun.

B. Hutang kepada negeri asing, terhitung pada tanggal 31 Desember 1949:

1. Hutang kepada Export-Import Bank untuk Indonesia didalam lingkungan bantuan E.C.A. (perdjandjian 28 Oktober 1948). Djumlah pada tanggal 31 December 1949 U.S. $ 15 000 000.—. Masih berdjalan 24 tahun. Bunga 2½% mulai tanggal 30 Djuni 1952.

2. A line of credit granted by the United States Government to the Netherlands Indies Government for the purchase of United States Surplus Property (persetudjuan 28 Mei 1947). Djumlah pada tanggal 31 Desember 1949 U.S. $ 62 550 412.—. Masih berdjalan 31½ tahun. Bunga 2%.

3. Hutang kepada Canada (persetudjuan 9 Oktober 1945). Djumlah pada tanggal 31 Desember 1949 Canada $ 15 452 188,21. Masih berdjalan 6 tahun. Bunga 2¼%.

4. Settelement between the Government of Australia and the Government of Indonesia (persetudjuan 17 Agustus 1949). Djumlah pada tanggal 31 Desember 1949 A.

£ 8 500 000.—. Masih berdjalan 10 tahun. Tidak dengan bunga.

C. Hutang kepada Keradjaan Nederland tersebut dibawah, terhitung pada tanggal 31 Desember 1949 dengan djumlah setinggi-tingginja:

1. Bagian Indonesia pada „swing", termuat dalam persetudjuan Monetair Inggeris ad £ 5 000 000.—. (ƒ 53 500 000.—).
2. Suatu swing pada rekening-C ƒ 40 000 000.—.
3. Sisa debet pada rekening-HG/HI ƒ 80 000 000.—.
4. Sisa debet pada rekening-rekening Bretton Woods ƒ 95 000 000.— (sebaliknja ada activum sedjumlah itu karena ikut serta pada Interfund dan Interbank).

D. Semua hutang dalam-negeri Indonesia pada tanggal penjerahan kedaulatan.

Pasal 26.

Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengakui bertanggung-djawab membajar baik bunga maupun angsuran modal dari hutang tersebut pada pasal 25 dan, sekadar mengenai hutang tersebut pada C, memperoleh hak jang ditentukan pada persetudjuan jang ada.

Pasal 27.

Setelah dikurangi dengan djumlah hutang Nederland kepada badan-hukum Indonesia pada saat penjerahan kedaulatan, maka segala hutang badan-hukum Indonesia kepada Keradjaan Nederland jang ada pada saat itu djuga, akan dihapuskanlah, djadi djumlah hutang extern kepada Nederland pada tanggal 31 Desember 1949 dikurangi dengan djumlah jang diperhitungkan mendjadi ƒ 2 000 000 000.—.

BAGIAN E.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 28.

Segala apa jang ditentukan pada persetudjuan ini sekadar mengenai Keradjaan Nederland, hanja mengenai Nederland sadja.

LAMPIRAN RANTJANGAN PERSETUDJUAN KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN

Behoort bij Wet van 21 December 1949, *Staatsblad* No. J 570.

PERSETUDJUAN PERDAGANGAN DAN HAL UANG JANG INDONESIA TURUT-SERTA PADANJA

Negeri-negeri	Persetudjuan Perdagangan Masa berlaku	Persetudjuan hal uang Masa berlaku	Tempoh mempermaklumkan penghentian
1. Argentinia	1- 4-'48—31-12-'52	1- 1-'48 — 31-12-'52.	—
2. Belgia	1- 7-'49—30- 6-'50	21-10-'43 — tidak ditentukan; dapat dipermaklumkan penghentiannja sedjak 1-1-'49 pada tanggal 1 Djanuari tiap-tiap tahun.	2 tahun
3. Bulgaria	1- 1-'49—31-12-'49	1- 1-'49 — 31-12-'49 diperpandjang setahun-setahun dengan begitu sadja.	3 bulan
4. Denmark	1- 7-'49—30- 6-'50	31- 1-'46 — tidak ditentukan.	3 bulan
5. Djerman-Timur .	1- 7-'49—30- 6-'50	1- 7-'49 — 30-6-'50.	—
6. Djerman-Barat..	1- 9-'49—31- 8-'50	1- 9-'49 — 31-12-'50 diperpandjang setengahtahun-setengahtahun dengan begitu sadja.	2 bulan
7. Inggeris	1- 1-'49—31-12-'49	7- 9-'45 — 7-9-'50.	3 bulan
8. Finlandia	1- 6-'49—31- 5-'50	1- 6-'49 — tidak ditentukan.	6 bulan
9. Perantjis	1- 8-'49—30- 6-'50	9- 4-'46 — tidak ditentukan.	3 bulan
10. Hongaria	1- 1-'49—31-12-'49	1- 1-'49 — 31-12-'49 diperpandjang setahun, melainkan djika dipermaklumkan penghentiannja.	3 bulan
11. Israël	1- 2-'49—31- 1-'50	1- 2-'49 — 31-1-'50.	3 bulan
12. Italia	1- 4-'49—31- 3-'50	30- 6-'48 — tidak ditentukan. [3]	1 bulan
13. Jugoslavia	1- 6-'49—31-10-'49 [1]	1- 2-'48 — tidak ditentukan (tidak dapat dipermaklumkan penghentiannja sebelum tanggal 1-2-'51).	—
14. Norwegia	1- 1-'48—31-12-'49	6-11-'45 — 1 tahun, diperpandjang dengan begitu sadja selama waktu jang tidak diperbatasi.	12 bulan
15. Austria	4-12-'48— 7- 2-'50	3-12-'46 — tidak ditentukan.	—
16. Polandia	1- 1-'49—31-12-'49	1- 1-'49 — diperpandjang dengan begitu sadja.	3 bulan sebelum achir tiap-tiap tahun
17. Portugal	1- 7-'49—30- 6-'50	1- 3-'46 — setahun, diperpandjang dengan begitu sadja.	3 bulan
18. Russia	10- 6-'48—10- 6-'49 [2]	10- 6-'48 — tidak ditentukan.	3 bulan
19. Spanjol	1- 6-'49—31- 5-'50	21-10-'46 — tidak ditentukan.	6 bulan
20. Tsjechoslowakia.	10- 5-'49— 1- 5-'50	15-11-'46 — tidak ditentukan.	2 bulan
21. Swedia	1- 3-'49—28- 2-'50	30-11-'45 — 13-12-'49, melainkan djika disetudjui lain.	3 bulan
22. Swis	1-10-'49—30- 9-'50	24-10-'45 — untuk 3 tahun; sesudah itu diperpandjang begitu sadja dari tahun ketahun.	3 bulan
23. Brazilia	—	1- 9-'48 — tidak ditentukan; persetudjuan sementara.	2 bulan
24. Uruguay	15- 7-'48— tidak ditentukan	12- 6-'47 — setahun, diperpandjang dengan begitu sadja.	3 bulan
25. Turki	6- 9-'49— 1- 7-'50	6- 9-'49 — 1-7-'50, melainkan djika diperpandjang dengan begitu sadja.	3 bulan
26. Canada	—	28- 1-'48 — tidak ditentukan. [3]	—

[1] Perembukan-perembukan tentang perdjandjian jang baru kini diadakan.

[2] Sambil menunggu perembukan-perembukan jang akan diadakan, kontingen-kontingen barang-barang tetap berlaku selama waktu *jang tak diperbatasi.*

[3] *Pertukaran djasa.*

RANTJANGAN PERSETUDJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN KERADJAAN NEDERLAND TENTANG KERDJASAMA DILAPANGAN KEBUDAJAAN.

Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland sama berkeinginan hendak memadjukan hubungannja dilapangan pengadjaran, pengetahuan dan kebudajaan umumnja, telah memutuskan membuat persetudjuan tentang hubungan kebudajaan antara kedua negara sebagai berikut.

BAB I.

DASAR DAN SIFAT.

Pasal 1.

Hubungan kebudajaan antara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland itu berdasarkan kebebasan sempurna, kesukarelaan dan pertimbal-balikan.

Hubungan kebudajaan antara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland itu bersifat umum dan diarahkan menudju mewudjudkan perkembangan bebas budi manusia jang merdeka itu.

BAB II.

MAKSUD.

Pasal 2.

Maksud persetudjuan ini ialah memadjukan hubungan kebudajaan antara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland.

BAB III.

DAJA UPAJA AKAN MENTJAPAI MAKSUD ITU.

Pasal 3.

Diadakanlah sebuah panitia bersama beranggota empatbelas orang, jang tudjuh orang diangkat mendjadi anggotanja oleh Pemerintah kedua peserta masing-masing.

Pasal 4.

Panitia itu berkewadjiban memadjukan mewudjudkan kerdjasama atas dasar persetudjuan ini. Pada seputjuk instruksi jang ditentukan oleh Pemerintah kedua peserta bersama-sama akan diatur bagaimana kewadjiban itu hendaknja didjalankan. Pada instruksi itu diantara lain-lain akan ditentukan bahwa panitia bersama diberi berkuasa akan membentuk panitia-bekerdja untuk membitjarakan pokok jang chusus-chusus. Bukan anggota panitia bersama boleh diangkat mendjadi anggota panitia-bekerdja.

Pasal 5.

Andjuran dan usul mengenai jang ditetapkan pada pasal 6, 12 dan 14 jang tentangnja telah tertjapai permupakatan pada panitia bersama akan diundjukkan kehadapan Pemerintah-nja sendiri oleh masing-masing pihak.

Selandjutnja Pemerintah masing-masing dapat memasukkan usul dan andjuran tersebut kepada konperensi menteri itu.

Pasal 6.

Kedua peserta berusaha memadjukan dinegerinja sendiri pengetahuan jang memadai tentang udjud kebudajaan peserta jang lain.

Tudjuan itu antara lain-lain akan diichtiarkan dengan radio, film, surat kabar, taman pustaka, penjiaran batjaan, pengadjaran dan pertundjukan seni.

Pasal 7.

Kedua peserta berdjandji akan memadjukan penukaran siaran radio dilapangan kebudajaan dan warta-berita.

Pasal 8.

Kedua peserta berdjandji bantu-membantu guna memadjukan pengadjaran dan ilmu pengetahuan dan pada umumnja guna memadjukan kebudajaan, apabila sedemikian diminta oleh salah satu peserta.

Pasal 9.

Dengan tidak mengurangi jang ditentukan pada pasal 8 kedua peserta akan memadjukan tukar-menukar mahaguru, guru dan orang-orang ahli-ahli dilapangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pengadjaran dan seni.

Pasal 10.

Salah satu peserta boleh mendirikan dan memelihara lembaga-lembaga dilapangan pengadjaran, kesenian dan kebudajaan lainnja dinegeri peserta jang lain, asal sadja dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan undang-undang jang berlaku dinegeri tempat lembaga-lembaga itu didirikan.

Pasal 11.

Hal badan-badan, jajasan, perkumpulan ataupun orang peribadi mendirikan dan memelihara lembaga-lembaga pengadjaran, pemeliharaan rohani atau sosial dan pada umumnja lembaga-lembaga kebudajaan dinegeri peserta jang lain tidak akan dihalang-halangi, dengan tidak dikurangi kekuasaan kedua Pemerintah masing-masing akan mengadakan peraturan untuk keperluan keamanan umum dan kesentosaan rohani rakjat pada masjarakat dan negara, jang tidak boleh bertentangan dengan hak manusia jang diakui Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pasal 12.

Soal kekuasaan-kekuasaan jang boleh diberikan bertimbal-balik kepada idjazah-idjazah dan gelaran-gelaran ilmu pengetahuan, demikian djuga kemungkinan-kemungkinan mengenai penjesuaian berbagai djenis pengadjaran dinegeri jang satu dengan jang dinegeri jang lain, mendjadilah pokok penjelidikan bagi panitia bersama.

Pasal 13.

Kedua peserta akan mengadakan kesempatan dan djika perlu membantu orang-orang dari negeri jang satu melakukan penjelidikan ilmu pengetahuan dinegeri jang lain.

Untuk penjelidikan sedemikian itu bolehlah didjadikan sjarat, bahwa kepada Pemerintah negeri tempat penjelidikan itu dilangsungkan akan dipermaklumkan hendaknja laku dan hasil penjelidikan itu.

Pasal 14.

Kedua peserta akan berichtiar supaja disediakan uang-tundjangan beladjar dengan maksud supaja peladjar-peladjar atau penjelidik-penjelidik dari pada kedua negeri diberi kesempatan akan memulai atau melandjutkan peladjarannja maupun penjelidikannja dinegeri jang lain.

Akan diichtiarkannja pula, supaja orang-orang jang mempeladjari ilmu pengetahuan, teknik atau kesenian dari pada negeri jang satu diberi kesempatan akan melawat kenegeri jang lain selama waktu jang tertentu.

Pasal 15.

Kedua peserta akan memadjukan mengadakan hubungan antara badan-badan jang bersifat kebudajaan — termasuk djuga badan-badan pemuda — jang telah diakui oleh Pemerintah masing-masing, dengan mengindahkan kepentingan keamanan umum dan kesentosaan rohani rakjat pada masjarakat dan negara.

Pasal 16.

Mendjadi keinginan kedua peserta bahwa buku-buku, surat-surat kabar dan madjalah-madjalah jang diterbitkan dinegeri jang satu dapat dimasukkan dengan bebas kedalam negeri jang lain; pada hal tersebut diichtiarkan pembebasan dari bea-bea dan peraturan-peraturan lain jang membatasi. Memasukkan barang-barang tersebut hanja boleh dibatasi karena aturan-aturan untuk keperluan keamanan umum dan kesentosaan rohani rakjat pada masjarakat dan negara.

Pasal 17.

Kedua peserta sekadar tenaga memadjukan supaja karangan-karangan jang terbit berbahasa(-bahasa) negeri jang satu dapat diterdjemahkan kedalam bahasa(-bahasa) negeri jang lain.

Pasal 18.

Kedua peserta akan bekerdjasama untuk mendaftarkan segala apa jang telah tertjapai oleh ilmu pengetahuan berhubungan dengan Indonesia pada saat penjerahaan kedaulatan, terutama dilapangan ilmu alam, teknik, ketabiban, sedjarah, bahasa, ekonomi dan hukum adat.

BAB IV.

PENJERAHAN BARANG-BARANG BERHARGA KEBUDAJAAN.

Pasal 19.

Barang-barang berharga kebudajaan jang berasal dari Indonesia dan jang diperoleh Pemerintah Nederland ataupun Pemerintah Hindia-Belanda dahulu dengan tjara lain dari pada tjara hukum-sipil harus diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat karena penjerahan kedaulatan dari pada Keradjaan Nederland kepada Republik Indonesia Serikat.

Untuk melaksanakan jang tersebut pada ajat 1, maka panitia bersama akan mengusulkan peraturan chusus setjara tersebut pada pasal 5. Pada peraturan itu akan dimuatkan pula aturan-aturan mengenai hal mungkin terdjadinja tukar-menukar barang-barang berharga kebudajaan atau sedjarah jang mendjadi hak milik ataupun kepunjaan negeri jang satu, sedang asalnja dari pada ataupun ada artinja bagi negeri jang lain.

BAB V.

LAPURAN TAHUNAN.

Pasal 20.

Tiap-tiap tahun panitia bersama mengundjukkan lapuran berupa surat tentang pekerdjaannja kehadapan masing-masing Pemerintah.

RANTJANGAN PERSETUDJUAN-PERPINDAHAN.

Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland telah menjetudjui sebagai berikut.

Pasal 1.

Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland menerima penundjukan warganegara menurut persetudjuan jang dilampirkan pada persetudjuan-perpindahan ini.

Pasal 2.

1. Pembagian Republik Indonesia Serikat atas negara-negara-bagian pada achirnja akan ditentukan oleh Konstituante sesuai dengan ketentuan-ketentuan termaktub pada Konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat, dengan pengertian bahwa antara rakjat daerah-daerah jang akan ditundjukkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat atas andjuran Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia atau badan Perserikatan Bangsa-bangsa jang lain akan diadakan plebisit. Plebisit itu mengenai soal apakah mereka akan membentuk negara-bagian sendiri dan akan diawasi oleh Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia atau badan lain tersebut diatas.
2. Tiap-tiap negara bagian akan dibefi kesempatan menerima Konstitusi jang tetap. Seandainja sesuatu negara-bagian tidak menerima Konstitusi itu maka negara-bagian itu berhak bermusjarawat tentang perhubungan chusus dengan Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland.

Pasal 3.

1. Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland mengakui dan menerima bahwa segala kekuasaan dan kewadjiban Gubernur-Djenderal Indonesia disebabkan kontrak-kontrak jang diadakan olehnja dengan Swapradja, oleh karena penjerahan kedaulatan berpindah kepada Republik Indonesia Serikat, ataupun, apabila beralaskan hukum tatanegara Republik Indonesia Serikat, berpindah kepada suatu negara-bagian.

2. Oleh karena penjerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat maka sekalian Swapradja dilepaskan karena hukum dari pada sumpah setianja kepada Seri Baginda Ratu Nederland.

3. Republik Indonesia Serikat mengakui kedudukan istimewa Swapradja menurut ketentuan-ketentuan mengenai hal itu pada Konstitusinja dan pada Konstitusi daerah-bagian masing-masing jang menentukan bahwa pertikaian-pertikaian hukum tentang kedudukan Swapradja akan diputuskan oleh badan Republik Indonesia Serikat jang bebas.

Pasal 4.

1. Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland mengakui dan menerima bahwa semua hak dan kewadjiban Indonesia berpindah kepada Republik Indonesia Serikat, baik hak serta kewadjiban jang bersifat hukum sipil maupun jang bersifat hukum publik, sekadar dalam persetudjuan chusus jang termasuk dalam Statut-Uni tentang hal tersebut tiada ditentukan lain.

2. Republik Indonesia Serikat bertanggung djawab memenuhi segala kewadjiban persekutuan hukum publik jang sah waktu dahulu di Indonesia dan jang telah termasuk kedalam Republik Indonesia Serikat atau kedalam bagian-bagiannja, dan mendjamin akan memenuhi segala kewadjiban persekutuan hukum publik jang langsung berdiri, sekadar dalam persetudjuan keuangan dan perekonomian tentang hal tersebut tiada ditentukan lain.

3. Jang ditentukan pada ajat-ajat tersebut ditats tidak berlaku atas keresidenan Irian (Nieuw-Guinea) berhubung dengan hal jang tersebut pada rantjangan Piagam Penjerahan Kedaulatan, pasal 2, ialah bahwa persesuaian pemendangan pihak-pihak jang bersangkutan tentang Irian belum mungkin tertjapai.

Pasal 5.

1. Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland berpengertian bahwa, dengan memperhatikan ajat kedua, segala hak dan kewadjiban Keradjaan disebabkan perdjandjian-perdjandjian (treaties) dan persetudjuan internasional lainnja jang diadakan Keradjaan itu, hanja dapat dipandang

hak dan kewadjiban Republik Indonesia Serikat, djikalau dan sekadar perdjandjian-perdjandjian dan persetudjuan-persetudjuan tadi berlaku atas daerah-hukum Republik Indonesia Serikat dan terktjuali hak-hak dan kewadjiban disebabkan perdjandjian-perdjandjian dan persetudjuan-persetudjuan jang Republik Indonesia Serikat tidak dapat didjadikan pihak jang menjertai padanja oleh karena ketentuan perdjandjian atau persetudjuan tersebut.

2. Dengan tidak mengurangi kekuasaan Republik Indonesia Serikat akan mempermaklumkan penghentian perdjandjian dan persetudjuan termaksud pada ajat pertama ataupun menghentikan berlakunja bagi daerah-hukumnja dengan tjara lain menurut ketentuan-ketentuan perdjandjian dan persetudjuan tersebut, maka jang ditetapkan pada ajat pertama tidak berlaku atas perdjandjian dan persetudjuan jang tentangnja, setelah diperbintjangkan lebih landjut oleh Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland, akan diperoleh kesimpulan bahwa ajat pertama tidak berlaku atas perdjandjian dan persetudjuan tersebut.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan tentang kedudukan-hukum pegawai-pemerintah sipil berhubung dengan penjerahan kedaulatan termuat pada persetudjuan jang dilampirkan pada persetudjuan-perpindahan ini.

Pasal 7.

Penarikan-kembali tentera Nederland dari Indonesia dan penjusunan kembali tentara di Indonesia jang dibentuk dan diperlengkapi oleh atau dibawah kekuasaan Pemerintah Indonesia-Belanda, akan diatur menurut jang telah ditetapkan pada „Peraturan tentang Urusan Kemiliteran" jang dilampirkan pada persetudjuan-perpindahan ini.

Pasal 8.

1. Sekadar peraturan undang-undang serta ketentuan-ketentuan tata-usaha jang sedang berlaku tiada bertentangan dengan penjerahan kedaulatan, dengan ketentuan-ketentuan Statut-Uni, dengan ketentuan-ketentuan persetudjuan-perpindahan ini atau dengan sesuatu persetudjuan lainnja jang

diadakan oleh kedua pihak, peraturan undang-undang serta ketentuan tata-usaha tersebut dengan tidak berubah tetap berlaku sebagai peraturan undang-undang dan ketentuan tata-usaha Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland sendiri, selama peraturan dan ketentuan tersebut tidak ditjabut atau diubah oleh badan-badan jang berkuasa Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland masing-masing.

2. Bila pada peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha tadi ada disebut kaulanegara Belanda, maka hal itu diartikan: warganegara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland.

3. Bila peraturan dan ketentuan tersebut mengenai kapal-kapal atau kapal-kapal udara jang berhak memakai bendera Belanda, maka peraturan dan ketentuan itu sama-sama mengenai kapal-kapal dan kapal-kapal udara jang berhak memakai bendera Republik Indonesia Serikat dan bendera Keradjaan Nederland.

Pasal 9.

Kekuasaan dalam lapangan pemerintahan umum atas Indonesia jang, menurut peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha jang sedang berlaku, di Negeri Belanda mendjadi kekuasaan badan-badan Belanda, akan dilakukan atas nama Republik Indonesia Serikat oleh seorang wakil jang ditundjuk oleh Pemerintah Negara itu dengan maksud tersebut, ialah selama menunggu peraturan landjut jang akan diadakan oleh badan-badan Republik Indonesia Serikat jang berkuasa.

Pasal 10.

Keradjaan Nederland akan berusaha supaja Republik Indonesia Serikat diterima mendjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.

RANTJANGAN PERSETUDJUAN PERIHAL PEMBAGIAN WARGANEGARA.

Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland,

menimbang bahwa pada saat penjerahan kedaulatan bagi orang-orang jang hingga saat itu kaulanegara Keradjaan Nederland — terhadap kepada Republik Indonesia Serikat termasuk orang-orang jang menurut perundang-undangan Republik Indonesia warganegara Republik tersebut — haruslah ditetapkan apakah mereka akan berkebangsaan Belanda ataukah berkebangsaan Indonesia,

bermupakat bahwa tentang hal tersebut pada saat itu berlaku penetapan jang berikut.

Pasal 1.

Dalam arti peraturan ini jang disebut dewasa ialah mereka jang berusia delapanbelas tahun penuh atau jang telah kawin lebih dahulu.

Djika telah terlangsung pemutusan pertalian kawin sebelum mereka berusia delapanbelas tahun penuh, maka mereka itu tetap dewasa.

Pasal 2.

Bagi Republik Indonesia Serikat, bila persetudjuan ini diperlakukan kepada orang-orang jang warganegara Republik Indonesia menurut perundang-undangan kewarnegaraan Republik tersebut pada saat mendjelang waktu penjerahan kedaulatan, maka dimana disebut „memperoleh" atau „memilih" kebangsaan Indonesia, kebangsaan Republik akan diganti mendjadi kebangsaan Indonesia, dan, dimana disebut „tetap memegang" kebangsaan Belanda atau „menolak" kebangsaan Indonesia, hilanglah kebangsaan Republik.

Pasal 3.

Orang-orang Belanda jang dewasa tetap memegang kebangsaan Belanda, akan tetapi djika mereka dilahirkan di Indonesia atau bertempat tinggal disitu sekurang-kurangnja enam bulan, maka mereka berhak akan menjatakan didalam waktu jang ditetapkan bahwa mereka memilih kebangsaan Indonesia.

Pasal 4.

1. Melainkan apa jang ditentukan pada pasal ini ajat kedua, maka kaulanegara Belanda bukan-orang-Belanda jang dewasa, jang mendjelang waktu penjerahan kedaulatan termasuk golongan penduduk orang-orang asli di Indonesia, memperoleh kebangsaan Indonesia, akan tetapi, djika mereka lahir diluar Indonesia dan bertempat tinggal di Negeri Belanda atau diluar daerah peserta Uni, mereka berhak akan menjatakan didalam waktu jang ditentukan bahwa mereka memilih kebangsaan Belanda.

2. Kaulanegara Belanda jang tersebut pada ajat diatas, jang bertempat tinggal di Suriname atau di Antillen Belanda:

a. djika mereka lahir diluar daerah Keradjaan, maka mereka memperoleh kebangsaan Indonesia, akan tetapi mereka berhak akan menjatakan didalam waktu jang ditentukan bahwa mereka memilih kebangsaan Belanda;

b. djika mereka lahir didaerah Keradjaan, maka mereka tetap memegang kebangsaan Belanda, akan tetapi mereka berhak akan menjatakan didalam waktu jang ditentukan bahwa mereka memilih kebangsaan Indonesia.

Pasal 5.

Orang-asing jang kaulanegara Belanda bukan-orang-Belanda jang telah dewasa mendjelang waktu penjerahan kedaulatan dan jang lahir di Indonesia atau bertempat tinggal di Republik Indonesia Serikat mendapat kebangsaan Indonesia, tetapi berhak menolaknja didalam waktu jang ditetapkan itu:

djika dalam hal ini mendjelang waktu penjerahan kedaulatan kebangsaannja tidak lain lagi dari pada kebangsaan Belanda, maka mereka itu mendapat kembali kebangsaan itu;

djika pada saat itu mereka mempunjai kebangsaan asing pula, maka sesudah menolak kebangsaan Indonesia mereka hanjalah mendapat kembali kebangsaan Belanda, djikalau mereka pada waktu itu djuga menjatakan keterangan guna itu.

Pasal 6.

Orang-asing jang kaulanegara Belanda bukan-orang-Belanda jang telah dewasa mendjelang waktu penjerahan kedaulatan, jang lahir tidak di Indonesia dan bertempat

tinggal di Keradjaan, tetap berkebangsaan Belanda, tetapi mereka berhak didalam waktu jang ditetapkan menolak kebangsaan Belanda dan memilih kebangsaan Indonesia;

djika mereka itu pada saat tersebut mempunjai kebangsaan asing pula, maka mereka berhak akan menolak kebangsaan Belanda dengan begitu sadja.

Hak menolak kebangsaan Belanda itu, berhubung atau tidak dengan memilih kebangsaan Indonesia, tidaklah berlaku bagi penduduk Suriname jang berasal dari India atau Pakistan.

Pasal 7.

Orang-asing jang kaulanegara Belanda bukan-orang-Belanda dari luar negeri jang telah dewasa mendjelang waktu penjerahan kedaulatan, jang bertempat tinggal diluar daerah peserta Uni dan jang lahir di Negeri Belanda, Suriname atau Antillen Belanda, tetap berkebangsaan Belanda, tetapi, djika orang tua mereka kaulanegara Belanda karena lahir di Indonesia, maka mereka berhak didalam waktu jang ditetapkan memilih kebangsaan Indonesia dengan menolak kebangsaan Belanda itu;

djika pada saat tersebut mereka berkebangsaan asing djuga, maka mereka berhak menolak kebangsaan Belanda dengan begitu sadja.

Djika mereka lahir diluar daerah peserta Uni, maka berlakunja pasal ini atau pasal 5 baginja tergantung kepada tempat lahir bapaknja atau ibunja, jaitu menurut pembedaan-pembedaan termaktub pada Undang-undang 1892 tentang Kerwarganegaraan Belanda dan Penduduk, pasal 1;

djika orang tua itu lahir pula diluar daerah peserta Uni, maka jang menentukan ialah tempat lahir bapaknja ataupun ibunja.

Pasal 8.

Jang belum dewasa mengikuti kebangsaan bapaknja ataupun ibunja menurut pembedaan-pembedaan jang termaktub pada Undang-undang 1892 tadi, djikalau orang tua itu mendjelang waktu penjerahan kedaulatan kaulanegara Belanda dan masih hidup.

Pasal 9.

Aturan-aturan diatas langsung berlaku bagi jang belum dewasa jang bapaknja atau ibunja, menurut pembedaan-pembedaan jang termaktub pada Undang-undang 1892 pasal 1 tersebut, mendjelang waktu penjerahan kedaulatan bukan kaulanegara Belanda atau telah meninggal, ja'ni dengan pengertian bahwa dalam hal jang terachir itu tempat tinggalnja jang sebenarnja akan dianggap tempat tinggalnja jang sah dan bahwa dalam kedua hal itu, dimana tersebut menjatakan keterangan, maka keterangan itu dapatlah dinjatakan oleh wakilnja jang sah.

Djika tidak ada wakil jang sah, maka tempoh-tempoh jang ditentukan akan mulai sedjak saat seorang wakil diangkat.

Pasal 10.

Isteri itu mengikuti kedudukan suaminja. Sesudah putus pertalian kawin maka selama waktu setahun sesudah itu jang perempuan berhak akan memperoleh atau menolak kebangsaan jang diperolehnja seandainja ia belum kawin pada saat penjerahan kedaulatan, ataupun jang dapat diperolehnja atau ditolaknja, ialah dengan djalan menjatakan keterangan.

Pasal 11.

Karena mendjalankan hak memilih atau menolak kebangsaan tidaklah mendjadi batal sesuatu tindakan jang terlangsung sebelum itu jang sekiranja akan mendjadi sah seandainja hak itu tidak didjalankan.

KETENTUAN-KETENTUAN PENDJALANKAN.

Pasal 12.

Keterangan-keterangan tentang memilih atau menolak kebangsaan dapat dinjatakan oleh jang berhak dihadapan, ataupun dikirimkan berupa surat kepada baik Komisaris-komisaris Agung kedua belah pihak, baik hakim harian biasa

orang-orang bersangkutan itu, maupun pegawai-pegawai jang lagi akan ditundjukkan untuk itu dikedua negara oleh tingkatan-djawatan jang berkuasa. Dinegeri asing keterangan tersebut boleh dinjatakan dihadapan ataupun dikirimkan berupa surat kepada pegawai-pegawai diplomatik atau konsol kedua belah fihak jang didaerahnja orang jang bersangkutan itu bertempat tinggal.

Tanda-tangan jang dibubuh dibawah surat penjatakan keterangan ataupun tjap empu djari harus dinjatakan sahnja (dilegalisir).

Barangsiapa jang menjatakan keterangan atau mengirimkannja berupa surat, dengan segera akan diberi atau dikirimi seputjuk surat bukti tentang itu.

Sekalian keterangan jang dinjatakan dalam masa satu bulan-kalender diumumkan pada bulan jang berikut pada Surat Berita Negara penerbitan negara jang pegawainja sudah dipermaklumi keterangan tadi; duplikat atau salinan jang sah keterangan tadi dikirimkan setiap bulan kepada Pemerintah negara jang lain.

Kedua belah pihak berdjandji akan mengumumkan dengan seluas-luasnja keleluasaan menjatakan keterangan tersebut. Keterangan itu serta surat bukti jang akan diberikan tentang itu bebas dari pada meterai dan biaja.

Pasal 13.

Arti perkataan „waktu jang ditentukan" pada persetudjuan ini ialah masa jang lamanja dua tahun sesudah penjerahan kedaulatan.

Pasal 14.

Keputusan atas hal melakukan atau rintangan melakukan hak-opsi boleh diminta kepada hakim harian biasa pada tempat tinggal orang jang bersangkutan. Djikalau orang itu bertempat tinggal dinegeri asing, maka jang berkuasa ialah Pengadilan Arrondissemen di Amsterdam dan hakim harian biasa di Djakarta (Batavia). Membantah putusan itu maka boleh diminta pengadilan lebih tinggi ataupun dipergunakan alat-alat pengadilan lain seperti untuk perkara sipil. Keputusan jang tidak dapat diubah lagi diberitahukan oleh Pemerintah Negeri jang daerah-hukumnja tempat keputusan itu

diambil kepada Pemerintah Pihak jang lain; Pemerintah Pihak jang lain mengakui keputusan itu.

TJATATAN.

Tentang kebangsaan penduduk Irian (Nieuw-Guinea) tidak diputuskan suatu apapun pada ketentuan-ketentuan diatas ini, djikalau kedaulatan atas daerah itu tiada berpindah kepada Republik Indonesia Serikat.

RANTJANGAN PERSETUDJUAN TENTANG KEDUDUKAN PEGAWAI-PEMERINTAH SIPIL BERHUBUNG DENGAN PENJERAHAN KEDAULATAN.

Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Keradjaan Nederland telah menjetudjui sebagai berikut.

Pasal 1.

Pada saat penjerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia Serikat menerima pada djabatannja sekalian pegawai-pegawai pemerintah sipil jang pada saat itu bekerdja pada Pemerintah Indonesia dalam djabatan tetap atau sementara maupun dengan perdjandjian waktu singkat, termasuk djuga, karena tergolong pada Pemerintah Indonesia tersebut, pegawai-pegawai persekutuan-persekutuan otonom jang dibentuk berdasarkan Aturan Pemerintahan Hindia (Indische Staatsregeling) pasal 119, 121 dan 123.

Pasal 2.

Dengan mengingat jang ditentukan pada pasal 3, 4 dan 5 maka Pemerintah Republik Indonesia Serikat menerima segala hak dan kewadjiban Indonesia pada saat penjerahan kedaulatan terhadap kepada pegawai-pegawai pemerintah termaksud pada pasal 1 dan bekas pegawai-pemerintah, demikian pula terhadap keluarga jang mereka tinggalkan.

Pasal 3.

Pada peraturan-peraturan kedudukan-hukum jang berlaku pada saat penjerahan kedaulatan, maka selama masa dua tahun sesudah penjerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tidaklah akan mengadakan perubahan-perubahan jang merugikan pegawai-pemerintah termaksud pada pasal 1, sekadar dan selama mereka itu mempunjai kebangsaan Belanda.

Pasal 4.

Sesudah penjerahan kedaulatan maka dengan segera Pemerintah Republik Indonesia Serikat berhak menjusun kembali (herschikken) dan menjaring (selecteren) pegawai-pegawai pemerintah sipil termaksud pada pasal 1.

Pasal 5.

Dengan memegang asas bahwa pemberhentian atas permintaan sendiri selalu akan diberikan, djuga selama masa-peralihan termaksud pada pasal 3, maka untuk pemberhentian dari pada djabatannja jang belum pada waktunja terhadap pegawai-pegawai pemerintah termaksud pada pasal itu djuga, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. djika pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, baik dalam masa-peralihan maupun sesudahnja, diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat karena alasan jang mengenai kepentingan dinas, diluar kesalahan atau perbuatan jang bersangkutan itu, maka berlakulah peraturan pemberhentian jang ada pada saat pemberhentian itu. Biaja pemberhentian itu ditanggung oleh Republik Indonesia Serikat. Atas pemberhentian pada masa-peralihan jang termaksud disini berlakulah peraturan melepaskan pegawai jang termaktub pada lampiran persetudjuan ini;

b. djika pemberhentian diberikan atas permintaan sendiri dalam masa-peralihan, maka jang bersangkutan tidaklah mempunjai hak atas pembajaran oleh atau dari Pemerintah Republik Indonesia Serikat;

c. djika pemberhentian diberikan atas permintaan sendiri sesudah masa-peralihan, disebabkan oleh perubahan sjarat-sjarat dinas sehingga, tergantung pada timbangan Pemerintah Republik Indonesia Serikat, tidak sepatutnjalah jang bersangkutan boleh diminta bekerdja terus maka berlakulah peraturan melepaskan pegawai jang ada pada saat pemberhentian itu.

Pasal 6.

1. Pada pegawai-pegawai pemerintah sebagai termaksud pada pasal-pasal tadi tiada termasuk sekalian guru agama (bedienaren van de godsdienst) jang dalam djabatan mendapat gadji dari pada Pemerintah Indonesia selaku pegawai negeri.

2. Kedudukan pegawai itu, demikian djuga kedudukan guru-guru subsidi jang telah mendapat pensiun berdasar „Peraturan pensiun guru-guru subsidi" („Pensioenreglement voor bijzondere leerkrachten") akan dipermusjawaratkan lebih landjut oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Keradjaan Nederland.

LAMPIRAN RANTJANGAN-PERSETUDJUAN TENTANG KEDUDUKAN PEGAWAI-PEGAWAI PEMERINTAH SIPIL BERHUBUNG DENGAN PENJERAHAN KEDAULATAN.

Sjarat-sjarat melepaskan.

A. Pegawai-pemerintah jang berdjabatan tetap.

Hal mengachiri berdjabatan diiringi oleh pemberian uang-tunggu untuk masa jang selama-lamanja lima tahun atau untuk masa jang kurang lama seberapa perlu untuk mentjapai lamanja djabatan serta usia jang diperlukan untuk mendapat pensiun biasa, menurut ketentuan-ketentuan jang sedang berlaku. Mula-mula dua tahun lamanja uang-tunggu itu berdjumlah 60% dari ƒ 500.— jang pertama, dan 40% dari pada sisa gadji aktip jang diterima kudian, selandjutnja 40% dari pada gadji itu, pada kedua hal sebanjak-banjaknja ƒ 750.— sebulan. Sesudah masa-uang-tunggu, djikalau pada saat itu telah tertjapai masa-djabatan untuk menghitung pensiun jang sekurang-kurangnja sepuluh tahun, maka dengan tidak memandang umur akan diberikan pensiun dihitung menurut ketentuan-ketentuan pensiun jang ada, ditambah dengan 4% dari dasar-pensiun, kadar dengan tambahan itu djumlah 40% dari dasar-pensiun tidak diliwati.

B. Pegawai-pemerintah jang berdjabatan sementara dan jang masuk berdjabatan sebelum 1 Maret 1942.

Djika tertjapai masa berdjabatan jang lamanja sekurang-kurangnja sepuluh tahun, hal mengachiri berdjabatan diiringi oleh pemberian uang-tundjangan selaku uang-tunggu untuk masa jang selama-lamanja setahun atau untuk masa jang kurang lama seberapa perlu guna mentjapai lamanja djabatan serta usia jang diperlukan untuk mendapat pensiun biasa, seandainja jang bersangkutan berdjabatan tetap. Uang-tundjangan selaku uang-tunggu berdjumlah 30% dari gadji aktip hingga sebanjak-banjaknja ƒ 175.— sebulan, lain dari pada tundjangan-kemahalan dan tundjangan-keluarga jang sedang berlaku. Sesudah masa-uang-tunggu jang dihitung seluruhnja selama jang berkepentingan berkediaman didaerah beriklim panas dan setengahnja selama ia berke-

diaman diluar daerah beriklim panas, dan djikalau pada saat itu sudah tertjapai masa-djabatan sekurang-kurangnja lima belas tahun, maka dengan tidak memandang umur diberilah tundjangan selaku pensiun sedjumlah $^4/_5$ dari pensiun jang dalam hal jang sesuai harus diperoleh pegawai-pemerintah berdjabatan tetap menurut jang sudah ditentukan pada A.

C. Pegawai-pegawai dengan perdjandjian waktu singkat.

Hal mengachiri berdjabatan membawa akibat seperti ditetapkan pada kontrak untuk hal menghentikan sebelum habis waktunja semata-mata karena alasan jang terletak pada djabatan.

D. Tempoh-tempoh jang berlaku untuk mempermaklumkan pemberhentian ialah sebagai berikut:

terhadap kepada pegawai jang berdjabatan tetap, satu bulan;

terhadap kepada pegawai jang berdjabatan sementara jang sesudah diperhentikan masih menerima pendapatan, dua, bulan;

terhadap kepada pegawai jang berdjabatan sementara jang sama sekali tidak berpendapatan sesudah diperhentikan (ialah pegawai berdjabatan sementara sesudah perang), satu bulan, bertambah sebulan tiap-tiap tahun penuh ia berdjabatan, sampai selama-lamanja tiga bulan.

E. Djika pegawai jang mendapat uang-tunggu atau pensiun termaksud pada A mentjukupi sjarat-sjarat jang ditetapkan pada „Buitenlands Verlofreglement" pasal 2 dan 3, maka sekadar mereka tidak dapat menuntut hak itu berdasarkan „Overtochtsreglement", mereka diberi perdjalanan pulang ke Negeri Belanda dengan pertjuma menurut ketentuan-ketentuan jang bersangkutan, dengan meniadakan segala hak atas perdjalanan kembali ke Indonesia dengan pertjuma jang sekiranja boleh dituntut.

F. 1. Pensiun-berimbangan atau uang-tundjangan selaku pensiun, uang-tunggu atau uang-tundjangan selaku uang-tunggu, jang diberikan menurut peraturan ini, akan dikurangi dengan djumlah jang dihitung menuntut persentasi dari pendapatan dari perkerdjaan jang sama dengan persentasi dasar jang dipakai untuk menghitung pembajaran oleh Pemerintah itu.

2. Pegawai-pegawai jang menerima pendapatan dari Pemerintah termaksud pada ajat diatas dapat diwadjibkan menerima pekerdjaan jang patut, selama mereka belum mentjapai usia lima puluh lima tahun.

3. Barangsiapa menolak pekerdjaan jang patut, maka pendapatannja dari Pemerintah akan dikurangi dengan persentasi jang sama dengan jang termaksud pada ajat 1 dihitung dari pendapatan jang ditolak itu.

RANTJANGAN PERSETUDJUAN TENTANG MEMPERBANTUKAN PEGAWAI OLEH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT UNTUK DJABATAN-PEMERINTAH SIPIL KERADJAAN NEDERLAND DAN SEBALIKNJA.

Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Keradjaan Nederland telah menjetudjui sebagai berikut.

Pasal 1.

Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland dengan bebas akan dapat mentjari pegawai untuk diangkat pada djabatan-pemerintahnja, jang satu diantara warganegara dan diaerah-hukum jang lain.

Republik Indonesia Serikat akan memberi bantuan kepada djabatan-pemerintah Nederland dalam hal mentjari pegawai-pegawai serta menempatkan pegawai-pegawai untuk sementara waktu, dan sebaliknja Keradjaan Nederland akan berbuat sedemikian.

Pasal 2.

Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland akan bermusjawarat tentang tjara mana lagi hal bantu-membantu itu boleh diichtiarkan dengan sebaik-baiknja.

Pasal 3.

Djikalau Republik Indonesia Serikat hendak mengangkat pegawai-pegawai Nederland untuk keperluan perwakilannja di Nederland dan sebaliknja djikalau Keradjaan Nederland hendak mengangkat pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat untuk keperluan perwakilannja di Indonesia, maka mereka akan bermupakat tentang itu lebih dahulu dan sedapat mungkin saling mengindahkan kehendak masing-masing.

RANTJANGAN PERATURAN-PERATURAN TENTANG URUSAN KEMILITERAN.

Peraturan-peraturan tentang urusan kemiliteran seperti tersebut pada pasal 7 Persetudjuan-Perpindahan terbagi sebagai berikut.

I

Peraturan-peraturan tentang angkatan laut Nederland di Indonesia sesudah penjerahan kedaulatan.

II

Peraturan-peraturan tentang angkatan darat di Indonesia dibawah pimpinan Nederland sesudah penjerahan kedaulatan.

III

Peraturan-peraturan tentang angkatan udara di Indonesia dibawah pimpinan Nederland sesudah penjerahan kedaulatan.

I

Peraturan-peraturan tentang angkatan laut Nederland di Indonesia sesudah penjerahan kedaulatan.

BAB I. Asas-asas umum.

BAB II. Tugas-kewadjiban jang akan didjalankan oleh Koninklijke Marine untuk keperluan Pemerintah Republik Indonesia Serikat selama masa penarikan-kembali Koninklijke Marine.

BAB III. Bantuan membangun Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat.

BAB IV. Tjara dan peraturan-peraturan tentang penarikan-kembali Koninklijke Marine.

BAB V. Urusan tentang pangkalan angkatan laut Surabaja.

BAB VI. Perdjandjian-perdjandjian tentang mendjalankan peraturan-peraturan termaktub pada bab-bab diatas.

BAB I.

ASAS-ASAS UMUM.

Pasal 1.

Disebabkan penjerahan kedaulatan maka pendjagaan keamanan Indonesia dilautan semata-mata atas tanggungan Republik Indonesia Serikat.

Pasal 2.

Koninklijke Marine sebagai alat Belanda tidak akan bertugas-kewadjiban lagi di Indonesia, dan karena itu Koninklijke Marine akan ditarik kembali dari Indonesia.

Pasal 3.

Disebabkan pasal-pasal diatas pendjagaan keamanan dilautan ialah kewadjiban Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat.

Pasal 4.

Pemerintah Nederland bersedia, atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia Serikat, memberi bantuan mendjalankan tugas-kewadjiban dilautan seperti jang disebut pada pasal 7, sekadar Republik Indonesia Serikat belum sanggup memenuhi kewadjiban itu dengan alat-alat sendiri. Bantuan itu berachir bersusut-susut.

Pasal 5.

Pemerintah Nederland bersedia, atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia Serikat, memberi bantuan membangun Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat, sehingga Republik Indonesia Serikat dapat memenuhi tugas-kewadjibannja dilautan dengan alatnja sendiri dalam waktu sesingkat-singkatnja.

Pasal 6.

Tempoh angkatan laut Nederland akan ditarik kembali dari Indonesia ditetapkan satu tahun lamanja, ketjuali djika Pemerintah-pemerintah jang berdaulat dengan permusjawaratan bersama mendapat persetudjuan jang lain.

BAB II.

TUGAS-KEWADJIBAN JANG AKAN DIDJALANKAN OLEH KONINKLIJKE MARINE UNTUK KEPERLUAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT SELAMA MASA PENARIKAN-KEMBALI KONINKLIJKE MARINE.

Pasal 7.

Atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia Serikat, maka selama masa penarikan-kembali Koninklijke Marine angkatan laut itu akan mendjalankan tugas-kewadjiban jang tersebut dibawah ini untuk keperluan Republik Indonesia Serikat:

a. membantu badan-badan maritim Republik Indonesia Serikat jang diserahi mendjalankan pekerdjaan patroli;

b. mengerdjakan menjapu-randjau dan pembersihan-randjau, menjelam dan mengemasi (berging);

c. hidrograpi;

d. membantu dengan satuan-satuan Djabatan Penerbangan Angkatan Laut.

Pasal 8.

Pemerintah Nederland bersedia, pada hari penjerahan kedaulatan menjerahkan hak milik atas dua buah kapal korvet Koninklijke Marine mendjadi kepunjaan Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Pemerintah Nederland bersedia pula bermusjawarat dengan Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan menjerahkan dua buah korvet lagi selekas mungkin sesudah penjerahan kedaulatan, demikian djuga alat-alat perkapalan dan penerbangan lain.

Achirnja Pemerintah Nederland bersedia, setahun sesudah penjerahan kedaulatan menjerahkan hak milik atas sebuah kapal pemburu-torpedo mendjadi kepunjaan Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Sjarat-sjarat urusan (zakelijke voorwaarden) berhubung dengan penjerahan kapal-kapal dan kapal-kapal udara itu akan mendjadi pokok permusjawaratan antara Pemerintah-pemerintah jang berdaulat.

Pasal 9.

Berhubung dengan penerimaan badan-badan-pemelihara dan persediaan-persediaan Koninklijke Marine, maka oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan diperhatikan hal-hal jang berikut:

a. pada saat penjerahan kedaulatan maka segala harta benda kepunjaan Pemerintah Indonesia jang sekarang pindah kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat;

b. sesudah penjerahan kedaulatan, maka dengan selekas mungkin Pemerintah Nederland akan bermusjawarat dengan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tentang saat dan sjarat-sjarat urusan (zakelijke voorwaarden) penjerahan harta benda kepunjaan Nederland jang dianggap patut diserahkan itu.

Pasal 10.

I. Bangun-bangunan maritim di Indonesia jang letaknja diluar pangkalan angkatan laut Surabaja, jang sebelum penjerahan kedaulatan diurus oleh Koninklijke Marine, untuk sementara tinggal dalam pengurusan Koninklijke Marine. Pengurusan itu dengan berangsur-angsur diserahkan kapada Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat; dalam hal itu harus diperhatikan jang berikut:

a. bangun-bangunan maritim haruslah tetap landjut berguna, supaja terdjaminlah memenuhi tugas-kewadjiban di lautan;

b. dengan tidak mempersoalkan apakah Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat ataupun Koninklijke Marine jang mengurus bangun-bangunan itu, maka bangun-bangunan tersebut haruslah tetap landjut berguna untuk keperluan Republik Indonesia Serikat dan untuk keperluan satuan-satuan Koninklijke Marine jang ada di Indonesia berdasarkan persetudjuan ini.

II. Jang ditentukan pada ajat tadi tentang bangun-bangunan maritim di Indonesia jang letaknja diluar pangkalan angkatan laut Surabaja akan berlaku djuga untuk bangun-bangunan di lingkungan pangkalan angkatan laut Surabaja jang akan ditundjuk dengan permusjawaratan bersama, ialah sekadar dianggap perlu.

Pasal 11.

Pemerintah Nederland bersedia, atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia Serikat, sekuat tenaga memperbantukan pegawai akan mengurus bangun-bangunan tersebut pada pasal diatas.

Pasal 12.

Selama masa tersebut pada pasal 6 segala pegawai dan satuan Koninklijke Marine dipimpin dibawah perintah Leksemana Koninklijke Marine di Indonesia (Vlagofficier Koninklijke Marine Indonesië).

Leksemana itu harus menurut petundjuk-petundjuk dan perintah-perintah Pemerintah Republik Indonesia Serikat tentang tugas-kewadjiban tersebut pada pasal 7, dan bertanggung-djawab kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat tentang mendjalankan tugas-kewadjiban tadi.

Pasal 13.

Lain dari pada bendera dan pandji-pandji perang Keradjaan Nederland, satuan-satuan Koninklijke Marine akan mengibarkan djuga bendera Republik Indonesia Serikat dari andang-andangnja pada waktu mendjalankan tugas-kewadjiban termaksud pada pasal 7.

Pasal 14.

Pada satuan-satuan Koninklijke Marine jang diserahi mendjalankan tugas-kewadjiban tersebut pada pasal 7 dapat ditempatkan opsir-opsir-penghubung Republik Indonesia Serikat. Opsir-opsir itu boleh diberi berkuasa menjelidik.

BAB III.

BANTUAN MEMBANGUN ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Pasal 15.

Pada asasnja disetudjui bahwa atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan dikirim sebagian angkatan laut, sebagai bagian Missi Militer Nederland.

Missi militer itu akan dilengkapi dengan panasehat, pelatih dan ahli teknik, guna pelatih pegawai-pegawai Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat dan guna alat-alat perlengkapan di daratan.

Pasal 16.

Pemerintah Nederland bersedia memberikan segala kelonggaran guna pelatihan pegawai Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat pada lembaga-lembaganja pendidikan maritim.

Pasal 17.

Pemerintah Nederland bersedia memberikan kesempatan sebanjak mungkin akan pelatihan pegawai Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat pada kapal-kapal Koninklijke Marine.

Pasal 18.

Pemerintah Nederland bersedia memberikan segala kelonggaran dan pertolongan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat bila membeli kapal, pesawat-terbang dan persediaan-persediaan untuk keperluan Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat.

Pasal 19.

I. Pemerintah Nederland bersedia mengizinkan pegawai bangsa Indonesia jang berdjabatan pada Koninklijke Marine pindah berdjabatan pada Republik Indonesia Serikat asal dengan kehendaknja sendiri dan dengan sjarat-sjarat jang akan ditentukan oleh Republik Indonesia Serikat.

II. Lagi pula Pemerintah Nederland bersedia akan berusaha supaja pegawai Belanda dan bekas pegawai Koninklijke Marine dapat masuk bekerdja pada Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat asal dengan kehendaknja sendiri.

BAB IV.

TJARA DAN PERATURAN-PERATURAN TENTANG PENARIKAN-KEMBALI KONINKLIJKE MARINE.

Pasal 20.

Sedang Koninklijke Marine ditarik kembali, pembesar-pembesar Indonesia dan pembesar-pembesar Belanda dengan

kerdjasama akan berichtiar supaja penjerahan tugas-kewadjiban maritim dilakukan dengan tepat. Menunggu Koninklijke Marine pulang, Angkatan Laut itu tidak akan dipergunakan setjara operasi melainkan sekadar diminta oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat jang berdaulat dan disetudjui Pemerintah Nederland.

Pasal 21.

Tentang tempoh penarikan-kembali satuan-satuan Pasukan Marinir berlakulah aturan-aturan seperti aturan-aturan untuk satuan-satuan Koninklijke Landmacht.

Pasal 22.

Departemen Angkatan Laut diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat, sedangkan Pimpinan Angkatan Laut berkesudahan pada hari penjerahan kedaulatan dan penjeselesaian hal itu berpindah kepada kantor Leksemana Koninklijke Marine di Indonesia (Vlagofficier Koninklijke Marine Indonesië).

BAB V.

PERATURAN TENTANG PANGKALAN ANGKATAN LAUT SURABAJA.

Pasal 23.

Pangkalan angkatan laut Surabaja, selandjutnja hanja disebut pangkalan sadja, melingkari daerah daratan dan lautan serta dengan galangan perkapalan, tangsi-tangsi, pelabuhan, lapangan terbang, bangun-bangunan, alat-alat dan lain-lain, jang letaknja dalam perbatasan seperti ditundjuk dalam peta jang dilampirkan pada perdjandjian ini, ja'ni dengan mengetjualikan harta milik kepunjaan partikelir.

Pasal 24.

Pada saat penjerahan kedaulatan pangkalan itu mendjadi pangkalan Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat dengan memperhatikan jang ditentukan tentang harta benda kepunjaan Koninklijke Marine sebagai tersebut pada pasal 9 ajat *b*.

Pasal 25.

Mulai dari saat penjerahan kedaulatan seorang opsir Koninklijke Marine diangkat mendjadi pengurus pangkalan itu oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Orang jang diangkat itu dipilih dari antara tiga orang jang dimadjukan oleh Pemerintah Nederland.

Pasal 26.

Tentang pengurusan jang didjalankannja pengurus pangkalan itu dengan langsung bertanggung-djawab kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat, atau djika perlu dengan perantaraan Kepala bagian angkatan laut pada Missi Militer Nederland, djikalau Kepala itu bertindak sebagai penasehat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat.

Pasal 27.

Pengurus pangkalan menanggung-djawab pendjagaan ketenteraman dan keamanan didalam lingkungan pangkalan. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan memperbantukan kepadanja suatu pasukan polisi, dengan memperhatikan segala kehendak pengurus itu dengan sepenuh-penuhnja. Komandan-komandan kapal dan bangun-bangunan didalam lingkungan pangkalan haruslah menurut petundjuk-petundjuk pengurus tentang pendjagaan ketenteraman dan keamanan.

Pasal 28.

Kekuasaan-kekuasaan jang akan diserahkan kepada pengurus pangkalan dimuatkan kadalam seputjuk instruksi jang akan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat. Dalam hal itu akan diminta nasehat Kepala bagian angkatan laut pada Missi Militer Nederland.

Pasal 29.

Hal mempergunakan pangkalan beserta sediaannja (diensten) untuk keperluan tentara Republik Indonesia Serikat dan satuan Koninklijke Marine jang berada di Indonesia oleh karena persetudjuan ini, berlaku menurut aturan-aturan jang sama bunjinja untuk kedua angkatan laut itu.

BAB VI.

PERDJANDJIAN-PERDJANDJIAN TENTANG MENDJALANKAN PERATURAN-PERATURAN TERMAKTUB PADA BAB-BAB DIATAS.

Pasal 30.

1. Pada saat penjerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia Serikat menerima dalam djabatannja pegawai sipil jang pada waktu itu bekerdja pada Pemerintah Indonesia baik dalam djabatan tetap atau sementara maupun dengan perdjandjian waktu singkat, begitupun pegawai sipil jang bekerdja pada Koninklijke Marine di Indonesia, ialah setjara dan menurut sjarat-sjarat seperti telah disetudjui tentang pegawai-pegawai sipil Pemerintah Indonesia jang lain.

2. Pada saat tersebut pada ajat 1 pegawai sipil jang bekerdja pada Koninklijke Marine di Indonesia dengan kontrak-perburuhan Belanda tinggal tetap bekerdja pada Koninklijke Marine menurut sjarat-sjarat jang sedang berlaku.

Pasal 31.

1. Segala biaja Koninklijke Marine, termasuk Pasukan Marinir, mulai 1 Djanuari 1950 sampai masa penarikan-kembali berachir ditanggung oleh Nederland.

2. Sekadar dalam masa itu Republik Indonesia Serikat diberi bantuan oleh Koninklijke Marine, maka berlakulah pasal 6 Persetudjuan untuk melaksanakan pasal 2 dan 21 Statut-Uni.

3. Untuk tahun 1950 djumlah uang jang harus ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat menurut ajat tadi, akan ditentukan sesudah dipermusjawaratkan antara kedua Pemerintah jang berdaulat, dengan pengertian bahwa djumlah itu tidak akan melebihi biaja eksplotasi Koninklijke Marine di Indonesia pada tahun 1949 (tidaklah termasuk kedalamnja biaja Pasukan Marinir), dengan mengingat pengaruh devaluasi jang mungkin ada.

4. Berkala-kala Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan memberikan valuta Indonesia dan deviezen jang perlu untuk membelandjai Koninklijke Marine, berdasarkan anggaran-kas dan anggaran-deviezen tahunan. Sekadar ajat

kedua tidak berlaku atasnja, pembelandjaan itu akan diselesaikan antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Nederland.

Pasal 32.

Didalam batas-batas bangun-bangunan tersebut pada pasal 10, kekuasaan didjalankan oleh komandan-komandan jang bersangkutan. Komandan-komandan itu menjelenggarakan pendjagaan bangun-bangunan itu dengan alatnja sendiri, atau seberapa perlu dengan bantuan Republik Indonesia Serikat.

Pasal 33.

Komandan-komandan bangun-bangunan tersebut pada pasal 10 memberikan segala bantuan kepada pembesar-pembesar Republik Indonesia Serikat jang berwadjib hal menjusul, menahan dan menghadapkan orang-orang jang dibawah kekuasaan pengadilan Indonesia, jang disangka telah melakukan sesuatu perbuatan jang dihantjam hukuman dan jang berada didalam lingkungan bangun-bangunan itu.

Pasal 34.

Atas orang-orang militer Koninklijke Marine jang tinggal di Indonesia karena sesuatu persetudjuan dengan Republik Indonesia Serikat berlaku hukum-pidana militer Belanda formil dan materiel, hukum-tatatertib militer Belanda serta pula hukum-pidana umum Indonesia materiel sekadar hukum-pidana militer tersebut tidak mempunjai aturan-aturan sendiri.

Hukum-tatatertib militer didjalankan oleh atau atas nama komandan Koninklijke Marine jang bersangkutan.

Kepada pembesar-pembesar Indonesia akan diberitahukan djika dimintanja bagaimana diselesaikan kesalahan besar-besar jang dilakukan oleh militer tersebut, bila kesalahan itu mengenai kepentingan Republik Indonesia Serikat atau kaulanegaranja.

Pasal 35.

Hal mempergunakan pelabuhan-pelabuhan dan lapangan-terbang Indonesia dan sediaannja (diensten) untuk tentara Republik Indonesia Serikat dan satuan-satuan Koninklijke Marine jang ada di Indonesia karena persetudjuan ini, berlaku menurut aturan-aturan jang sama bunjinja untuk kedua angkatan laut itu.

II

Peraturan-peraturan tentang angkatan darat di Indonesia dibawah pimpinan Nederland sesudah penjerahan kedaulatan.

BAB I. Asas-asas umum.
BAB II. Pengerahan angkatan darat jang dibawah perintah Nederland.
BAB III. Penkangkatan balatentara Koninklijke Landmacht dengan kapal dari Indonesia.
BAB IV. Penjusunan-kembali angkatan darat jang dibentuk atau dilengkapi oleh atau dibawah kekuasaan Pemerintah Indonesia (Penguasa Indonesia-Belanda).
BAB V. Peraturan-peraturan sosial.
BAB VI. Penjerahan barang bergerak dan barang tetap jang dipakai oleh Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger.
BAB VII. Keuangan.
BAB VIII. Ketentuan-ketentuan pendjalankan.

BAB I.

ASAS-ASAS UMUM.

Pasal 1.

Angkatan darat jang dibawah perintah Nederland selekas mungkin ditarik kembali dari Indonesia atau disusun kembali menurut garis-garis pentundjuk dibawah ini.

Pasal 2.

Disebabkan penjerahan kedaulatan, maka keamanan di Indonesia dan keamanan terhadap keluar mendjadi tanggungan Pemerintah Republik Indonesia Serikat jang berdaulat.

Pasal 3.

1. Ketika angkatan darat jang dibawah perintah Nederland ditarik kembali, maka pembesar-pembesar Indonesia dan Belanda kerdjasama akan berichtiar supaja tanggungdjawab militer kedaerahan diserahkan dengan teratur.

2. Angkatan darat jang dibawah perintah Nederland jang menunggu pengangkutan dengan kapal atau jang sedang disusun kembali tidak akan dipergunakan setjara operasi, melainkan sekadar diminta oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat jang berdaulat dan disetudjui Pemerintah Nederland.

Pasal 4.

Anggota-anggota angkatan darat jang berada di Indonesia pada saat penjerahan kedaulatan dan jang dibentuk atau dilengkapi oleh atau dibawah kekuasaan Pemerintah Indonesia (Penguasa Indonesia-Belanda), dapat dimasukkan kedalam tentara Republik Indonesia Serikat peraturan-peraturan jang lagi akan diadakan.

Pasal 5.

Penjerahan barang bergerak dan barang tetap jang patut diserahkan akan dilakukan dengan permusjawaratan, setjara tertib dan teratur.

BAB II.

PENGERAHAN ANGKATAN DARAT JANG DIBAWAH PERINTAH NEDERLAND.

Pasal 6.

1. Angkatan tersebut pada pasal 1 setjepat mungkin akan dikampungkan didaerah-daerah (rayons) jang akan ditentukan dengan permusjawaratan bersama, sekadar perkampungan itu belum terdjadi waktu penjerahan kedaulatan.

2. Jang patut didjadikan daerah perkampungan itu ialah daerah-daerah jang berdekatan pelabuhan dan daerah-daerah jang tjukup ruangan pemondokannja bagi pasukan-pasukan.

3. Dengan maksud mengusahakan penjerahan tanggung-djawab militer kedaerahan dengan tertib, haruslah dipertimbangkan kemungkinan angkatan tersebut pada pasal 4 disusun kembali diluar daerah (rayon) itu pula.

Pasal 7.

Untuk tiap-tiap daerah (rayon) ditundjuk seorang komandan Belanda jang memerintah anggota angkatan tersebut pada pasal 1 jang ada didaerah itu.

Pasal 8.

Angkatan tersebut pada pasal 1 mempunjai kedudukan tamu didaerah pemerintah sahabat; Pemerintah Republik Indonesia Serikat memberi segala kelonggaran.

Pasal 9.

Angkatan tersebut pada pasal 1 tetap dibawah perintah komandannja sendiri.

Pasal 10.

Angkatan tersebut pada pasal 1 tetap memegang persendjataan dan perlengkapannja jang sah, ketjuali djika pembesar-pembesar militer Belanda jang berkuasa menentukan lain.

Pasal 11.

Pemerintah Republik Indonesia Serikat — dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan bab ini — tetap menanggung djawab pendjagaan ketenteraman dan ketertiban didalam lingkungan daerah (rayon).

Pasal 12.

Atas orang-orang militer angkatan tersebut pada pasal 1 berlakulah hukum-pidana militer Belanda formil dan materiel, hukum-tatatertib militer Belanda serta pula hukum-pidana umum Indonesia jang materiel, sekadar hukum-pidana militer tersebut tidak mempunjai aturan sendiri.

Hukum-tatatertib militer didjalankan oleh atau atas nama komandan angkatan tersebut pada pasal 1. Kepada pembesar-pembesar Indonesia akan diberitahukan djika dimintanja bagaimana diselesaikan kesalahan besar-besar jang dilakukan oleh militer tersebut, bila kesalahan itu mengenai kepentingan Republik Indonesia Serikat atau kaulanegaranja.

Pasal 13.

Anggota-anggota angkatan tersebut pada pasal 1 berkebebasan bergerak didalam lingkungan (rayon). Djika mereka hendak bepergian diluar daerah (rayon), haruslah mereka mempunjai pas jang berlaku sah dan ditandatangani oleh

komandan tersebut pada pasal 7 dan jang ditandai oleh seorang pembesar militer jang akan ditundjuk oleh Republik Indonesia Serikat. Dengan memperhatikan pasal 3 ajat 2 mereka tidak akan mendjalankan suatu tindakan militer djuapun, akan tetapi mereka akan diberi kesempatan mengadakan latihan menurut peraturan-peraturan jang akan ditetapkan dengan permusjawaratan bersama.

Pasal 14.

1. Didalam lingkungan daerah (rayon) itu keamanan dan ketenteraman anggota angkatan jang disebutkan pada pasal 1 didjaga oleh badan-badan militer Belanda jang berkuasa, djika perlu dengan patroli.

2. Patroli itu dapat bertindak hanja terhadap anggota angkatan tersebut pada pasal 1.

Pasal 15.

Didalam batas-batas kampemen-kampemen angkatan tersebut pada pasal 1 kekuasaan didjalankan oleh komandan-komandan satuan-satuan jang ditempatkan disitu. Komandan itu mengatur pendjagaan kampemennja dengan alat-alat sendiri.

Pasal 16.

Komandan jang disebut pada pasal 15 memberi segala bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat dalam hal menjusul, menahan dan menghadapkan orang-orang jang dibawah kekuasaan pengadilan Indonesia, jang disangka telah melakukan sesuatu perbuatan jang dihantjam hukuman dan jang berada didalam kampemen itu.

Pasal 17.

Tentang membawa sendjata diluar dinas dimuka umum, diturut aturan jang berlaku pada waktu perdamaian antara negara-negara berdaulat. Dalam hal-hal jng istimewa akan diadakan permusjawaratan tentang itu antara pembesar-pembesar militer jang bersangkutan.

Pasal 18.

1. Angkatan tersebut pada pasal 1 tetap mempunjai pedjabatan sendiri jang perlu untuk pemeliharakannja.
2. Pedjabatan-pedjabatan itu berkebasan bergerak diluar daerah (rayon) untuk memenuhi kewadjibannja, sedang atas pedjabatan sendiri itulah melindung dan menunggui dirinja dengan alat-alat sendiri. Aturan-aturan landjut pendjalankan jang ditentukan pada pasal ini akan ditetapkan dengan permusjawaratan bersama.

Pasal 19.

Penempatan angkatan tersebut pada pasal 1, ketjuali perubahan-perubahannja jang perlu diadakan untuk pengangkutan dengan kapal, diubah hanja dengan permusjawaratan bersama.

BAB III.

PENGANGKUTAN BALATENTARA KONINKLIJKE LANDMACHT DARI INDONESIA DENGAN KAPAL.

Pasal 20.

Sesudah penjerahan kedaulatan Koninklijke Landmacht akan diangkut dari Indonesia dengan kapal didalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Pasal 21.

Untuk mentjapai tudjuan itu maka Pemerintah-pemerintah Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland akan bekerdjasama untuk mempergunakan segala alat-alat jang sedia.

Pasal 22.

Djika ternjata kelak — seperti dengan sesal hati telah dichawatiri oleh Pemerintah Nederland — bahwa karena kekurangan ruangan kapal karena kesukaran-kesukaran teknik lain penarikan-kembali didalam waktu enam bulan sesudah penjerahan kedaulatan terhambat ditjapai, maka Pemerintah Keradjaan Nederland dengan segala senang hati

akan memberi kesempatan kepada pembesar-pembesar Republik Indonesia Serikat akan mengetahui menurut kehendaknja segala tindakan dan ichtiar jang telah diusahakannja untuk mengangkut Koninklijke Landmacht ketanah airnja.

Pasal 23.

Sesudah penjerahan kedaulatan maka akan diadakan panitia teknik bersama akan memeriksai kemungkinan-kemungkinan mengirim Koninklijke Landmacht pulang ketanah airnja, serta tjara dan alat-alat pengatasi segala kesukaran tadi.

Pasal 24.

Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia atau badan jang menggantikannja akan diberi kesempatan membantu dalam hal itu menurut garis-garis petundjuk jang berlaku atas badan tersebut dan seperti telah ditetapkan pada memorandum tanggal 22 Djuni 1949 tentang mengadakan Konperensi Medja Bundar.

BAB IV.

PENJUSUNAN-KEMBALI ANGKATAN DARAT JANG DIBENTUK DAN DILENGKAPI OLEH ATAU DIBAWAH KEKUASAAN PEMERINTAH INDONESIA (PENGUASA INDONESIA-BELANDA).

Pasal 25.

1. Mulai pada saat penjerahan kedaulatan komandan angkatan tersebut pada pasal 1 diserahi kewadjiban menjusun kembali angkatan tersebut pada pasal 4. Maksud penjusunan-kembali jang terutama ialah supaja anggota-anggota angkatan tersebut jang dianggap lajak diberi kesempatan akan pindah memasuki balatentara Republik Indonesia Serikat dengan setjepat mungkin.

2. Barang dimana pada persetudjuan ini selandjutnja disebut perkataan penjusunan-kembali, maka maksudnja ialah penjusunan-kembali tersebut pada ajat 1 pasal ini.

Pasal 26.

Kekuasaan tata-usaha dan kehakiman jang pada perundang-undangan Indonesia sebelum penjerahan kedaulatan diserahkan kepada Wakil Agung Mahkota terhadap angkatan tersebut pada pasal 4, selama penjusunan-kembali angkatan tersebut didjalankan oleh atau atas nama Radja Nederland.

Pasal 27.

1. Pada penjusunan-kembali akan diusahakan supaja perpindahan anggota-anggota angkatan tersebut pada pasal 4 kepada balatentara Republik Indonesia Serikat sedapat mungkin akan berlangsung satuan demi satuan.
2. Untuk penjerahan dinas akan diadakan peraturan landjut dengan permusjawaratan bersama.

Pasal 28.

1. Satuan-satuan jang telah disusun oleh komandan-komandan angkatan tersebut pada pasal 4 dan telah disediakan untuk perpindahan, akan terhitung balatentara Republik Indonesia Serikat sedjak sehari sesudah penjerahan kedaulatan.
2. Satuan-satuan jang selandjutnja dibentuk sedemikian itu akan pindah demi telah disiapkan oleh komandan angkatan tersebut pada pasal 4.

Pasal 29.

Pada penjusunan-kembali maka komandan angkatan tersebut pada pasal 1 harus memperhatikan garis-garis petundjuk jang akan ditetapkan oleh atau atas nama Pemerintah Keradjaan Nederland bersama-sama dengan Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Pasal 30.

Mendjalankan penjusunan-kembali itu ialah pokok penjelenggaraan bersama antara komandan angkatan tersebut pada pasal 1 dan komandan angkatan Republik Indonesia Serikat.

Pasal 31.

1. Penjusunan-kembali akan dilaksanakan didalam masa enam bulan lamanja, mulai pada hari sjarat-sjarat masuk angkatan darat Republik Indonesia Serikat diumumkan.

2. Selama masa itu peraturan-peraturan tentang kedudukan hukum pegawai militer angkatan tersebut pada pasal 4 jang sedang berlaku pada hari mendjelang penjerahan kedaulatan tetaplah berlaku dengan tidak berubah, ialah dengan tidak mengurangi jang ditentukan selandjutnja pada persetudjuan ini.

3. Atas permusjawaratan bersama antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Keradjaan Nederland dapat ditetapkan bahwa sesudah penjusunan-kembali itu telah tertjapai, beberapa pedjabatan atau tjabang-pedjabatan boleh bekerdja terus untuk memenuhi beberapa kewadjiban dan selama masa jang ditentukan.

4. Ketika penjusunan-kembali itu telah tertjapai, maka berkesudahanlah Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (Tentara Keradjaan Indonesia-Belanda). Djika sesudah itu hal itu ternjata perlu diselesaikan lebih landjut, maka Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Keradjaan Nederland akan bermusjawarat tentang itu lebih dahulu tepat pada waktunja.

Pasal 32.

Sesudah penjerahan kedaulatan maka pegawai militer angkatan tersebut pada pasal 4:

a. sebagian diuntukkan masuk berdjabatan pada Republik Indonesia Serikat;

b. sebagian lagi diuntukkan masuk berdjabatan kepada Keradjaan Nederland;

c. jang selebihnja diuntukkan akan dilepaskan.

Pasal 33.

Mengabulkan penguntukan termaktub pada pasal 32 tadi pada *a* dan *b* berlangsung setjara suka-rela.

Pasal 34.

Djika pegawai militer Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger dengan langsung masuk berdjabatan pada Republik Indonesia Serikat atau pada Keradjaan Nederland, maka lamanja ia berdjabatan pada Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger dihitung penuh.

Pasal 35.

Dengan tidak mengurangi jang ditetapkan pada kedua pasal tadi, maka sjarat-sjarat masuk berdjabatan pada Republik Indonesia Serikat menurut pasal 32 pada *a* ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan sjarat-sjarat masuk berdjabatan pada Keradjaan Nederland menurut pasal 32 pada *b* ditetapkan oleh Pemerintah Keradjaan Nederland. Untuk masuk berdjabatan pada Republik Indonesia Serikat kewarganegaraan Indonesia mendjadi sjarat.

Pasal 36.

Kepada organisasi atau perhimpunan jang anggotanja tersangkut-paut pada penjusunan-kembali itu akan diberi kesempatan membela kepentingan anggotanja itu.

Pasal 37.

Melepaskan dari djabatan berlaku dengan diiringi pemberhentian menurut asas-asas jang ditetapkan pada Bab V.

BAB V.

PERATURAN-PERATURAN SOSIAL.

Pasal 38.

Pegawai militer Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger jang tidak pindah berdjabatan negeri Keradjaan Nederland atau Republik Indonesia Serikat, diperhentikan dengan diperhatikan ketentuan-ketentuan dibawah ini.

Pasal 39.

Mereka jang berdjabatan tetap lagi pada saat pemberhentiannja berhak mendapat pensiun menurut ketentuan-

ketenuan jang berlaku pada hari mendjelang penjerahan kedaulatan, menerima pensiun jang dihitung menurut ketentuan itu.

Pasal 40.

Mereka jang berdjabatan tetap lagi tidak dapat menuntut hak berdasar pada pasal 39, akan tetapi jang masa-djabatannja untuk menghitung pensiun telah sampai 15 tahun lamanja atau lebih, menerima pensiun menurut peraturan tertera pada Staatsblad Indonesia 1948 nomor 13.

Pasal 41.

1. Mereka jang tidak dapat menuntut hak berdasar pada pasal 39 dan 40 menerima uang-tunggu jang dihitung menurut ketentuan pada ajat berikut pasal ini.

2. Uang-tunggu itu dibajar selama dua perlima masa-djabatan jang sudah, dengan pengertian bahwa lamanja itu sekurang-kurangnja setahun dan selama-lamanja lima tahun.

3. Djumlah jang akan dibajar tiap-tiap bulan ialah:

selama 6 bulan jang pertama	80%
selama 12 bulan kemudiannja	60%
selama bulan jang selebihnja	40%

dari gadji aktip jang diterima kudian, ataupun dari gadji aktip jang harus diperoleh jang bersangkutan seandainja tetap ia berdjabatan.

4. Untuk menghitung uang-tunggu korporal, serdadu kelas 1 dan serdadu kelas 2 ditetapkan gadji bulanan masing-masing *f* 200, *f* 160 dan *f* 140.

5. Djika sekiranja akibat mendjalankan peraturan tersebut pada ajat 1 sampai 4 pasal ini dalam hal uang jang diterima oleh jang bersangkutan kurang menjenangkan dari pada apabila didjalankan kepadanja peraturan pasal 42, maka bolehlah ia menuntut supaja peraturan jang disebut kemudian didjalankan kepadanja.

Pasal 42.

1. Mereka jang diterima dalam djabatan dengan perdjandjian waktu singkat lagi telah sampai waktu djabatannja jang ditetapkan, menerima bajaran jang mereka berhak menerima menurut peraturan-peraturan jang berlaku pada hari mendjelang penjerahan kedaulatan.

2. Mereka jang belum sampai masa-djabatannja jang ditetapkan itu, menerima bajaran tersebut pada ajat 1 kadar masa-djabatannja dengan ditambah 20%.

Pasal 43.

Jang berkewadjiban milisi dan berkewadjiban tjadangan milisi menerima bajaran dan bantuan sosial chusus jang boleh dituntutnja karena ketentuan-ketentuan jang berlaku pada hari mendjelang penjerahan kedaulatan.

Pasal 44.

Aturan chusus jang pada hari mendjelang penjerahan kedaulatan berlaku atas orang militer jang meninggalkan djabatan militer akan didjalankan.

Pasal 45.

Dalam hal pendapatan melungguk, maka boleh diadakan pemotongan atas pensiun perimbangan tersebut pada pasal 40 dan atas uang-tunggu tersebut pada pasal 41, seperti telah disetudjui pada peraturan kedudukan pegawai sipil.

Pasal 46.

1. Ketjuali jang ditetapkan pada ajat kedua maka mereka jang karena peraturan ini mendapat pensiun jang berimbangan atau uang-tunggu, dapat diwadjibkan menerima pekerdjaan preman jang lajak.

2. Jang ditetapkan pada ajat 1 tidak berlaku atas mereka jang telah berusia 55 tahun.

Pasal 47.

1. Pada saat penjerahan kedaulatan maka segala pegawai sipil, baik jang dimiliterisir ataupun tidak dan jang masuk bilangan Departement van Oorlog, pindah berdjabatan Republik Indonesia Serikat, berdasar jang telah disetudjui tentang pegawai pemerintah jang bekerdja pada departemen sipil.

2. Akan tetapi selama penjusunan-kembali pegawai-pegawai itu bilamana perlu akan meneruskan pekerdjaanja dalam susunan jang ada.

3. Pegawai-pegawai jang dimiliterisir akan didemiliterisir setjepat mungkin, selambat-lambatnja mendjelang saat memangku djabatan Republik Indonesia Serikat. Hingga saat mereka didemiliterisir pegawai itu tetap dibawah aturan-aturan tentang hukum-pidana formil dan meteriel dan hukum-tatatertib jang berlaku atasnja sebelum penjerahan kedaulatan.

BAB VI.

PENJERAHAN BARANG BERGERAK DAN BARANG TETAP JANG DIPAKAI OLEH KONINKLIJK NEDERLANDS-INDONESISCH LEGER.

Pasal 48.

Dengan permusjawaratan bersama antara Komandan angkatan Nederland di Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat akan dirantjang rentjana penjerahan barang bergerak dan barang tetap jang dipakai oleh Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger.

Pasal 49.

Pada merantjangkan rentjana itu harus diperhatikan:

a. keamanan angkatan di kedua belah pihak;

b. tugas-kewadjiban jang akan dipenuhi oleh angkatan itu;

c. tudjuan jang hendak ditjapai ialah bahwa semua barang bergerak dan barang tetap, jang dipakai oleh Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger diserahkan berangsur-angsur, sehingga pada achir masa penjusunan-kembali Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger segala barang itu selesai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.

Pasal 50.

Hal mendjalankan rentjana tersebut pada pasal 48 itu diselenggarakan oleh Komandan angkatan Nederland di Indonesia dan komandan angkatan Republik Indonesia Serikat bersama-sama.

Komandan angkatan Nederland di Indonesia menanggung djawab segala barang bergerak dan barang tetap jang dipakai oleh Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger sampai pada waktu penjerahannja.

BAB VII

KEUANGAN.

Pasal 51.

1. Biaja Koninklijke Landmacht di Indonesia sesudah penjerahan kedaulatan mendjadi tanggungan Keradjaan Nederland.
2. Berkala-kala Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan menjediakan valuta Indonesia jang perlu untuk membajar gadji dan keperluan lain-lain Koninklijke Landmacht kepada Komandan angkatan darat Nederland di Indonesia atau pembesar jang ditundjukkannja; pun Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan mentjukupkan sjarat-sjarat untuk makanan, pemondokan, pakaian dan keperluan lain-lain Koninklijke Landmacht.

Pembelandjaannja itu nanti akan diselesaikan antara Keradjaan Nederland dan Republik Indonesia Serikat.

Pasal 52.

Djika dan sekadar satuan-satuan Koninklijke Landmacht dan Angkatan Udara (Luchtstrijdkrachten) mendjalankan pekerdjaan untuk Pemerintah Republik Indonesia Serikat atas permintaanja, maka biaja satuan-satuan itu selama masa perkerdjaannja itu ditanggung oleh Republik Indonesia Serikat menurut peraturan jang sekiranja mungkin ditetapkan lebih dahulu.

Pasal 53.

Djikalau dan sekadar alat-alat Koninklijke Landmacht dan Angkatan Udara diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat, atas permintaan pembesar-pembesar jang ditundjukkan untuk itu oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat, maka haruslah pembajarannja ditetapkan dengan permusjawaratan jang sekiranja mungkin terdjadi lebih dahulu.

Pasal 54.

1. Biaja Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger selama masa sedjak saat penjerahan kedaulatan sampai kesudahan penjusunan kembali dibajar oleh Republik Indonesia Serikat.

2. Ongkos-ongkos pensiun, uang-tunggu, bajaran sekaligus dan lain-lain aturan sosial untuk bekas pegawai dan pegawai Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger mendjadi tanggungan Republik Indonesia Serikat. Sekadar pegawai-pegawai Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger pindah berdjabatan pada djabatan negeri Nederland, maka karena itu akan diadakan penjelesaian antara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland menurut peraturan jang akan diadakan tentang hak-hak jang sudah diperoleh pegawai itu. Jang ditetapkan pada ajat ini tidak berlaku atas anggota-anggota Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger jang sesudah Maret 1942 masuk dinas Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger dan jang tidak mendjadi warganegara Indonesia sebelum kesudahan penjusunan-kembali. Biaja aturan-aturan sosial untuk anggota-anggota Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger itu akan mendjadi tanggungan negeri Belanda.

3. Selama masa penjusunan-kembali maka berkala-kala Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan menjediakan kepada Komandan angkatan Nederland di Indonesia uang jang diperlukannja untuk melaksanakan penjusunan-kembali itu.

BAB VIII.

KETENTUAN-KETENTUAN PENDJALANKAN.

Pasal 55.

Pengawasan atas mendjalankan putusan-putusan Konperensi Medja Bundar dalam lapangan kemiliteran itu mulai pada hari penjerahan kedaulatan didjalankan setjara ditetapkan oleh kedua Pemerintah dengan permusjawaratan bersama-sama dengan tidak mengurangi jang ditentukan tentang pengawasan umum atas pelaksanaan segala persetudjuan jang tertjapai di Konperensi Medja Bundar.

Pasal 56.

Antara pembesar-pembesar militer Republik Indonesia Serikat dan Nederland jang bersangkutan akan diadakan kerdjasama berhubung dengan penglaksanaan persetudjuan ini, sehingga pastilah penepatan persetudjuan ini dalam lapangan teknik-militer jang tepat pada waktunja lagi sempurna. Dengan maksud itu mereka memakai opsir-opsir penghubung.

III.

Peraturan-peraturan tentang angkatan udara di Indonesia dibawah pimpinan Nederland sesudah penjerahan kedaulatan.

Pasal 1.

Disebabkan penjerahan kedaulatan maka keamanan di Indonesia diudara semata-mata atas tanggungan Republik Indonesia Serikat.

Pasal 2.

Djadi karena pasal 1 tadi kewadjiban mendjaga keamanan diudara dalam arti kemiliteran ialah kewadjiban Angkatan Udara Republik Indonesia Serikat.

Pasal 3.

Angkatan Udara jang dibawah perintah Nederland sebagai alat Belanda tidak akan berkewadjiban Belanda lagi di Indonesia; karena itulah angkatan udara tersebut akan ditarik kembali dari Indonesia.

Pasal 4.

Pemerintah Nederland bersedia atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia Serikat memberi bantuan berupa memperbantukan pegawai-pegawai dan mempersediakan alat-alat, bilamana Republik Indonesia Serikat belum tjukup sanggup memenuhi tugas-kewadjibannja dengan alat-alat sendiri. Bantuan itu berachir bersusut.

Pasal 5.

Pemerintah Belanda bersedia atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia Serikat memberi bantuan — berupa utusan sebagai bagian pada Missi Militer Nederland — pada pembangunan Angkatan Udara Republik Indonesia Serikat, sehingga Republik Indonesia Serikat dapat memennuhi tugas-kewadjibannja dengan alat-alat sendiri dengan sesegera-segeranja.

Pasal 6.

Bantuan termaksud pada pasal 4 dan 5 akan dapat diberi berupa:

a. membantu pada pembangunan dan pelatihan Angkatan Udara Republik Indonesia Serikat;

b. memberi kesempatan akan dan pertolongan pada pembelian, pemeliharaan dan pembetulan alat-alat;

c. pegawai untuk pimpinan sekalian lalulintas (airtraffic control) di lapangan-lapangan terbang jang lagi akan ditundjukkan;

d. mendjalankan tugas-kewadjiban chusus.

Pasal 7.

Semua ketentuan tentang memberi bantuan termaksud pada pasal 4 dan 5 jang berlaku atas angkatan jang angkatan udara masuk bagiannja, sedapat mungkin akan berlaku sedemikian itu pula atas angkatan udara itu.

Pasal 8.

Semua ketentuan tentang hal menjusun kembali dan menarik kembali angkatan jang angkatan udara masuk bagiannja, sedapat mungkin akan berlaku sedemikian itu pula atas angkatan udara itu, sekadar tidak ketentuan-ketentuan tadi harus dilaini berhubung dengan kedudukan tegak-sendiri Angkatan Udara Republik Indonesia Serikat dan dengan pertalian organik bagian-bagian Angkatan Udara Nederland di Indonesia dengan Militaire Luchtvaart Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger.

Akan diichtiarkan supaja penjusunan-kembali angkatan udara itu diselesaikan didalam waktu enam bulan sesudah penjerahan kedaulatan.

Pasal 9.

Keamanan sekalian pegawai Belanda jang bekerdja dipangkalan-pangkalan penerbangan dibawah komando Republik Indonesia Serikat ditanggungdjawab Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Pasal 10.

Didalam waktu tiga bulan sesudah penjerahan kedaulatan maka Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan memberitahukan kepada Pemerintah Nederland berapa banjak tenaga dan tenaga apakah dari Angkatan Udara Nederland jang dianggapnja perlu untuk mendjalankan tugas-kewadjiban tersebut pada pasal 4, 5 dan 6.

Pasal 11.

Semua ketentuan tentang menerima pemindahan pegawai dan alat-alat angkatan jang angkatan udara masuk bagiannja, akan berlaku sedemikian itu pula atas angkatan itu.

Pada hal ini ditegaskan betapa pentingnja pekerdjaan untuk perhubungan lalulintas di udara (airtraffic service) dilapangan terbang jang akan dianggap perlu guna penerbangan sipil Republik Indonesia Serikat akan dilandjutkan hendaknja sebagaimana biasa menurut keperluan masa perdamaian.

Lagi harus diperhatikan bahwa penerimaan itu akan selesai didalam waktu tersebut pada pasal 8, alinea ke-2.

DELEGASI NEDERLAND PADA KONPERENSI MEDJA BUNDAR

Sekertariat

No. 875

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Kepada Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Ketua Delegasi Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal.

Tuan-tuan Ketua,

Dengan hormat saja permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar mentjatat bahwa Delegasi-delegasi pada Konperensi telah menjetudjui sebagai berikut.

Kalimat pada pasal 2 Rantjangan Piagam Penjerahan Kedaulatan jang bunjinja: „status quo keresidenan Irian (Nieuw-Guinea) tetap berlaku" berarti: „dengan melandjutkan kekuasaan Pemerintah Keradjaan Nederland atas keresidenan Irian (Nieuw-Guinea)".

Saja harap sudilah Paduka Jang Mulia mempermaklumkan kepada saja, apakah Paduka Jang Mulia dapat menjetudjui jang diatas tadi.

Dengan taklim,

J. H. VAN MAARSEVEEN,

Ketua Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar.

DELEGASI REPUBLIK INDONESIA

DELEGASI P.P.F.

No. 2/E.L.

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Tuan Ketua,

Dengan hormat kami permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa surat Paduka Jang Mulia sudah kami terima; kami beritahukan bahwa Delegasi-delegasi Republik Indonesia dan Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal pada Konperensi Medja Bundar mentjatat bahwa Delegasi-delegasi pada Konperensi telah menjetudjui sebagai berikut.

Kalimat pada pasal 2 Rantjangan Piagam Penjerahan Kedaulatan jang bunjinja: „status quo keresidenan Irian (Nieuw-Guinea) tetap berlaku" berarti: „dengan melandjutkan kekuasaan Pemerintah Keradjaan Nederland atas keresidenan Irian (Nieuw-Guinea)".

Dengan taklim,

MOHAMMAD HATTA,

Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Konperensi Medja Bundar.

HAMID,

Ketua Delegasi P.P.F. pada Konperensi Medja Bundar.

Kepada Ketua Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar di 's-Gravenhage.

DELEGASI NEDERLAND PADA KONPERENSI MEDJA BUNDAR

Sekertariat

No. 871

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Kepada Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Ketua Delegasi Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal.

Tuan-tuan Ketua,

Dengan hormat saja permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar berpendirian bahwa Delegasi-delegasi pada Konperensi telah menjetudjui sebagai berikut.

Nederland boleh bertindak untuk dan atas nama Keradjaan Nederland sebagai peserta Uni, djika permusjawaratan landjutan dengan Suriname dan Antillen Nederland menghasilkan jang demikian.

Status Keradjaan Nederland sebagai peserta Uni oleh karena itu tidak akan tersinggung.

Saja harap sudilah Paduka Jang Mulia mempermaklumkan kepada saja, apakah Paduka Jang Mulia menjetudjui jang diatas tadi.

Dengan taklim,

J. H. VAN MAARSEVEEN,

Ketua Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar.

DELEGASI REPUBLIK INDONESIA

DELEGASI P.P.F.

No. 5/E.L.

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Tuan Ketua,

Dengan hormat kami permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa surat Paduka Jang Mulia sudah kami terima; kami beritahukan bahwa Delegasi-delegasi Republik Indonesia dan Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal pada Konperensi Medja Bundar berpendirian bahwa Delegasi-delegasi pada Konperensi telah menjetudjui sebagai berikut.

Nederland boleh bertindak untuk dan atas nama Keradjaan Nederland sebagai peserta Uni, djika permusjawaratan landjutan dengan Suriname dan Antillen Nederland menghasilkan jang demikian.

Status Keradjaan Nederland sebagai peserta Uni oleh karena itu tidak akan tersinggung.

Dengan taklim.

MOHAMMAD HATTA,
Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Konperensi Medja Bundar.

HAMID,
Ketua Delegasi P.P.F. pada Konperensi Medja Bundar.

Kepada Ketua Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar di 's-Gravenhage.

DELEGASI NEDERLAND PADA KONPERENSI MEDJA BUNDAR

Sekertariat

No. 844

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Kepada Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Ketua Delegasi Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal.

Tuan-tuan Ketua,

Dengan hormat saja permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar berpendirian bahwa Delegasi-delegasi pada Konperensi telah menjetudjui sebagai berikut.

Pemerintah Nederland dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan permusjawaratan bersama akan menetapkan aturan-aturan hal mentjari kuburan mereka jang gugur, demikian pula hal menggali, mengidentipikasi, mendaftarkan dan menanam kembali djenazah-djenazah mereka jang gugur itu.

Dengan permusjawaratan bersama akan ditetapkan pula aturan-aturan tentang mengadakan, menjelenggarakan dan memelihara taman bahagia Peutjut di Kuta Radja dan taman-taman bahagia jang sekarang sedang diurus atau diadakan oleh „Legergravendienst" di Indonesia.

Dengan taklim,

J. H. VAN MAARSEVEEN,

Ketua Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar.

DELEGASI REPUBLIK INDONESIA

DELEGASI P.P.F.

No. 10/E.L.

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Tuan Ketua.

Dengan hormat kami permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa Delegasi-delegasi Indonesia pada Konperensi Medja Bundar berpendirian bahwa Delegasi-delegasi pada Konperensi telah menjetudjui sebagai berikut.

Pemerintah Nederland dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan permusjawaratan bersama akan menetapkan aturan-aturan hal mentjari kuburan mereka jang gugur, demikian pula hal menggali, mengidentipikasi, mendaftarkan dan menanam kembali djenazah-djenazah mereka jang gugur itu.

Dengan permusjawaratan bersama akan ditetapkan pula aturan-aturan tentang mengadakan, menjelenggarakan dan memelihara taman bahagia Peutjut di Kuta Radja dan taman-taman bahagia jang sekarang sedang diurus atau diadakan oleh „Legergravendienst" di Indonesia.

Dengan taklim,

MOHAMMAD HATTA,

Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Konperensi Medja Bundar.

HAMID,

Ketua Delegasi P.P.F. pada Konperensi Medja Bundar.

Kepada Ketua Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar di 's-Gravenhage.

DELEGASI NEDERLAND PADA
KONPERENSI MEDJA BUNDAR

Sekertariat

No. 850

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Kepada Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Ketua Delegasi Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal.

Tuan-tuan Ketua,

Dengan hormat saja permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar berpendirian bahwa Delegasi-delegasi pada Konperensi telah menjetudjui sebagai berikut:

a. Baru sesudah penjerahan kedaulatan maka isi-susunan missi militer jang akan ditukar peserta Uni Nederland-Indonesia dan tugas-kewadjiban missi itu dengan permusjawaratan bersama akan ditentukan oleh kedua Pemerintah, sesuai dengan pasal 7 rantjangan Persetudjuan untuk melaksanakan pasal-pasal 2 dan 21 Statut-Uni jang dilampirkan pada rantjangan Statut ini.

b. Tetapi pada waktu penjerahan kedaulatan itu mulai berlaku, sebuah missi militer Nederland akan bekerdjalah di Indonesia, jang akan berkewadjiban membantu hal membangun dan melatih angkatan Republik Indonesia Serikat serta pula memberi nasehat tentang soal-soal kemiliteran.

c. Berhubung dengan jang telah disetudjui pada *b* dan sambil menunggu aturan termaksud pada *a*, maka Panitia Urusan Kemiliteran pada Konperensi Medja Bundar telah merentjanakan sebuah rantjangan persetudjuan Missi Militer sebagaimana termaktub dibelakang ini. Rantjangan itu akan diturut oleh kedua belah pihak sampai aturan termaksud pada *a* akan terdjadi sudah.

RANTJANGAN RENTJANA-PERSETUDJUAN MISSI MILITER.

BAB I.

KEWADJIBAN DAN MASA.

Pasal 1.

Kewadjiban Missi Militer Nederland ialah memberi bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada pembangunan dan pelatihan balatentara Republik Indonesia Serikat serta pula memberi nasehat tentang soal-soal militer.

Pasal 2.

Persetudjuan ini diadakan untuk masa tiga tahun lamanja, terhitung sedjak saat persetudjuan ini ditandatangani, asal tidak disudahi lebih dahulu ataupun dilandjutkan menurut aturan-aturan termaktub dibawah ini.

Pasal 3.

Sekurang-kurangnja setahun sebelum berachirnja masa tersebut pada pasal 2 kedua Pemerintah bermusjawarat hal melandjutkan masa-tinggal ataupun hal mengubah isi-susunan dan tugas-kewadjiban missi itu djika sekiranja dipandang perlu.

Pasal 4.

Persetudjuan ini dapat dipermaklumkan penghentiannja sebelum berachirnja masa tersebut pada pasal 2 ataupun sebelum berachirnja masa-landjutan jang disetudjui menrurut pasal 3, dengan pemberitahuan dengan surat oleh salah satu dari pada kedua Pemerintah, seraja diperhatikan waktu penghentian enam bulan lamanja.

Pasal 5.

Atas inisiatip salah satu dari pada kedua Pemerintah maka persetudjuan ini dapat disudahi dengan segera lagi dengan tidak bersjarat, apabila salah satu dari pada kedua Pemerintah terlibat dalam kerusuhan dalam negeri atau permusuhan luar negeri maupun karena kepentingan umum bagi Republik Indonesia Serikat atau bagi Keradjaan Nederland.

BAB II.

ISI-SUSUNAN.

Pasal 6.

Missi Militer Nederland merupakan kesatuan bulat dan meliputi bagian angkatan laut, bagian angkatan darat dan bagian angkatan udara.

Pasal 7.

Pemerintah Republik Indonesia Serikat mempermaklumkan kehendaknja kepada Pemerintah Karadjaan Nederland tentang isi-susunan Missi Militer, ja'ni berhubungan dengan tugas-kewadjiban jang akan didjalankannja; setelah itu maka isi-susunan itu akan ditetapkan oleh kedua Pemerintah dengan permusjawaratan bersama.

Pasal 8.

Isi-susunan Missi Militer tidak akan diubah melainkan dengan djalan permusjawaratan kedua Pemerintah.

Pasal 9.

Tiap-tiap anggota Missi Militer pada setiap waktu dapat diperhentikan dari keanggotaannja oleh Pemerintah Keradjaan Nederland, sedangkan Pemerintah Keradjaan Nederland menanggung akan mengangkat anggota pengganti.

BAB III.

PEKERDJAAN DAN TINGKAT-TINGKAT (RANGEN).

Pasal 10.

Pegawai Missi Militer itu mendjalankan suruhan jang tentang sifatnja dan tjara mendjalankannja sudah diperoleh persetudjuan antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat dan Kepala Missi Militer.

Pasal 11.

Pokok-pokok jang mungkin ternjata atau jang boleh diduga bersifat politik akan dipermusjawaratkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Keradjaan Nederland.

Pasal 12.

Tiap-tiap anggota Missi akan melakukan kewadjibannja pada Missi itu dengan sama tingkatnja sebagaimana jang didudukinja pada Tentara Keradjaan Nederland dan akan memakai uniform (pakaian militer) Belanda dengan tanda-tandanja jang telah ditentukan untuk itu.

Pasal 13.

Anggota-anggota Missi tetaplah pegawai balatentara Nederland dan karena itulah tetap terikat pada kewadjibannja terhadap Keradjaan Nederland.

Pasal 14.

Anggota-anggota Missi Militer tengah melakukan kewadjibannja harus tunduk pada petundjuk-petundjuk dan aturan-aturan pembesar-pembesar militer Republik Indonesia Serikat jang berkuasa masing-masing atas angkatan laut, angkatan darat dan angkatan udara dan dengan demikian bertanggung djawab kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat, dengan perantaraan Kepada Missi Militer.

Pasal 15.

Anggota-anggota Missi Militer sedapat-dapatnja akan disusun mendjadi golongan-golongan.

Pembesar-pembesar militer Republik Indonesia Serikat jang berkuasa akan bermusjawaratan dengan opsir tertinggi atau jang tertua pada tingkatnja dari tiap-tiap golongan tentang petundjuk-petundjuk dan aturan-aturan kadar melakukan kewadjibannja.

Pasal 16.

Anggota Missi Militer boleh menurut segala kehormatan dan kemuliaan chusus jang menurut undang-undang dan peraturan-peraturan Republik Indonesia Serikat diberikan kepada pegawai jang bertingkat sama.

Pasal 17.

Atas orang-orang militer pada Missi Militer tersebut berlakulah hukum-pidana militer Belanda formil dan materiel, hukum-tatatertib militer Belanda serta pula hukum-pidana umum Indonesia jang materiel sekadar hukum-pidana militer tersebut tidak mempunjai aturan sendiri. Hukum-tatatertib militer didjalankan oleh atau atas nama Kepala Missi Militer.

Kepada Pembesar-pembesar Indonesia akan diberitahukan tjara bagaimanakah diselesaikan kesalahan besar-besar jang dilakukan oleh militer tersebut bila kesalahan itu mengenai kepentingan Republik Indonesia Serikat atau kaulanegaranja.

Pasal 18.

Kepala Missi Militer dan beberapa anggota missi itu jang ditundjuk setelah dipermusjawaratkan dengan Pemerintah Republik Indonesia Serikat diberi berimmunitet diplomasi.

BAB IV.

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI KEUANGAN DAN TATAUSAHA.

Pasal 19.

1. Anggota Missi Militer masuk bilangan urusan keuangan dan tatausaha negeri Nederland.
2. Biaja Missi disusun menurut pasal 6, 7, 8 dan 9 itu dan ongkos-ongkos pekerdjaan jang didjalankannja menurut pasal 10 dan 11 itu mendjadi tanggungan Republik Indonesia Serikat.
3. Berkala-kala Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan menjediakan kepada Kepala Missi Militer Nederland uang jang diperlukannja berdasarkan anggaran-kas tahunan jang dibuat Kepala itu serta disahkan Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Deviezen jang perlu guna belandja Missi itu disediakan djuga oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan berkala-kala dan berdasarkan anggaran-deviezen tahunan jang dibuat Kepala Missi itu serta disahkan Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Djikalau ternjata perlu maka bolehlah Kepala Missi itu mengusulkan perubahan anggaran-kas ataupun anggaran-deviezen.

Pasal 20.

1. Keadaan keuangan pegawai Missi Militer akan diatur menurut peraturan-peraturan Belanda. Sekadar peraturan-peraturan itu terutama mengenai pekerdjaan militer-militer Belanda pada Missi Militer Nederland, maka peraturan-peraturan itu akan dilandjutkan ataupun diadakan maupun diubah setelah dipermusjawaratkan dengan Republik Indonesia Serikat.

2. Pasal 19 ajat 2 terhadap gadji dan pendapatan lain mulai berlaku pada hari anggota Missi Militer berangkat dari Nederland dan akan landjut berlaku hingga pada hari kembalinja di Nederland setelah pekerdjaannja pada Missi Militer berachir sudah, dan sekiranja sesudah itu hingga saat berachir tiap-tiap perlop jang mendjadi hak anggota itu karena ia dipekerdjakan pada Missi Militer.

3. Ajat 2 pasal 19 akan berlaku pula akan biaja pengangkutan pegawai serta keluarganja dari Nederland ke Indonesia pergi pulang.

4. Biaja perdjalanan naik kapal dan kapal-udara Koninklijke Marine tidak akan ditanggungkan.

Pasal 21.

1. Anggota-anggota Missi tidak akan kena padjak Republik Indonesia Serikat ialah menurut peraturan jang akan disusun oleh kedua peserta sesuai dengan jang lazim dipakai dalam perhubungan internasional.

2. Peraturan jang sedemikian itu akan diadakan pula tentang bea masuk-keluar serta padjak dan tjukai lainnja jang dikenakan pada barang-barang tertentu teruntuk bagi atau sedang dipakai pada Missi itu.

3. Apabila seorang anggota Missi meninggal dunia, maka pewarisannja dari sudut padjak akan diatur seolah-olah ia meninggal dunia di Nederland.

Pasal 22.

Pengganti ongkos djalan dan penginapan waktu perdjalanan dinas didalam lingkungan daerah Republik Indonesia Serikat akan diberi oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Perdjalanan itu harus dilakukan menurut peraturan akomodasi jang berlaku djuga atas kaum militer jang berdjabatan pada Republik Indonesia Serikat.

Pasal 23.

Apabila seorang anggota Missi Militer atau seorang dari pada keluarganja meninggal dunia dan kaum kerabatnja menghendaki supaja djenazah itu diangkut ke Nederland, maka Pemerintah Indonesia Serikat akan memberi bantuannja guna pengangkutan itu dan akan menanggung ongkosnja.

BAB V.

KETENTUAN CHUSUS.

Pasal 24.

Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan memberi kelonggaran jang memadai kepada anggota Missi Militer.

Pasal 25.

Apabila pada persetudjuan ini disebut perkataan keluarga maka jang dimaksud ialah anak-isteri seorang anggota.

Pasal 26.

Anggota Missi Militer itu berhak mendapat perlop sebulan setahun.

Bagian perlop jang tidak dipakai akan ditambahkan pada perlop kudian tahun demi tahun selama anggota itu berdjabatan pada Missi Militer.

Ongkos perdjalanan selama perlop tidaklah dipikul oleh Republik Indonesia Serikat, dengan tidak dikurangi kelonggaran-kelonggaran umum hal memakai alat-pengangkutan jang berlaku atas kaum militer.

Pasal 27.

Kepala Missi Militer akan memberikan perlop tersebut pada pasal 26 sambil memperhatikan kepentingan Republik Indonesia Serikat.

Pasal 28.

Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan mengusahakan pemeliharaan kesehatan jang lengkap lagi memadai bagi anggota Missi Militer serta keluarganja.

Pasal 29.

Anggota Missi Militer jang sementara waktu jang agak lama tidak dapat melakukan kewadjibannja karena kurang sehat badannja akan diganti.

Dengan taklim,

J. H. VAN MAARSEVEEN,

Ketua Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar.

DELEGASI
REPUBLIK INDONESIA

DELEGASI
P.P.F.

No. 11E./L.

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Kepada Ketua Delegasi Nederland pada
Konperensi Medja Bundar di 's-Gravenhage.

Tuan Ketua,

Dengan hormat kami permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa Delegasi-delegasi Indonesia pada Konperensi Medja Bundar berpendirian bahwa Delegasi-delegasi pada Konperensi telah menjetudjui sebagai berikut:

a. Baru sesudah penjerahan kedaulatan maka isi-susunan missi militer jang akan ditukar peserta Uni Nederland-Indonesia dan tugas-kewadjiban missi itu dengan permusjawaratan bersama akan ditentukan oleh kedua Pemerintah, sesuai dengan pasal 7 rantjangan Persetudjuan untuk melaksanakan pasal-pasal 2 dan 21 Statut-Uni jang dilampirkan pada rantjangan Statut itu.

b. Tetapi pada waktu penjerahan kedaulatan itu mulai berlaku, sebuah missi militer Nederland akan bekerdjalah di Indonesia, jang akan berkewadjiban membantu hal membangun dan melatih angkatan Republik Indonesia Serikat serta pula memberi nasehat tentang soal-soal kemiliteran.

c. Berhubung dengan jang telah disetudjui pada *b* dan sambil menunggu aturan termaksud pada *a*, maka Panitia Urusan Kemiliteran pada Konperensi Medja Bundar telah merentjanakan sebuah rantjangan persetudjuan Missi Militer sebagaimana termaktub dibelakang ini. Rantjangan itu akan diturut oleh kedua belah pihak sampai aturan termaksud pada *a* akan terdjadi sudah.

RANTJANGAN RENTJANA-PERSETUDJUAN MISSI MILITER.

BAB I.

KEWADJIBAN DAN MASA.

Pasal 1.

Kewadjiban Missi Militer Nederland ialah memberi bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada pembangunan dan pelatihan balatentara Republik Indonesia Serikat serta pula memberi nasehat tentang soal-soal militer.

Pasal 2.

Persetudjuan ini diadakan untuk masa tiga tahun lamanja, terhitung sedjak saat persetudjuan ini ditandatangani, asal tidak disudahi lebih dahulu ataupun dilandjutkan menurut aturan-aturan termaktub dibawah ini.

Pasal 3.

Sekurang-kurangnja setahun sebelum berachirnja masa tersebut pada pasal 2 kedua Pemerintah bermusjawarat hal melandjutkan masa-tinggal ataupun hal mengubah isi-susunan dan tugas-kewadjiban missi itu djika sekiranja dipandang perlu.

Pasal 4.

Persetudjuan ini dapat dipermaklumkan penghentiannja sebelum berachirnja masa tersebut pada pasal 2 ataupun sebelum berachirnja masa-landjutan jang disetudjui menurut pasal 3, dengan pemberitahuan dengan surat oleh salah satu dari pada kedua Pemerintah, seraja diperhatikan waktu penghentian enam bulan lamanja.

Pasal 5.

Atas inisiatip salah satu dari pada kedua Pemerintah maka persetudjuan ini dapat disudahi dengan segera lagi dengan tidak bersjarat, apabila salah satu dari pada kedua Pemerintah terlibat dalam kerusuhan dalam negeri atau permusuhan luar negeri maupun karena kepentingan umum bagi Republik Indonesia Serikat atau bagi Keradjaan Nederland.

BAB II.

ISI-SUSUNAN.

Pasal 6.

Missi Militer Nederland merupakan kesatuan bulat dan meliputi bagian angkatan laut, bagian angkatan darat dan bagian angkatan udara.

Pasal 7.

Pemerintah Republik Indonesia Serikat mempermaklumkan kehendaknja kepada Pemerintah Keradjaan Nederland tentang isi-susunan Missi Militer, ja'ni berhubungan dengan tugas-kewadjiban jang akan didjalankannja; setelah itu maka isi-susunan itu akan ditetapkan oleh kedua Pemerintah dengan permusjawaratan bersama.

Pasal 8.

Isi-susunan Missi Militer tidak akan diubah melainkan dengan djalan permusjawaratan kedua Pemerintah.

Pasal 9.

Tiap-tiap anggota Missi Militer pada setiap waktu dapat diperhentikan dari keanggotaannja oleh Pemerintah Keradjaan Nederland, sedangkan Pemerintah Keradjaan Nederland menanggung akan mengangkat anggota pengganti.

BAB III.

PEKERDJAAN DAN TINGKAT-TINGKAT (RANGEN).

Pasal 10.

Pegawai Missi Militer itu mendjalankan suruhan jang tentang sifatnja dan tjara mendjalankannja sudah diperoleh persetudjuan antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat dan Kepala Missi Militer.

Pasal 11.

Pokok-pokok jang mungkin ternjata atau jang boleh diduga bersifat politik akan dipermusjawaratkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Keradjaan Nederland.

Pasal 12.

Tiap-tiap anggota Missi akan melakukan kewadjibannja pada Missi itu dengan sama tingkatnja sebagaimana jang didudukinja pada Tentara Keradjaan Nederland dan akan memakai uniform (pakaian militer) Belanda dengan tanda-tandanja jang telah ditentukan untuk itu.

Pasal 13.

Anggota-anggota Missi tetaplah pegawai balatentara Nederland dan karena itulah tetap terikat pada kewadjibannja terhadap Keradjaan Nederland.

Pasal 14.

Anggota-anggota Missi Militer tengah melakukan kewadjibannja harus tunduk pada petundjuk-petundjuk dan aturan-aturan pembesar-pembesar militer Republik Indonesia Serikat jang berkuasa masing-masing atas angkatan laut, angkatan darat dan angkatan udara dan dengan demikian bertanggung-djawab kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat, dengan perantaraan Kepada Missi Militer.

Pasal 15.

Anggota-anggota Missi Militer sedapat-dapatnja akan disusun mendjadi golongan-golongan.

Pembesar-pembesar militer Republik Indonesia Serikat jang berkuasa akan bermusjawaratan dengan opsir tertinggi atau jang tertua pada tingkatnja dari tiap-tiap golongan tentang petundjuk-petundjuk dan aturan-aturan kadar melakukan kewadjibannja.

Pasal 16.

Anggota Missi Militer boleh menuntut segala kehormatan dan kemuliaan chusus jang menurut undang-undang dan peraturan-peraturan Republik Indonesia Serikat diberikan kepada pegawai jang bertingkat sama.

Pasal 17.

Atas orang-orang militer pada Missi Militer tersebut berlakulah hukum-pidana militer Belanda formil dan materiel, hukum-tatatertib militer Belanda serta pula hukum-pidana umum Indonesia jang materiel sekadar hukum-pidana militer tersebut tidak mempunjai aturan sendiri. Hukum-tatatertib militer didjalankan oleh atau atas nama Kepala Missi Militer.

Kepada Pembesar-pembesar Indonesia akan diberitahukan tjara bagaimanakah diselesaikan kesalahan besar-besar jang dilakukan oleh militer tersebut bila kesalahan itu mengenai kepentingan Republik Indonesia Serikat atau kaulanegaranja.

Pasal 18.

Kepala Missi Militer dan beberapa anggota missi itu jang ditundjuk setelah dipermusjawaratkan dengan Pemerintah Republik Indonesia Serikat diberi berimmunitet diplomasi.

BAB IV.

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI KEUANGAN DAN TATAUSAHA.

Pasal 19.

1. Anggota Missi Militer masuk bilangan urusan keuangan dan tatausaha negeri Nederland.

2. Biaja Missi disusun menurut pasal 6, 7, 8 dan 9 itu dan ongkos-ongkos pekerdjaan jang didjalankannja menurut pasal 10 dan 11 itu mendjadi tanggungan Republik Indonesia Serikat.

3. Berkala-kala Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan menjediakan kepada Kepala Missi Militer Nederland uang jang diperlukannja berdasarkan anggaran-kas tahunan jang dibuat Kepala itu serta disahkan Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Deviezen jang perlu guna belandja Missi itu disediakan djuga oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan berkala-kala dan berdasarkan anggaran-deviezen tahunan jang dibuat Kepala Missi itu serta disahkan Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Djikalau ternjata perlu maka bolehlah Kepala Missi itu mengusulkan perubahan anggaran-kas ataupun anggaran-deviezen.

Pasal 20.

1. Keadaan keuangan pegawai Missi Militer akan diatur menurut peraturan-peraturan Belanda. Sekadar peraturan-peraturan itu terutama mengenai pekerdjaan militer-militer Belanda pada Missi Militer Nederland, maka peraturan-peraturan itu akan dilandjutkan ataupun diadakan maupun diubah setelah dipermusjawaratkan dengan Republik Indonesia Serikat.

2. Pasal 19 ajat 2 terhadap gadji dan pendapatan lain mulai berlaku pada hari anggota Missi Militer berangkat dari Nederland dan akan landjut berlaku hingga pada hari kembalinja di Nederland setelah pekerdjaannja pada Missi Militer berachir sudah, dan sekiranja sesudah itu hingga saat berachir tiap-tiap perlop jang mendjadi hak anggota itu karena ia dipekerdjakan pada Missi Militer.

3. Ajat 2 pasal 19 akan berlaku pula akan biaja pengangkutan pegawai serta keluarganja dari Nederland ke Indonesia pergi pulang.

4. Biaja perdjalanan naik kapal dan kapal-udara Koninklijke Marine tidak akan ditanggungkan.

Pasal 21.

1. Anggota-anggota Missi tidak akan kena padjak Republik Indonesia Serikat ialah menurut peraturan jang akan disusun oleh kedua peserta sesuai dengan jang lazim dipakai dalam perhubungan internasional.

2. Peraturan jang sedemikian itu akan diadakan pula tentang bea masuk-keluar serta padjak dan tjukai lainnja jang dikenakan pada barang-barang tertentu teruntuk bagi atau sedang dipakai pada Missi itu.

3. Apabila seorang anggota Missi meninggal dunia, maka pewarisannja dari sudut padjak akan diatur seolah-olah ia meninggal dunia di Nederland.

Pasal 22.

Pengganti ongkos djalan dan penginapan waktu perdjalanan dinas didalam lingkungan daerah Republik Indonesia Serikat akan diberi oleh Pemerintah Republik Indonesia Se-

rikat. Perdjalanan itu harus dilakukan menurut peraturan akomodasi jang berlaku djuga atas kaum militer jang berdjabatan pada Republik Indonesia Serikat.

Pasal 23.

Apabila seorang anggota Missi Militer atau seorang dari pada keluarganja meninggal dunia dan kaum kerabatnja mengehendaki supaja djenazah itu diangkut ke Nederland, maka Pemerintah Indonesia Serikat akan memberi bantuannja guna pengangkutan itu dan akan menanggung ongkosnja.

BAB V.

KETENTUAN CHUSUS.

Pasal 24.

Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan memberi kelonggaran jang memadai kepada anggota Missi Militer.

Pasal 25.

Apabila pada persetudjuan ini disebut perkataan keluarga maka jang dimaksud ialah anak-isteri seorang anggota.

Pasal 26.

Anggota Missi Militer itu berhak mendapat perlop sebulan setahun.

Bagian perlop jang tidak dipakai akan ditambahkan pada perlop kudian tahun demi tahun selama anggota itu berdjabatan pada Missi Militer.

Ongkos perdjalanan selama perlop tidaklah dipikul oleh Republik Indonesia Serikat, dengan tidak dikurangi kelonggaran-kelonggaran umum hal memakai alat-pengangkutan jang berlaku atas kaum militer.

Pasal 27.

Kepala Missi Militer akan memberikan perlop tersebut pada pasal 26 sambil memperhatikan kepentingan Republik Indonesia Serikat.

Pasal 28.

Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan mengusahakan pemeliharaan kesehatan jang lengkap lagi memadai bagi anggota Missi Militer serta keluarganja.

Pasal 29.

Anggota Missi Militer jang sementara waktu jang agak lama tidak dapat melakukan kewadjibannja karena kurang sehat badannja akan diganti.

MOHAMMAD HATTA,

Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Konperensi Medja Bundar.

HAMID,

Ketua Delegasi P.P.F. pada Konperensi Medja Bundar.

DELEGASI NEDERLAND PADA KONPERENSI MEDJA BUNDAR

Sekertariat

No. 848 's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Kepada Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Ketua Delegasi Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal.

Tuan-tuan Ketua,

Dengan hormat saja permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar berpendirian bahwa Delegasi-delegasi pada Konperensi telah menjetudjui sebagai berikut.

Berhubung dengan persetudjuan jang diadakan oleh kedua belah pihak dan jang antara lain-lain menentukan bahwa tempoh Koninklijke Marine akan selesai ditarik kembali dari Indonesia ditetapkan setahun lamanja maka Ketua-ketua kedua Delegasi Indonesia mengakui telah bermupakat dengan Ketua Delegasi Nederland bahwa Pemerintah Republik Indonesia Serikat sesudah penjerahan kedaulatan dengan segera akan berunding dengan Pemerintah Keradjaan Nederland tentang bantuan maritim jang akan diberikan oleh Nederland kepada Republik Indonesia Serikat, berdasarkan pasal 4 dan 5 rantjangan Persetudjuan untuk melaksanakan pasal 2 dan 21 Statut-Uni.

Delegasi Republik Indonesia dan delegasi Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal berkejakinan bahwa perundingan itu perlu diadakan. Njatalah bagi mereka karena alasan-alasan teknik bahwa Nederland tidak akan sanggup memberi bantuan tersebut pada pasal 3 rantjangan Persetudjuan untuk melaksanakan pasal 2 dan 21 Statut-Uni lebih dari setahun lamanja, djika perundingan tadi selambat-lambatnja empat bulan sesudah penjerahan kedaulatan itu tidak menghasilkan persetudjuan.

Dengan taklim,

J. H. VAN MAARSEVEEN,

Ketua Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar.

DELEGASI REPUBLIK INDONESIA

DELEGASI P.P.F.

No. 12 E./L.

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Tuan Ketua,

Dengan hormat kami permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa Delegasi-delegasi Indonesia pada Konperensi Medja Bundar berpendirian bahwa Delegasi-delegasi pada Konperensi telah menjetudjui sebagai berikut.

Berhubung dengan persetudjuan jang diadakan oleh kedua belah pihak dan jang antara lain-lain menentukan bahwa tempoh Koninklijke Marine akan selesai ditarik kembali dari Indonesia ditetapkan setahun lamanja maka Ketua-ketua kedua Delegasi Indonesia mengakui telah bermupakat dengan Ketua Delegasi Nederland bahwa Pemerintah Republik Indonesia Serikat sesudah penjerahan kedaulatan dengan segera akan berunding dengan Pemerintah Keradjaan Nederland tentang bantuan maritim jang akan diberikan oleh Nederland kepada Republik Indonesia Serikat, berdasarkan pasal 4 dan 5 rantjangan Persetudjuan untuk melaksanakan pasal 2 dan 21 Statut-Uni.

Delegasi Republik Indonesia dan delegasi Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal berkejakinan bahwa perundingan itu perlu diadakan. Njatalah bagi mereka karena alasan-alasan teknik bahwa Nederland tidak akan sanggup memberi bantuan tersebut pada pasal 3 rantjangan Persetudjuan untuk melaksanakan pasal 2 dan 21 Statut-Uni lebih dari setahun lamanja, djika perundingan tadi selambat-lambatnja empat bulan sesudah penjerahan kedaulatan itu tidak menghasilkan persetudjuan.

Dengan taklim,

MOHAMMAD HATTA,
Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Konperensi Medja Bundar.

HAMID,
Ketua Delegasi P.P.F. pada Konperensi Medja Bundar.

Kepada Ketua Delegasi Nederland
pada Konperensi Medja Bundar
di 's-Gravenhage.

DELEGASI NEDERLAND PADA KONPERENSI MEDJA BUNDAR

Sekertariat

No. 847

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Kepada Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Ketua Delegasi Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal.

Tuan-tuan Ketua,

Dengan hormat saja permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa pada membuat Rantjangan Persetudjuan Keuangan dan Perekonomian tertjapai djuga kata-sepakat tentang enam pokok jang dibawah ini:

1. Pemerintah Republik Indonesia mengakui kedudukan chusus bekas pegawai Pemerintah Indonesia dan kerabat-kerabat jang ditinggalkan pegawai itu dan menerima kewadjiban melandjutkan perlakuan jang sekarang terhadap golongan-golongan itu sesuduh penjerahan kedaulatan.

Jang ditentukan pada alinea tadi mengandung djuga bahwa pembajaran pensiun bekas pegawai Pemerintah Indonesia dan pembajaran-pembajaran kepada kerabat-kerabat jang ditinggalkan pegawai itu, sekadar pegawai-pegawai itu ataupun kerabat jang ditinggalkannja bertempat-tinggal di Negeri Belanda dilakukan dengan uang negeri Belanda dengan pengartian bahwa selambat-lambatnja pada bulan Maret 1950 akan diadakan pembitjaraan untuk mentjapai penjelesaian jang berpadanan.

Tjara jang dilakukan sekarang akan dilandjutkan sampai persetudjuan telah tertjapai.

2. Djika Fonds Hal-uang Internasional sesudah penjerahan kedaulatan, tetapi sebelum Republik Indonesia Serikat mendapat keanggotaan Fonds itu, dengan langsung minta keterangan kepada Republik Indonesia Serikat atau djika Fonds itu hendak mengadakan pemeriksaan, maka Republik Indonesia Serikat akan memberi keterangan jang diminta itu

dan memperkenankan pemeriksaan jang dikehendaki djikalau dan sekadar perlu karena ketentuan-ketentuan-atjara jang berlaku tentang itu, ialah supaja boleh dipertimbangkan permintaan untuk mendapat keanggotaan Fonds itu.

3. Terhadap kepada kredit-HG telah disetudjui bahwa peraturan jang sekarang akan terus berlaku sampai diadakan peraturan baru dengan permupakatan antara kedua pihak. Kedua pihak akan bermusjawarat tentang hal itu selekas mungkin dan akan mengichtiarkan dengan sungguh-sungguh supaja hal itu diselesaikan sebelum ultimo Maret 1950.

4. Persetudjuan Pelajaran Umum termasuk djuga lampiran-lampiran pendjalankannja akan terus berlaku sampai 31 Maret 1950 dengan pengartian bahwa djika peraturan-peraturan jang berlaku sekarang menetapkan bahwa keputusan-keputusan dapat diambil oleh salah satu pihak pada sendirinja, maka keputusan-keputusan itu akan diambil oleh kedua belah pihak dengan kata sepakat. Pembitjaraan tentang perubahan-perubahan jang akan diadakan pada persetudjuan itu akan dilakukan selekas mungkin.

5. Djandji-djandji jang dibuat didalam lingkungan Badan Koordinasi Nederland-Indonesia dan jang bersifat teknik-deviezen — tentang itu lihatlah Bab XI, XIII dan XIV Ringkasan konklusi-konklusi Badan-Koordinasi, Sektor Keuangan jang dilampirkan disini — tetap berlaku selama djandji-djandji itu tidak diubah dengan permusjawaratan antara Nederland dan Republik Indonesia Serikat. Permusjawaratan itu akan dilakukan pada tribulan pertama tahun 1950.

6. Sesudah penjerahan kedaulatan akan didjadikan suatu alat pelaksanakan kerdjasama dilapangan politik dagang setjara praktis.

Saja harap sudilah Paduka Jang Mulia mempermaklumkan kepada saja, apakah Paduka Jang Mulia setudju dengan isi surat ini.

Dengan taklim,

J. H. VAN MAARSEVEEN,

Ketua Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar.

LAMPIRAN tersebut pada ajat 5 surat Ketua Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar tgl. 2 Nopember 1949, No. 847 serta ajat 5 surat Ketua Delegasi Republik Indonesia dan Ketua Delegasi Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal tgl. 2 Nopember 1949, No. 8/E.L.

Hoofdstukken XI, XIII en XIV van de Samenvatting van de Conclusies van het Coördinatie-College, Financiële Sector.

HOOFDSTUK XI.

DEVIEZENINGEZETENSCHAP EN DEVIEZENRECHTELIJK EIGENDOM VAN VERMOGENSWAARDEN.

Paragraaf 1.

Deviezeningezetenschap.

1. Onder „ingezetenen" wordt verstaan:

a. natuurlijke personen, die hun woonplaats in het binnenland hebben, dan wel gewoonlijk aldaar verblijven;

b. rechtspersonen en vennootschappen, die in het binnenland zijn gevestigd of worden bestuurd dan wel — in nader door De Nederlandsche Bank respectievelijk het Deviezeninstituut voor Indonesië te bepalen gevallen — aldaar kantoor houden;

c. filialen, bijkantoren en bedrijven in het binnenland van een niet-ingezetene, ongeacht of zij al dan niet rechtspersoonlijkheid bezitten.

2. Onder „niet-ingezetenen" wordt verstaan:

a. natuurlijke en rechtspersonen en vennootschappen, niet vallende onder de omschrijving „ingezetenen";

b. filialen, bijkantoren en bedrijven in het buitenland van een ingezetene, ongeacht of zij al dan niet rechtspersoonlijkheid bezitten, tenzij zij in het binnenland worden bestuurd.

3. Het deviezeningezetenschap van natuurlijke personen, woonachtig in Nederland respectievelijk Indonesië wordt als regel geacht te zijn verkregen of te zijn verloren gegaan na verblijf van 1 jaar in het binnenland respectievelijk het andere gebiedsdeel, tenzij reeds dadelijk of na enige tijd als zeker kan worden aangenomen, dat dit verblijf langer dan één jaar zal duren, in welk geval het ingezetenschap ingaat of eindigt op het moment, dat zulks als zeker wordt aangenomen. In twijfelgevallen zal De Nederlandsche Bank respectievelijk het Deviezeninstituut voor Indonesië zelfstandig een beslissing nemen ten aanzien van het ingezetenschap van personen afkomstig uit Indonesië respectievelijk Nederland, van welke beslissing beide instanties elkaar terstond mededeling zullen doen.

Paragraaf 2.

Beschikkingsrecht over vermogenswaarden luidende in Nederlands en Indonesisch courant.

1. Nederland en Indonesië zien af van vordering van niet-commerciële vermogenswaarden luidende in Indonesisch respectievelijk Nederlands courant.

2. Indonesië staat aan natuurlijke personen, deviezeningezetenen van Indonesië, toe te beschikken over de hun toebehorende vermogenswaarden in Nederland. Nederland zal zoveel mogelijk hieraan medewerken door het doen verlenen van de nodige vergunningen.

Paragraaf 3.

Deviezenrechtelijk eigendom van vermogenswaarden van filialen enz. in het andere gebiedsdeel.

1. Zonder ten aanzien van de vraag, welke vermogenswaarden als behorende aan de in het ene gebiedsdeel gevestigde filialen, bijkantoren of bedrijven van ingezetenen van het andere gebidsdeel dienen te worden beschouwd en derhalve tot de deviezenhuishouding van het ene gebiedsdeel dienen te worden gerekend, een principiële formule op te stellen, wordt om practische redenen de volgende werkbasis aanvaard:

a. als vermogenswaarden van een in Indonesië gevestigd filiaal bijkantoor of bedrijf van een ingezetene van Nederland worden beschouwd de per 10 Mei 1940 aan bedoeld

filiaal, bijkantoor of bedrijf voor de directe bedrijfsuitoefening ter beschikking staande vermogenswaarden, alsmede alle waarden welke sedertdien door deze bedrijfsuitoefening in Indonesië zijn of worden verkregen, voorzover niet deze vermogenswaarden in overeenstemming met de Indonesische deviezenvoorschriften ter beschikking van de ingezetene van Nederland zijn gesteld;

b. als vermogenswaarden van een in Nederland gevestigd filiaal, bijkantoor of bedrijf van een ingezetene van Indonesië worden beschouwd de per 10 Mei 1940 aan bedoeld filiaal, bijkantoor of bedrijf voor de directe bedrijfsuitoefening ter beschikking staande vermogenswaarden, alsmede alle waarden, welke sindsdien door deze bedrijfsuitoefening in Nederland zijn of worden verkregen, voorzover niet deze vermogenswaarden in overeenstemming met de Nederlandse deviezenvoorschriften ter beschikking van de ingezetene van Indonesië zijn gesteld.

2. Ingeval de toepassing van de onder 1 vermelde werkbasis tot aperte onbillijkheden zou leiden, zullen De Nederlandsche Bank en het Deviezeninstituut voor Indonesië in onderling overleg van geval tot geval een beslissing nemen.

Paragraaf 4.

Deviezenrechtelijk eigendom van vermogenswaarden en bedrijfsresultaten van filialen, bijkantoren enz. buiten Nederland en Indonesië.

1. Ten aanzien van de verdeling tussen Nederland en Indonesië van vermogenswaarden belegd in filialen en bijkantoren buiten deze gebiedsdelen, zomede van de netto bedrijfsresultaten in deviezen, die sedertdien uit deze beleggingen zijn voortgekomen, zal het in paragraaf 3 vastgelegde zogenaamde 10 Mei-criterium van kracht zijn. Deze regel valt te formuleren door in de in genoemde paragraaf 3 weergegeven conclusie onder lid 1, sub *a* en *b* achter „welke sedertdien door deze bedrijfsuitoefening in Indonesië (respectievelijk Nederland)" toe te voegen: „of in het buitenland".

2. Wanneer op grond van de in lid 1 vermelde werkbasis vastgesteld is, dat bepaalde zich in het buitenland bevinden-

de vermogenswaarden tot het Indonesische deviezenvermogen behoren, zal worden nagegaan, of er voor Nederland aanleiding bestaat, dat Indonesisch belang over te nemen tegen restitutie van de daarvoor uitgelegde deviezen c.q. de waarde der investatie. Deze aanleiding wordt verondersteld aanwezig te zijn, wanneer het object buiten de Indonesische economische sfeer is gelegen, ofschoon dit voor Nederland geenszins een verplichting tot overname inhoudt. Elk geval zal op zijn eigen mérites worden bezien. Indonesië is daarbij bereid om in nader overleg verrekening in vreemde valuta uit te stellen, indien de deviezenpositie van Nederland zulks wenselijk maakt.

Paragraaf 5.

Positie handelshuizen in Japan.

1. Er zal naar worden gestreefd dat de met de betrokken Amerikaanse autoriteiten te treffen regelingen ruimte laten voor eventuele vestiging van Nederlandse handelshuizen, al dan niet in het kader van een trustmaatschappij.

2. Op grond van het feit, dat de in Japan te vestigen handelshuizen feitelijk als aan- en verkoopkantoren van in Indonesië gevestigde handelshuizen moeten worden beschouwd, zullen voor zover ten behoeve van hun oprichting en instandhouding door Indonesië deviezen zijn verstrekt, deze huizen, zolang deze factoren gelden, tot het deviezenvermogen van Indonesië behoren.

HOOFDSTUK XIII.

FINANCIERING VAN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN IN INDONESIE DOOR NEDERLAND OF DOOR INDONESIE.

1. De financiering van Indonesische dochtermaatschappijen van Nederlandse ondernemingen dient achtereenvolgens op de volgende wijze te geschieden:

a. door aanwending van de saldi in Indonesië;

b. door financiering door Indonesische banken met korte bedrijfscredieten en met langere bedrijfscredieten tegen

in Indonesië aanwezig onderpand in de mate, waarin dit ook reeds vóór 1940 placht te geschieden en/of door transfer uit Nederland ten laste van de moedermaatschappijen.

2. Nederland zal van Overheidswege aan de uitvoering van deze bepaling steun verlenen door in voorkomende gevallen moedermaatschappijen, die niet bereid zijn tot investering over te gaan, daartoe aan te sporen.

3. In beginsel zal tegenover buitenlandse maatschappijen dezelfde als in lid 1 genoemde gedragslijn worden gevolgd.

4. Erkend wordt, dat in zeer bijzondere gevallen afwijkingen van de hoofdregel noodzakelijk kunnen zijn, met name indien de moedermaatschappij weigerachtig blijft te investeren en het betrokken bedrijf voor Indonesië van vitaal belang is.

HOOFDSTUK XIV.

EFFECTENVERKEER INDONESIE—NEDERLAND.

Paragraaf 1.

Obligaties met pari-clausule.

Wat betreft de mogelijkheid tot opzending naar Nederland van obligaties met pari-clausule is bepaald dat:

a. de nog niet uitbetaalde lossingen en achterstallige coupons uitsluitend in Indonesië betaalbaar zijn, terwijl de overmaking van deze gelden geschiedt binnen het kader van het transfer-schema;

b. met betrekking tot de nog aanwezige obligaties onderscheid wordt gemaakt tussen:

1. obligaties, die het eigendom zijn van niet-Indonesische deviezeningezetenen;
2. obligaties, die het eigendom zijn van Indonesische deviezeningezetenen;
3. obligaties, die het eigendom zijn van Indonesische deviezeningezetenen, rechtspersonen;

waarbij als regel is aanvaard, dat voor de opzending naar Nederland van de sub 1 en sub 2 bedoelde stukken onvoor-

waardelijke vergunning wordt verleend, van de sub 3 bedoelde stukken in het algemeen geen vergunning zal worden verleend.

Daarbij wordt aangetekend, dat genoemde faciliteit voor zover zij natuurlijke personen betreft, uitsluitend zal gelden voor de oorspronkelijke houders van de obligatiën.

Paragraaf 2.

Buitenlandse effecten van Indonesische ingezetenen.

1. Het is in het kader van de samenwerking tussen Nederland en Indonesië uitermate gewenst, dat de Nederlandse banken zoveel mogelijk medewerking verlenen aan de uitvoering van de Indonesische deviezenbepalingen, hetgeen o.a. inhoudt, dat bij het beschikken over buitenlandse effecten door een Indonesische ingezetene, de bank, waar deze effecten in depôt liggen, aan genoemd persoon vraagt de vergunning van het Deviezeninstituut voor Indonesië over te leggen.

2. Hoewel De Nederlandsche Bank de Nederlandse bankinstellingen niet tot deze medewerking kan verplichten, is zij bereid gevonden aan de Nederlandse bankinstellingen een mededeling hieromtrent te doen uitgaan. Mocht desondanks het nagestreefde doel niet worden bereikt, dan zal het Deviezeninstituut voor Indonesië tot concentrering van alle buitenlandse effecten van Indonesische ingezetenen ten name van deviezenbanken in Indonesië overgaan.

3. Bij verkoop van buitenlandse effecten, liggend in een depôt bij een bank in Nederland, door een Indonesisch ingezetene, zal de overdracht van de buitenlandse valuta door Nederland aan Indonesië plaats vinden tegen betaling door Indonesië ten laste van de F- respectievelijk C-rekening, zodat de Indonesische ingezetene afrekening in Nederlands courant ontvangt.

DELEGASI
REPUBLIK INDONESIA

DELEGASI
P.P.F.

No. 8/E.L.

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Tuan Ketua,

Dengan hormat kami permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa surat Paduka Jang Mulia tgl. 2 Nopember 1949, jang bunjinja sebagai berikut, sudah kami terima:

„Dengan hormat saja permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa pada membuat Rantjangan Persetudjuan Keuangan dan Perekonomion tertjapai djuga kata sepakat tentang enam pokok jang dibawah ini:

1. Pemerintah Republik Indonesia mengakui kedudukan chusus bekas pegawai Pemerintah Indonesia dan kerabat-kerabat jang ditinggalkan pegawai itu dan menerima kewadjiban melandjutkan perlakuan jang sekarang terhadap golongan-golongan itu sesudah penjerahan kedaulatan.

Jang ditentukan pada alinea tadi mengandung djuga bahwa pembajaran pensiun bekas pegawai Pemerintah Indonesia dan pembajaran-pembajaran kepada kerabat-kerabat jang ditinggalkan pegawai itu, sekadar pegawai-pegawai itu ataupun kerabat jang ditinggalkannja bertempat-tinggal di Negeri Belanda dilakukan dengan uang negeri Belanda dengan pengartian bahwa selambat-lambatnja pada bulan Maret 1950 akan diadakan pembitjaraan untuk mentjapai penjelesaian jang berpadanan.

Tjara jang dilakukan sekarang akan dilandjutkan sampai persetudjuan telah tertjapai.

2. Djika Fonds Hal-uang Internasional sesudah penjerahan kedaulatan, tetapi sebelum Republik Indonesia Serikat mendapat keanggotaan Fonds itu, dengan langsung minta keterangan kepada Republik Indonesia Serikat atau djika Fonds itu hendak mengadakan pemeriksaan, maka Republik Indonesia Serikat akan memberi keterangan jang diminta itu dan memperkenankan pemeriksaan jang dikehendaki djikalau dan sekadar perlu karena ketentuan-ketentuan-atjara jang berlaku tentang itu, ialah supaja boleh dipertimbangkan permintaan untuk mendapat keanggotaan Fonds itu.

3. Terhadap kepada kredit-HG telah disetudjui bahwa peraturan jang sekarang akan terus berlaku sampai diadakan peraturan baru dengan permupakatan antara kedua pihak. Kedua pihak akan bermusjawarat tentang hal itu selekas mungkin dan akan mengichtiarkan dengan sungguh-sungguh supaja hal itu diselesaikan sebelum ultimo Maret 1950.

4. Persetudjuan Pelajaran Umum termasuk djuga lampiran-lampiran pendjalankannja akan terus berlaku sampai 31 Maret 1950 dengan pengartian bahwa djika peraturan-peraturan jang berlaku sekarang menetapkan bahwa keputusan-keputusan dapat diambil oleh salah satu pihak pada sendirinja, maka keputusan-keputusan itu akan diambil oleh kedua belah pihak dengan kata sepakat. Pembitjaraan tentang perubahan-perubahan jang akan diadakan pada persetudjuan itu akan dilakukan selekas mungkin.

5. Djandji-djandji jang dibuat didalam lingkungan Badan Koordinasi Nederland-Indonesia dan jang bersifat teknik-deviezen — tentang itu lihatlah Bab XI, XIII dan XIV Ringkasan konklusi-konklusi Badan-Koordinasi, Sektor Keuangan jang dilampirkan disini — tetap berlaku selama djandji-djandji itu tidak diubah dengan permusjawaratan antara Nederland dan Republik Indonesia Serikat. Permusjawaratan itu akan dilakukan pada tribulan pertama tahun 1950.

6. Sesudah penjerahan kedaulatan akan didjadikan suatu alat pelaksanakan kerdjasama dilapangan politik dagang setjara praktis.

Saja harap sudilah Paduka Jang Mulia mempermaklumkan kepada saja, apakah Paduka Jang Mulia setudju dengan isi surat ini."

Kami permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa kami setudju dengan isi surat itu.

Dengan taklim,

MOHAMMAD HATTA,
Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Konperensi Medja Bundar.

HAMID,
Ketua Delegasi P.P.F. pada Konperensi Medja Bundar.

Kepada Ketua Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar di 's-Gravenhage.

DELEGASI NEDERLAND PADA KONPERENSI MEDJA BUNDAR

Sekertariat

No. 846

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Kepada Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Ketua Delegasi Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal.

Tuan-tuan Ketua,

Dengan hormat saja permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia perihal jang dibawah ini.

Pemerintah Nederland bersedia melepaskan persetudjuan timah-putih (tin pledge) jang diadakan antara badan-hukum Negara Nederland dan badan-hukum Indonesia. Berhubung dengan itu diusulkannja supaja sesudah penjerahan kedaulatan diadakan hendaknja sebuah peraturan untuk menghindarkan Nederland dari pada risiko garansi jang diberikannja guna hutang-hutang Indonesia. Pada peraturan itu antara lain-lain akan dimuatkan hendaknja bahwa krediteur-krediteur lain terhadap kepada djaminan pembajaran hutang-hutang jang diadakan Indonesia, tidak akan diberi kedudukan jang lebih baik dari pada kedudukan Nederland. Menurut pendapatnja, sebaiknjalah perundingan hal itu dengan selekas mungkin diadakan sesudah penjerahan kedaulatan, ja'ni dalam hubungan Uni.

Saja harap sudilah Paduka Jang Mulia mempermaklumkan kepada saja, apakah Paduka Jang Mulia setudju dengan jang diatas.

Dengan taklim,

J. H. Van Maarseveen,

Ketua Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar.

DELEGASI REPUBLIK INDONESIA

DELEGASI P.P.F.

No. 9/E.L.

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Tuan Ketua,

Dengan hormat kami permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa Delegasi kami merasa puas karena Pemerintah Nederland bersedia melepaskan persetudjuan timah-putih (tin pledge) jang diadakan antara badan-hukum Negara Nederland dan badan-hukum Indonesia.

Mereka setudju benar djikalau selekas mungkin sesudah penjerahan kedaulatan akan dimulai perundingan dalam hubungan Uni untuk menjelidiki dengan tjara bagaimanakah boleh diperkenankan agaknja kehendak Paduka Jang Mulia supaja Nederland terhindar dari pada risiko garansi jang diberikannja guna hutang-hutang Indonesia.

Kami setudju benar dengan pendapat bahwa krediteur-krediteur lain terhadap kepada djaminan pembajaran hutang-hutang jang diadakan atau jang akan diadakan Indonesia, tidak akan diberi kedudukan jang lebih baik dari pada kedudukan Nederland.

Kami harap mudah-mudahan dengan ini surat Paduka Jang Mulia hari ini kami djawab dengan memuaskan.

Dengan taklim,

MOHAMMAD HATTA,
Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Konperensi Medja Bundar.

HAMID,
Ketua Delegasi P.P.F. pada Konperensi Medja Bundar.

Kepada Ketua Delegasi Nederland
pada Konperensi Medja Bundar
di 's-Gravenhage.

DELEGASI NEDERLAND PADA KONPERENSI MEDJA BUNDAR

Sekertariat

No. 872

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Kepada Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Ketua Delegasi Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal.

Tuan-tuan Ketua,

Dengan hormat saja permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar berpendirian bahwa Delegasi-delegasi pada Konperensi telah setudju bahwa peserta Uni akan memperwadjibkan dirinja akan mengadakan permusjawaratan bersama sebelum memasukkan kedalam perundang-undangan kebangsaannja ketentuan-ketentuan jang karenanja boleh timbul perselisihan-perselisihan kebangsaan antara perundang-undangan mereka.

Saja harap sudilah Paduka Jang Mulia mempermaklumkan kepada saja, apakah Paduka Jang Mulia setudju dengan jang diatas.

Dengan taklim,

J. H. VAN MAARSEVEEN,

Ketua Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar.

DELEGASI REPUBLIK INDONESIA

DELEGASI P.P.F.

No. 4/E.L.

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Tuan Ketua,

Dengan hormat kami permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa surat Paduka Jang Mulia sudah kami terima; kami beritahukan bahwa Delegasi-delegasi Republik Indonesia dan Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal pada Konperensi Medja Bundar berpendirian bahwa Delegasi-delegasi pada Konperensi telah setudju bahwa peserta Uni memperwadjibkan dirinja akan mengadakan permusjawaratan bersama sebelum memasukkan kedalam perundang-undangan kebangsaannja ketentuan-ketentuan jang karenanja boleh timbul perselisihan-perselisihan kebangsaan antara perundang-undangan mereka.

Dengan taklim,

MOHAMMAD HATTA,
Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Konperensi Medja Bundar.

HAMID,
Ketua Delegasi P.P.F. pada Konperensi Medja Bundar.

Kepada Ketua Delegasi Nederland
pada Konperensi Medja Bundar
di 's-Gravenhage.

DELEGASI NEDERLAND PADA KONPERENSI MEDJA BUNDAR

Sekertariat

No. 876

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Kepada Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Ketua Delegasi Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal.

Tuan-tuan Ketua,

Dengan hormat saja permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar berpendirian bahwa Delegasi-delegasi pada Konperensi telah menjetudjui sebagai berikut.

Masing-masing peserta akan menetapkan pada perundang-undangan kebangsaannja sendiri bahwa djika warganegaranja masuk berdjabatan pada peserta jang lain atau pada suatu badan-hukum publik didalam lingkungan daerah-hukum peserta jang lain itu, tidaklah mereka akan kehilangan ataupun dikenakan pembatasan kebangsaannja.

Saja harap sudilah Paduka Jang Mulia mempermaklumkan kepada saja, apakah Paduka Jang Mulia menjetudjui jang diatas.

Dengan taklim,

J. H. VAN MAARSEVEEN,

Ketua Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar.

DELEGASI
REPUBLIK INDONESIA

DELEGASI
P.P.F.

No. 6/E.L.

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Tuan Ketua,

Dengan hormat kami permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa surat Paduka Jang Mulia sudah kami terima; kami beritahukan bahwa Delegasi-delegasi Republik Indonesia dan Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal pada Konperensi Medja Bundar berpendirian bahwa Delegasi-delegasi pada Konperensi telah menjetudjui sebagai berikut.

Masing-masing peserta akan menetapkan pada perundang-undangan kebangsaannja sendiri bahwa djika warganegaranja masuk berdjabatan pada peserta jang lain atau pada suatu badan-hukum publik didalam lingkungan daerah-hukum peserta jang lain itu, tidaklah mereka akan kehilangan ataupun dikenakan pembatasan kebangsaannja.

Dengan taklim,

MOHAMMAD HATTA,
Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Konperensi Medja Bundar.

HAMID,
Ketua Delegasi P.P.F. pada Konperensi Medja Bundar.

Kepada Ketua Delegasi Nederland
pada Konperensi Medja Bundar
di 's-Gravenhage.

DELEGASI NEDERLAND PADA KONPERENSI MEDJA BUNDAR

Sekertariat

No. 849

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Kepada Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Ketua Delegasi Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal.

Tuan-tuan Ketua,

Dengan hormat saja permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar berpendirian bahwa Delegasi-delegasi pada Konperensi telah menjetudjui sebagai berikut.

Selama antara peserta Uni belum diadakan pertauran landjut maka terhadap hak-hak dalam hukum-atjara tidaklah mereka akan membeda-bedakan antara warganegaranja sendiri dan warganegara peserta jang lain.

Saja harap sudilah Paduka Jang Mulia mempermaklumkan kepada saja, apakah Paduka Jang Mulia setudju dengan jang diatas itu.

Dengan taklim,

J. H. VAN MAARSEVEEN,

Ketua Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar.

DELEGASI
REPUBLIK INDONESIA

DELEGASI
P.P.F.

No. 7/E.L.

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Tuan Ketua,

Dengan hormat kami permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa surat Paduka Jang Mulia tentang hak-hak warganegara telah kami terima; kami beritahukan bahwa Delegasi-delegasi Republik Indonesia dan Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal pada Konperensi Medja Bundar berpendirian bahwa Delegasi-delegasi pada Konperensi telah menjetudjui sebagai berikut.

Selama antara peserta Uni belum diadakan peraturan landjut maka terhadap hak-hak dalam hukum-atjara tidaklah mereka akan membeda-bedakan antara warganegaranja sendiri dan warganegara peserta jang lain.

Dengan taklim,

MOHAMMAD HATTA,
Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Konperensi Medja Bundar.

HAMID,
Ketua Delegasi P.P.F. pada Konperensi Medja Bundar.

Kepada Ketua Delegasi Nederland
pada Konperensi Medja Bundar
di 's-Gravenhage.

DELEGASI NEDERLAND PADA KONPERENSI MEDJA BUNDAR

Sekertariat

No. 873

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Kepada Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Ketua Delegasi Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal.

Tuan-tuan Ketua,

Dengan hormat saja permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar memahami bahwa untuk melaksanakan jang ditetapkan pada pasal 25 Rantjangan Statut-Uni tentang utus-mengutus Komisaris Agung Delegasi-delegasi pada Konperensi telah menjetudjui sebagai berikut.

Pasal 1.

Komisaris-komisaris Agung mengalami hak-hak istimewa dan immunitet jang lazim diberikan kepada Duta-Besar (Ambassadeur) negara-negara asing.

Pasal 2.

Sebelum Pemerintah salah satu peserta mengangkat Komisaris Agung maka Ia beroleh kepastian hendaknja bahwa Pemerintah peserta jang lain setudju dengan pengangkatan itu.

Pasal 3.

Demi diangkat Komisaris Agung, maka hal itu dipermaklumkan kepada Pemerintah peserta jang lain. Komisaris Agung jang diangkat itu menerima surat penghantar jang ditanda-tangani oleh Kepala Negaranja; sesampainja pada tempat djabatannja maka surat itu diserahkannja sendiri kepada Kepala Negara peserta jang lain. Tanggal penjerahan itu akan dianggap tanggal ia memangku djabatannja.

Pasal 4.

Perbandingan pangkatnja dengan Duta-duta Besar negara asing tergantung pada tanggal ia memangku djabatannja.

Pasal 5.

Peserta berhak mengangkat Komisaris-komisaris pada tempat-tempat jang akan dipermupakatkan; Komisaris itu melakukan pekerdjaannja dibawah pengawasan Komisaris Agung. Mereka itu mempunjai status wakil-wakil konsoler dan lagi berpangkat Konsol-Djenderal atau Konsol.

Pasal 6.

Komisaris-komisaris itu mengalami hak-hak istimewa dan immunitet wakil-wakil konsoler negara-negara asing jang berdjabatan itu sadja (beroeps consulaire vertegenwoordigers van vreemde mogendheden).

Pasal 7.

Pengangkatan Komisaris dipermaklumkan Pemerintahnja kepada Pemerintah peserta jang lain dengan perantaraan Komisaris Agung jang diakkreditir pada Pemerintah itu, dengan permintaan supaja disahkan ia melakukan djabatannja.

Pasal 8.

Perbandingan pangkatnja dengan wakil-wakil konsoler negara asing tergantung pada tanggal ia memangku djabatannja.

Pasal 9.

Pada Komisariat Agung akan bekerdja pegawai-pegawai dengan status diplomatik. Mereka itu akan bergelar wakil Komisaris Agung, Sekertaris ke-1, ke-2 atau ke-3.

Pada Komisariat akan bekerdja pegawai-pegawai dengan status konsoler. Mereka itu akan bergelar Sekertaris ke-1, ke-2 atau ke-3.

Saja harap sudilah Paduka Jang Mulia mempermaklumkan kepada saja, apakah Paduka Jang Mulia setudju dengan jang diatas itu.

Dengan taklim,

J. H. Van Maarseveen,

Ketua Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar.

DELEGASI REPUBLIK INDONESIA

DELEGASI P.P.F.

No. 3/E.L.

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Tuan Ketua,

Dengan hormat kami permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa surat Paduka Jang Mulia tentang utus-mengutus Komisaris Agung telah kami terima; kami beritahukan bahwa Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal pada Konperensi Medja Bundar berpendirian bahwa untuk melaksanakan jang ditetapkan pada pasal 25 Rantjangan Statut-Uni Delegasi-delegasi pada Konperensi telah menjetudjui sebagai berikut.

Pasal 1.

Komisaris-komisaris Agung mengalami hak-hak istimewa dan immunitet jang lazim diberikan kepada Duta-Besar (Ambassadeur) negara-negara asing.

Pasal 2.

Sebelum Pemerintah salah satu peserta mengangkat Komisaris Agung maka Ia beroleh kepastian hendaknja bahwa Pemerintah peserta jang lain setudju dengan pengangkatan itu.

Pasal 3.

Demi diangkat Komisaris Agung, maka hal itu dipermaklumkan kepada Pemerintah peserta jang lain. Komisaris Agung jang diangkat itu menerima surat penghantar jang ditanda-tangani oleh Kepala Negaranja; sesampainja pada tempat djabatannja maka surat itu diserahkannja sendiri kepada Kepala Negara peserta jang lain. Tanggal penjerahan itu akan dianggap tanggal ia memangku djabatannja.

Pasal 4.

Perbandingan pangkatnja dengan Duta-duta Besar negara asing tergantung pada tanggal ia memangku djabatannja.

Pasal 5.

Peserta berhak mengangkat Komisaris-komisaris pada tempat-tempat jang akan dipermupakatkan; Komisaris itu melakukan pekerdjaannja dibawah pengawasan Komisaris Agung. Mereka itu mempunjai status wakil-wakil konsoler dan lagi berpangkat Konsol-Djenderal atau Konsol.

Pasal 6.

Komisaris-komisaris itu mengalami hak-hak istimewa dan immunitet wakil-wakil konsoler negara-negara asing jang berdjabatan itu sadja (beroeps consulaire vertegenwoordigers van vreemde mogendheden).

Pasal 7.

Pengangkatan Komisaris dipermaklumkan Pemerintahnja kepada Pemerintah peserta jang lain dengan perantaraan Komisaris Agung jang diakkreditir pada Pemerintah itu, dengan permintaan supaja disahkan ia melakukan djabatannja.

Pasal 8.

Perbandingan pangkatnja dengan wakil-wakil konsoler negara asing tergantung pada tanggal ia memangku djabatannja.

Pasal 9.

Pada Komisariat Agung akan bekerdja pegawai-pegawai dengan status diplomatik. Mereka itu akan bergelar wakil Komisaris Agung, Sekertaris ke-1, ke-2 atau ke-3.

Pada Komisariat akan bekerdja pegawai-pegawai dengan status konsoler. Mereka itu akan bergelar Sekertaris ke-1, ke-2 atau ke-3.

Dengan taklim,

MOHAMMAD HATTA,
Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Konperensi Medja Bundar.

HAMID,
Ketua Delegasi P.P.F. pada Konperensi Medja Bundar.

Kepada Ketua Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar di 's-Gravenhage.

DELEGASI NEDERLAND PADA KONPERENSI MEDJA BUNDAR

Sekertariat

No. 874

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Kepada Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Ketua Delegasi Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal.

Tuan-tuan Ketua,

Dengan hormat saja permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar berpendirian bahwa Delegasi-delegasi pada Konperensi telah menjetudjui sebagai berikut.

Berhubung dengan jang ditetapkan pada pasal 6 dan 9 rantjangan Persetudjuan Perpindahan dan pembentukan Komisariat-komisariat Agung maka Delegasi-delegasi menganggap perlu bahwa dengan permupakatan bersama selekas mungkin akan diadakan peraturan-peraturan landjut mengenai pengawasan urusan uang dan pembelandjaan biaja didaerah-hukum masing-masing; pasal itu boleh dipertimbangkan hal saling memberi kredit dengan rekening-courant atas sjarat-sjarat jang akan ditentukan.

Pada persetudjuan itu, sekadar perlu dan atas sjarat-sjarat jang akan ditentukan padanja maka boleh diatur hal memperbantukan untuk sementara kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat pegawai-pegawai Pemerintah Nederland jang pada saat ini bekerdja pada Commissariaat voor Indonesische Zaken disamping pegawai-pegawai Pemerintah Indonesia, ialah untuk keperluan wakil Republik Indonesia Serikat di Nederland.

Lagi pula Delegasi-delegasi bersetudju bahwa seandainja wakil Republik Indonesia Serikat di Nederland termaksud pada pasal 9 rantjangan Persetudjuan Perpindahan belum memangku djabatannja di Negeri Belanda pada saat penje-

rahan kedaulatan, hingga saat ia memangku djabatannja ia akan diwakili pada djabatannja itu oleh Gecommitteerde voor Indonesische Zaken jang sekarang. Gecommitteerde itu akan bertanggung-djawab kepada dan akan mengindahkan petun-djuk-petundjuk jang mengikat dari pada Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Saja harap sudilah Paduka Jang Mulia mempermaklumkan kepada saja, apakah Paduka Jang Mulia dapat menjetudjui jang diatas itu.

Dengan taklim,

J. H. VAN MAARSEVEEN,

Ketua Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar.

DELEGASI REPUBLIK INDONESIA

DELEGASI P.P.F.

No. 1/E.L.

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Tuan Ketua,

Dengan hormat kami permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa surat Paduka Jang Mulia sudah kami terima; kami beritahukan bahwa Delegasi-delegasi Republik Indonesia dan Pertemuan untuk permusjawaratan Federal pada Konperensi Medja Bundar berpendirian bahwa Delegasi-delegasi pada Konperensi telah menjetudjui sebagai berikut.

Berhubung dengan jang ditetapkan pada pasal 6 dan 9 rantjangan Persetudjuan Perpindahan dan pembentukan Komisariat-komisariat Agung maka Delegasi-delegasi menganggap perlu bahwa dengan permupakatan bersama selekas mungkin akan diadakan peraturan-peraturan landjut mengenai pengawasan urusan uang dan pembelandjaan biaja didaerah-hukum masing-masing; pasal itu boleh dipertimbangkan hal saling memberi kredit dengan rekening-courant atas sjarat-sjarat jang akan ditentukan.

Pada persetudjuan itu, sekadar perlu dan atas sjarat-sjarat jang akan ditentukan padanja maka boleh diatur hal memperbantukan untuk sementara kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat pegawai-pegawai Pemerintah Nederland jang pada saat ini bekerdja pada Commissariaat voor Indonesische Zaken disamping pegawai-pegawai Pemerintah Indonesia, ialah untuk keperluan wakil Republik Indonesia Serikat di Nederland.

Lagi pula Delegasi-delegasi bersetudju bahwa seandainja wakil Republik Indonesia Serikat di Nederland termaksud pada pasal 9 rantjangan Persetudjuan Perpindahan belum memangku djabatannja di Negeri Belanda pada saat penjerahan kedaultan, hingga saat ia memangku djabatannja ia akan diwakili pada djabatannja itu oleh Gecommitteerde voor

Indonesische Zaken jang sekarang. Gecommitteerde itu akan bertanggung-djawab kepada dan akan mengindahkan petundjuk-petundjuk jang mengikat dari pada Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Dengan taklim,

MOHAMMAD HATTA,	HAMID,
Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Konperensi Medja Bundar.	*Ketua Delegasi P.P.F. pada Konperensi Medja Bundar.*

Kepada Ketua Delegasi Nederland
pada Konperensi Medja Bundar
di 's-Gravenhage.

DELEGASI NEDERLAND PADA KONPERENSI MEDJA BUNDAR

Sekertariat

No. 843

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Kepada Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Ketua Delegasi Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal.

Tuan-tuan Ketua,

Dengan hormat saja permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar berpendirian bahwa Delegasi-delegasi pada Konperensi telah menjetudjui sebagai berikut.

1. Ketiga Delegasi dalam Panitia Urusan Kemeliteran berpendapat dengan suara bulat bahwa supaja keputusan-keputusan jang telah diambil pada Konperensi Medja Bundar tentang penarikan-kembali ataupun penjusunan-kembali angkatan udara jang dibawah perintah Nederland didjalankan dengan teratur, maka baiklah kiranja djikalau dibentuk suatu Panitia-persiapan selekas mungkin sesudah Konperensi Medja Bundar selesai.

Panitia itu antara lain-lain haruslah memperhatikan soal perpindahan pegawai-pegawai angkatan udara Nederland masuk berdjabatan pada angkatan udara Republik Indonesia Serikat atas kehendaknja sendiri, dengan maksud supaja perpindahan itu akan terdjadi selekas mungkin sesudah penjerahan kedaulatan.

2. Ketiga Delegasi dalam Panitia Urusan Kemiliteran berpendapat dengan suara bulat bahwa supaja keputusan-keputusan jang telah diambil pada Konperensi Medja Bundar sebagaimana termaktub pada persetudjuan angkatan laut didjalankan dengan teratur, maka baiklah kiranja dibentuk suatu Panitia-persiapan selekas mungkin sesudah Konperensi Medja Bundar selesai.

Ketiga Delegasi mengandjurkan supaja Panitia itu akan disusun di Indonesia, sedang jang mendjadi anggotanja ialah wakil-wakil Pemerintah Nederland, Pemerintah Republik Indonesia serta Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal.

Dengan taklim,

J. H. VAN MAARSEVEEN,

Ketua Delegasi Nederland pada Konpèrensi Medja Bundar.

DELEGASI
REPUBLIK INDONESIA

DELEGASI
P.P.F.

No. 13/E.L.

's-Gravenhage, 2 Nopember 1949.

Tuan Ketua,

Dengan hormat kami permaklumkan kepada Paduka Jang Mulia bahwa Delegasi-delegasi Indonesia pada Konperensi Medja Bundar berpendirian bahwa Delegasi-delegasi pada Konperensi telah menjetudjui sebagai berikut.

1. Ketiga Delegasi dalam Panitia Urusan Kemeliteran berpendapat dengan suara bulat bahwa supaja keputusan-keputusan jang telah diambil pada Konperensi Medja Bundar tentang penarikan-kembali ataupun penjusunan-kembali angkatan udara jang dibawah perintah Nederland didjalankan dengan teratur, maka baiklah kiranja djikalau dibentuk suatu Panitia-persiapan selekas mungkin sesudah Konperensi Medja Bundar selesai.

Panitia itu antara lain-lain haruslah memperhatikan soal perpindahan pegawai-pegawai angkatan udara Nederland masuk berdjabatan pada angkatan udara Republik Indonesia Serikat atas kehendaknja sendiri, dengan maksud supaja perpindahan itu akan terdjadi selekas mungkin sesudah penjerahan kedaulatan.

2. Ketiga Delegasi dalam Panitia Urusan Kemiliteran berpendapat dengan suara bulat bahwa supaja keputusan-keputusan jang telah diambil pada Konperensi Medja Bundar sebagaimana termaktub pada persetudjuan angkatan laut didjalankan dengan teratur, maka baiklah kiranja dibentuk suatu Panitia-persiapan selekas mungkin sesudah Konperensi Medja Bundar selesai.

Ketiga Delegasi mengandjurkan supaja Panitia itu akan disusun di Indonesia, sedang jang mendjadi anggotanja ialah wakil-wakil Pemerintah Nederland, Pemerintah Republik Indonesia serta Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal.

MOHAMMAD HATTA,
Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Konperensi Medja Bundar.

HAMID,
Ketua Delegasi P.P.F. pada Konperensi Medja Bundar.

Kepada Ketua Delegasi Nederland pada Konperensi Medja Bundar di 's-Gravenhage.

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat voor de aanvaarding van de resultaten van de Ronde Tafel Conferentie betreffende de wijze om werkelijke, volledige en onvoorwaardelijke souvereiniteit over te dragen aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië overeenkomstig de Renville-beginselen een voorziening in de zin van artikel 211 der Grondwet moet worden getroffen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1.

De Mantelresolutie met ontwerp-overeenkomsten en briefwisseling betreffende de wijze om werkelijke, volledige en onvoorwaardelijke souvereiniteit over te dragen aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië overeenkomstig de Renville-beginselen, welke Mantelresolutie met ontwerpovereenkomsten en briefwisseling door de Algemene Vergadering van de Ronde Tafel Conferentie te 's-Gravenhage op 2 November 1949 is aangenomen en in afdruk in Nederlandse en in Indonesische tekst en in Engelse vertaling nevens deze wet is gevoegd, wordt door het Koninkrijk der Nederlanden aanvaard.

Artikel 2.

Wij dragen zorg, dat, echter niet zonder voorafgaand overleg met de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, hetzij bij de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië, hetzij bij een ander orgaan der Verenigde Naties, die stappen worden gedaan, welke naar Ons

---

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Bijl. Hand. II 49/50, 1478; Hand. II 49/50, bladz. 798—840, 842—881, 884—931;

Bijl. Hand. I 49/50, 1478; Hand. I 49/50 bladz. .....

inzicht bevorderlijk kunnen zijn aan een volledig tot zijn recht komen van het zelfbeschikkingsrecht, gelijk dit is bedoeld in artikel 2 der Overgangsovereenkomst, behorende bij de in artikel 1 dezer wet vermelde Mantelresolutie.

Artikel 3.

Deze wet, welke kan worden aangehaald als „Wet Souvereiniteitsoverdracht Indonesië", treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 21 December 1949.

JULIANA.

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
W. DREES.

De Minister zonder Portefeuille,
J. R. H. VAN SCHAIK.

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen,
J. H. VAN MAARSEVEEN.

De Minister zonder Portefeuille,
GÖTZEN.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
STIKKER.

De Minister van Justitie,
WIJERS.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
TEULINGS.

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
TH. RUTTEN.

De Minister van Financiën,
P. LIEFTINCK.

De Minister van Oorlog,
SCHOKKING.

De Minister van Marine,
SCHOKKING.

De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting,
J. IN 'T VELD.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
D. G. W. SPITZEN.

De Minister van Economische Zaken,
VAN DEN BRINK.

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,
MANSHOLT.

De Minister van Sociale Zaken,
A. M. JOEKES.

Uitgegeven de een en twintigste December 1949.

De Minister van Justitie,
WIJERS.

MANTELRESOLUTIE.

De Delegaties van:

1. Het Koninkrijk der Nederlanden,
2. De Regering van de Republiek Indonesië,
3. De Bijeenkomst voor Federaal Overleg,

overwegende, dat zij ter Ronde Tafel Conferentie zijn bijeengekomen om zo spoedig mogelijk tot een goede en duurzame oplossing te geraken van het Indonesische conflict door het bereiken van overeenstemming tussen de deelnemers betreffende de wijze om werkelijke, volledige en onvoorwaardelijke souvereiniteit over te dragen aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië overeenkomstig de Renvillebeginselen;

overwegende, dat zij dit doel hebben bereikt in goede samenwerking;

overwegende, dat de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië daarbij waardevolle bijstand heeft verleend;

hebben het volgende besloten:

I. De resultaten van de Ronde Tafel Conferentie zijn vervat in ontwerp-overeenkomsten en brieven, al welke documenten aan deze resolutie zijn gehecht.

II. A. De ontwerp-overeenkomsten zijn de volgende:

1. het ontwerp-Charter van Souvereiniteitsoverdracht;
2. het ontwerp-Uniestatuut met daaronder begrepen de bijlage en bijzondere overeenkomsten omstrent de voornaamste onderwerpen van toekomstige samenwerking;
3. de ontwerp-Overgangsovereenkomst met de daaronder begrepen bijzondere overeenkomsten, houdende regeling van de onderwerpen, welke als gevolg van de souvereiniteitsoverdracht voorziening behoeven.

B. Omtrent een aantal afzonderlijke punten hebben de Delegaties hun standpunten in een briefwisseling aan elkander medegedeeld.

III. De onder A en B genoemde bescheiden zijn in de Nederlandse en de Indonesische taal gesteld.
Beide teksten hebben gelijke kracht.
Er is een officiële Engelse vertaling van de stukken vervaardigd, welke in geval van verschil in betekenis tussen de Nederlandse en de Indonesische teksten de doorslag zal geven.

IV. De aanvaarding van deze resolutie door het Koninkrijk der Nederlanden enerzijds en de tot de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië toetredende gebieden anderzijds zal worden beschouwd als ratificatie van de aan deze resolutie gehechte bescheiden. De ratificatie door een der partijen verliest haar kracht als een der andere partijen de resolutie niet ratificeert.

V. De onder II vermelde overeenkomsten zullen in werking treden op het ogenblik van de souvereiniteitsoverdracht, welke zal geschieden in een plechtige bijeenkomst te Amsterdam, te houden uiterlijk op 30 December 1949.

VI. De Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië of een ander orgaan van de Verenigde Naties zal in Indonesië toezien op de nakoming van de op de Ronde Tafel Conferentie bereikte overeenkomsten.

De Delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden,
J. H. VAN MAARSEVEEN,
Voorzitter.

De Delegatie van de Regering van de Republiek Indonesië,
MOHAMMAD HATTA,
Voorzitter.

De Voorzitter van de Ronde Tafel Conferentie,
W. DREES.

De Delegatie van de Bijeenkomst voor Federaal Overleg,
HAMID,
Voorzitter.

De Secretaris-Generaal der Ronde Tafel Conferentie,
M. J. PRINSEN.

De Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië,
R. HERREMANS,
Voorzitter van de week.

H. MERLE COCHRAN,
Lid.

TH. K. CRITCHLEY,
Lid.

J. A. ROMANOS,
Eerste Secretaris.

Noot. De mantelresolutie werd in de Nederlandse tekst het eerst getekend door de Voorzitter van de Delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden, in de Indonesische tekst het eerst door de Voorzitter van de Delegatie van de Regering van de Republiek Indonesië, en in de Engelse tekst het eerst door de Voorzitter van de Delegatie van de Bijeenkomst voor Federaal Overleg.

ONTWERP-CHARTER VAN SOUVEREINITEITS-OVERDRACHT.

Artikel 1.

1. Het Koninkrijk der Nederlanden draagt de volledige souvereiniteit over Indonesië onvoorwaardelijk en onherroepelijk over aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en erkent deze mitsdien als een onafhankelijke en souvereine Staat.

2. De Republiek der Verenigde Staten van Indonesië aanvaardt deze souvereiniteit op de voet van de bepalingen van haar Constitutie, welke in ontwerp ter kennis is gebracht van het Koninkrijk der Nederlanden.

3. De overdracht van de souvereiniteit zal plaats hebben uiterlijk 30 December 1949.

Artikel 2.

Ten aanzien van de residentie Nieuw-Guinea is overeengekomen:

a. gezien het feit, dat het nog niet mogelijk is gebleken de standpunten van partijen nopens Nieuw-Guinea overeen te brengen, waardoor deze in geschil blijven,

b. gezien de wenselijkheid om de Ronde Tafel Conferentie met goed resultaat te beëindigen op 2 November 1949,

c. gezien de belangrijke factoren, die in ogenschouw moeten worden genomen bij de oplossing van het vraagstuk Nieuw-Guinea,

d. gezien het beperkte onderzoek, dat kon worden ingesteld en voltooid ten aanzien van de problemen, die samenhangen met het vraagstuk Nieuw-Guinea,

e. gezien de moeilijke taak, waarvoor de deelgenoten in de Unie zich al dadelijk zullen zien gesteld, en,

f. gezien de beslotenheid van partijen tot handhaving van het beginsel om door vredelievende en redelijke middelen alle geschillen op te lossen, die later mochten blijken te bestaan of te rijzen,

dat de status quo van de residentie Nieuw-Guinea zal worden gehandhaafd met de bepaling, dat binnen een jaar na de datum van overdracht van de souvereiniteit aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië het vraagstuk van de staatkundige status van Nieuw-Guinea zal worden bepaald door onderhandelingen tussen de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en het Koninkrijk der Nederlanden.

ONTWERP-UNIESTATUUT.

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië,

besloten hebbende op basis van vrijwilligheid, gelijkheid en volledige onafhankelijkheid een vriendschappelijke samenwerking tot stand te brengen tussen elkander en tot verwezenlijking van de toekomstige samenwerking in het leven te roepen de Nederlands-Indonesische Unie,

zijn overeengekomen in dit Uniestatuut de grondslag te leggen van hun onderlinge verhouding als onafhankelijke en souvereine staten,

daarbij van oordeel zijnde, dat niets in dit Statuut aldus mag worden uitgelegd, dat enige daarin niet genoemde vorm van samenwerking, of samenwerking op enig daarin niet genoemd gebied, waaraan de beide deelgenoten in de toekomst de behoefte mochten gevoelen, zullen zijn uitgesloten.

KARAKTER VAN DE UNIE.

Artikel 1.

1. De Nederlands-Indonesische Unie verwezenlijkt de georganiseerde samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië op basis van vrijwilligheid en gelijkheid in status met gelijke rechten.

2. De Unie doet geen afbreuk aan de status van elk van de beide deelgenoten als onafhankelijke en souvereine staat.

DOEL VAN DE UNIE.

Artikel 2.

1. De Unie stelt zich ten doel samenwerking der deelgenoten ter behartiging van hun gemeenschappelijke belangen.

2. Deze samenwerking zal plaats hebben ter zake van onderwerpen in de eerste plaats liggende op het gebied der buitenlandse betrekkingen en defensie, en voorzover nodig financiën, alsmede ten aanzien van onderwerpen van economische en culturele aard.

Artikel 3.

1. Beide deelgenoten verbinden zich hun staatsbestel te baseren op de beginselen der democratie en te streven naar een onafhankelijke rechtspraak.

2. Beide deelgenoten zullen de in de Bijlage van dit Statuut vermelde fundamentele menselijke rechten en vrijheden erkennen.

WERKING DER UNIE.

Artikel 4.

Alle beslissingen in de Unie worden genomen bij overeenstemming tussen beide deelgenoten.

HOOFD DER UNIE.

Artikel 5.

1. Aan het hoofd der Unie staat Hare Majesteit Koningin Juliana, Prinses van Oranje-Nassau, en bij opvolging Hare wettige opvolgers in de Kroon der Nederlanden.

2. In geval van minderjarigheid van het Hoofd der Unie, of in geval het Hoofd der Unie buiten staat geraakt zijn functies te vervullen, zomede indien het Hoofd der Unie tijdelijk zijn functies neerlegt, voorzien de beide deelgenoten in onderlinge overeenstemming in de waarneming.

In onderlinge overeenstemming kan een dergelijke voorziening bij voorbaat worden getroffen.

Artikel 6.

Het Hoofd der Unie verwezenlijkt de idee van vrijwillige en duurzame samenwerking tussen de deelgenoten.

DE ORGANEN DER UNIE.

Artikel 7.

Voor de uitvoering van de doelstellingen der Unie houden de daartoe door elk der deelgenoten aangewezen ministers, of personen, die naar de eigen staatsinstellingen der deel-

genoten gelijke of gelijksoortige verantwoordelijkheid dragen, tweemaal per jaar, en voorts zo dikwijls de deelgenoten zulks nodig achten, conferenties.

Tenzij anders overeengekomen zullen daaraan drie ministers van iedere deelgenoot deelnemen.

Artikel 8.

De ministers ter conferentie blijven verantwoordelijk aan de eigen organen der deelgenoten op de voet van de eigen staatsinstellingen der deelgenoten.

Artikel 9.

De conferentie van ministers stelt naar gelang van de behoeften commissies in, waarin de beide deelgenoten op basis van pariteit leden benoemen.

Artikel 10.

1. De beide deelgenoten zullen een goed contact en een geregelde samenwerking tussen de wederzijdse parlementen van de deelgenoten bewerkstelligen.

2. De eerste bespreking van vertegenwoordigers van de parlementen zal plaats hebben binnen acht maanden na de totstandkoming van het voorlopige parlement van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 11.

1. De Unie beschikt over een permanent secretariaat. Elk der deelgenoten wijst een secretaris-generaal aan, welke beide voor één jaar om beurten de leiding van het secretariaat op zich nemen.

2. De benoeming van het overige personeel geschiedt in overeenstemming tussen de beide secretarissen-generaal volgens een door de beide deelgenoten gezamenlijk opgestelde instructie.

BESLUITEN EN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN.

Artikel 12.

1. Besluiten worden op de conferentie van ministers genomen bij eenparigheid van stemmen tussen de vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden enerzijds en die van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië anderzijds.

2. Met besluiten van de conferentie kan op de volgende wijzen worden gehandeld.

3. Besluiten genomen op de conferentie van ministers tot het uitvaardigen van gemeenschappelijke regelingen behoeven goedkeuring door de wederzijdse parlementen der deelgenoten. Na goedkeuring door de beide parlementen zal het Hoofd der Unie constateren, dat overeenstemming bestaat tussen beide deelgenoten en wordt de gemeenschappelijke regeling vervolgens in het officiële Staatsblad van elk der deelgenoten afgekondigd. Door die afkondiging verkrijgt de gemeenschappelijke regeling rechtskracht. De gemeenschappelijke regelingen zijn onschendbaar.

4. Ten aanzien van andere besluiten van de conferentie kan het Hoofd der Unie op verzoek van de conferentie eveneens constateren, dat overeenstemming bestaat tussen beide deelgenoten.

UNIE-HOF VAN ARBITRAGE.

Artikel 13.

1. Er is een Unie-Hof van Arbitrage, rechtsprekende in naam van het Hoofd der Unie.

2. Het Hof neemt kennis van rechtsgeschillen door één der deelgenoten tegen de andere deelgenoot dan wel door beide deelgenoten gezamenlijk aanhangig gemaakt, welke hun grondslag vinden in het Uniestatuut, in enige overeenkomst tussen de deelgenoten, of in gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 14.

1. Het Unie-Hof van Arbitrage bestaat uit drie door het Koninkrijk der Nederlanden en drie door de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië benoemde leden.

2. De leden van het Hof worden benoemd voor tien jaar. Zij treden in ieder geval af, indien zij de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.

3. Tot voorzitter wordt jaarlijks bij afwisseling een Nederlander en een Indonesiër door en uit de leden van het Hof gekozen.

4. Alvorens hun ambt te aanvaarden leggen de leden van het Hof ten overstaan van het Hoofd der Unie op de wijze hunner godsdienstige gezindheid de eed of belofte af, dat zij hun ambt met eerlijkheid, nauwgezetheid en onpartijdigheid zullen vervullen en zich in de uitoefening hunner bediening zullen gedragen, zoals een goed lid van het Unie-Hof van Arbitrage betaamt.

Artikel 15.

1. Het Unie-Hof van Arbitrage beslist bij meerderheid van stemmen.

2. Bij staking van stemmen zal, tenzij beide deelgenoten anders verzoeken, het Hof zich tot de President van het Internationaal Hof van Justitie of tot een andere bij meerderheid van stemmen aan te wijzen internationale instantie wenden met het verzoek iemand van een andere nationaliteit tot bijzonder lid van het Unie-Hof van Arbitrage te benoemen, die met de rechten van een gewoon lid aan een hernieuwde beraadslaging over het rechtsgeschil en aan de beslissing daarvan zal deelnemen.

Artikel 16.

Nadere bepalingen nopens de rechtsgang bij en de organisatie en regeling van werkzaamheden van het Unie-Hof van Arbitrage zullen bij gemeenschappelijke regeling worden vastgesteld. Zolang zulk een gemeenschappelijke regeling niet bestaat, regelt het Hof zelf de rechtsgang en de orga-

nisatie en regeling van zijn werkzaamheden, waarbij, indien het terzake niet tot overeenstemming kan komen, het tweede lid van het voorgaande artikel van overeenkomstige toepassing zal zijn.

Artikel 17.

De beide deelgenoten verbinden zich om de beslissingen van het Unie-Hof van Arbitrage na te komen en zullen deze op hun eigen gezag en verantwoordelijkheid ten uitvoer leggen, ieder binnen eigen rechtsgebied.

Artikel 18.

In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen van het recht van de deelgenoten en van publiekrechtelijke lichamen binnen hun rechtsgebied enerzijds, en bepalingen van het Uniestatuut, enige overeenkomst tussen de deelgenoten of enige gemeenschappelijke regeling anderzijds, zal de laatstgenoemde categorie van bepalingen de voorrang hebben.

Artikel 19.

De beide deelgenoten behouden zich alle rechten voor, die hun volgens het volkenrecht of anderszins toekomen nopens het inroepen van de beslissing van enige internationale rechter of arbiter in die gevallen, waarin het Unie-Hof van Arbitrage naar het oordeel van beide deelgenoten onbevoegd is dan wel in die gevallen, waarin het Hof zich onbevoegd verklaart.

BUITENLANDSE BETREKKINGEN.

Artikel 20.

Regelingen omtrent de samenwerking tussen de deelgenoten op het gebied der buitenlandse betrekkingen worden gegeven in de aan dit Statuut gehechte overeenkomst.

DEFENSIE.

Artikel 21.

Regelingen omtrent de samenwerking tussen de deelgenoten op het gebied der defensie worden gegeven in de aan dit Statuut gehechte overeenkomst.

FINANCIËLE EN ECONOMISCHE BETREKKINGEN.

Artikel 22.

Regelingen omtrent de samenwerking tussen de deelgenoten op het gebied van de financiële en economische betrekkingen worden gegeven in de aan dit Statuut gehechte overeenkomst.

CULTURELE BETREKKINGEN.

Artikel 23.

Regelingen omtrent de samenwerking tussen de deelgenoten op cultureel gebied worden gegeven in de aan dit Statuut gehechte overeenkomst.

STAATSBURGERSCHAP.

Artikel 24.

1. Onverminderd hetgeen is of zal worden bepaald in bijzondere overeenkomsten tussen de deelgenoten, zal ten aanzien van de uitoefening van staatkundige en andere rechten door staatsburgers van de ene deelgenoot in het rechtsgebied van de andere deelgenoot het hieronder bepaalde gelden:

a. de nationaliteit van staatsburgers van de ene deelgenoot zal geen bezwaar zijn voor het bekleden van ambten in het rechtsgebied van de andere deelgenoot, behoudens ten aanzien van:

1°. ambten, waarvan de bekleder verantwoordelijk is tegenover een vertegenwoordigend lichaam, behoudens uitzonderingen, die de wet mocht bepalen;

2°. die politieke, gezagdragende, rechterlijke en leidende ambten, die door de wet worden aangewezen;

b. ten aanzien van de uitoefening van burgerlijke rechten en de werkzaamheid op maatschappelijk terrein zal elk der deelgenoten zich steeds ten volle rekenschap geven van de speciale belangen binnen zijn rechtsgebied van de staatsburgers en rechtspersonen van de andere deelgenoot en deswege geen noemenswaard onderscheid maken tussen de wederzijd-

se staatsburgers en rechtspersonen, onverkort de bevoegdheid van iedere deelgenoot om regelingen vast te stellen, die nodig zijn, hetzij voor de bescherming van zijn nationale belangen, hetzij voor de bescherming van economisch zwakke groepen.

2. In geen geval zullen de staatsburgers en rechtspersonen van de ene deelgenoot in het rechtsgebied van de andere deelgenoot een ongunstiger behandeling ondervinden dan staatsburgers en rechtspersonen van een derde Staat.

BIJZONDERE BEPALINGEN.

Artikel 25.

Ter behartiging van de belangen der deelgenoten in elkanders rechtsgebied worden door de Regeringen der deelgenoten Hoge Commissarissen benoemd. Zij hebben de status van diplomatieke vertegenwoordigers en bezitten de rang van ambassadeur.

Artikel 26.

1. Voorzover bij overeenkomst niet anders is bepaald, worden de kosten der Unie door ieder der deelgenoten voor de helft gedragen.

2. Verdere voorzieningen betreffende de kosten der Unie worden bij gemeenschappelijke regeling getroffen. Zolang zulk een gemeenschappelijke regeling niet bestaat, zal de conferentie van ministers de nodige voorzieningen treffen.

Artikel 27.

1. Alle officiële bescheiden, welke van de conferentie van ministers en van andere Unieorganen uitgaan, worden in de Nederlandse en Indonesische taal gesteld.

2. Beide teksten hebben gelijke kracht.

Artikel 28.

Het Uniestatuut en de daarbij behorende overeenkomsten, alsmede de gemeenschappelijke regelingen en te sluiten overeenkomsten kunnen ter registratie aan het Secretariaat der Verenigde Naties worden aangeboden overeenkomstig artikel 102 van het Handvest der Verenigde Naties.

BIJLAGE VAN HET ONTWERP-UNIESTATUUT.

De fundamentele menselijke rechten en vrijheden, welke ingevolge artikel 3 van het Uniestatuut door de deelgenoten worden erkend en welke een ieder gerechtigd is uit te oefenen en te genieten, zonder dat te dezer zake onderscheid van welke aard ook mag worden gemaakt op grond van ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, nationale of maatschappelijke afkomst, bezit of geboorte, zijn de volgende:

1. (1) Een ieder wordt als persoon erkend voor de Wet.
   (2) Allen hebben aanspraak op gelijke bejegening en gelijke bescherming door de Wet.
   (3) Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling en tegen iedere ophitsing tot een zodanige achterstelling.

2. Allen, die zich op het grondgebied van de Staat bevinden, hebben gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goed.

3. (1) Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de staatsgrenzen.
   (2) Een ieder heeft het recht het land te verlaten en — staatsburger of ingezetene zijnde — daarnaar terug te keren.

4. Niemand mag worden aangehouden of in hechtenis genomen dan op bevel van het daartoe ingevolge de wettelijke regelingen bevoegde gezag en in de gevallen en op de wijze daarbij omschreven.

5. (1) Ieders woning is onschendbaar.
   (2) Het betreden van een woonerf of het binnentreden in een woning tegen de wil van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen voorzien bij een op hem toepasselijke rechtsregel.

6. De vrijheid en het geheim van correspondentie zijn onschendbaar, behalve op last van de rechter of ander daartoe bij wettelijke regelingen bevoegd verklaard gezag, in de gevallen in die regelingen omschreven.

7. Een ieder heeft het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid om hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar, als in het particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de practische toepassing, door eredienst, het onderhouden van de geboden en voorschriften en door het opvoeden van de kinderen in het geloof of de overtuiging van hun ouders.

8. Een ieder heeft het recht op vrijheid van mening en meningsuiting.

9. Het recht der ingezetenen op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering wordt erkend en, voor zoveel nodig, in wettelijke regelingen gewaarborgd.

10. (1) Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
(2) Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.

11. (1) Een ieder heeft met inachtneming van eisen van geschiktheid recht op beschikbare arbeid, op vrije keuze van beroep en op rechtvaardige arbeidsvoorwaarden.
(2) Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert.

12. Een ieder heeft het recht vakverenigingen op te richten, en zich daarbij aan te sluiten, ter bescherming van zijn belangen.

13. (1) Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het daarop naar wettelijke regelingen te houden toezicht van de Overheid.
(2) De keuze van het te volgen onderwijs is vrij.

14. De Overheid bevordert naar haar vermogen de sociale zekerheid, bijzonderlijk het verzekeren en waarborgen van gunstige arbeidsvoorwaarden en arbeidstoestanden, het voorkomen en bestrijden van werkloosheid en het bevorderen van redelijke ouderdomsvoorzieningen en zorg voor weduwen en wezen.

15. (1) De verhoging der volkswelvaart is voorwerp van aanhoudende zorg der Overheid, zullende het te allen tijde haar streven zijn, dat een ieder van een menswaardige levensstandaard verzekerd is voor zich en zijn gezin.

(2) Behoudens in het algemeen belang in wettelijke regelingen in te stellen beperkingen wordt aan allen naar hun aard, aanleg en geschiktheid gelijkelijk en zoveel mogelijk gelegenheid geboden deel te nemen aan de ontwikkeling van de welvaartsbronnen des lands.

16. Het gezin heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.

17. (1) De Overheid zal de geestelijke en lichamelijke volksontwikkeling zoveel mogelijk bevorderen.

(2) De Overheid voorziet, waar nodig, in de behoefte aan openbaar onderwijs, dat gegeven wordt op grondslag van verdraagzaamheid en gelijke eerbiediging van ieders godsdienstige overtuiging en met gelegenheid binnen de schooluren tot het geven van godsdienstonderwijs overeenkomstig de wensen der ouders.

(3) De leerlingen van de particuliere school, welke voldoet aan voor het openbaar onderwijs gestelde wettelijke eisen van deugdelijkheid van het onderwijs, hebben dezelfde rechten als die van de openbare school.

(4) De vrijheid om sociale en charitatieve werkzaamheden te verrichten, daarvoor, alsmede voor particulier onderwijs, organisaties te stichten en bezittingen te verwerven en te hebben voor deze doeleinden, wordt erkend.

18. De bevordering van openbare hygiëne en volksgezondheid is voorwerp van aanhoudende zorg van de Overheid.

19. De Overheid verleent aan alle erkende godsdienstge gemeenschappen en organisaties gelijke bescherming.

Elk der deelgenoten handhaaft in zijn rechtsgebied de vrije uitoefening van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, welke in deze bijlage zijn opgesomd, met inachtneming wijders van de internationale verdragen en de internationaal erkende rechtsbeginselen, de uitoefening daarvan betreffende.

De uitoefening van rechten en vrijheden, welke in deze bijlage zijn opgesomd, mag niet worden beperkt dan uitsluitend om rekening te kunnen houden met de rechten en vrijheden van anderen, met de goede zeden, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische rechtsorde.

ONTWERP-OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE REPUBLIEK DER VERENIGDE STATEN VAN INDONESIË TER REGELING VAN HUN SAMENWERKING OP HET GEBIED DER BUITENLANDSE BETREKKINGEN.

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, bezield door de gelijke wens om tot samenwerking te geraken op het gebied van hun buitenlandse betrekkingen,

hebben besloten de navolgende overeenkomst aan te gaan ter regeling van die samenwerking.

Artikel 1.

De Nederlands-Indonesische Unie verwezenlijkt de samenwerking op het gebied der buitenlandse betrekkingen.

In gevallen waarin de deelgenoten van mening zijn, dat het in beider belang is, en zij dienovereenkomstig besluiten, kan de conferentie van ministers voorzien in de instelling van een gezamenlijke of gemeenschappelijke vertegenwoordiging in het internationale rechtsverkeer.

Artikel 2.

Met vooropstelling van het beginsel, dat ieder der deelgenoten zijn eigen buitenlandse betrekkingen onderhoudt en zijn eigen buitenlandse politiek bepaalt, zullen zij er naar streven hun buitenlands beleid zoveel mogelijk te coördineren en dienaangaande overleg te plegen.

Artikel 3.

Geen der deelgenoten sluit een verdrag, noch verricht hij andere internationale rechtshandelingen, waarbij belangen van de andere deelgenoot zijn betrokken, dan na overleg met die deelgenoot.

Artikel 4.

Indien een der deelgenoten bij enige vreemde mogendheid geen diplomatieke vertegenwoordiging heeft geaccrediteerd,

zal hij bij voorkeur zijn belangen door de diplomatieke vertegenwoordiging van de andere deelgenoot bij die vreemde mogendheid doen behartigen.

Artikel 5.

Indien een der deelgenoten voor het onderhouden van zijn buitenlandse betrekkingen technische of andere medewerking verzoekt, zal de andere deelgenoot deze naar beste vermogen verlenen.

ONTWERP-OVEREENKOMST TER UITVOERING VAN DE ARTIKELEN 2 EN 21 VAN HET UNIESTATUUT.

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië,

gevolg gevende aan het bepaalde in de artikelen 2 en 21 van het Uniestatuut,

zijn overeengekomen als volgt.

Artikel 1.

Ieder der deelgenoten draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de defensie van zijn eigen grondgebied.

Voorzieningen hiertoe worden door ieder van hen getroffen.

Artikel 2.

De gemeenschappelijke regelingen, als bedoeld in artikel 12 van het Uniestatuut, worden door elk der deelgenoten in eigen rechtsgebied zelfstandig uitgevoerd.

Artikel 3.

Onverminderd het bepaalde in artikel 2 zal de samenwerking tot uitdrukking kunnen komen in steun, welke de ene deelgenoot desgevraagd aan de andere deelgenoot verstrekt, voor zover naar zijn oordeel de gevraagde steun verenigbaar is met zijn vermogen en zijn eigen behoeften, in het bijzonder ook met de belangen van zijn eigen defensie.

Artikel 4.

De in artikel 3 bedoelde steun zal onder meer kunnen bestaan in:

a. opleiding en hogere opleiding van officieren, kader, gespecialiseerde militairen en burgerhulpkrachten;
b. het ter beschikking stellen van personeel;
c. het ter beschikking stellen van materieel;
d. het bieden van gelegenheid tot en hulp bij het onderhoud en de reparatie van materieel van de andere deelgenoot.

Artikel 5.

Indien een der deelgenoten ter beschikkingstelling verzoekt van onderdelen van de strijdkrachten van de andere deelgenoot in zijn rechtsgebied, kunnen de deelgenoten terzake een overeenkomst aangaan.

Artikel 6.

Indien ingevolge de artikelen 4 en 5 de deelgenoten elkander steun verlenen, zullen de kosten van deze steunverlening, tenzij in bijzondere gevallen anders wordt overeengekomen, ten laste komen van de deelgenoot, die de steun heeft verzocht.

Artikel 7.

De deelgenoten zullen militaire missies uitwisselen. De voorwaarden, waaronder dit zal geschieden, alsmede de samenstelling en de bepaling van de taken dier missies zullen door de Regeringen der deelgenoten in onderling overleg worden geregeld.

Een deelgenoot, die een militaire missie van een derde mogendheid wenst te vragen of te aanvaarden, zal hieromtrent vooraf overleg plegen met de andere deelgenoot.

Artikel 8.

De beide deelgenoten treden in overleg ingeval van dreiging van een aanval op beide deelgenoten of op een hunner.

Artikel 9.

Indien een deelgenoot buiten eigen gebied materieel voor zijn strijdkrachten wenst aan te schaffen, zal deze zoveel mogelijk overleg plegen met de andere deelgenoot, op welke wijze zij elkander daarbij behulpzaam kunnen zijn.

Artikel 10.

Indien een deelgenoot inlichtingen over zijn defensie verstrekt aan de andere deelgenoot, is deze — ook tegenover een bondgenoot — tot geheimhouding verplicht, tenzij deze plicht door eerstgenoemde deelgenoot uitdrukkelijk wordt opgeheven.

Indien personeel van een deelgenoot uit hoofde van samenwerking, als voorzien in deze overeenkomst, in het rechtsgebied of in organisaties van de andere deelgenoot wordt toegelaten, zal eerstgenoemde deelgenoot het mogelijke doen, opdat dit personeel de geheimhouding bewaart van alle defensie-aangelegenheden van de andere deelgenoot, waarmede het in aanraking mocht komen.

Artikel 11.

De deelgenoten zullen regeling treffen ten aanzien van het formeel en materieel straf- en tuchtrecht, hetwelk wordt toegepast op militairen van een deelgenoot, die zich uit hoofde van samenwerking bevinden in het rechtsgebied van de andere deelgenoot. Bij deze regeling zullen de deelgenoten zich rekenschap geven van soortgelijke regelingen in andere landen.

Artikel 12.

Tenzij de deelgenoten anders overeenkomen, kunnen, indien één der deelgenoten bij een oorlog is of dreigt te worden betrokken, koopvaardijschepen en burgerluchtvaartuigen onder de vlag van een deelgenoot alleen door deze en niet door de andere deelgenoot worden gevorderd of gemilitairiseerd, onverschillig waar zij zich bevinden.

Daarbij zal echter de ene deelgenoot overleg plegen met de andere, indien het koopvaardijschip of het burgerluchtvaartuig zich in diens rechtsgebied bevindt.

Artikel 13.

De deelgenoten zullen regelingen treffen omtrent de bepalingen, welke zullen gelden, indien Marine-eenheden of militaire luchtvaartuigen van de ene deelgenoot zich in of nabij het rechtsgebied van de andere deelgenoot bevinden en in dat rechtsgebied zee- of luchthavens aandoen.

Artikel 14.

In afwachting van een regeling tussen de deelgenoten inzake de diepstplicht van hun wederzijdse onderdanen zal geen der onderdanen van de ene deelgenoot tot dienstneming bij de krijgsmacht van de andere deelgenoot worden verplicht.

Zolang voor enige ingezetene van de beide deelgenoten krachtens de ter Ronde Tafel Conferentie aanvaarde bepalingen een optierecht aangaande zijn toekomstige nitionaliteit openstaat, zal de betrokkene niet door een der deelgenoten tot het vervullen van dienstplicht worden opgeroepen.

Artikel 15.

Deze overeenkomst laat onverlet de rechten en verplichtingen, welke voor de deelgenoten voortvloeien uit het Handvest der Verenigde Naties of daarop steunende internationale regelingen.

Artikel 16.

De deelgenoten zullen zo spoedig mogelijk in overleg treden tot het uitwerken van de grondslagen in de voorgaande artikelen vervat en zij nemen op zich zodanige maatregelen te treffen als voor de richtige vervulling van de doeleinden van het Uniestatuut en van deze overeenkomst op het gebied van defensie door de betrokken Regeringen in onderling overleg nuttig zal worden geacht.

ONTWERP FINANCIËLE EN ECONOMISCHE OVEREENKOMST.

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, geleid door de wens om de door de souvereiniteitsoverdracht ontstane nieuwe verhoudingen op financieel en economisch gebied te regelen, alsmede om op dit gebied tot samenwerking te geraken;

Gelet op de artikelen 2 en 22 van het Uniestatuut;

Hebben besloten de navolgende overeenkomst aan te gaan.

AFDELING A.

RECHTEN, CONCESSIES, VERGUNNINGEN EN BEDRIJFSUITOEFENING.

Artikel 1.

1. Ten aanzien van de erkenning en het herstel van de rechten, concessies en vergunningen, naar het recht van Nederlandsch-Indië (Indonesië) bevoegdelijk verleend en nog van kracht op de datum der souvereiniteitsoverdracht, neemt de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië als uitgangspunt, dat deze worden erkend en dat de rechthebbenden — voor zover zulks nog niet is geschied — in de feitelijke uitoefening van hun recht zullen worden hersteld, een en ander behoudens het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

2. De Republiek der Verenigde Staten van Indonesië behoudt zich het recht voor een onderzoek in te stellen ten aanzien van belangrijke rechten, concessies en vergunningen, verleend na 1 Maart 1942, welke de economische politiek van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië kunnen beïnvloeden, teneinde na te gaan of toepassing van artikel 2 gewenst wordt geacht.

3. Er zal worden rekening gehouden met:

a. de toestand die geschapen is door het feit, dat gedurende de Japanse bezetting en de daarop gevolgde revolutieperiode ondernemingsgronden, waarvan de aanplantingen waren gerooid ten behoeve van voedselverbouw dan wel

woonerven, zijn geoccupeerd door de bevolking — gedurende de bezetting met toestemming van de Japanse autoriteiten — en dat in bepaalde gevallen het ontnemen van die gronden aan de betrokken bevolking zonder meer en teruggave daarvan aan de betrokken ondernemingen, te grote onrust zou verwekken en dat zulk een teruggave veelal onmogelijk is. Elk geval zal afzonderlijk worden beoordeeld en er zal naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing worden gezocht.

b. de noodzakelijkheid dat bepaalde particuliere eigendommen tegen schadeloosstelling in 's Lands belang tijdelijk gevorderd blijven (worden) ten behoeve van een overheidsdienst;

c. de intrekking bij de Undang-undang Republik Indonesia 1948 Nr 13 van de conversierechten in de residenties Jogjakarta en Soerakarta, hetgeen geboden was door de veranderde omstandigheden in het algemeen en de gewijzigde opvatting der bevolking in het bijzonder. In dit geval zal de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië de nodige wettelijke maatregelen (doen) treffen om aan de betrokken bedrijven de grootst mogelijke zekerheid te verschaffen ter erlanging van de voor die bedrijven benodigde gronden.

4. De mogelijkheid dat bedrijven van openbaar nut, zoals de particuliere spoor- en tramwegen en de electriciteits- en gasbedrijven, door de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zullen worden genationaliseerd, hetgeen dan langs de weg van onteigening c.q. naasting zal geschieden, zal geen invloed hebben op het herstel van de rechthebbenden in de feitelijke uitoefening van hun recht. Wel kan bij dit rechtsherstel rekening worden gehouden met de beheersvorm van de spoor- en tramwegen op het ogenblik der souvereiniteitsoverdracht.

Artikel 2.

Aan de in artikel 1, eerste lid, bedoelde rechten, concessies en vergunningen zal slechts kunnen worden getornd in het algemeen belang, waaronder het volksbelang, langs de weg van minnelijke schikking met de rechthebbenden en indien deze niet tot stand komt, door onteigening te algemenen nutte, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.

Artikel 3.

Tot onteigening, nationalisatie, opheffing, gedwongen afstand of overgang van zaken of rechten zal niet worden overgegaan dan te algemenen nutte volgens wettelijk voorgeschreven vorm van proces en — bij gemis aan overeenstemming tussen partijen — tegen vooraf genoten of verzekerde schadeloosstelling, door de rechter te bepalen op de werkelijke waarde van het ontnomene, een en ander volgens voorschriften, bij de wet te bepalen. De vereisten van voorafgaand genot of voorafgaande verzekering van de verschuldigde schadeloosstelling gelden niet wanneer oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, watersnood, aardbeving, vulkanische uitbarsting of andere dringende omstandigheden een onverwijlde inbezitneming vorderen.

Artikel 4.

Ten behoeve van bestaande en nieuwe bedrijven en ondernemingen wordt de mogelijkheid opengesteld de voor hun bedrijfsuitoefening nodige verlenging, dan wel vernieuwing of verlening van rechten, concessies en vergunningen te doen plaatshebben op zodanige voorwaarden, voor zodanige termijn en op zodanig tijdstip, dat zij bedrijfseconomisch verantwoord blijven, dan wel zijn, en dat de rechthebbenden verzekerd zijn van een continuïteit, welke het mogelijk maakt de voor een normale bedrijfsuitoefening op lange termijn gewenste investeringen te doen, zulks behoudens die gevallen, dat een algemeen belang — waaronder begrepen de algemeen economische politiek van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië — zich daartegen verzet.

Artikel 5.

De bedrijven en ondernemingen zullen hun medewerking verlenen aan zakelijk verantwoorde samenwerking met en inschapeling van Indonesisch kapitaal.

Artikel 6.

De Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zal de nodige maatregelen treffen ter veiligstelling van de uitoefening door de rechthebbenden van de in artikel 1, eerste lid,

bedoelde rechten, concessies en vergunningen, zulks ter bevordering van de hervatting en de duurzaamheid van de economische activiteit. Daarbij zal evenwel in het oog moeten worden gehouden, dat de algemeen economische politiek, door de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië te volgen, in de eerste plaats gericht zal zijn op de economische opbouw van de Indonesische samenleving in haar geheel en wel in dien zin, dat de belangen en de stoffelijke en geestelijke vooruitgang van het Indonesische volk in zijn geheel het best worden gediend door het scheppen van een maximale effectieve koopkracht en verhoging van de levenstandaard van het volk.

Artikel 7.

Ten aanzien van alle in artikel 1, eerste lid, bedoelde rechten, concessies en vergunningen, welke als gevolg van de oorlog, bezetting en de daaropvolgende abnormale omstandigheden niet konden worden uitgeoefend, wordt de mogelijkheid opengesteld, dat deze — op verzoek van de rechthebbenden — met een overeenkomstige termijn worden verlengd, zulks behoudens die gevallen, dat een algemeen belang — waaronder begrepen de algemeen economische politiek van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië — zich daartegen verzet.

Artikel 8.

De lasten, welke op het bedrijfsleven rusten als gevolg van fiscale, in een modern land gebruikelijke sociale en andere maatregelen, worden binnen zodanige redelijke grenzen gehouden, dat onder normale omstandigheden een bedrijfsvoering mogelijk is, die veroorlooft normale vernieuwingen, afschrijvingen en reserveringen en die een redelijk rendement toelaat voor het in die bedrijven gestoken kapitaal.

Artikel 9.

De wijze van bedrijfsuitoefening en de vrijheid van handel, bedrijf en geldverkeer zullen slechts bij wettelijke regeling worden beperkt.

Artikel 10.

Partijen erkennen de noodzakelijkheid van een onafhankelijke fiscale rechtspraak. Zij zullen regelingen treffen ter voorkoming van dubbele belasting.

Artikel 11.

Nederlandse staatsburgers, rechtspersonen, producten, schepen en andere objecten genieten in Indonesië niet minder gunstige behandeling dan die van enig derde land.

Vreemdelingen van alle naties zullen gelijke rechten genieten in de deelname in de handel met Indonesië en in de economische activiteit en de industriële ontwikkeling in dit land. Echter erkent de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië dat ten volle rekening behoort te worden gehouden met de bijzondere belangen van de Nederlandse staatsburgers en rechtspersonen binnen Indonesië en voorts dat geen discriminatie zal plaats vinden ten aanzien van genoemde belangen, onverkort het recht van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië om zodanige regelingen te treffen als nodig zijn ter bescherming der nationale belangen of ter bescherming van economisch zwakke groepen.

Het in dit artikel ten behoeve van Nederland overeengekomene geldt wederkerig tussen Nederland en Indonesië.

Artikel 12.

1. Afgescheiden van de algemene plicht, dat de ondernemers ten aanzien van hun bedrijven zich hebben te onderwerpen aan de wetten van het land, zullen in het belang van de sociale rust en orde en ter verbetering van de sociale toestanden de bedrijven (ondernemingen) hebben mede te werken aan maatregelen als de ondergenoemde:

a. het streven naar de instelling van georganiseerd overleg tussen werkgevers en werknemers op het gehele terrein der arbeidsverhoudingen;

b. het geleidelijk bevorderen van de totstandkoming van een belangengemeenschap tussen de ondernemers en de arbeiders c.q. grondbezitters, zodat de na te streven belangen samengroeien en dat de betrokken arbeiders en grondbezitters op een hoger levensniveau komen;

c. verbetering van de woningvoorziening en andere sociale voorzieningen van de arbeiders;

d. het zo spoedig mogelijk opnemen van daartoe geschikte Indonesiërs in de leiding (ook directies) en staven der bedrijven en het medewerken aan de instelling van opleidingsgelegenheden, er op gericht om na zekere redelijke termijn het overwegende deel van het leidend stafpersoneel der bedrijven te doen bestaan uit Indonesische staatsburgers;

e. ten aanzien van bedrijven wier arbeidsveld in hoofdzaak in Indonesië is gelegen, het aanwezig doen zijn in Indonesië van volledig gemachtigde organen.

2. Door de ondernemers zal op het terrein, genoemd sub *a* t/m *d*, ook initiatief worden getoond, doch onder voorbehoud dat de overheidseisen op dit gebied ten aanzien van buitenlandse investeringen niet verder zullen gaan dan ten aanzien van Indonesische bedrijven van gelijke soort en omvang.

Artikel 13.

Bij eventuele wijziging van de bestaande bepalingen op agrarisch gebied op grond van het algemeen belang zal worden rekening gehouden met de belangen van de rechthebbenden en met de bedrijfszekerheid in het bijzonder.

AFDELING B.

FINANCIËLE BETREKKINGEN.

Artikel 14.

Nederland en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zullen ieder voor zich streven naar een gezond monetair systeem, zich daarbij baserend op de beginselen, tot uitdrukking gebracht in de Bretton Woods Overeenkomsten. Dit vereist onder andere, dat in elk der landen slechts één circulatiebank werkzaam zal zijn. De monetaire politiek van elk der beide landen zal gericht zijn op het bereiken en handhaven van een stabiele interne en externe waarde van de munteenheid en op het bevorderen van een vrij betalingsverkeer.

Artikel 15.

De Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zal ook zolang zij het lidmaatschap van het Internationale Monetaire Fonds nog niet heeft verkregen, de regels, welke een lid van het Fonds heeft in acht te nemen, naleven. Voorts zal overleg worden gepleegd tussen Nederland en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië teneinde haar zo spoedig mogelijk het lidmaatschap van het Fonds te doen verwerven.

Artikel 16.

Over wijziging van de wisselkoers van de munteenheden van Nederland en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zal tussen de beide landen voorafgaand overleg worden gepleegd.

Artikel 17.

Zolang de internationale of interne omstandigheden een deviezenregime noodzakelijk maken, zullen Nederland en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië overleg plegen terzake van voor de wederpartij van wezenlijk belang zijnde punten van het te voeren deviezenbeleid.

Artikel 18.

1. Onder voorbehoud van het bepaalde in het vijfde lid staat de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië transfer naar Nederland toe:

a. ten behoeve van bedrijven, uitmakend een actieve Nederlandse investering, voor:

I. de noodzakelijke uitgaven in Nederland ten behoeve van het bedrijf in Indonesië;

II. de bijdragen aan fondsen voor pensioen-, invaliditeits-, weduwen- en wezen- en andere sociale voorzieningen ten behoeve van het personeel, een en ander voorzover de premiën en bijdragen noodzakelijk zijn tot dekking van uitkeringen aan Nederlanders;

III. rente en contractueel verschuldigde aflossing van in Nederland ten behoeve van het bedrijf in Indonesië geleende gelden;

IV. de jaarlijkse winsten en de afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik;

b. van dividenden, voor wat betreft passieve investeringen van uit Nederland;

c. aan levensverzekeringsmaatschappijen voor premiën, benevens aan fondsen voor pensioen-, invaliditeits-, weduwen- en wezen- en andere sociale voorzieningen, voor bijdragen, zowel van werkgevers als van werknemers, een en ander voorzover de premiën en bijdragen noodzakelijk zijn tot dekking van uitkeringen aan Nederlanders;

d. aan in Indonesië werkzame of werkzaam geweest zijnde Nederlanders voor hun spaargelden, alsmede voor de bedragen bestemd voor het onderhoud van buiten Indonesië verblijvende personen tot wier onderhoud zij wettelijk of moreel gehouden zijn;

e. ten behoeve van in Indonesië werkzame of werkzaam geweest zijnde Nederlanders c.q. hun nabestaanden, die buiten Indonesië verblijven, voor pensioen, verlofstractementen en andere dergelijke periodieke sociale uitkeringen, voorzover die niet uit de onder *a* en *c* bedoelde fondsen worden bestreden;

f. van rente en aflossing op door lagere openbare rechtsgemeenschappen of door andere op hoog gezag ingestelde rechtspersonen uitgegeven obligatieleningen en aangegane ondershandse leningen, voor zover de betalingen van die rente en aflossing in verband met de financiële positie van bedoelde rechtsgemeenschappen en andere rechtspersonen niet wettelijk zijn of worden opgeschort.

2. Het bepaalde in het eerste lid kan voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen door partijen nader worden uitgewerkt.

3. Onverminderd het in het eerste en tweede lid bepaalde zal de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds overmakingen naar Nederland en het buitenland toestaan.

4. Voor bedrijven welke in Indonesië gedeeltelijk met Indonesisch kapitaal werken, zullen de in de vorige leden vermelde regelingen gelden, voorzover de feitelijke verhoudingen zulks vereisen.

5. De Republiek der Verenigde Staten van Indonesië behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde transfers van gelden zodanige beperkingen aan te leggen, welke zij noodzakelijk acht in verband met haar deviezenpositie. Terzake van deze beperkingen zal tussen de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en Nederland vooraf overleg plaats vinden, welk overleg, tenzij de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en Nederland anders overeenkomen, zal plaats vinden middels een nader in te stellen technische commissie.

6. De transfer van rente en aflossing welke voortvloeit uit de op het tijdstip van de souvereiniteitsoverdracht door de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië overgenomen schulden, wordt beheerst door de ten aanzien van deze schulden gemaakte of te maken afspraken.

7. Het bepaalde in de vorige leden is op overeenkomstige wijze van toepassing ten aanzien van de overmakingen van Nederland naar Indonesië.

8. Ingeval van onteigening, nationalisatie enz. c.q. naasting staat de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië transfer toe van de schadeloosstelling c.q. naastingsprijs binnen drie jaren na de datum van het ontstaan van het recht op de schadeloosstelling c.q. naastingsprijs.

In gevallen waarin de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië het onmogelijk acht om de schadeloosstelling c.q. naastingsprijs binnen drie jaar over te maken, zal de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zulks moeten verklaren alvorens tot onteigening, nationalisatie enz. over te gaan. Een arbitrage-commissie, bestaande uit een vertegenwoordiger van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, een vertegenwoordiger van de rechthebbende en een derde lid, door beide eerstgenoemden in onderling overleg aan te wijzen, zal een bindende beslissing geven met betrekking tot de vraag of en in hoeverre een uitzondering mag worden gemaakt op bovenbedoelde termijn van 3 jaar. Ingeval onmiddellijke overmaking niet plaats heeft, zal de in Indonesisch Courant uitgedrukte schadeloosstelling c.q. naastingsprijs tegen de koers van de dag van ontstaan van het recht worden gecrediteerd in de valuta van het land waaruit het geïnvesteerde kapitaal afkomstig is.

Artikel 19.

1. Zolang de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië schuldverplichtingen heeft aan Nederland, waaronder mede begrepen de door Nederland ten behoeve van schulden van Indonesië gegeven garanties, zal de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië van tevoren met Nederland overleg plegen, zowel terzake van voorgenomen wijzigingen in de op het tijdstip van de souvereiniteitsoverdracht van kracht zijnde Muntwet en de Javasche Bankwet, als ten aanzien van een door de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië nieuw vast te stellen muntwet en circulatiebankwet en eventueel nadien daarin aan te brengen wijzigingen. Voorts zal de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, zolang de bovenbedoelde schuldverhouding bestaat, in het algemeen overleg plegen, wanneer zij belangrijke maatregelen overweegt op monetair en financieel gebied, voorzover belangen van Nederland daarbij zijn betrokken.

2. Met de in het eerste lid bedoelde schuldverplichtingen en garanties worden bedoeld die welke bestaan op het tijdstip der souvereiniteitsoverdracht.

3. De Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zal tot het tijdstip van het van kracht worden van de nieuwe circulatiebankwet overleg met Nederland plegen inzake de benoeming en het ontslag van president en directeuren van de circulatiebank en inzake de credietverlening van de circulatiebank aan de overheid.

4. Teneinde het in het eerste lid bedoelde overleg zo soepel mogelijk te doen verlopen, zal aan de staf van de Hoge Commissaris in Indonesië een door de Nederlandse Regering aangewezen adviseur voor aangelegenheden op het gebied van het geldwezen en het circulatiebankwezen worden toegevoegd.

AFDELING C.

HANDELSPOLITIEKE BETREKKINGEN EN SAMENWERKING.

Artikel 20.

1. In overeenstemming met de beginselen van onafhankelijkheid en souvereiniteit zullen de Regeringen van Neder-

land en van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië de uiteindelijke verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen handelspolitiek, zowel wat betreft het binnen- als buitenland.

2. Gebaseerd op deze beginselen kan een vrijwillige samenwerking tussen beide landen in hun buitenlandse handelsbetrekkingen tot gemeenschappelijk voordeel strekken. Deze samenwerking zal bevorderd worden door nauw contact en voortdurend beraad tussen de beide landen over de verschillende aspecten van de buitenlandse handel. Voorzover het voor beide partijen voordelig en nuttig wordt geoordeeld, zal gemeenschappelijk worden opgetreden. Elk van beide partijen zal zich nauwkeurig rekenschap geven van de economische belangen waarvoor de ander de verantwoordelijkheid draagt.

3. Bedacht dient te worden dat economisch, geografisch en politiek, Nederland tot de Europese sfeer en Indonesië tot de Aziatische sfeer behoort. Historisch hebben nauwe economische betrekkingen tussen Europa en Azië in het algemeen, en tussen Nederland en Indonesië in het bijzonder, steeds en tot op dit ogenblik bestaan. Als gevolg der historie, heeft Nederland aanzienlijke economische en financiële belangen in Indonesië. De Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zal met deze belangen naar behoren rekening houden.

Artikel 21.

1. De buitenlandse handelsbetrekkingen van Nederland met de andere landen zullen worden geregeld door en zullen onder toezicht staan van de Nederlandse Regering of haar daartoe geëigende organen op haar of hun uitsluitend gezag.

De buitenlandse handelsbetrekkingen van Indonesië met de andere landen zullen worden geregeld door en zullen onder toezicht staan van de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië of haar daartoe geëigende organen op haar of hun uitsluitend gezag.

2. Ten aanzien van de landen van Europa zullen Nederland en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië op handelspolitiek gebied samenwerken. In het laatste kwartaal van 1950 zal omtrent een voortzetting van deze samenwerking, en de wijze waarop, opnieuw overleg worden ge-

pleegd, waarbij beide partijen vrij zijn opnieuw hun standpunt te bepalen.

3. Ieder der beide partijen behoudt het uiteindelijke beschikkingsrecht en de handelspolitieke eigendom over de eigen producten en bepaalt zelf welke producten en in welke hoeveelheden het wil inzetten en welke tegenprestaties het daartegenover verwacht.

Dit betekent ook, dat in een bepaald geval een der beide partijen slechts een gering of zelfs in het geheel geen aandeel in een bepaalde handelsovereenkomst kan nemen; in het laatste geval zal de andere partij gerechtigd zijn, uit hoofde van zijn eigen belangen, niettemien een overeenkomst aan te gaan.

De niet-deelnemende partij evenwel zal dan zich ervan onthouden afzonderlijk een handelsovereenkomst met het betreffende derde land af te sluiten.

Wanneer een gezamenlijke handelsovereenkomst is afgesloten, zal niet een van de partijen zonder voorafgaand overleg wijziging aanbrengen.

4. Bij de onderhandelingen met derde landen treden Nederland en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, hoewel twee afzonderlijke delegaties vormend, tegenover het derde land gecoördineerd op. Tevoren moet onderling overeenstemming zijn bereikt over een gemeenschappelijk beleid.

5. De handelsovereenkomsten zullen worden getekend enerzijds door of namens de Regering van Nederland en door of namens de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, anderzijds door het betreffende derde land.

6. Ten aanzien van degene die namens de gecoördineerde delegaties zal optreden, zal tevoren worden beslist. Als richtlijn kan hierbij gelden, dat als zodanig kan worden aangewezen de voorzitter van die delegatie, welke de meeste belangen bij de betreffende bespreking heeft.

7. De op het tijdstip van de souvereiniteitsoverdracht geldende handels- en monetaire overeenkomsten zullen, voorzover deze op Indonesië betrekking hebben, door de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië worden overgenomen en uitgevoerd. Een opgave van deze overeenkomsten is vermeld in bijgaande lijst.

Artikel 22.

1. Ten aanzien van het handelsverkeer tussen Nederland en Indonesië zijn beide landen bereid een systeem van wederkerige voorkeursbehandeling in overweging te nemen. Een dergelijk systeem dient tot beider voordeel te strekken en mag niet in strijd komen met internationale overeenkomsten.

2. Beide landen gaan er in beginsel van uit, dat zij elkaar voor hun respectievelijke producten geen hogere prijzen zullen betalen, dan daarvoor elders onder gelijke voorwaarden gelden.

3. Ten aanzien van de invoer in beide landen zullen zowel de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië als Nederland onderscheidenlijk lijsten van importbehoeften opstellen, in overeenstemming met de behoefte van elk land aan consumptiegoederen en aan goederen voor rehabilitatie en wederopbouw en gebaseerd op de beschikbaarheid van deviezen.

Ten aanzien van de uitvoer uit beide landen zullen Nederland en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië exportgoederen reserveren voor en toewijzen aan de ander.

4. Gebaseerd op het eerste en derde lid van dit artikel zullen beide partijen telkens voor een nader vast te stellen tijdsduur overeenkomsten aangaan voor het onderlinge handelsverkeer. De voor de periode 1 October 1949 tot 1 October 1950 opgestelde modus vivendi (thans te noemen handelsaccoord) wordt voorshands door beide landen aanvaard. In het eerste kwartaal van 1950 zullen tussen beide partijen besprekingen plaats hebben over het verloop en eventuele wijzigingen van deze overeenkomst.

5. Gedurende de periode waarvoor bepaalde contingenten gelden, zullen in principe geen invoer-, uitvoer- of deviezenvergunningen worden geweigerd voorzover het betreft een tussen koper en verkoper overeengekomen transactie vallende binnen het kader der overeengekomen contingenten. Indien bijzondere omstandigheden afwijking van dit beginsel noodzakelijk maken, zal hierover met de andere partij voorafgaand overleg worden gepleegd.

6. Ten aanzien van het handelsverkeer en daarmede verband houdende aangelegenheden kunnen Nederland en

Indonesië een beroep op elkaar doen voor assistentie en medewerking. Beide partijen gaan ermede accoord dat elk deze assistentie zal verlenen indien daartoe behoefte bestaat en ze raadzaam wordt geacht.

7. Zouden veranderingen of amendementen in de afgesproken contingenten nodig worden geacht, dan zullen beide partijen hiertoe in onderling overleg besluiten.

Artikel 23.

1. De tussen Nederland en Indonesië bestaande regeling, luidens welke het betalingsverkeer tussen de beide landen onderling en met een aantal andere landen voor zoveel nodig wordt afgewikkeld over een commerciële rekening, genaamd C-rekening nieuwe stijl, blijft na het tijdstip van de souvereiniteitsoverdracht voorshands van kracht.

2. Bij de besprekingen, die overeenkomstig artikel 22, vierde lid, in het eerste kwartaal van 1950 tussen beide landen zullen plaats vinden, zal overleg worden gepleegd, of en zo ja, welke wijzigingen in het vigerende stelsel gewenst zijn.

Voorzover eventuele wijzigingen tussen Nederland en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië kunnen worden geregeld, zullen deze zo spoedig mogelijk van kracht worden; voorzover zij de verhouding met derde landen betreffen, zal binnen het kader van de bestaande overeenkomsten overleg worden gepleegd.

Artikel 24.

1. Aanbevolen wordt dat Nederland een handelsvertegenwoordiging benoemt bij de Nederlandse Hoge Commissaris in Indonesië om haar Regering te vertegenwoordigen, nauw contact te onderhouden met de economische organen van de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en deze, indien en wanneer nodig of raadzaam geacht, assistentie te verlenen.

Aanbevolen wordt dat de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië een handelsvertegenwoordiging bij de Indonesische Hoge Commissaris in Nederland benoemt om haar Regering te vertegenwoordigen, nauw contact te onderhouden met de economische organen van de Nederlandse Regering en deze, indien en wanneer nodig of raadzaam geacht, assistentie te verlenen.

2. Het beheer van de in- en uitvoercontingenten en de daarbij behorende betalingsvergunningen berust in Nederland bij de Nederlandse Regering en de door haar daartoe aangewezen organen; ditzelfde beheer berust in Indonesië bij de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en de door haar daartoe aangewezen organen.

AFDELING D.

SCHULDENREGELING.

Artikel 25.

Ten laste van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië komen:

A. De navolgende geconsolideerde leningen, berekend per 31 December 1949:

1. De Nederlands-Indische Lening 1935, rentende 3½% [uitgegeven krachtens de Nederlands-Indische Leningwet 1934 (Staatsblad No. 558) j°. de Nederlands-Indische Conversie-leningwet 1934 (Staatsblad No. 425), zoals deze is gewijzigd bij de wet van 1 November 1934 (Staatsblad No. 559)]. Stand per 31 December 1949 ƒ 36 650 000.—. Resterende looptijd 21 jaar.

2. De Nederlands-Indische Conversielening 1937, rentende 3% [uitgegeven krachtens de Nederlands-Indische Conversie-leningwet 1934 (Staatsblad No. 425)]. Stand per 31 December 1949 ƒ 90 000 000.—. Resterende looptijd 18 jaar.

3. De Nederlands-Indische Lening 1937 A, rentende 3% [uitgegeven krachtens de Nederlands-Indische Conversieleningwet 1937 (Staatsblad No. 904)]. Stand per 31 December 1949 ƒ 616 250 000.—. Resterende looptijd 25 jaar.

4. Aandeel van Indonesië in de Nederlandse Nationale Werkelijke Schuld 1896, rentende 3% (Wet van 30 December 1895, Staatsblad No. 236). Stand per 31 December 1949 ƒ 3 300 000.—. Resterende looptijd 3 jaar.

5. De 3% Indonesische Lening 1962—64 (overeenkomst van 19 Mei/8 Juni 1949) zijnde het krachtens artikel 4,

tweede lid, van de overeenkomst van 8/14 April 1938 geconverteerde aandeel van Indonesië in de 3—3½% Nederlandse Staatslening 1938, welke lening krachtens de Conversieleningwet 1948 (Staatsblad No. I 115) en de Leningwet 1946 (Staatsblad No. G 143), gewijzigd bij de wetten van 23 November 1946 (Staatsblad No. G 333) en van 12 Februari 1948 (Staatsblad No. I 52), geconverteerd werd. Stand per 31 December 1949 ƒ 79 912 000.—, welk bedrag op 1 Juni 1964 in zijn geheel moet worden afgelost.

6. Beleningen bij de Nederlandsche Bank en Javasche Bank, rentende 3% (overeenkomsten van 14 en 16 Januari 1932, later gewijzigd op 28 December 1932) op onderpand van krachtens de wet van 25 Juli 1932 (Staatsblad No. 393), later gewijzigd bij de wet van 15 Maart 1933 (Staatsblad No. 99), aan Indonesië ter beschikking gestelde Nederlandse Schatkistbiljetten. Stand per 31 December 1949 totaal ƒ 44 624 775.—. Resterende looptijd 13½ jaar.

B. De schuld aan derde landen, berekend per 31 December 1949:

1. Lening Export-Import Bank ten behoeve van Indonesië in het kader van de E.C.A.-hulp (overeenkomst van 28 October 1948). Stand per 31 December 1949 U.S. $ 15 000 000.—. Resterende looptijd 24 jaar. Rente 2½% vanaf 30 Juni 1952.

2. A line of credit granted by the United States Government to the Netherlands Indies Government for the purchase of United States Surplus Property (overeenkomst van 28 Mei 1947). Stand per 31 December 1949 U.S. $ 62 550 412.— Resterende looptijd 31½ jaar. Rente 2%.

3. Lening van Canada (overeenkomst van 9 October 1945). Stand per 31 December 1949 Can. $ 15 452 188,21. Resterende looptijd 6 jaar. Rente 2¼%.

4. Settlement between the Government of Australia and the Government of Indonesia (overeenkomst van 17 Augustus 1949). Stand per 31 December 1949 A. £ 8 500 000.—. Resterende looptijd 10 jaar. Rentevrij.

C. De volgende schulden aan het Koninkrijk der Nederlanden, berekend per 31 December 1949 tot de hieronder vermelde maximum bedragen:

1. Het aandeel van Indonesië is de swing, voorzien in het Brits Monetair Accoord ad £ 5 000 000.— (f 53 500 000.—).

2. Een swing op de C-rekening van f 40 000 000.—.

3. Het debetsaldo op de HG/HI-rekening van f 80 000 000.—.

4. Het debetsaldo op de Bretton Woods-rekeningen van f 95 000 000.— (hiertegenover staat een activum van hetzelfde bedrag als deelneming in Interfund en Interbank).

D. Alle interne schulden van Indonesië op de datum van de souvereiniteitsoverdracht.

Artikel 26.

De Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië aanvaardt de verantwoordelijkheid voor betaling zowel van rente als van aflossing op de in het vorige artikel bedoelde schulden en verkrijgt voorzover de schulden onder C betreft de in de bestaande overeenkomsten vastgestelde rechten.

Artikel 27.

De overige schulden van de rechtspersoon Indonesië aan het Koninkrijk der Nederlanden op de datum van de souvereiniteitsoverdracht worden, nadat hierop de schulden van Nederland aan de rechtspersoon Indonesië op dezelfde datum in compensatie zijn gebracht, vervallen verklaard, hetgeen neerkomt op een vermindering van de externe schuld aan Nederland met een berekend bedrag van f 2 000 000 000.— per 31 December 1949.

AFDELING D.

SLOTBEPALING.

Artikel 28.

Het bepaalde in deze overeenkomst heeft, voorzover het Koninkrijk der Nederlanden betreft, uitsluitend betrekking op Nederland.

BIJLAGE VAN DE ONTWERP FINANCIËLE EN ECONOMISCHE OVEREENKOMST

Behoort bij Wet van 21 December 1949, *Staatsblad* No. J 570.

LIJST VAN HANDELS- EN MONETAIRE ACCOORDEN, WAARIN INDONESIË PARTICIPEERT

Landen	Handelsaccoorden Looptijd	Monetaire accoorden Looptijd	Termijn van opzegging
1. Argentinië	1- 4-'48—31-12-'52	1- 4-'48 — 31-12-'52.	—
2. België	1- 7-'49—30- 6-'50	21-10-'43 — onbepaald; opzegbaar vanaf 1-1-'49 op 1 Januari van ieder jaar.	2 jaar
3. Bulgarije	1- 1-'49—31-12-'49	1- 1-'49 — 31-12-'49 met stilzwijgende verlenging telkens van een jaar.	3 maanden
4. Denemarken	1- 7-'49—30- 6-'50	31- 1-'46 — onbepaald.	3 maanden
5. Oost-Duitsland	1- 7-'49—30- 6-'50	1- 7-'49 — 30-6-'50.	—
6. West-Duitsland.	1- 9-'49—31- 8-'50	1- 9-'49 — 31-12-'50 met stilzwijgende verlenging van telkens 6 maanden.	2 maanden
7. Engeland	1- 1-'49—31-12-'49	7- 9-'45 — 7-9-'50.	3 maanden
8. Finland	1- 6-'49—31- 5-'50	1- 6-'49 — onbepaald.	6 maanden
9. Frankrijk	1- 8-'49—30- 6-'50	9- 4-'46 — onbepaald.	3 maanden
10. Hongarije	1- 1-'49—31-12-'49	1- 1-'49 — 31-12-'49 met verlenging van een jaar behoudens opzegging.	3 maanden
11. Israël	1- 2-'49—31- 1-'50	1- 2-'49 — 31-1-'50.	1 maand
12. Italië	1- 4-'49—31- 3-'50	30- 6-'48 — onbepaald. [3]	—
13. Joegoslavië	1- 6-'49—31-10-'49 [1]	1- 2-'48 — onbepaald (niet opzegbaar voor 1-2-'51).	12 maanden
14. Noorwegen	1- 1-'48—31-12-'49	6-11-'45 — 1 jaar met onbepaalde stilzwijgende verlenging.	—
15. Oostenrijk	4-12-'48— 7- 2-'50	3-12-'46 — onbepaald.	3 maanden voor het einde van elk jaar
16. Polen	1- 1-'49—31-12-'49	1- 1-'49 — 31-12-'49 met stilzwijgende verlenging.	3 maanden
17. Portugal	1- 7-'49—30- 6-'50	1- 3-'46 — 1 jaar met stilzwijgende verlenging.	3 maanden
18. Rusland	10- 6-'48—10- 6-'49 [2]	10- 6-'48 — onbepaald.	6 maanden
19. Spanje	1- 6-'49—31- 5-'50	21-10-'46 — onbepaald.	2 maanden
20. Tsjechoslowakije	10- 5-'49— 1- 5-'50	15-11-'46 — onbepaald.	3 maanden
21. Zweden	1- 3-'49—28- 2-'50	30-11-'45 — 31-12-'49, tenzij anders overeengekomen.	3 maanden
22. Zwitserland ...	1-10-'49—30- 9-'50	24-10-'45 — voor 3 jaren, daarna stilzwijgend van jaar tot jaar.	3 maanden
23. Brazilië	—	1- 9-'48 — onbepaald; voorlopige overeenkomst.	2 maanden
24. Uruguay	15- 7-'48— onbepaald	12- 6-'47 — 1 jaar met stilzwijgende verlenging.	3 maanden
25. Turkije	6- 9-'49— 1- 7-'50	6- 9-'49 — 1-7-'50 behoudens stilwijgende verlenging.	3 maanden
26. Canada	—	28- 1-'48 — onbepaald. [3]	—

1) *Onderhandelingen over een nieuw verdrag worden thans gevoerd.*

2) *In afwachting van komende onderhandelingen lopen de goederencontingenten onbepaald door.*

3) *Dienstenverkeer.*

ONTWERP CULTURELE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE REPUBLIEK DER VERENIGDE STATEN VAN INDONESIË.

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigide Staten van Indonesië, bezield door de gelijke wens om haar wederzijdse betrekkingen op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur in het algemeen te bevorderen,

hebben besloten de navolgende overeenkomst aan te gaan betreffende de culturele betrekkingen tussen de beide staten.

HOOFDSTUK I.

GRONDSLAG EN KARAKTER.

Artikel 1.

De culturele betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië berusten op basis van volledige vrijheid, vrijwilligheid en wederkerigheid.

Deze culturele betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië dragen een universeel karakter en zijn gericht op de verwezenlijking van de vrije ontplooiing van de vrije menselijke geest.

HOOFDSTUK II.

DOEL.

Artikel 2.

Doel van de overeenkomst is bevordering van de culturele betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

HOOFDSTUK III.

MIDDELEN TOT HET BEREIKEN VAN HET DOEL.

Artikel 3.

Er wordt ingesteld een gemengde commissie, bestaande uit veertien leden, waarvan ieder van de Regeringen der deelgenoten zeven leden benoemt.

Artikel 4.

De commissie heeft tot taak de verwezenlijking van de samenwerking op basis van deze overeenkomst te bevorderen. In een instructie, welke door de Regeringen van beide deelgenoten gezamenlijk wordt vastgesteld, worden regelen gegeven voor de uitvoering van deze taak. In deze instructie zal mede worden bepaald, dat aan de gemengde commissie de bevoegdheid wordt verleend om werkcommissies in te stellen voor de behandeling van bijzondere onderwerpen. In deze werkcommissies kunnen personen benoemd worden, die zelf geen leden der commissie zijn.

Artikel 5.

Ten aanzien van het bepaalde in de artikelen 6, 12 en 14 zal elk der beide Partijen in de gemengde commissie de aanbevelingen en voorstellen, waarover in de gemengde commissie overeenstemming is bereikt, voorleggen aan de eigen Regering.

Ieder der beide Regeringen kan vervolgens deze voorstellen en aanbevelingen voorleggen aan de conferentie van ministers.

Artikel 6.

De beide deelgenoten streven ernaar om in het eigen land een redelijke kennis te bevorderen van de cultuur van de andere deelgenoot in haar essentiële bestanddelen.

Dit streven zal mede worden verwezenlijkt door middel van radio, film, pers, bibliotheken, lectuurverspreiding, onderwijs en kunstmanifestaties.

Artikel 7.

De beide deelgenoten verbinden zich de uitwisseling van radiouitzendingen op cultureel gebied en nieuwsberichten te bevorderen.

Artikel 8.

De beide deelgenoten verbinden zich elkaar steun te verlenen ten behoeve van de ontwikkeling van onderwijs en wetenschap en in het algemeen ter bevordering van de cultuur, indien zulks door een der deelgenoten wordt verzocht.

Artikel 9.

Onverminderd het bepaalde onder artikel 8 zullen beide deelgenoten de uitwisseling van hoogleraren, leraren, deskundigen op het gebied van wetenschappen, opvoeding, onderwijs en kunsten bevorderen.

Artikel 10.

De beide deelgenoten kunnen op elkaars grondgebied instituten van onderwijs, kunst en van andere culturele aard oprichten en in stand houden met inachtneming van de in het land van oprichting geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 11.

Aan de oprichting en het instandhouden van instituten van onderwijs, van geestelijke zorg, van sociale zorg en in het algemeen instellingen van culturele aard op het grondgebied van de andere deelgenoot door corporaties, stichtingen, verenigingen of particuliere personen, zullen geen belemmeringen in de weg worden gelegd, behoudens de bevoegdheid van elk van beide Regeringen om regelingen te treffen in het belang van de openbare veiligheid en het zedelijk welzijn van het volk in maatschappij en staat, welke niet in strijd zijn met de menselijke rechten, zoals deze door de Verenigde Naties zijn erkend.

Artikel 12.

Het vraagstuk van de bevoegdheden, die over en weer aan het bezit van getuigschriften en graden kunnen worden verbonden, alsmede de mogelijkheden ten aanzien van de

aanpassing van de verschillende soorten van onderwijs in het ene land aan die van het andere land, vormen een voorwerp van studie voor de gemengde commissie.

Artikel 13.

De beide deelgenoten zullen de gelegenheid scheppen en zo nodig bijstand verlenen voor het verrichten van wetenschappelijke onderzoekingen in het ene land door personen uit het andere land.

Als voorwaarde voor dergelijke onderzoekingen zal gesteld kunnen worden, dat de Regering van het land, waar het onderzoek plaats vindt, van het verloop en van de resultaten van dit onderzoek in kennis wordt gesteld.

Artikel 14.

De beide deelgenoten zullen bevorderen, dat beurzen beschikbaar worden gesteld, teneinde studerenden of onderzoekers uit beide landen in de gelegenheid te stellen hun studiën of onderzoekingen in het andere land te beginnen of voort te zetten.

Zij zullen tevens bevorderen, dat beoefenaren van wetenschap, techniek of kunst van het ene land in de gelegenheid worden gesteld een stage door te brengen in het andere land.

Artikel 15.

De beide deelgenoten zullen het leggen van contacten tussen door de respectieve landen erkende organisaties, werkzaam op cultureel gebied, daaronder begrepen jeugdorganisaties, bevorderen, met inachtneming van de belangen van de openbare veiligheid en het zedelijk welzijn van het volk in maatschappij en staat.

Artikel 16.

Beide deelgenoten achten het wenselijk, dat boeken, couranten en tijdschriften, die in één der beide landen zijn uitgegeven, vrijelijk toegang vinden op het grondgebied van het andere land, waarbij gestreefd wordt naar vrijdom van rechten en van andere beperkende maatregelen. De invoer van genoemd materiaal kan slechts beperkt worden op grond van maatregelen in het belang van de openbare veiligheid en het zedelijk welzijn van het volk in maatschappij en staat.

Artikel 17.

Beide deelgenoten zullen de vertaling van geschriften verschenen in de taal (talen) van het ene land, in de taal (talen) van het andere land naar vermogen bevorderen.

Artikel 18.

Beide deelgenoten zullen samenwerken de stand van de wetenschap met betrekking tot Indonesië op het tijdstip van de souvereiniteitsoverdracht, inzonderheid wat betreft natuurwetenschappen, techniek, medische wetenschappen, geschiedenis, taal, economie en adatrecht te inventariseren.

HOOFDSTUK IV.

OVERDRACHT VAN OBJECTEN VAN CULTURELE WAARDE.

Artikel 19.

Objecten van culturele waarde, die afkomstig zijn uit Indonesië, en die anders dan door privaatrechtelijke wijze van eigendomsverkrijging in het bezit gekomen zijn van de Nederlandse Regering dan wel van de voormalige Nederlandsch-Indische Regering, zullen worden overgedragen aan de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, als gevolg van de souvereiniteitsoverdracht van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Ter uitvoering van eerste lid zal de gemengde commissie op de voet van artikel 5 een afzonderlijke regeling voorstellen, Daarin zullen tevens voorzieningen worden opgenomen betreffende een mogelijke uitwisseling van voorwerpen van culturele of historische waarde, die het eigendom of in het bezit zijn van het ene land en afkomstig uit of van belang voor het andere land.

HOOFDSTUK V.

JAARVERSLAG.

Artikel 20.

De gemengde commissie brengt van haar werkzaamheden jaarlijks schriftelijk rapport uit aan elk der beide Regeringen.

ONTWERP-OVERGANGSOVEREENKOMST.

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1.

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië aanvaarden een toescheiding van staatsburgers overeenkomstig de aan deze overgangsovereenkomst gehechte overeenkomst.

Artikel 2.

1. De indeling van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië in deelstaten zal uiteindelijk worden bepaald door de Constituante in overeenstemming met de bepalingen van de voorlopige Constitutie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, met dien verstande, dat door de bevolkingen van gebieden, die door de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië op aanbeveling van de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië of een ander orgaan van de Verenigde Naties worden aangewezen, een plebisciet onder toezicht van de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië of bedoeld ander orgaan zal worden gehouden over de vraag, of zij zich tot een afzonderlijke deelstaat zullen vormen.

2. Elke deelstaat zal in de gelegenheid worden gesteld de definitieve Constitutie te aanvaarden. Ingeval een deelstaat deze niet aanvaardt, zal hij de bevoegdheid hebben te onderhandelen omtrent een speciale verhouding tot de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel 3.

1. Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië erkennen en aanvaarden, dat alle bevoegdheden en verplichtingen van de Gouverneur-Generaal van Indonesië, voortspruitende uit de contracten door deze met Zelfbesturen gesloten, door de souvereiniteitsoverdracht overgaan op de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, dan wel, indien het staatsrecht van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië daartoe aanleiding geeft, op een deelgebied.

2. Door de overdracht van souvereiniteit aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië worden de Zelfbestuurders van rechtswege ontslagen van hun eed van trouw aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden.

3. De Republiek der Verenigde Staten van Indonesië erkent de bijzondere positie van de Zelfbesturen op de voet van de desbetreffende bepalingen in haar Constitutie en in die harer deelgebieden, waarin rechtsgeschillen inzake de positie der Zelfbesturen worden onderworpen aan de uitspraak van een onafhankelijk orgaan van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 4.

1. Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië erkennen en aanvaarden, dat alle rechten en verplichtingen van Indonesië op de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië overgaan, zowel die van privaatrechtelijke als die van publiekrechtelijke aard, voor zover daaromtrent in de onder het Uniestatuut begrepen bijzondere overeenkomsten niet anders is bepaald.

2. De Republiek der Verenigde Staten van Indonesië is aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de voormalige wettig bestaande publiekrechtelijke gemeenschappen in Indonesië, welke in de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië of haar onderdelen zijn opgelost en garandeert de nakoming der verplichtingen van publiekrechtelijke gemeenschappen, welke als zodanig voortbestaan, voor zover daaromtrent in de financiële en economische overeenkomst niet anders is bepaald.

3. Het bepaalde in de voorgaande leden is niet van toepassing op de residentie Nieuw-Guinea in verband met het feit als vermeld in artikel 2 van het Charter van Souvereiniteitsoverdracht, dat het nog niet mogelijk is geweest de standpunten van partijen nopens Nieuw-Guinea overeen te brengen.

Artikel 5.

1. Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië verstaan, dat, met inachtneming van het tweede lid, de rechten en verplichtingen van het Koninkrijk, welke voortvloeien uit de door het Koninkrijk

gesloten verdragen en andere internationale overeenkomsten, slechts worden aangemerkt als rechten en verplichtingen van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, indien en voorzover deze verdragen en overeenkomsten van toepassing zijn op het rechtsgebied van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, en met uitzondering van de rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit verdragen en overeenkomsten, waarbij de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië uit hoofde van de bepalingen van deze verdragen of overeenkomsten geen partij kan worden.

2. Onverminderd de bevoegdheid van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië om de in het eerste lid bedoelde verdragen en overeenkomsten op te zeggen of de werking daarvan op andere wijze voor haar rechtsgebied overeenkomstig de bepalingen van deze verdragen en overeenkomsten te beëindigen, is het eerste lid niet van toepassing op verdragen en overeenkomsten, ten aanzien waarvan nader overleg tussen de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en het Koninkrijk der Nederlanden tot de conclusie zal leiden, dat deze niet vallen onder de werking van het eerste lid.

Artikel 6.

Voorzieningen betrefende de rechtspositie van de burgerlijke overheidsdienaren in verband met de souvereiniteitsoverdracht zijn opgenomen in de aan deze overgangsovereenkomst gehechte overeenkomst.

Artikel 7.

Het terugtrekken van de Nederlandse strijdkrachten uit Indonesië en de reorganisatie van de door of onder het gezag van de Regering van Indonesië (Nederlands-Indonesische overheid) gevormde en uitgeruste strijdkrachten in Indonesië worden geregeld als voorgeschreven in de aan deze overgangsovereenkomst gehechte „Regelingen betreffende Militaire Aangelegenheden".

Artikel 8.

1. De bestaande wettelijke regelingen en administratieve voorschriften blijven, voorzover zij niet onverenigbaar zijn met de souvereiniteitsoverdracht, met de bepalingen van het

Uniestatuut, van deze overgangsovereenkomst of van enige andere overeenkomst, tussen partijen gesloten, ongewijzigd van kracht als eigen regelingen en voorschriften van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, zolang zij niet door de bevoegde organen van het Koninkrijk der Nederlanden, onderscheidenlijk de bevoegde organen van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië worden buiten werking gesteld of gewijzigd.

2. Waar in deze regelingen en voorschriften wordt gesproken van Nederlandse onderdanen, wordt daaronder verstaan: staatsburgers van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

3. Waar deze regelingen en voorschriften betrekking hebben op schepen of luchtvaartuigen, die gerechtigd zijn tot het voeren van de Nederlandse vlag, hebben zij gelijkelijk betrekking op schepen of luchtvaartuigen, die gerechtigd zijn tot het voeren van de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden en die gerechtigd zijn tot het voeren van de vlag van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 9.

De bevoegdheden, welke volgens de bestaande wettelijke regelingen en administratieve voorschriften in Nederland op het gebied van het algemeen bestuur over Indonesië toekomen aan Nederlandse organen, worden in afwachting van nadere voorzieningen door de bevoegde organen van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië voor deze uitgeoefend door een Gedelegeerde, daartoe aangewezen door de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 10.

Het Koninkrijk der Nederlanden zal bij de Verenigde Naties het lidmaatschap van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië bevorderen.

ONTWERP-OVEREENKOMST BETREFFENDE DE TOESCHEIDING VAN STAATSBURGERS.

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië,

overwegende, dat, op het tijdstip van de souvereiniteitsoverdracht, ten aanzien van de personen, die tot op dat ogenblik onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden waren, voor de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië daaronder begrepen de personen, die volgens de wetgeving van de Republiek Indonesië burgers waren van deze Republiek, dient te worden bepaald of zij de Nederlandse dan wel de Indonesische nationaliteit zullen bezitten,

komen overeen, dat te dien aanzien op dat ogenblik de navolgende bepalingen in werking treden.

Artikel 1.

Meerderjarig in de zin van deze overeenkomst zijn zij, die de volle leeftijd van achttien jaar hebben bereikt of vroeger in het huwelijk zijn getreden.

Wanneer het huwelijk is ontbonden, voordat zij de volle leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, blijven zij meerderjarig.

Artikel 2.

Voor de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zal bij toepassing van deze overeenkomst op personen, die naar de nationaliteitswetgeving van de Republiek Indonesië onmiddellijk voor de souvereiniteitsoverdracht burgers zijn van deze Republiek, waar gesproken wordt van het „verkrijgen" of „verkiezen" van de Indonesische nationaliteit, de Republikeinse nationaliteit worden omgezet in de Indonesische, en, waar gesproken wordt van het „behouden" van de Nederlandse of het „verwerpen" van de Indonesische nationaliteit, de Republikeinse nationaliteit verloren gaan.

Artikel 3.

Meerderjarige Nederlanders behouden de Nederlandse nationaliteit, doch zijn bevoegd, indien zij in Indonesië geboren of aldaar tenminste zes maanden woonachtig zijn,

binnen de gestelde termijn, te verklaren, dat zij de Indonesische nationaliteit verkiezen.

Artikel 4.

1. Behoudens het tweede lid van dit artikel verkrijgen de onmiddelijk vóór de souvereiniteitsoverdracht tot de inheemse bevolking (orang² jang asli) van Indonesië behorende meerderjarige Nederlandse onderdanen-niet-Nederlanders de Indonesische nationaliteit, doch zijn, indien zij buiten Indonesië geboren en in Nederland of buiten de gebieden der deelgenoten van de Unie woonachtig zijn, bevoegd binnen de gestelde termijn te verklaren, dat zij de Nederlandse nationaliteit verkiezen.

2. De in de aanhef van het vorige lid omschreven Nederlandse onderdanen, die in Suriname of in de Nederlandse Antillen woonachtig zijn:

a. verkrijgen, indien zij buiten het Koninkrijk geboren zijn, de Indonesische nationaliteit, doch zijn bevoegd binnen de gestelde termijn te verklaren, dat zij de Nederlandse nationaliteit verkiezen;

b. behouden, indien zij in het Koninkrijk geboren zijn, de Nederlandse nationaliteit, doch zijn bevoegd binnen de gestelde termijn te verklaren, dat zij de Indonesische nationaliteit verkiezen.

Artikel 5.

De onmiddellijk vóór de souvereiniteitsoverdracht meerderjarige uitheemse Nederlandse onderdanen-niet-Nederlanders, die in Indonesië geboren of in de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië woonachtig zijn, verkrijgen de Indonesische nationaliteit, doch zijn bevoegd deze binnen de gestelde termijn te verwerpen;

bezaten zij in dit geval onmiddellijk vóór de souvereiniteitsoverdracht geen andere dan de Nederlandse nationaliteit, dan zullen zij deze herkrijgen;

bezaten zij op gemeld tijdstip mede een vreemde nationaliteit, dan zullen zij, bij verwerping van de Indonesische nationaliteit, de Nederlandse slechts dan herkrijgen, indien zij tegelijkertijd een daartoe strekkende verklaring afleggen.

Artikel 6.

De onmiddellijk vóór de souvereiniteitsoverdracht meerderjarige uitheemse Nederlandse onderdanen-niet-Nederlanders, die niet in Indonesië geboren zijn en in het Koninkrijk woonachtig, behouden de Nederlandse nationaliteit, doch zijn bevoegd binnen de gestelde termijn met verwerping van deze, de Indonesische nationaliteit te verkiezen;

bezaten zij op gemeld tijdstip mede een vreemde nationaliteit, dan zijn zij bevoegd de Nederlandse zonder meer te verwerpen.

Deze bevoegdheid tot verwerping van de Nederlandse nationaliteit al of niet verbonden met die tot verkiezing van de Indonesische nationaliteit komt niet toe aan de uit India of Pakistan afkomstige bewoners van Suriname.

Artikel 7.

De onmiddellijk vóór de souvereiniteitsoverdracht meerderjarige uitheemse Nederlandse onderdanen-niet-Nederlanders, die buiten de gebieden der deelgenoten van de Unie woonachtig en in Nederland, Suriname of de Nederlandse Antillen geboren zijn, behouden de Nederlandse nationaliteit, doch zijn, indien zij geboren zijn uit ouders, die door geboorte in Indonesië Nederlands onderdaan waren, bevoegd binnen de gestelde termijn met verwerping van deze de Indonesische nationaliteit te verkiezen;

bezaten zij op gemeld tijdstip mede een vreemde nationaliteit, dan zijn zij bevoegd de Nederlandse zonder meer te verwerpen.

Zijn zij buiten de gebieden der deelgenoten van de Unie geboren dan is naar gelang van de geboorteplaats van hun vader of van hun moeder, naar de in artikel 1 van de Wet van 1892 op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap gemaakte onderscheidingen, dit artikel of artikel 5 toepasselijk; indien deze ouder ook buiten de gebieden der deelgenoten van de Unie geboren is, zal de geboorteplaats van diens vader of moeder beslissend zijn.

Artikel 8.

Minderjarigen volgen de nationaliteit van hun vader of van hun moeder, naar de in artikel 1 van de bovengenoemde

Wet van 1892 gemaakte onderscheidingen, indien deze onmiddellijk vóór de souverniteitsoverdracht Nederlands onderdaan en in leven is.

Artikel 9.

Op minderjarigen van wie de vader of de moeder, naar de in artikel 1 van genoemde Wet van 1892 gemaakte onderscheidingen, onmiddellijk vóór de souvereiniteitsoverdracht geen Nederlands onderdaan of niet meer in leven is, worden bovenstaande regels rechtstreeks toegepast met dien verstande, dat in het laatste geval als hun woonplaats zal gelden de feitelijke plaats van hun vestiging en dat in beide gevallen, waar sprake is van een verklaring, deze zal kunnen worden gedaan door hun rechtmatige vertegenwoordiger.

Is er geen rechtmatige vertegenwoordiger, dan zullen de gestelde termijnen eerst beginnen te lopen vanaf het ogenblik, dat een vertegenwoordiger is benoemd.

Artikel 10.

De gehuwde vrouw volgt de staat van haar man.

Na ontbinding van het huwelijk is zij gedurende een jaar daarna bevoegd alsnog door een verklaring de nationaliteit te verkrijgen of te verwerpen, die zij, ware zij op het ogenblik van de souvereiniteitsoverdracht niet gehuwd geweest, verkregen had of door het afleggen van een verklaring had kunnen verkrijgen of verwerpen.

Artikel 11.

De uitoefening van het recht van verkiezing of verwerping van een nationaliteit maakt geen tevoren verrichte handeling ongeldig, die geldig zou zijn, indien dit recht niet ware uitgeoefend.

UITVOERINGSBEPALINGEN.

Artikel 12.

De verklaringen van verkiezing of verwerping van nationaliteit kunnen door de daartoe bevoegde personen worden afgelegd voor of toegezonden aan hetzij de Hoge Commis-

sarissen van Partijen, hetzij de gewone dagelijkse rechter van de betreffende persoon, hetzij de ambtenaren, die daartoe door de bevoegde autoriteiten in beide staten alsnog zullen worden aangewezen. In den vreemde zullen deze verklaringen kunnen worden afgelegd voor of toegezonden aan de diplomatieke of consulaire ambtenaren van een van beide Partijen, binnen wier ressort de woonplaats van de betreffende persoon is gelegen.

De onder een schriftelijke verklaring gestelde handtekening of vingertopafdruk moet worden gelegaliseerd.

Aan hem, die een verklaring aflegt of indient, wordt aanstonds een bewijs daarvan uitgereikt of toegezonden.

De gedurende een kalendermaand afgelegde verklaringen worden in de daarop volgende maand in de staatscourant van de staat, wiens ambtenaren daarvan kennis hebben genomen, gepubliceerd, terwijl duplicaten of gewaarmerkte afschriften dier verklaringen maandelijks aan de Regering van de andere staat worden toegezonden.

Beide Partijen verbinden zich om aan de mogelijkheid tot het afleggen der bedoelde verklaringen ruime bekendheid te geven. De verklaringen en de daarvan af te geven bewijsstukken zijn vrij van zegel en kosten.

Artikel 13.

Deze overeenkomst verstaat onder „de gestelde termijn": een tijdvak van twee jaar na de overdracht van de souvereiniteit.

Artikel 14.

Beslissingen over de uitoefening of verhindering van uitoefening van het optierecht kunnen worden gevraagd aan de gewone dagelijkse rechter van de woonplaats van de berokken persoon. Indien deze in de vreemde woont, zullen de Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam en de gewone dagelijkse rechter te Batavia (Djakarta) bevoegd zijn. Hoger beroep en andere rechtsmiddelen staan daartegen open als in burgerlijke zaken. De in kracht van gewijsde gegane beslissing wordt door de Regering van de Partij, in wier rechtsgebied de beslissing gevallen is, aan de Regering van de andere Partij medegedeeld en door deze als zodanig erkend.

AANTEKENING.

Omtrent de nationaliteit van de inwoners van Nieuw-Guinea is, indien de souvereiniteit over dit gebied niet op de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië overgaat, in de bovenstaande bepalingen niets beslist.

ONTWERP-OVEREENKOMST INZAKE DE POSITIE VAN DE BURGERLIJKE OVERHEIDSDIENAREN IN VERBAND MET DE SOUVEREINITEITS-OVERDRACHT.

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zijn het volgende overeengekomen.

Artikel 1.

Op het tijdstip van de souvereiniteitsoverdracht neemt de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië in haar dienst over alle alsdan bij de Regering van Indonesië in vast of tijdelijk dienstverband of op kort verband werkzame burgerlijke overheidsdienaren, waaronder begrepen het onder deze Regering ressorterende personeel van de op de voet van de artikelen 119, 121 en 123 van de Indische Staatsregeling ingestelde zelfstandige gemeenschappen.

Artikel 2.

De Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië aanvaardt met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 5, alle rechten en verplichtingen, welke Indonesië op het tijdstip der souvereiniteitsoverdracht heeft ten aanzien van de in artikel 1 bedoelde overheidsdienaren en de gewezen overheidsdienaren alsmede de nagelaten betrekkingen.

Artikel 3.

De Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zal gedurende een periode van twee jaren na de souvereiniteitsoverdracht geen wijzigingen in de op het tijdstip van de souvereiniteitsoverdracht geldende rechtspositiebepalingen van de in artikel 1 bedoelde overheidsdienaren, voorzover en voorzolang zij de Nederlandse nationaliteit bezitten, te hunnen nadele aanbrengen.

Artikel 4.

De Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië heeft het recht reeds terstond na de souvereiniteitsoverdracht de in artikel 1 bedoelde overheidsdienaren te herschikken en te selecteren.

Artikel 5.

Met behoud van het beginsel, dat op verzoek steeds ontslag wordt verleend ook gedurende de in artikel 3 bedoelde overgangsperiode, geldt ten aanzien van de in hetzelfde artikel bedoelde overheidsdienaren voor een voortijdige dienstbeëindiging het navolgende:

a. bij eervol ontslag niet op verzoek, zowel in als na de overgangsperiode verleend door de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië om redenen van dienstbelang, buiten schuld of toedoen van betrokkene, is de op het tijdstip van ontslag geldende afvloeiingsregeling van toepassing. De kosten hiervan komen ten laste van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië. Voor ontslagen in de overgangsperiode als hier bedoeld geldt de afvloeiingsregeling in bijlage dezes neergelegd.

b. bij ontslag op verzoek verleend in de overgansperiode heeft de betrokkene geen aanspraak op een uitkering door of vanwege de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

c. bij ontslag op verzoek verleend na afloop van de overgangsperiode tengevolge van zodanige wijziging in de dienstvoorwaarden, dat ter beoordeling van de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië doordienen van betrokkene niet in redelijkheid kan worden gevergd, zal een op het tijdstip van ontslag geldende afvloeiingsregeling van toepassing zijn.

Artikel 6.

1. Onder overheidsdienaren bedoeld in de voorgaande artikelen zijn niet begrepen de bedienaren van de godsdienst, die in hun bediening door de Regering van Indonesië als ambtenaren worden bezoldigd.

2. Over de positie van deze groep, alsmede van de op de voet van het „Pensioenreglement voor bijzondere leerkrachten" gepensionneerden zal nader overleg tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië worden gepleegd.

BIJLAGE BIJ DE ONTWERP-OVEREENKOMST INZAKE DE POSITIE VAN DE BURGERLIJKE OVERHEIDSDIENAREN IN VERBAND MET DE SOUVEREINITEITSOVERDRACHT.

Afvloeiingsvoorwaarden.

A. Overheidsdienaren in vaste dienst.

De dienstbeëindiging gaat gepaard met een opwachtgeldstelling gedurende ten hoogste vijf jaren of zoveel korter als nodig is om de volgens de bestaande bepalingen voor toekenning van normaal pensioen vereiste dienst- en leeftijd te bereiken. Het wachtgeld bedraagt gedurende de eerste twee jaar 60% van de eerste ƒ 500.— en 40% van het restant van de laatstelijk genoten activiteitswedde, en vervolgens 40% van die wedde, in beide gevallen tot een maximum van ƒ 750.— 's maands. Na beëindiging van de wachtgeldperiode wordt, indien alsdan een voor pensioen medetellende diensttijd van tenminste tien jaar is bereikt, onafhankelijk van de leeftijd een pensioen toegekend, berekend volgens de bestaande pensioenbepalingen, vermeerderd met 4% van de pensioengrondslag, voorzover daardoor een totaal van 40% van die grondslag niet wordt overschreden.

B. Overheidsdienaren in tijdelijke dienst en vóór 1 Maart 1942 in dienst getreden.

De dienstbeëindiging gaat bij een diensttijd van tenminste tien jaar gepaard met toekenning van een onderstand bij wijze van wachtgeld gedurende ten hoogste één jaar of zoveel minder als nodig is om, wanneer de betrokkenen in vaste dienst waren geweest, de voor toekenning van normaal pensioen vereiste dienst- en leeftijd te bereiken. De ondertstand bij wijze van wachtgeld bedraagt 30% van de activiteitswedde, tot een maximum van ƒ 175.— 's maands, ongeacht de geldende duurte- en gezinstoelagen. Na beëindiging van de wachtgeldperiode, welke binnen de keerkringen doorgebracht voor de helft als diensttijd zal gelden, wordt, indien alsdan een diensttijd van tenminste vijftien jaar is bereikt, onafhankelijk van de leeftijd een onderstand bij wijze van pensioen toegekend ten bedrage van 4/5 van het pensioen,

hetwelk in overeenkomstige gevallen krachtens het bepaalde sub A aan overheidsdienaren in vaste dienst zou toekomen.

C. Kortverbanders.

Aan de dienstbeëindiging worden verbonden de contractueel vastgelegde gevolgen van een tussentijdse verbreking van het dienstverband om uitsluitend bij de dienst gelegen redenen.

D. De bestaande opzeggingstermijnen zijn als volgt:

voor ambtenaren in vaste dienst, één maand;

voor ambtenaren in tijdelijke dienst, die na het ontslag nog inkomsten blijven behouden, twee maanden;

voor ambtenaren in tijdelijke dienst, die na het ontslag geheel buiten inkomsten geraken (dit zijn dus de na-oorlogse tijdelijken), één maand, vermeerderd met één maand voor elk vol jaar dienst, tot een maximum van drie maanden.

E. Indien de wachtgelders en gepensionneerden bedoeld sub A voldoen aan de criteria neergelegd in de artikelen 2 en 3 van het Buitenlands Verlofreglement, zal aan hen, voorzover zij niet reeds uit hoofde van het Overtochtsreglement daarop aanspraak kunnen doen gelden, vrije overtocht naar Nederland worden verleend op de voet van de terzake bestaande bepalingen, met verval van alle eventuele aanspraken op vrije terugreis naar Indonesië.

F. 1. Op uit hoofde van deze regeling toegekend evenredig pensioen of onderstand bij wijze van pensioen, wachtgeld of onderstand bij wijze van wachtgeld, wordt een bedrag gekort, berekend naar een percentage van het inkomen uit arbeid, gelijk aan het voor de berekening van de uitkering van overheidswege toegepaste percentage van de grondslag.

2. Aan ambtenaren, die in het genot zijn van in de voorgaande alinea bedoelde van overheidswege toegekende inkomsten kan, voor zolang zij de leeftijd van vijf en vijftig jaar nog niet hebben bereikt, de verplichting tot het aanvaarden van passende arbeid worden opgelegd.

3. Ingeval de aangeboden passende arbeid niet wordt aanvaard, zal een zelfde percentage als bedoeld in de eerste alinea van het verzuimde inkomen worden gekort.

ONTWERP-OVEREENKOMST INZAKE HET VERLENEN VAN PERSONELE BIJSTAND DOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN TEN BEHOEVE VAN DE BURGERLIJKE OVERHEIDSDIENSTEN DER REPUBLIEK DER VERENIGDE STATEN VAN INDONESIË EN OMGEKEERD.

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zijn het volgende overeengekomen.

Artikel 1.

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zullen vrijelijk personeel voor hun overheidsdiensten kunnen aanwerven onder de staatsburgers en in het rechtsgebied van elkander.

Het Koninkrijk der Nederlanden zal ten behoeve van de Indonesische overheidsdiensten en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zal omgekeerd ten behoeve van de Nederlandse overheidsdiensten medewerking verlenen bij de werving van personeel en de tijdelijke detachering van ambtenaren.

Artikel 2.

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië treden in overleg omtrent de wijze waarop overigens het meest doelmatig de verlening van wederzijdse bijstand kan worden bevorderd.

Artikel 3.

Indien het Koninkrijk der Nederlanden ten behoeve van zijn vertegenwoordiging in Indonesië en anderzijds de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië ten behoeve van haar vertegenwoordiging in Nederland personeel van elkander in dienst wensen te nemen, zullen zij zich hierover tevoren met elkander verstaan en elkander zoveel mogelijk terwille zijn.

ONTWERP-REGELINGEN BETREFFENDE MILITAIRE AANGELEGENHEDEN.

De regelingen betreffende Militaire Aangelegenheden als bedoeld in artikel 7 van de Overgangsovereenkomst zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen.

I.

Regelingen betreffende de Nederlandse zeestrijdkrachten in Indonesië na de souvereiniteitsoverdracht.

II.

Regelingen betreffende de onder Nederlands bevel staande landstrijdkrachten in Indonesië na de souvereiniteitsoverdracht.

III.

Regelingen betreffende de onder Nederlands bevel staande luchtstrijdkrachten in Indonesië na de souvereiniteitsoverdracht.

I.

Regelingen betreffende de Nederlandse zeestrijdkrachten in Indonesië na de souvereiniteitsoverdracht.

Hoofdstuk: I. Algemene beginselen.

Hoofdstuk: II. Taken, welke de Koninklijke Marine zal uitvoeren ten behoeve van de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië gedurende de terugtrekperiode der Koninklijke Marine.

Hoofdstuk: III. Steun bij de opbouw van de Marine van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Hoofdstuk: IV. Wijze van en regelingen inzake het terugtrekken van de Koninklijke Marine.

Hoofdstuk: V. Regeling betreffende de marinebasis Soerabaja.

Hoofdstuk: VI. Afspraken inzake de uitvoering der in de voorafgaande hoofdstukken overeengekomen regelingen.

HOOFDSTUK I.

ALGEMENE BEGINSELEN.

Artikel 1.

Ingevolge de overdracht van de souvereiniteit zal voor de beveiliging ter zee van Indonesië uitsluitend de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië verantwoordelijk zijn.

Artikel 2.

Voor de Koninklijke Marine als Nederlands apparaat zal geen Nederlandse taak in Indonesië bestaan, weshalve de Koninklijke Marine uit Indonesië zal worden teruggetrokken.

Artikel 3.

De beveiliging ter zee is op grond van de voorafgaande artikelen taak van de zeestrijdkrachten van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 4.

De Nederlandse Regering is bereid, op verzoek van de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, steun te verlenen bij de uitoefening van de taken ter zee, als genoemd in artikel 7, voor zover de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië nog niet in staat is deze taken met eigen middelen te vervullen. Deze steun is van aflopend karakter.

Artikel 5.

De Nederlandse Regering is bereid, op verzoek van de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië steun te verlenen bij de opbouw van de Marine der Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, zodat binnen de kortst mogelijke tijd de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië haar taken ter zee met eigen middelen kan vervullen.

Artikel 6.

De termijn, waarbinnen de Nederlandse zeestrijdkrachten uit Indonesië zullen worden teruggetrokken, wordt op één jaar gesteld, tenzij de souvereine Regeringen in onderling overleg anders overeenkomen.

HOOFDSTUK II.

TAKEN, WELKE DE KONINKLIJKE MARINE ZAL UITVOEREN TEN BEHOEVE VAN DE REGERING VAN DE REPUBLIEK DER VERENIGDE STATEN VAN INDONESIË GEDURENDE DE TERUGTREKPERIODE DER KONINKLIJKE MARINE.

Artikel 7.

Op verzoek van de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zal de Koninklijke Marine gedurende haar terugtrekperiode ten behoeve van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië de navolgende taken verrichten:

a. steun aan de maritieme organen van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, belast met de patrouilledienst;

b. mijnenveeg- en mijnenopruimdienst, duik- en bergingsbedrijf;

c. hydrografie;

d. steun met onderdelen van de Marine Luchtvaartdienst.

Artikel 8.

De Nederlandse Regering is bereid op de dag van de souvereiniteitsoverdracht twee korvetten der Koninklijke Marine in eigendom over te dragen aan de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië. Voorts is de Nederlandse Regering bereid, in overleg met de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zo spoedig mogelijk na de souvereiniteitsoverdracht verder een tweetal korvetten, alsmede ander varend en vliegend materieel over te dragen.

Tenslotte is de Nederlandse Regering bereid, een jaar na de souvereiniteitsoverdracht een torpedobootjager aan de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië in eigendom over te dragen.

De zakelijke voorwaarden, waaronder deze overdracht der schepen en vliegtuigen zal plaats vinden, zullen onderwerp van overleg zijn tussen de souvereine Regeringen.

Artikel 9.

Met betrekking tot de overname van de instandhoudingsorganen en voorraden der Koninklijke Marine door de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zal het navolgende in acht worden genomen:

a. op het tijdstip van de souvereiniteitsoverdracht gaan de eigendommen van de huidige Regering van Indonesië over op de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië;

b. de Nederlandse Regering zal zo spoedig mogelijk na de souvereiniteitsoverdracht overleg openen met de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië inzake het tijdstip en de zakelijke voorwaarden van overdracht van de daarvoor in aanmerking komende Nederlandse eigendommen.

Artikel 10.

I. De buiten de marinebasis Soerabaja gelegen maritieme inrichtingen in Indonesië, welke voor de souvereiniteitsoverdracht onder beheer der Koninklijke Marine staan, blijven voorlopig onder beheer van de Koninklijke Marine. In gemeenschappelijk overleg wordt geleidelijk het beheer overgedragen aan de Marine van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, waarbij het navolgende in aanmerking wordt genomen:

a. de maritieme inrichtingen moeten blijven functionneren, om een goede taakvervulling ter zee te waarborgen;

b. onafhankelijk van de vraag of de Marine van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië dan wel de Koninklijke Marine een inrichting beheert, blijft de inrichting functionneren ten behoeve van de Marine van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en van de onderdelen der Koninklijke Marine, welke in Indonesië aanwezig zijn op grond van deze overeenkomst.

II. Voor zover nader in onderling overleg aan te wijzen inrichtingen, binnen de marinebasis Soerabaja gelegen, daarvoor in aanmerking komen, geldt het in het vorige lid bepaalde ten aanzien van buiten de marinebasis Soerabaja gelegen maritieme inrichtingen in Indonesië.

Artikel 11.

De Nederlandse Regering is bereid om binnen haar vermogen op verzoek van de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië personeel ter beschikking te stellen voor het beheer van de in het voorgaande artikel genoemde inrichtingen.

Artikel 12.

Het personeel en de onderdelen der Koninklijke Marine staan gedurende de periode, genoemd in artikel 6, onder bevel van de Vlagofficier der Koninklijke Marine in Indonesië (V.K.M.I.), die ten aanzien van de taken, als bedoeld in artikel 7, gehouden is zich te richten naar de aanwijzingen en opdrachten van de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en voor de uitvoering van de bedoelde taken verantwoording schuldig is aan de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 13.

Behalve de Nederlandse vlag en oorlogswimpel voeren de eenheden der Koninklijke Marine bij de vervulling van de taken, als bedoeld in artikel 7, de vlag van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië van de ra.

Artikel 14.

Aan boord van de eenheden van de Koninklijke Marine, belast met de uitvoering van de taken, als bedoeld in artikel 7, kunnen verbindingsofficieren van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië worden geplaatst, aan wie opsporingsbevoegdheid kan worden verleend.

HOOFDSTUK III.

STEUN BIJ DE OPBOUW VAN DE MARINE VAN DE REPUBLIEK DER VERENIGDE STATEN VAN INDONESIË.

Artikel 15.

In beginsel wordt overeengekomen, dat op verzoek van de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië een afdeling zeemacht als onderdeel van de Neder-

landse Militaire Missie zal worden uitgezonden, waarin voor de opleiding van het Marine-personeel van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en voor de walorganen adviseurs, instructeurs en technici opgenomen zullen worden.

Artikel 16.

De Nederlandse Regering is bereid in haar opleidingsinrichtingen ten behoeve van de opleiding van het personeel van de Marine van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië alle mogelijke faciliteiten te verlenen.

Artikel 17.

De Nederlandse Regering is bereid, aan boord van de schepen der Koninklijke Marine zoveel mogelijk gelegenheid te bieden voor de opleiding van het personeel van de Marine van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 18.

De Nederlandse Regering is bereid, aan de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië alle mogelijke faciliteiten te verschaffen en steun te verlenen bij het aankopen van schepen, vliegtuigen en voorraden ten behoeve van de Marine van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 19.

I. De Nederlandse Regering is bereid, het Indonesische beroepspersoneel der Koninklijke Marine toe te staan op basis van een vrijwillige verbintenis en op nader door de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië te stellen voorwaarden over te gaan in dienst van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

II. De Nederlandse Regering is voorts bereid te bevorderen, dat Nederlands personeel en gewezen personeel van de Koninklijke Marine op basis van vrijwilligheid dienst kan nemen bij de Marine van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

HOOFDSTUK IV.

WIJZE VAN EN REGELINGEN INZAKE HET TERUGTREKKEN VAN DE KONINKLIJKE MARINE.

Artikel 20.

Bij de terugtrekking van de Koninklijke Marine zullen de Nederlandse en Indonesische instanties in onderlinge samenwerking zorg dragen, dat de overdracht van de maritieme taken op de juiste wijze geschiedt. In afwachting van de afvoer van de Koninklijke Marine zal deze niet operationeel worden gebruikt dan voor zover zulks door de souvereine Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië wordt gevraagd en dit de instemming heeft van de Nederlandse Regering.

Artikel 21.

Met betrekking tot de termijn van terugtrekking van de eenheden van het Korps Mariniers gelden overeenkomstige regelen als voor de eenheden der Koninklijke Landmacht.

Artikel 22.

Het Departement der Marine wordt overgedragen aan de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, terwijl het Commandement der Zeemacht op de dag van de souvereiniteitsoverdracht als zodanig ophoudt te bestaan en de afwikkeling hiervan overgaat naar het bureau van de Vlagofficier der Koninklijke Marine in Indonesië (V.K.M.I.).

HOOFDSTUK V.

REGELING BETREFFENDE DE MARINEBASIS SOERABAJA.

Artikel 23.

De Marinebasis Soerabaja, verder aan te duiden als de basis, omvat — met uitzondering van particuliere eigendommen — het land- en watergebied, benevens de zich daarop bevindende werven, kampen, havens, vliegvelden, etablissementen, installaties als anderszins, welke liggen binnen de begrenzing als aangegeven op de aan deze overeenkomst gehechte kaart.

Artikel 24.

Op het tijdstip van de overdracht der souvereiniteit wordt de basis marinebasis van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, met inachtneming van het bepaalde ten aanzien van de eigendommen der Koninklijke Marine, als bedoeld in artikel 9 sub *b*.

Artikel 25.

Met ingang van het tijdstip, waarop de souvereiniteit wordt overgedragen, wordt een officier der Koninklijke Marine door de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië benoemd tot beheerder van de basis. Deze benoeming geschiedt uit een door de Nederlandse Regering ingediende voordracht van drie.

Artikel 26.

De beheerder van de basis is rechtstreeks verantwoording schuldig voor het gevoerde beheer aan de Minister van Defensie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, of indien nodig door tussenkomst van het Hoofd van de afdeling zeemacht van de Nederlandse Militaire Missie, indien deze optreedt als adviseur van de Minister van Defensie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 27.

De beheerder van de basis is verantwoordelijk voor de handhaving van orde en veiligheid binnen de basis. Daartoe zal hem door de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië ter beschikking worden gesteld een politiemacht, bij welke terbeschikkingstelling ten volle rekening wordt gehouden met de wensen van de beheerder.

De commandanten der schepen en inrichtingen binnen de basis zijn gehouden zich ten aanzien van de handhaving van orde en veiligheid te richten naar de aanwijzingen van de beheerder.

Artikel 28.

De aan de beheerder van de basis te verlenen bevoegdheden worden vastgelegd in een instructie, welke door de Minister van Defensie van de Republiek der Verenigde

Staten van Indonesië zal worden vastgesteld. Hierbij wordt het advies van het Hoofd van de afdeling zeemacht van de Nederlandse Militaire Missie ingewonnen.

Artikel 29.

Het gebruik van de basis en haar diensten zal voor de strijdkrachten van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en voor onderdelen der Koninklijke Marine, die in Indonesië aanwezig zijn op grond van deze overeenkomst, volgens voor beide marines gelijkluidende regelen geschieden.

HOOFDSTUK VI.

AFSPRAKEN INZAKE DE UITVOERING DER IN DE VOORAFGAANDE HOOFDSTUKKEN OVEREENGEKOMEN REGELINGEN.

Artikel 30.

1. Op het tijdstip van de souvereiniteitsoverdracht neemt de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië in haar dienst over al het alsdan bij de Regering van Indonesië in vast of tijdelijk dienstverband of op kort verband in dienst zijnde en bij de Koninklijke Marine in Indonesië werkzame burgerpersoneel; op dezelfde wijze en voorwaarden als ten aanzien van de overige burgerlijke overheidsdienaren van de Regering van Indonesië is overeengekomen.

2. Op het tijdstip, vermeld onder lid 1, blijft het bij de Koninklijke Marine in Indonesië op Nederlands arbeidscontract werkzame burgerpersoneel op de bestaande voorwaarden in dienst bij de Koninklijke Marine.

Artikel 31.

1. De kosten van de Koninklijke Marine, inclusief het Korps Mariniers, vanaf 1 Januari 1950 tot aan het einde van de terugtrekperiode komen ten laste van Nederland.

2. Voorzover door de Koninklijke Marine in deze periode steun wordt verleend aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, is van toepassing artikel 6 van de Overeenkomst ter uitvoering van de artikelen 2 en 21 van het Uniestatuut.

3. Voor het jaar 1950 zal het totaalbedrag, dat ingevolge het vorige lid ten laste van de Regering der Republiek der Verenigde Staten van Indonesië komt, in voorafgaand overleg tussen de souvereine Regeringen worden vastgesteld met dien verstande, dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan de exploitatie-kosten van de Koninklijke Marine in Indonesië hebben bedragen in 1949 (de kosten van het Korps Mariniers niet inbegrepen), rekening houdende met eventuele devaluatie-invloeden.

4. De Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zal periodiek de voor de uitgaven der Koninklijke Marine benodigde Indonesische valuta en deviezen beschikbaar stellen op basis van een jaarlijkse kasbegroting onderscheidenlijk deviezenbegroting. Deze uitgaven zullen, voorzover het tweede lid niet van toepassing is, nader tussen de Regeringen van Nederland en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië worden verrekend.

Artikel 32.

Binnen de grenzen der inrichtingen, genoemd in artikel 10, wordt het gezag uitgeoefend door de betrokken commandanten. Deze commandanten dragen met eigen middelen zorg voor de bewaking van de inrichtingen, of voorzover nodig met steun van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 33.

De commandanten der inrichtingen, genoemd in artikel 10, verlenen alle medewerking aan de bevoegde autoriteiten van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië bij opsporing, aanhouding en voorgeleiding van onder de Indonesische jurisdictie vallende personen, die verdacht worden zich schuldig te hebben gemaakt aan enig strafbaar feit en zich binnen deze inrichtingen bevinden.

Artikel 34.

Op de militairen, behorende tot de Koninklijke Marine, welke krachtens enige overeenkomst met de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië in Indonesië verblijven, is toepasselijk het Nederlandse formele en materiële militaire

strafrecht, het Nederlandse militaire tuchtrecht, alsmede het Indonesische commune materiële strafrecht, voorzover het genoemde militaire strafrecht geen eigen regelingen bevat.

Het militaire tuchtrecht wordt uitgeoefend door of namens de desbetreffende commandant van de Koninklijke Marine.

Desgevraagd zal aan de Indonesische autoriteiten worden medegedeeld, welke afdoening is gevolgd op door genoemde militairen gepleegde ernstige vergrijpen, waarbij de belangen van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië of van haar onderdanen zijn betrokken.

Artikel 35.

Het gebruik van de Indonesische havens, vliegvelden en hun diensten zal voor de strijdkrachten van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en voor de onderdelen van de Koninklijke Marine, welke in Indonesië aanwezig zijn op grond van deze overeenkomst, volgens voor beide marines gelijkluidende regelen geschieden.

II.

Regelingen betreffende de onder Nederlands bevel staande landstrijdkrachten in Indonesië na de souvereiniteitsoverdracht.

Hoofdstuk I. Algemene beginselen.

Hoofdstuk II. Het samentrekken van de onder Nederlands bevel staande landstrijdkrachten.

Hoofdstuk III. Het verschepen van de troepen van de Koninklijke Landmacht uit Indonesië.

Hoofdstuk IV. Reorganisatie van de door of onder het gezag van de Regering van Indonesië (Nederlands-Indonesische overheid) gevormde en uitgeruste landstrijdkrachten.

Hoofdstuk V. Sociale voorzieningen.

Hoofdstuk VI. Overdracht van de bij het Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger in gebruik zijnde roerende en onroerende goederen.

Hoofdstuk VII. Financiën.

Hoofdstuk VIII. Uitvoeringsbepalingen.

HOOFDSTUK I.

ALGEMENE BEGINSELEN.

Artikel 1.

De onder Nederlands bevel staande landstrijdkrachten zullen overeenkomstig de hiernavolgende richtlijnen zo spoedig mogelijk uit Indonesië worden teruggetrokken dan wel gereorganiseerd.

Artikel 2.

Ingevolge de overdracht van de souvereiniteit berust de verantwoordelijkheid voor de in- en uitwendige veiligheid van Indonesië bij de souvereine Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 3.

1. Bij het terugtrekken van de onder Nederlands bevel staande landstrijdkrachten zullen de betrokken Nederlandse en Indonesische instanties in onderlinge samenwerking zorg dragen, dat de militaire territoriale verantwoordelijkheid op ordelijke wijze wordt overgedragen.

2. De onder Nederlands bevel staande landstrijdkrachten, welke op afscheep wachten of worden gereorganiseerd, zullen niet operationeel worden gebruikt dan voor zover zulks door de souvereine Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië wordt gevraagd en de instemming heeft van de Nederlandse Regering.

Artikel 4.

Leden van de strijdkrachten welke op het moment van de overdracht van de souvereiniteit in Indonesië aanwezig zijn en gevormd en uitgerust zijn door of onder het gezag van de Regering van Indonesië (Nederlands-Indonesische overheid), kunnen volgens nader te bepalen regelen worden opgenomen in de krijgsmacht van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 5.

De overdracht van de daarvoor in aanmerking komende roerende en onroerende goederen zal in onderling overleg geschieden op een ordelijke en zakelijke basis.

HOOFDSTUK II.

HET SAMENTREKKEN VAN DE ONDER NEDERLANDS BEVEL STAANDE LANDSTRIJDKRACHTEN.

Artikel 6.

1. Voor zover zulks bij de overdracht van de souvereiniteit nog niet zal zijn geschied, zullen de in artikel 1 genoemde strijdkrachten zo spoedig mogelijk worden verzameld in bij onderling overleg vast te stellen gebieden (rayons).

2. Hiervoor komen in aanmerking gebieden in de nabijheid van havens en gebieden, welke over voldoende legeringsruimte voor troepen beschikken.

3. Teneinde het op ordelijke wijze overdragen van de militaire territoriale verantwoordelijkheid te bevorderen moet de mogelijkheid worden overwogen om de reorganisatie van de in artikel 4 genoemde strijdkrachten ook buiten de rayons te doen plaats vinden.

Artikel 7.

Voor ieder rayon wordt een Nederlandse commandant aangewezen, die het bevel voert over de in dat rayon aanwezige leden van de in artikel 1 genoemde strijdkrachten.

Artikel 8.

De in artikel 1 genoemde strijdkrachten hebben de positie van gasten, die zich bevinden op het grondgebied van een bevriende regering; de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië verleent alle mogelijke faciliteiten.

Artikel 9.

De in artikel 1 genoemde strijdkrachten blijven onder hun eigen commandanten.

Artikel 10.

De in artikel 1 genoemde strijdkrachten blijven in het bezit van hun organieke bewapening en uitrusting, tenzij de bevoegde Nederlandse militaire instanties anders bepalen.

Artikel 11.

De Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië blijft — onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk — verantwoordelijk voor de handhaving van de rust en orde binnen de rayons.

Artikel 12.

Op de militairen, behorende tot de in artikel 1 genoemde strijdkrachten, is toepasselijk het Nederlandse formele en materiële militaire strafrecht, het Nederlandse militaire tuchtrecht, alsmede het Indonesische commune materiële strafrecht, voorzover het genoemde militaire strafrecht geen eigen regelingen bevat.

Het militaire tuchtrecht wordt uitgeoefend door of namens de commandant van de in artikel 1 genoemde strijdkrachten. Desgevraagd zal aan de Indonesische autoriteiten worden medegedeeld, welke afdoening is gevolgd op door genoemde militairen gepleegde ernstige vergrijpen, waarbij de belangen van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië of van haar onderdanen zijn betrokken.

Artikel 13.

De leden van de in artikel 1 genoemde strijdkrachten hebben bewegingsvrijheid binnen de rayons. Indien zij zich buiten de rayons willen bewegen, dienen zij voorzien te zijn van een geldige verlofpas, welke is getekend door de in artikel 7 bedoelde commandant en geviseerd door een door de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië aan te wijzen militaire autoriteit. Zij zullen zich — met inachtneming van lid 2 van artikel 3 — onthouden van alle militaire activiteiten, doch zullen in de gelegenheid worden gesteld tot het houden van oefeningen overeenkomstig in onderling overleg vast te stellen regelingen.

Artikel 14.

1. In de rayons geschiedt de handhaving van rust en orde onder de leden van de in artikel 1 genoemde strijdkrachten door de daartoe bevoegde Nederlandse militaire organen, welke zo nodig daartoe patrouilles uitsturen.

2. Deze patrouilles kunnen uitsluitend tegen de leden van de in artikel 1 genoemde strijdkrachten optreden.

Artikel 15.

Binnen de grenzen der kampementen van de in artikel 1 genoemde strijdkrachten wordt het gezag uitgeoefend door de commandanten van de aldaar gelegerde onderdelen. Deze commandanten dragen met eigen middelen zorg voor de bewaking hunner kampementen.

Artikel 16.

De in artikel 15 genoemde commandanten verlenen alle medewerkking aan de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië betreffende opsporing, aanhouding en voorgeleiding van onder de Indonesische jurisdictie vallende personen, die verdacht worden zich schuldig te hebben gemaakt aan enig strafbaar feit en zich binnen de kampementen bevinden.

Artikel 17.

Inzake het buiten dienst in het openbaar dragen van wapenen zullen de regelen van toepassing zijn, die tussen souvereine staten in vredestijd gelden. In bijzondere gevallen zal hieromtrent overleg worden gepleegd tussen de betrokken militaire autoriteiten.

Artikel 18.

1. De in artikel 1 genoemde strijdkrachten behouden de voor haar instandhouding nodige eigen diensten.

2. Deze diensten hebben voor de vervulling van hun taak bewegingsvrijheid buiten de rayons en dragen met eigen middelen zorg voor hun beveiliging en bewaking. Nadere regelen ter uitvoering van het bepaalde in dit artikel worden in onderling overleg vastgesteld.

Artikel 19.

Wijzigingen in de dislocatie van de in artikel 1 genoemde strijdkrachten, behalve die wijzigingen, welke nodig zijn voor de afscheep, zullen slechts in onderling overleg plaats vinden.

HOOFDSTUK III.

HET VERSCHEPEN VAN DE TROEPEN VAN DE KONINKLIJKE LANDMACHT UIT INDONESIË.

Artikel 20.

De Koninklijke Landmacht zal na de overdracht van de souvereiniteit binnen de kortst mogelijke tijd uit Indonesië worden verscheept.

Artikel 21.

Ter bereiking van dit doel zullen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië samenwerken om alle beschikbare middelen te benutten.

Artikel 22.

Mocht blijken, zoals de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden tot haar leedwezen voorziet, dat gebrek aan scheepsruimte of andere technische moeilijkheden de voltooiing van de terugtrekking binnen zes maanden na de souvereiniteitsoverdracht beletten, dan zal de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden volgaarne de autoriteiten van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië in de gelegenheid stellen om naar believen kennis te nemen van de door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden voor de repatriëring der Koninklijke Landmacht getroffen voorzieningen en verrichte inspanningen.

Artikel 23.

Na de overdracht van de souvereiniteit wordt een gemengde technische commissie ingesteld om de technische mogelijkheden voor het repatriëren van de Koninklijke Landmacht, alsmede de wijze waarop en de middelen, waarmede de moeilijkheden kunnen worden overwonnen, te bestuderen.

Artikel 24.

De Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië of het haar opvolgend college zal in de gelegenheid worden gesteld om, overeenkomstig de voor dit college geldende richtlijnen en zoals in het memorandum van 22 Juni 1949 betreffende het houden van de Ronde Tafel Conferentie is voorzien, terzake medewerking te verlenen.

HOOFDSTUK IV.

REORGANISATIE VAN DE DOOR OF ONDER HET GEZAG VAN DE REGERING VAN INDONESIË (NEDERLANDS-INDONESISCHE OVERHEID) GEVORMDE EN UITGERUSTE LANDSTRIJDKRACHTEN.

Artikel 25.

1. Met ingang van het tijdstip der souvereiniteitsoverdracht wordt de commandant der in artikel 1 genoemde strijdkrachten belast met de reorganisatie van de in artikel 4 genoemde strijdkrachten. Deze reorganisatie zal in de eerste plaats ertoe strekken, de daarvoor in aanmerking komende leden van laatstgenoemde strijdkrachten de gelegenheid te geven zo spoedig mogelijk naar de krijgsmacht van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië over te gaan.

2. Waar in deze overeenkomst verder over reorganisatie wordt gesproken, wordt daarmede bedoeld de in lid 1 van dit artikel genoemde reorganisatie.

Artikel 26.

De administratieve en justitiële bevoegdheden, die in de vóór de souvereiniteitsoverdracht bestaande Indonesische wetgeving aan de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon ten opzichte van de in artikel 4 genoemde strijdkrachten zijn verleend, worden gedurende de reorganisatie van genoemde strijdkrachten uitgeoefend door of namens de Koning der Nederlanden.

Artikel 27.

1. Bij de reorganisatie zal ernaar worden gestreefd, dat de overgang van de leden van de in artikel 4 genoemde strijdkrachten naar de krijgsmacht van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zoveel mogelijk onderdeelsgewijze zal plaats vinden.

2. Voor de overgave van de diensten zal onderling overleg een nadere regeling worden getroffen.

Artikel 28.

1. De onderdelen, welke de commandanten van de in artikel 4 genoemde strijdkrachten reeds vóór de overdracht van de souvereiniteit uit leden dier strijdkrachten hebben samengesteld en voor overgang gereed houden, zullen met ingang van de dag na de overdracht van de souvereiniteit behoren tot de krijgsmacht van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

2. Verdere aldus gevormde onderdelen gaan over naarmate zij daartoe door de commandanten der in artikel 4 genoemde strijdkrachten in gereedheid zullen zijn gebracht.

Artikel 29.

De commandant der in artikel 1 genoemde strijdkrachten neemt bij de reorganisatie de richtlijnen in acht, welke door of namens de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië gezamenlijk zullen worden vastgesteld.

Artikel 30.

De uitvoering van de reorganisatie is een voorwerp van gemeenschappelijke zorg tussen de commandant van de in artikel 1 genoemde strijdkrachten en de commandant van de strijdkrachten der Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 31.

1. De reorganisatie zal geschieden binnen een periode van zes maanden, aanvangende op de dag waarop de voorwaarden van dienstneming bij de landstrijdkrachten van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië bekend gemaakt zullen zijn.

2. Gedurende die periode blijven de op de dag vóór de souvereiniteitsoverdracht geldende regelingen betreffende de rechtspositie van het militaire personeel van de in artikel 4 genoemde strijdkrachten ongewijzigd van kracht, onverminderd het verder in deze overeenkomst bepaalde.

3. In overleg tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van

Indonesië kan worden bepaald, dat na het einde van de reorganisatie diensten of onderdelen van diensten voor de vervulling van bepaalde taken en voor een bepaalde periode blijven voortbestaan.

4. Met het einde van de reorganisatie houdt het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger op te bestaan. Indien na afloop van de reorganisatie een verdere afwikkeling van de in artikel 4 bedoelde strijdkrachten nodig blijkt, zullen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië terzake tijdig vooraf in overleg treden.

Artikel 32.

Het militaire personeel van in artikel 4 genoemde strijdkrachten is na de overdracht van de souvereiniteit

a. deels bestemd om in dienst te treden bij de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië;

b. deels bestemd om in dienst te treden bij het Koninkrijk der Nederlanden;

c. overigens bestemd om af te vloeien.

Artikel 33.

De aanvaarding van de in het vorige artikel sub *a* en *b* bedoelde bestemmingen geschiedt op basis van vrijwilligheid.

Artikel 34.

Indien militair personeel van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger zonder dienstonderbreking in dienst treedt bij de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië of het Koninkrijk der Nederlanden, wordt de bij het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger doorgebrachte diensttijd ten volle in rekening gebracht.

Artikel 35.

Onverminderd het bepaalde in de beide voorgaande artikelen worden de voorwaarden, verbonden aan het volgen van de in artikel 32, sub *a*, omschreven bestemming, vastgesteld door de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en de voorwaarden, verbonden aan het volgen

van de in artikel 32, sub *b*, omschreven bestemming, vastgesteld door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden. Voor dienstneming bij de krijgsmacht van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië wordt het Indonesische staatsburgerschap vereist.

Artikel 36.

Organisaties of verenigingen, welker leden bij de reorganisatie nauw betrokken zijn, zullen in de gelegenheid worden gesteld de belangen van hun leden te bepleiten.

Artikel 37.

Afvloeiing gaat gepaard met ontslag overeenkomstig de beginselen vastgelegd in Hoofdstuk V.

HOOFDSTUK V.

SOCIALE VOORZIENINGEN.

Artikel 38.

Het militair personeel van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, dat niet overgaat in staatsdienst van het Koninkrijk der Nederlanden of van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, wordt ontslagen met inachtneming van de onderstaande bepalingen.

Artikel 39.

Zij, die in vaste dienst zijn en op het tijdstip van ontslag volgens de op de dag vóór de souvereniteitsoverdracht geldende bepalingen recht kunnen doen gelden op pensioen, ontvangen een pensioen, berekend volgens die bepalingen.

Artikel 40.

Zij, die in vaste dienst zijn en geen aanspraak ontlenen aan het bepaalde in artikel 39, doch een voor pensioen geldende diensttijd hebben van 15 jaar of meer, ontvangen een pensioen, berekend volgens de regeling, vervat in het Indonesisch Staatsblad No. 13 van 1948.

Artikel 41.

1. Zij, die geen aanspraken ontlenen aan het bepaalde in de artikelen 39 en 40 ontvangen een wachtgeld, berekend volgens de bepalingen van de volgende leden van dit artikel.

2. Het wachtgeld wordt uitgekeerd gedurende een termijn van tweevijfde van de volbrachte diensttijd, met dien verstande, dat het ten minste een jaar en ten hoogste vijf jaar wordt genoten.

3. Het maandelijks uit te keren bedrag bedraagt:

gedurende de eerste zes maanden 80%
gedurende de volgende twaalf maanden 60%
gedurende de resterende maanden 40%
van de laatstgenoten activiteitsbezoldiging, dan wel van de activiteitsbezoldiging, die betrokkenen krachtens hun diensttijd zouden genieten.

4. Voor de berekening van het wachtgeld wordt voor de korporaals, de soldaten 1e klas en de soldaten 2e klas een maandelijkse bezoldiging vastgesteld van respectievelijk ƒ 200,—, ƒ 160,— en ƒ 140,—.

5. Indien toepassing van de regeling in de vorige leden van dit artikel tot gevolg zou hebben, dat zij voor de betrokkene financieel minder gunstig zou zijn, dan indien op hem de regeling van artikel 42 was toegepast, kan hij verlangen, dat laatstgenoemde regeling op hem wordt toegepast.

Artikel 42.

1. Zij, die op kort dienstverband aangenomen, de tijd, waarvoor hun verbintenis was aangegaan, ten einde hebben gediend, ontvangen de uitkeringen, waarop zij recht hebben krachtens de regelingen, geldend op de dag vóór de souvereiniteitsoverdracht.

2. Zij, die de tijd van zodanig dienstverband nog niet ten einde hebben gediend, ontvangen de uitkeringen, bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid van hun volbrachte diensttijd, doch verhoogd met 20%.

Artikel 43.

De dienst- en reserveplichtigen genieten de uitkeringen en de bijzondere sociale voorzieningen, waarop zij aanspraak hebben krachtens de op de dag vóór de souvereiniteitsoverdracht geldende bepalingen.

Artikel 44.

De op de dag vóór de souvereiniteitsoverdracht geldende bijzondere voorzieningen, welke worden toegepast bij het verlaten van de militaire dienst, worden uitgevoerd.

Artikel 45.

Op de in artikel 40 bedoelde evenredige pensioenen en op de in artikel 41 bedoelde wachtgelden kan bij cumulatie van inkomsten een korting worden toegepast als overeengekomen bij de positieregeling van burgerlijke overheidsdienaren.

Ten aanzien van soldij-genietende militairen zal voor de berekening van die korting naar billijkheid een percentage worden vastgesteld.

Artikel 46.

1. Behoudens het bepaalde in het tweede lid kan aan hen, die ingevolge deze regeling evenredig pensioen of wachtgeld genieten, de verplichting tot het aanvaarden van een passende burgerbetrekking worden opgelegd.

2. Het gestelde in het eerste lid geldt niet voor hen, die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt.

Artikel 47.

1. Op het tijdstip der souvereiniteitsoverdracht gaan de al dan niet gemilitairiseerde burgerambtenaren, ressorterende onder het Departement van Oorlog, over in dienst van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, op de voet van hetgeen is overeengekomen ten aanzien van de bij de civiele departementen werkzame overheidsdienaren.

2. Gedurende de reorganisatie zal dit personeel echter voorzover nodig zijn werkzaamheden in het bestaande verband blijven voortzetten.

3. Het gemilitairiseerde personeel zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk onmiddellijk vóór het tijdstip van het aanvaarden van een functie in dienstverband bij de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië worden gedemilitairiseerd. Tot op het tijdstip van demilitairisering blijft dit personeel onderworpen aan de vóór de overdracht der souvereiniteit te hunnen aanzien geldende voorschriften omtrent formeel en materieel strafrecht en tuchtrecht.

HOOFDSTUK VI.

OVERDRACHT VAN DE BIJ HET KONINKLIJK NEDERLANDS-INDONESISCH LEGER IN GEBRUIK ZIJNDE ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN.

Artikel 48.

In onderling overleg tussen de Commandant van de Nederlandse strijdkrachten in Indonesië en de Minister van Defensie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zal het plan voor de overdracht van de bij het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger in gebruik zijnde roerende en onroerende goederen worden ontworpen.

Artikel 49.

Bij het ontwerpen van dit plan wordt rekening gehouden met:

a. de veiligheid der wederzijdse strijdkrachten;

b. de door deze strijdkrachten te vervullen taken;

c. het te bereiken doel, namelijk dat door een geleidelijke overdracht van alle bij het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger in gebruik zijnde roerende en onroerende goederen bij het einde van de reorganisatie-periode van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, de bij het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger in gebruik zijnde roerende en onroerende goederen aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zullen zijn overgedragen.

Artikel 50.

De uitvoering van het onder artikel 48 genoemde plan is een voorwerp van gemeenschappelijke zorg tussen de Commandant van de Nederlandse strijdkrachten in Indonesië en de Commandant van de strijdkrachten van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië. De Commandant van de Nederlandse strijdkrachten in Indonesië is tot aan de overdracht van de bij het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger in gebruik zijnde roerende en onroerende goederen daarvoor verantwoordelijk.

HOOFDSTUK VII.

VAN DE FINANCIËN.

Artikel 51.

1. De kosten van de Koninklijke Landmacht in Indonesië komen na de overdracht van de souvereiniteit ten laste van het Koninkrijk der Nederlanden.

2. De Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zal periodiek de voor de uitgaven van salarissen en dergelijke van de Koninklijke Landmacht benodigde Indonesische valuta aan de Commandant van de Nederlandse landstrijdkrachten in Indonesië of de door deze aan te wijzen autoriteiten beschikbaar stellen; eveneens zal de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië de middelen beschikbaar stellen voor voeding, huisvesting, kleding enz. van de Koninklijke Landmacht. Deze uitgaven zullen dan nader tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië worden verrekend.

Artikel 52.

Indien en voor zover onderdelen van de Koninklijke Landmacht en de Luchtstrijdkrachten (L.S.K.) op verzoek van de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië diensten voor deze verrichten, komen de kosten van deze onderdelen gedurende de desbetreffende periode voor rekening van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, volgens een, zo mogelijk voorafgaand, overeen te komen regeling.

Artikel 53.

Indien en voor zover materieel van de Koninklijke Landmacht en de Luchtstrijdkrachten op verzoek van de daartoe door de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië aangewezen autoriteiten wordt overgedragen aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, zal de betaling hiervan in, zoveel mogelijk voorafgaand, overleg worden geregeld.

Artikel 54.

1. De kosten van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger gedurende de periode na de souvereiniteitsoverdracht tot aan het einde van de reorganisatie worden betaald door de Republiek van de Verenigde Staten van Indonesië.

2. De kosten van de pensioenen, wachtgelden, uitkeringen ineens en andere sociale voorzieningen van gewezen personeel en personeel van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger komen ten laste van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Voorzover personeel van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger overgaat in Nederlandse overheidsdienst, zal mitsdien tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië een verrekening plaats vinden volgens een nader overeen te komen regeling terzake van de verkregen rechten van dit personeel. Het in dit lid gestelde lijdt uitzondering ten aanzien van die leden van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, die na Maart 1942 in dienst van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger zijn getreden, en die geen Indonesisch staatsburger worden vóór het einde van de reorganisatie. De kosten van de sociale voorzieningen van deze leden van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger zullen door Nederland worden gedragen.

3. Gedurende de periode van de reorganisatie zullen door de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië aan de Commandant van de Nederlandse strijdkrachten in Indonesië periodiek de gelden beschikbaar worden gesteld, welke deze voor de uitvoering van de reorganisatie nodig heeft.

HOOFDSTUK VIII.

UITVOERINGSBEPALINGEN.

Artikel 55.

Het toezicht op de uitvoering van de ter Ronde Tafel Conferentie genomen besluiten op militair gebied wordt met ingang van de dag van de overdracht van de souvereiniteit uitgeoefend op een door de beide Regeringen in onderling overleg te bepalen wijze, onverminderd hetgeen omtrent het algemeen toezicht op de uitvoering der ter Ronde Tafel Conferentie bereikte overeenkomsten wordt bepaald.

Artikel 56.

Tussen de betrokken militaire autoriteiten van Nederland en van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zal een zodanige samenwerking met betrekking tot de uitvoering dezer overeenkomst worden tot stand gebracht, dat daardoor de tijdige en volledige nakoming op militair-technisch gebied wordt verzekerd. Zij bedienen zich daartoe van verbindingsofficieren.

III.

Regelingen betreffende de onder Nederlands bevel staande luchtstrijdkrachten in Indonesië na de souvereiniteisoverdracht.

Artikel 1.

Ingevolge de overdracht van de souvereiniteit zal voor de beveiliging in de lucht in Indonesië uitsluitend de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië verantwoordelijk zijn.

Artikel 2.

De taak van beveiliging in de lucht in militaire zin is op grond van het voorgaande dus de taak van de Luchtmacht van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 3.

Voor de onder Nederlands bevel staande luchtstrijdkrachten zal als Nederlands apparaat geen Nederlandse taak meer in Indonesië bestaan, weshalve bedoelde luchtstrijdkrachten uit Indonesië zullen worden teruggetrokken.

Artikel 4.

De Nederlandse Regering is bereid, op verzoek van de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië steun te verlenen in de vorm van terbeschikkingstelling van personeel en materieel, voor zover de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië nog niet voldoende in staat zal zijn haar taken met eigen middelen te vervullen. Deze steun is van aflopend karakter.

Artikel 5.

De Nederlandse Regering is bereid, op verzoek van de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië steun te geven in de vorm van een missie, als afdeling van de Nederlandse Militaire Missie bij de opbouw van de Luchtmacht der Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, zodat binnen de kortst mogelijke tijd de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië haar taken met eigen middelen kan uitvoeren.

Artikel 6.

De in de artikelen 4 en 5 bedoelde steun zal kunnen omvatten:

a. het medewerken bij de opbouw en de opleiding van de Luchtmacht van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië;

b. het bieden van gelegenheid tot en hulp bij aankoop, onderhoud en reparatie van materieel;

c. personeel ten behoeve van de verkeersleiding op daartoe nader vast te stellen vliegvelden;

d. het verrichten van speciale taken.

Artikel 7.

Alle bepalingen ten aanzien van de steunverlening als bedoeld in de artikelen 4 en 5, welke van toepassing zijn op de strijdkrachten, waarvan de luchtstrijdkrachten onderdelen zijn, zullen voor zover mogelijk op overeenkomstige wijze van toepassing zijn op de luchtstrijdkrachten.

Artikel 8.

Alle bepalingen ten aanzien van reorganisatie en terugtrekking van de strijdkrachten, waarvan de luchtstrijdkrach-

ten onderdelen zijn, zullen op overeenkomstige wijze van toepassing zijn op de luchtstrijdkrachten, voor zover hiervan niet dient te worden afgeweken in verband met de zelfstandige positie van de Luchtmacht van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en de organieke verwevenheid van de onderdelen van de Legerluchtmacht in Indonesië en de Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger.

Er zal naar gestreefd worden de reorganisatie van de luchtstrijdkrachten binnen zes maanden na de souvereiniteitsoverdracht te voltooien.

Artikel 9.

De veiligheid van het Nederlands personeel, werkzaam op vliegbases, welke staan onder commando van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, valt onder de verantwoordelijkheid van de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 10.

Binnen de termijn van drie maanden na de overdracht van de souvereiniteit zal de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië aan de Nederlandse Regering te kennen geven, hoeveel en welke krachten van de Nederlandse Luchtstrijdkrachten zij nodig oordeelt voor de taken, vermeld in de artikelen 4, 5 en 6.

Artikel 11.

Alle bepalingen ten aanzien van de overname van personeel en materieel van de strijdkrachten, waarvan de luchtstrijdkrachten onderdelen zijn, zullen op overeenkomstige wijze van toepassing zijn op de luchtstrijdkrachten. Hierbij wordt gewezen op het grote belang, dat de luchtverkeersdienst op de vliegvelden, welke nodig geacht zullen worden voor de burgerluchtvaart van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, blijft functionneren als normaal wordt vereist in vredestijd.

Verder dient in acht te worden genomen, dat deze overname binnen de termijn, genoemd in artikel 8, 2e alinea, voltooid zal zijn.

NEDERLANDSE DELEGATIE TER RONDE TAFEL CONFERENTIE

Secretariaat

No. 875

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Aan de Voorzitters van de Delegaties der Regering van de Republiek Indonesië en van de Bijeenkomst voor Federaal Overleg.

Mijne Heren Voorzitters,

Ik heb de eer U mede te delen, dat de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie constateert, dat tussen de Delegaties ter Conferentie het volgende is overeengekomen.

De zinsnede in artikel 2 van het ontwerp-Charter van Souvereiniteitsoverdracht, luidende: „de status quo van de residentie Nieuw-Guinea zal worden gehandhaafd" betekent: „met voortzetting van het gezag van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden over de residentie Nieuw-Guinea".

Ik zal het op prijs stellen te vernemen, of U zich hiermede kunt verenigen.

Ik heb de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaar,

J. H. Van Maarseveen,

Voorzitter der Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

DELEGATIE
REPUBLIEK INDONESIË

DELEGATIE
B.F.O.

No. 2/E.L.

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben de eer de ontvangst te erkennen van Uw terzake handelend schrijven en kunnen U mededelen, dat de Delegaties van de Republiek Indonesië en de Bijeenkomst voor Federaal Overleg ter Ronde Tafel Conferentie constateren, dat tussen de Delegaties ter Conferentie het volgende is overeengekomen.

De zinsnede in artikel 2 van het ontwerp-Charter van Souvereiniteitsoverdracht, luidende: „de status quo van de residentie Nieuw-Guinea zal worden gehandhaafd" betekent: „met voortzetting van het gezag van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden over de residentie Nieuw-Guinea".

Wij hebben de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaren,

MOHAMMAD HATTA,
Voorzitter der Republikeinse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

HAMID,
Voorzitter der B.F.O.-Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

Aan de Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie, te 's-Gravenhage.

NEDERLANDSE DELEGATIE TER
RONDE TAFEL CONFERENTIE

Secretariaat

No. 871

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Aan de Voorzitters van de Delegaties der Regering van de Republiek Indonesië en van de Bijeenkomst voor Federaal Overleg.

Mijne Heren Voorzitters,

Ik heb de eer U mede te delen, dat de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie zich op het standpunt stelt, dat tussen de Delegaties ter Conferentie het volgende is overeengekomen.

Nederland mag voor en namens het Koninkrijk der Nederlanden als deelgenoot in de Unie handelen, indien de uitkomst van het voortgezet overleg met Suriname en de Nederlandse Antillen daartoe leidt.

De status van het Koninkrijk der Nederlanden als deelgenoot in de Unie zal daardoor niet worden aangetast.

Ik zal het op prijs stellen te vernemen, of U zich hiermede kunt verenigen.

Ik heb de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaar,
J. H. Van Maarseveen,
Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

DELEGATIE
REPUBLIEK INDONESIË

DELEGATIE
B.F.O.

No. 5/E.L.

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben de eer de ontvangst te erkennen van Uw terzake handelend schrijven en kunnen U mededelen, dat de Delegaties van de Republiek Indonesië en de Bijeenkomst voor Federaal Overleg ter Ronde Tafel Conferentie zich op het standpunt stellen, dat tusssen de Delegaties ter Conferentie het volgende is overeengekomen.

Nederland mag voor en namens het Koninkrijk der Nederlanden als deelgenoot in de Unie handelen, indien de uitkomst van het voortgezet overleg met Suriname en de Nederlandse Antillen daartoe leidt.

De status van het Koninkrijk der Nederlanden als deelgenoot in de Unie zal daardoor niet worden aangetast.

Wij hebben de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaren,

MOHAMMAD HATTA,
Voorzitter der Republikeinse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

HAMID,
Voorzitter der B.F.O.-Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

Aan de Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie, te 's-Gravenhage.

Nr 2, 1950

NEDERLANDSE DELEGATIE TER RONDE TAFEL CONFERENTIE

Secretariaat

No. 844

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Aan de Voorzitters van de Delegaties der Regering van de Republiek Indonesië en van de Bijeenkomst voor Federaal Overleg.

Mijne Heren Voorzitters,

Ik heb de eer U mede te delen, dat de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie zich op het standpunt stelt, dat tussen de Delegaties ter Conferentie het volgende is overeengekomen.

De Nederlandse Regering en de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zullen in onderling overleg regelen stellen inzake het opsporen van graven van gevallenen, alsmede inzake het opgraven, indentificeren, registeren en herbegraven van de stoffelijke resten van zodanige personen.

Zij zullen voorts in onderling overleg regelen stellen inzake de stichting, verzorging en instandhouding van het ereveld Peutjut in Kuta Radja en de thans bij de Legergravendienst in beheer of in aanleg zijnde erevelden in Indonesië.

Ik heb de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaar,

J. H. Van Maarseveen,

Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

DELEGATIE
REPUBLIEK INDONESIË

DELEGATIE
B.F.O.

No. 10/E.L.

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben de eer U mede te delen, dat de Indonesische Delegaties ter Ronde Tafel Conferentie zich op het standpunt stellen, dat tussen de Delegaties ter Conferentie het volgende is overeengekomen.

De Nederlandse Regering en de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zullen in onderling overleg regelen stellen inzake het opsporen van graven van gevallenen, alsmede inzake het opgraven, identificeren, registreren en herbegraven van de stoffelijke resten van zodanige personen.

Zij zullen voorts in onderling overleg regelen stellen inzake de stichting, verzorging en instandhouding van het ereveld Peutjut in Kuta Radja en de thans bij de Legergravendienst in beheer of in aanleg zijnde erevelden in Indonesië.

Wij hebben de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaren,

MOHAMMAD HATTA,
Voorzitter der Republikeinse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

HAMID,
Voorzitter der B.F.O.-Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

Aan de Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie,
's-Gravenhage.

NEDERLANDSE DELEGATIE TER RONDE TAFEL CONFERENTIE

Secretariaat

No. 850

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Aan de Voorzitters van de Delegaties der Regering van de Republiek Indonesië en van de Bijeenkomst voor Federaal Overleg.

Mijne Heren Voorzitters,

Ik heb de eer U mede te delen, dat de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie zich op het standpunt stelt, dat tussen de Delegaties ter Conferentie het volgende is overeengekomen.

a. Eerst na de overdracht van de souvereiniteit kunnen de samenstelling en de bepaling van de taken der door de deelgenoten van de Nederlands-Indonesische Unie uit te wisselen militaire missies door derzelver Regeringen in onderling overleg worden geregeld, overeenkomstig artikel 7 van de aan het ontwerp-Uniestatuut gehechte ontwerp-overeenkomst ter uitvoering van de artikelen 2 en 21 van genoemd Statuut.

b. Echter zal met ingang van bovenbedoelde overdracht van de souvereiniteit een Nederlandse militaire missie in Indonesië werkzaam zijn, welke tot taak zal hebben medewerking te verlenen bij de opbouw en de opleiding van de strijdkrachten van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, alsmede adviserend op te treden inzake vraagstukken van militaire aard.

c. In verband met hetgeen onder *b* is overeengekomen en in afwachting van een regeling als bedoeld onder *a*, is door de Commissie voor Militaire Aangelegenheden ter Ronde Tafel Conferentie een concept-overeenkomst Militaire Missie ontworpen, zoals deze hierna is weergegeven, waarnaar partijen zich tot aan het totstandkomen van de regeling als bedoeld onder *a* zullen gedragen.

CONCEPT OVEREENKOMST MILITAIRE MISSIE.

HOOFDSTUK I.

TAAK EN DUUR.

Artikel 1.

De taak van de Nederlandse Militaire Missie bestaat uit medewerking verlenen aan de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië bij de opbouw en de opleiding van de strijdkrachten van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, alsmede adviserend optreden inzake vraagstukken van militaire aard.

Artikel 2.

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie jaren, gerekend vanaf de datum van ondertekening van deze overeenkomst, tenzij eerder beëindigd, dan wel verlengd volgens hieronder beschreven regels.

Artikel 3.

De twee Regeringen plegen tenminste één jaar vóór de beëindiging van de termijn genoemd in artikel 2, overleg omtrent eventuele verlenging van het verblijf van dan wel omtrent eventuele wijziging van de samenstelling en de taken van de missie.

Artikel 4.

Deze overeenkomst kan worden opgezegd vóór de beëindiging van de termijn, genoemd in artikel 2, of vóór de beëindiging van de verlenging, overeengekomen volgens artikel 3, door middel van een schriftelijke kennisgeving van één van beide Regeringen, waarbij een opzeggingstermijn in acht dient te worden genomen van zes maanden.

Artikel 5.

Deze overeenkomst kan, op initiatief van één van beide Regeringen, worden beëindigd, terstond en zonder voorwaarden, in tijden, waarin één van beide Regeringen is betrokken in binnenlandse onlusten of buitenlandse vijande-

lijkheden, dan wel om redenen van algemeen belang voor het Koninkrijk der Nederlanden of voor de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

HOOFDSTUK II.

SAMENSTELLING.

Artikel 6.

De Nederlandse Militaire Missie vormt één geheel; zij omvat een afdeling zeemacht, een afdeling landmacht en een afdeling luchtmacht.

Artikel 7.

De Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië geeft aan de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden haar wensen te kennen inzake de samenstelling van de Militaire Missie, verband houdende met de door deze Militaire Missie uit te voeren opdrachten, waarna de samenstelling in gemeenschappelijk overleg door beide Regeringen zal worden vastgesteld.

Artikel 8.

Wijzigingen in de samenstelling van de Militaire Missie zullen niet dan in gemeenschappelijk overleg door beide Regeringen worden vastgesteld.

Artikel 9.

Ieder lid van de Militaire Missie kan door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden te allen tijde van zijn lidmaatschap worden ontheven, waarbij de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zich verplicht voor een vervangend lid zorg te dragen.

HOOFDSTUK III.

WERKZAAMHEDEN EN RANGEN.

Artikel 10.

Het personeel van de Militaire Missie voert die opdrachten uit, waaromtrent inzake aard en wijze van uitvoering tussen

CONCEPT OVEREENKOMST MILITAIRE MISSIE.

HOOFDSTUK I.

TAAK EN DUUR.

Artikel 1.

De taak van de Nederlandse Militaire Missie bestaat uit medewerking verlenen aan de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië bij de opbouw en de opleiding van de strijdkrachten van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, alsmede adviserend optreden inzake vraagstukken van militaire aard.

Artikel 2.

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie jaren, gerekend vanaf de datum van ondertekening van deze overeenkomst, tenzij eerder beëindigd, dan wel verlengd volgens hieronder beschreven regels.

Artikel 3.

De twee Regeringen plegen tenminste één jaar vóór de beëindiging van de termijn genoemd in artikel 2, overleg omtrent eventuele verlenging van het verblijf van dan wel omtrent eventuele wijziging van de samenstelling en de taken van de missie.

Artikel 4.

Deze overeenkomst kan worden opgezegd vóór de beëindiging van de termijn, genoemd in artikel 2, of vóór de beëindiging van de verlenging, overeengekomen volgens artikel 3, door middel van een schriftelijke kennisgeving van één van beide Regeringen, waarbij een opzeggingstermijn in acht dient te worden genomen van zes maanden.

Artikel 5.

Deze overeenkomst kan, op initiatief van één van beide Regeringen, worden beëindigd, terstond en zonder voorwaarden, in tijden, waarin één van beide Regeringen is betrokken in binnenlandse onlusten of buitenlandse vijande-

lijkheden, dan wel om redenen van algemeen belang voor het Koninkrijk der Nederlanden of voor de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

HOOFDSTUK II.

SAMENSTELLING.

Artikel 6.

De Nederlandse Militaire Missie vormt één geheel; zij omvat een afdeling zeemacht, een afdeling landmacht en een afdeling luchtmacht.

Artikel 7.

De Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië geeft aan de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden haar wensen te kennen inzake de samenstelling van de Militaire Missie, verband houdende met de door deze Militaire Missie uit te voeren opdrachten, waarna de samenstelling in gemeenschappelijk overleg door beide Regeringen zal worden vastgesteld.

Artikel 8.

Wijzigingen in de samenstelling van de Militaire Missie zullen niet dan in gemeenschappelijk overleg door beide Regeringen worden vastgesteld.

Artikel 9.

Ieder lid van de Militaire Missie kan door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden te allen tijde van zijn lidmaatschap worden ontheven, waarbij de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zich verplicht voor een vervangend lid zorg te dragen.

HOOFDSTUK III.

WERKZAAMHEDEN EN RANGEN.

Artikel 10.

Het personeel van de Militaire Missie voert die opdrachten uit, waaromtrent inzake aard en wijze van uitvoering tussen

de Minister van Defensie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en het Hoofd van de Militaire Missie overeenstemming bestaat.

Artikel 11.

Over onderwerpen, waarvan zou blijken of waarvan is te verwachten, dat zij een politiek karakter dragen, zal overleg plaats vinden tussen de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel 12.

Elk lid van de Missie zal zijn diensten in de Missie verrichten in de rang, welke hij bekleedt bij de strijdkrachten van het Koninkrijk der Nederlanden en zal het daarvoor voorgeschreven Nederlandse uniform en de daarbij behorende onderscheidingstekenen dragen.

Artikel 13.

De leden van de Missie blijven behoren tot het personeel van de Nederlandse strijdkrachten en blijven uit dien hoofde gebonden aan hun verplichtingen jegens het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel 14.

De leden van de Militaire Missie zijn binnen het kader van de vervulling van hun taak gebonden zich te richten naar de aanwijzingen en voorschriften van de respectievelijk voor de zee-, land- en luchtmacht bevoegde militaire autoriteiten van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en zijn als zodanig verantwoordelijk aan de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, door tussenkomst van het Hoofd van de Militaire Missie.

Artikel 15.

De leden van de Militaire Missie zullen zoveel mogelijk in groepen worden georganiseerd.

De bevoegde militaire autoriteiten van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zullen met de hoogste of oudste in rang zijnde officier van elke groep overleg plegen

inzake de aanwijzingen en voorschriften binnen het kader van de vervulling van hun taak.

Artikel 16.

De leden van de Militaire Missie hebben aanspraak op alle eerbewijzen en voorrechten, welke de wetten en voorschriften van de strijdkrachten van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië verlenen aan het personeel van overeenkomstige rang.

Artikel 17.

Op de militairen, behorende tot de Militaire Missie, is toepasselijk het Nederlandse formele en materiële militaire strafrecht, het Nederlandse militaire tuchtrecht, alsmede het Indonesische commune materiële strafrecht, voorzover het genoemde militaire strafrecht geen eigen regelingen bevat.

Het militaire tuchtrecht wordt uitgeoefend door of namens het Hoofd van de Militaire Missie.

Desgevraagd zal aan de Indonesische autoriteiten worden medegedeeld, welke afdoening is gevolgd op door genoemde militairen gepleegde ernstige vergrijpen, waarbij de belangen van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië of van haar onderdanen zijn betrokken.

Artikel 18.

Het Hoofd van de Militaire Missie en enkele in overleg met de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië aan te wijzen leden van deze Missie, genieten diplomatieke onschendbaarheid.

HOOFDSTUK IV.

BEPALINGEN VAN FINANCIËLE EN ADMINISTRATIEVE AARD.

Artikel 19.

1. De leden van de Militaire Missie vallen onder financieel en administratief beheer van Nederland.

2. De kosten van de Missie, zoals samengesteld overeenkomstig de artikelen 6, 7, 8 en 9, en van de door haar verrichte taken, zoals overeengekomen volgens de artikelen 10 en 11, komen ten laste van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

3. Door de Regering der Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zullen aan het Hoofd van de Nederlandse Militaire Missie periodiek de benodigde gelden ter beschikking worden gesteld op basis van een door dat Hoofd opgemaakte en door de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië goedgekeurde jaarlijkse kasbegroting. De voor de uitgaven van de Missie noodzakelijke deviezen zullen eveneens periodiek en op basis van een jaarlijkse deviezenbegroting, opgemaakt door het Hoofd der Missie en goedgekeurd door de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, ter beschikking worden gesteld.

Bij gebleken noodzaak kunnen door het Hoofd van de Missie wijzigingen in de kasbegroting respectievelijk de deviezenbegroting worden voorgesteld.

Artikel 20.

1. De financiële positie van het personeel van de Militaire Missie zal onderworpen zijn aan de Nederlandse regelingen. Voorzover deze regelingen in het bijzonder betrekking hebben op de dienst van Nederlandse militairen bij de Nederlandse Militaire Missie, zullen zij worden gehandhaafd, respectievelijk ingevoerd of gewijzigd na overleg met de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

2. De werking van artikel 19 lid 2 ten aanzien van salarissen en emolumenten zal aanvangen op de dag van vertrek uit Nederland van de leden van de Militaire Missie en zal worden bestendigd tot op de dag van terugkomst in Nederland na beëindiging van de tewerkstelling bij de Militaire Missie, en eventueel daarna tot op de dag van beëindiging van elk verlof, waarop men, tengevolge van de tewerkstelling bij de Militaire Missie recht kan doen gelden.

3. Het tweede lid van artikel 19 zal eveneens van toepassing zijn op de kosten van vervoer van personeel en van hun gezinnen van Nederland naar Indonesië en terug.

4. Onkosten voor reizen met schepen en vliegtuigen der Koninklijke Marine zullen niet worden verrekend.

Artikel 21.

1. De leden van de Missie zullen vrijgesteld zijn van belastingen van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië overeenkomstig een tussen de beide deelgenoten te treffen regeling, welke zal worden opgesteld naar analogie van de terzake internationaal gebruikelijke regelingen.

2. Een soortgelijke regeling zal worden getroffen terzake van de in- en uitvoerrechten en de andere belastingen en accijnzen geheven op bepaalde goederen, bestemd voor of in gebruik bij de Missie.

3. Indien een lid der Missie overlijdt, zal zijn successie uit fiscaal oogpunt worden geregeld als ware hij in Nederland overleden.

Artikel 22.

Vergoeding van reis- en verblijfkosten op dienstreizen binnen het gebied van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zal worden verleend door de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en deze reizen dienen te geschieden volgens de accommodatievoorschriften, welke eveneens van toepassing zijn op militairen in dienst van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 23.

Indien bij een sterfgeval van een van de leden van de Militaire Missie, of van een van de gezinsleden van een lid van de Militaire Missie de familie van de overledene vervoer van de overledene naar Nederland wenst, zal de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië de kosten dragen van en medewerking verlenen tot dit vervoer.

HOOFDSTUK V.

BIJZONDERE BEPALINGEN.

Artikel 24.

De Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zal passende faciliteiten verlenen aan de leden van de Militaire Missie.

Artikel 25.

Indien in deze overeenkomst wordt gesproken van gezinnen, dan blijft dit beperkt tot echtgenote en kinderen.

Artikel 26.

De leden van de Militaire Missie zullen recht kunnen doen gelden op een jaarlijks verlof van één maand.

Enig ongebruikt deel van dit verlof zal cumulatief zijn van jaar tot jaar gedurende de tijd van in dienst zijn bij de Militaire Missie.

De reiskosten tijdens het verlof komen niet ten laste van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, onverminderd de algemene voor militairen geldende faciliteiten ten aanzien van het gebruik van openbare vervoermiddelen.

Artikel 27.

Het Hoofd van de Militaire Missie zal het in artikel 26 genoemde verlof verlenen, rekening houdende met de belangen van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 28.

De Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zal voorzien in een volledige en passende geneeskundige verzorging voor de leden van de Militaire Missie en hun gezinnen.

Artikel 29.

De leden van de Militaire Missie, die wegens hun gezondheidstoestand gedurende een lange periode niet in staat zijn hun diensten te verrichten, zullen worden vervangen.

Ik heb de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaar.

J. H. Van Maarseveen,

Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

Nr 2, 1950

DELEGATIE
REPUBLIEK INDONESIE

No. 11/E.L.

DELEGATIE
B.F.O.

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Aan de Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie, 's-Gravenhage.

Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben de eer U mede te delen, dat de Indonesische Delegaties ter Ronde Tafel Conferentie zich op het standpunt stellen, dat tussen de Delegaties ter Conferentie het volgende is overeengekomen.

a. Eerst na de overdracht van de souvereiniteit kunnen de samenstelling en de bepaling van de taken der door de deelgenoten van de Nederlands-Indonesische Unie uit te wisselen militaire missies door derzelver Regeringen in onderling overleg worden geregeld, overeenkomstig artikel 7 van de aan het ontwerp-Uniestatuut gehechte ontwerp-overeenkomst ter uitvoering van de artikelen 2 en 21 van genoemd Statuut.

b. Echter zal met ingang van bovenbedoelde overdracht van de souvereiniteit een Nederlandse militaire missie in Indonesië werkzaam zijn, welke tot taak zal hebben medewerking te verlenen bij de opbouw en de opleiding van de strijdkrachten van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, alsmede adviserend op te treden inzake vraagstukken van militaire aard.

c. In verband met hetgeen onder *b* is overeengekomen en in afwachting van een regeling als bedoeld onder *a* is door de Commissie voor Militaire Aangelegenheden ter Ronde Tafel Conferentie een concept-overeenkomst Militaire Missie ontworpen, zoals deze hierna is weergegeven, waarnaar partijen zich tot aan het totstandkomen van de regeling als bedoeld onder *a* zullen gedragen.

CONCEPT OVEREENKOMST MILITAIRE MISSIE.

HOOFDSTUK I.

TAAK EN DUUR.

Artikel 1.

De taak van de Nederlandse Militaire bestaat uit medewerking verlenen aan de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië bij de opbouw en de opleiding van de strijdkrachten van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, alsmede adviserend optreden inzake vraagstukken van militaire aard.

Artikel 2.

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie jaren, gerekend vanaf de datum van ondertekening van deze overeenkomst, tenzij eerder beëindigd, dan wel verlengd volgens hieronder beschreven regels.

Artikel 3.

De twee Regeringen plegen tenminste één jaar vóór de beëindiging van de termijn genoemd in artikel 2, overleg omtrent eventuele verlenging van het verblijf van dan wel omtrent eventuele wijziging van de samenstelling en de taken van de missie.

Artikel 4.

Deze overeenkomst kan worden opgezegd vóór de beëindiging van de termijn genoemd in artikel 2, of vóór de beëindiging van de verlenging, overeengekomen volgens artikel 3, door middel van een schriftelijke kennisgeving van één van beide Regeringen, waarbij een opzeggingstermijn in acht dient te worden genomen van zes maanden.

Artikel 5.

Deze overeenkomst kan, op initiatief van één van beide Regeringen, worden beëindigd, terstond en zonder voorwaarden, in tijden, waarin één van beide Regeringen is betrokken in binnenlandse onlusten of buitenlandse vijandelijkheden, dan wel om redenen van algemeen belang voor het Koninkrijk der Nederlanden of voor de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

HOOFDSTUK II.

SAMENSTELLING.

Artikel 6.

De Nederlandse Militaire Missie vormt één geheel; zij omvat een afdeling zeemacht, een afdeling landmacht en een afdeling luchtmacht.

Artikel 7.

De Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië geeft aan de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden haar wensen te kennen inzake de samenstelling van de Militaire Missie, verband houdende met de door deze Militaire Missie uit te voeren opdrachten, waarna de samenstelling in gemeenschappelijk overleg door beide Regeringen zal worden vastgesteld.

Artikel 8.

Wijzigingen in de samenstelling van de Militaire Missie zullen niet dan in gemeenschappelijk overleg door beide Regeringen worden vastgesteld.

Artikel 9.

Ieder lid van de Militaire Missie kan door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden te allen tijde van zijn lidmaatschap worden ontheven, waarbij de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zich verplicht voor een vervangend lid zorg te dragen.

HOOFDSTUK III.

WERKZAAMHEDEN EN RANGEN.

Artikel 10.

Het personeel van de Militaire Missie voert die opdrachten uit, waaromtrent inzake aard en wijze van uitvoering tussen de Minister van Defensie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en het Hoofd van de Militaire Missie overeenstemming bestaat.

Artikel 11.

Over onderwerpen, waarvan zou blijken of waarvan is te verwachten, dat zij een politiek karakter dragen, zal overleg plaats vinden tussen de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel 12.

Elk lid van de Missie zal zijn diensten in de Missie verrichten in de rang, welke hij bekleedt bij de strijdkrachten van het Koninkrijk der Nederlanden en zal het daarvoor voorgeschreven Nederlandse uniform en de daarbij behorende onderscheidingstekenen dragen.

Artikel 13.

De leden van de Missie blijven behoren tot het personeel van de Nederlandse strijdkrachten en blijven uit dien hoofde gebonden aan hun verplichtingen jegens het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel 14.

De leden van de Militaire Missie zijn binnen het kader van de vervulling van hun taak gebonden zich te richten naar de aanwijzingen en voorschriften van de respectievelijk voor de zee-, land- en luchtmacht bevoegde militaire autoriteiten van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en zijn als zodanig verantwoordelijk aan de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, door tussenkomst van het Hoofd van de Militaire Missie.

Artikel 15.

De leden van de Militaire Missie zullen zoveel mogelijk in groepen worden georganiseerd.

De bevoegde militaire autoriteiten van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zullen met de hoogste of oudste in rang zijnde officier van elke groep overleg plegen inzake de aanwijzingen en voorschriften binnen het kadar van de vervulling van hun taak.

Artikel 16.

De leden van de Militaire Missie hebben aanspraak op alle eerbewijzen en voorrechten, welke de wetten en voorschriften van de strijdkrachten van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië verlenen aan het personeel van overeenkomstige rang.

Artikel 17.

Op de militairen, behorende tot de Militaire Missie is, toepasselijk het Nederlandse formele en materiële militaire strafrecht, het Nederlandse militaire tuchtrecht, alsmede het Indonesische commune materiële strafrecht, voorzover het genoemde militaire strafrecht geen eigen regelingen bevat.

Het militaire tuchtrecht wordt uitgeoefend door of namens het Hoofd van de Militaire Missie.

Desgevraagd zal aan de Indonesische autoriteiten worden medegedeeld, welke afdoening is gevolgd op door genoemde militairen gepleegde ernstige vergrijpen, waarbij de belangen van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië of van haar onderdanen zijn betrokken.

Artikel 18.

Het Hoofd van de Militaire Missie en enkele in overleg met de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië aan te wijzen leden van deze Missie, genieten diplomatieke onschendbaarheid.

HOOFDSTUK IV.
BEPALINGEN VAN FINANCIËLE EN ADMINISTRATIEVE AARD.

Artikel 19.

1. De leden van de Militaire Missie vallen onder financieel en administratief beheer van Nederland.

2. De kosten van de Missie, zoals samengesteld overeenkomstig artikel 6, 7, 8 en 9, en van de door haar verrichte taken, zoals overeengekomen volgens artikel 10 en 11, komen ten laste van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

3. Door de Regering der Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zullen aan het Hoofd van de Nederlandse Militaire Missie periodiek de benodigde gelden ter beschikking worden gesteld op basis van een door dat Hoofd opgemaakte en door de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië goedgekeurde jaarlijkse kasbegroting. De voor de uitgaven van de Missie noodzakelijke deviezen zullen eveneens periodiek en op basis van een jaarlijkse deviezenbegroting, opgemaakt door het Hoofd der Missie en goedgekeurd door de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, ter beschikking worden gesteld.

Bij gebleken noodzaak kunnen door het Hoofd van de Missie wijzigingen in de kasbegroting respectievelijk de deviezenbegroting worden voorgesteld.

Artikel 20.

1. De financiële positie van het personeel van de Militaire Missie zal onderworpen zijn aan de Nederlandse regelingen, Voorzover deze regelingen in het bijzonder betrekking hebben op de dienst van Nederlandse militairen bij de Nederlandse Militaire Missie, zullen zij worden gehandhaafd, respectievelijk ingevoerd of gewijzigd na overleg met de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

2. De werking van artikel 19 lid 2 ten aanzien van salarissen en emolumenten zal aanvangen op de dag van vertrek uit Nederland van de leden van de Militaire Missie en zal worden bestendigd tot op de dag van terugkomst in Nederland na beëindiging van de tewerkstelling bij de Militaire Missie, en eventueel daarna tot op de dag van beëindiging van elk verlof, waarop men, tengevolge van de tewerkstelling bij de Militaire Missie recht kan doen gelden.

3. Het tweede lid van artikel 19 zal eveneens van toepassing zijn op de kosten van vervoer van personeel en van hun gezinnen van Nederland naar Indonesië en terug.

4. Onkosten voor reizen met schepen en vliegtuigen der Koninklijke Marine zullen niet worden verrekend.

Artikel 21.

1. De leden van de Missie zullen vrijgesteld zijn van belastingen van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië overeenkomstig een tussen de beide deelgenoten te treffen regeling, welke zal worden opgesteld naar analogie van de terzake internationaal gebruikelijke regelingen.

2. Een soortgelijke regeling zal worden getroffen terzake van de in- en uitvoerrechten en de andere belastingen en accijnzen geheven op bepaalde goederen, bestemd voor of in gebruik bij de Missie.

3. Indien een lid der Missie overlijdt, zal zijn successie uit fiscaal oogpunt worden geregeld als ware hij in Nederland overleden.

Artikel 22.

Vergoeding van reis- en verblijfkosten op dienstreizen binnen het gebied van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zal worden verleend door de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en deze reizen dienen te geschieden volgens de accommodatievoorschriften welke eveneens van toepassing zijn op militairen in dienst van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 23.

Indien bij een sterfgeval van een van de leden van de Militaire Missie, of van een van de gezinsleden van een lid van de Militaire Missie de familie van de overledene vervoer van de overledene naar Nederland wenst, zal de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië de kosten dragen van en medewerking verlenen tot dit vervoer.

HOOFDSTUK V.

BIJZONDERE BEPALINGEN.

Artikel 24.

De Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zal passende faciliteiten verlenen aan de leden van de Militaire Missie.

Artikel 25.

Indien in deze overeenkomst wordt gesproken van gezinnen, dan blijft dit beperkt tot echtgenote en kinderen.

Artikel 26.

De leden van de Militaire Missie zullen recht kunnen doen gelden op een jaarlijks verlof van één maand.

Enig ongebruikt deel van dit verlof zal cumulatief zijn van jaar tot jaar gedurende de tijd van in dienst zijn bij de Militaire Missie.

De reiskosten tijdens het verlof komen niet ten laste van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, onverminderd de algemene voor militairen geldende faciliteiten ten aanzien van het gebruik van openbare vervoermiddelen.

Artikel 27.

Het Hoofd van de Militaire Missie zal het in artikel 26 genoemde verlof verlenen, rekening houdende met de belangen van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 28.

De Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zal voorzien in een volledige en passende geneeskundige verzorging voor de leden van de Militaire Missie en hun gezinnen.

Artikel 29.

De leden van de Militaire Missie, die wegens hun gezondheidstoestand gedurende een lange periode niet in staat zijn hun diensten te verrichten, zullen worden vervangen.

Wij hebben de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaren,

MOHAMMAD HATTA,

Voorzitter der Republikeinse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

HAMID,

Voorzitter der B.F.O.-Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

NEDERLANDSE DELEGATIE TER RONDE TAFEL CONFERENTIE

Secretariaat

No. 848

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Aan de Voorzitters van de Delegaties der Regering van de Republiek Indonesië en van de Bijeenkomst voor Federaal Overleg.

Mijne Heren Voorzitters,

Ik heb de eer U mede te delen, dat de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie zich op het standpunt stelt, dat tussen de Delegaties ter Conferentie het volgende is overeengekomen.

Naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarbij onder meer de termijn, waarbinnen de Koninklijke Marine uit Indonesië zal zijn teruggetrokken, op een jaar is gesteld, bevestigen de Voorzitters der beide Indonesische Delegaties, met de Voorzitter der Nederlandse Delegatie te zijn overeengekomen, dat de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië terstond na de overdracht van de souvereiniteit met de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden besprekingen zal openen omtrent de door Nederland aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië te verlenen maritieme bijdrage, op basis van de artikelen 4 en 5 van de ontwerp-overeenkomst ter uitvoering van de artikelen 2 en 21 van het Uniestatuut.

De Delegaties der Republiek Indonesië en der Bijeenkomst Federaal Overleg zijn overtuigd van de noodzakelijkheid van die besprekingen. Zij zien in, dat het Nederland om technische redenen niet mogelijk zal zijn de in artikel 3 van de ontwerp-overeenkomst ter uitvoering van de artikelen 2 en 21 van het Uniestatuut genoemde steun langer dan één

jaar te verlenen, wanneer niet uiterlijk vier maanden na de overdracht van de souvereiniteit de bovengenoemde besprekingen tot een overeenkomst hebben geleid.

Ik heb de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaar,

J. H. VAN MAARSEVEEN,

Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

DELEGATIE
REPUBLIE INDONESIË

DELEGATIE
B.F.O.

No. 12/E.L.

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben de eer U mede te delen, dat de Indonesische Delegaties ter Ronde Tafel Conferentie zich op het standpunt stellen, dat tussen de Delegaties ter Conferentie het volgende is overeengekomen.

Naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarbij onder meer de termijn, waarbinnen de Koninklijke Marine uit Indonesië zal zijn teruggetrokken, op een jaar is gesteld, bevestigen de Voorzitters der beide Indonesische Delegaties, met de Voorzitter der Nederlandse Delegatie te zijn overeengekomen, dat de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië terstond na de overdracht van de souvereiniteit met de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden besprekingen zal openen omtrent de door Nederland aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië te verlenen maritieme bijdrage, op basis van de artikelen 4 en 5 van de ontwerp-overeenkomst ter uitvoering van de artikelen 2 en 21 van het Uniestatuut.

De Delegaties der Republiek Indonesië en der Bijeenkomst Federaal Overleg zijn overtuigd van de noodzakelijkheid van die besprekingen. Zij zien in, dat het Nederland om technische redenen niet mogelijk zal zijn de in artikel 3 van de ontwerp-overeenkomst ter uitvoering van de artikelen 2 en 21 van het Uniestatuut genoemde steun langer dan één jaar te verlenen, wanneer niet uiterlijk vier maanden na de

overdracht van de souvereiniteit de bovengenoemde besprekingen tot een overeenkomst hebben geleid.

Wij hebben de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaren,

MOHAMMAD HATTA,
Voorzitter der Republikeinse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

HAMID,
Voorzitter der B.F.O.-Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

Aan de Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie, te 's-Gravenhage.

NEDERLANDSE DELEGATIE TER RONDE TAFEL CONFERENTIE

Secretariaat

No. 847.

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Aan de Voorzitters van de Delegaties der Regering van de Republiek Indonesia en van de Bijeenkomst voor Federaal Overleg.

Mijne Heren Voorzitters,

Ik heb de eer U mede te delen, dat bij de afsluiting van de Financiële en Economische Overeenkomst mede overeenstemming werd bereikt ten aanzien van de volgende zes punten.

1. De Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië erkent de speciale positie van het gewezen overheidspersoneel van Indonesië en de nagelaten betrekkingen van dit personeel en verplicht zich om na de overdracht van de souvereiniteit de tegenwoordige behandeling van genoemde categorieën van personen voort te zetten.

Het bepaalde in de voorafgaande alinea houdt in dat betaling van pensioenen van gewezen overheidspersoneel van Indonesië en van uitkeringen aan de nagelaten betrekkingen van dit personeel, voor zover dit personeel, dan wel de nagelaten betrekkingen in Nederland gevestigd zijn, in Nederlands courant zal plaats vinden, met dien verstande, dat uiterlijk in de maand Maart 1950 onderhandelingen zullen worden gevoerd teneinde tot een redelijke oplossing te geraken.

De tegenwoordige praktijk zal voortgang vinden tot overeenstemming is bereikt.

2. Indien het Internationale Monetaire Fonds na de souvereiniteitsoverdracht, doch voordat de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië het lidmaatschap van dat Fonds heeft verkregen, rechtstreeks aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië inlichtingen vraagt of indien dat Fonds een onderzoek wenst in te stellen, zal de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië de gevraagde inlichtingen verstrekken en het gevraagde onderzoek toe-

staan, indien en voor zover zulks krachtens de terzake geldende procesregelen vereist wordt voor de beoordeling van verzoeken ter verkrijging van het lidmaatschap van het Fonds.

3. Met betrekking tot het HG-crediet is overeenkomen dat de bestaande regeling zal blijven doorlopen totdat een nieuwe regeling in overeenstemming tussen beide partijen tot stand zal zijn gekomen. Het overleg daartoe zal zo spoedig mogelijk worden geopend en met ernst zal ernaar worden gestreefd vóór ultimo Maart 1950 gereed te komen.

4. De Generale Scheepvaart Overeenkomst met inbegrip van de daarbij behorende bijlagen voor de uitvoering daarvan zal van kracht blijven tot 31 Maart 1950, met dien verstande dat, wanneer de tegenwoordige regelingen bepalen dat eenzijdige beslissingen door een der partijen kunnen worden genomen, deze beslissingen door beide partijen in onderlinge overeenstemming zullen worden genomen. Onderhandelingen over de wijzigingen, in deze overeenkomst aan te brengen, zullen zo spoedig mogelijk plaatsvinden.

5. De in het kader van het Coördinatie-College Nederland-Indonesië gemaakte afspraken van deviezentechnische aard — waarvoor moge worden verwezen naar de hierbij gevoegde Hoofdstukken XI, XIII en XIV van de Samenvatting van de Conclusies van het Coördinatie-College, Financiële Sector — blijven van kracht zolang zij niet in gemeenschappelijk overleg tussen Nederland en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië worden gewijzigd. Dit overleg zal in het eerste kwartaal van 1950 plaatsvinden.

6. Na de souvereiniteitsoverdracht zal een middel worden geschapen teneinde aan de handelspolitieke samenwerking een practisch hanteerbare uitwerking te geven.

Ik zal het op prijs stellen te vernemen of U zich hiermede kunt verenigen.

Ik heb de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaar,

J. H. Van Maarseveen,

Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

BIJLAGE bedoeld in punt 5 van de brief van de Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie van 2 November 1949, no. 847 en van de Voorzitters van de Delegaties van de Republiek Indonesië en van de Bijeenkomst voor Federaal Overleg van 2 November 1949, no. 8/E.L.

Hoofdstukken XI, XIII en XIV van de Samenvatting van de Conclusies van het Coördinatie-College, Financiële Sector.

HOOFDSTUK XI.

DEVIEZENINGEZETENSCHAP EN DEVIEZENRECHTELIJK EIGENDOM VAN VERMOGENSWAARDEN.

Paragraaf 1.

Deviezeningezetenschap.

1. Onder „ingezetenen" wordt verstaan:

a. natuurlijke personen, die hun woonplaats in het binnenland hebben, dan wel gewoonlijk aldaar verblijven;

b. rechtspersonen en vennootschappen, die in het binnenland zijn gevestigd of worden bestuurd dan wel — in nader door De Nederlandsche Bank respectievelijk het Deviezeninstituut voor Indonesië te bepalen gevallen — aldaar kantoor houden;

c. filialen, bijkantoren en bedrijven in het binnenland van een niet-ingezetene, ongeacht of zij al dan niet rechtspersoonlijkheid bezitten.

2. Onder „niet-ingezetenen" wordt verstaan:

a. natuurlijke en rechtspersonen en vennootschappen, niet vallende onder de omschrijving „ingezetenen";

b. filialen, bijkantoren en bedrijven in het buitenland van een ingezetene, ongeacht of zij al dan niet rechtspersoonlijkheid bezitten, tenzij zij in het binnenland worden bestuurd.

3. Het deviezeningezetenschap van natuurlijke personen, woonachtig in Nederland respectievelijk Indonesië wordt als regel geacht te zijn verkregen of te zijn verloren gegaan na

verblijf van 1 jaar in het binnenland respectievelijk het andere gebiedsdeel, tenzij reeds dadelijk of na enige tijd als zeker kan worden aangenomen, dat dit verblijf langer dan één jaar zal duren, in welk geval het ingezetenschap ingaat of eindigt op het moment, dat zulks als zeker wordt aangenomen. In twijfelgevallen zal De Nederlandsche Bank respectievelijk het Deviezeninstituut voor Indonesië zelfstandig een beslissing nemen ten aanzien van het ingezetenschap van personen afkomstig uit Indonesië respectievelijk Nederland, van welke beslissing beide instanties elkaar terstond mededeling zullen doen.

Paragraaf 2.

Beschikkingsrecht over vermogenswaarden luidende in Nederlands en Indonesisch courant.

1. Nederland en Indonesië zien af van vordering van niet-commerciële vermogenswaarden luidende in Indonesisch respectievelijk Nederlands courant.

2. Indonesië staat aan natuurlijke personen, deviezeningezetenen van Indonesië, toe te beschikken over de hun toebehorende vermogenswaarden in Nederland. Nederland zal zoveel mogelijk hieraan medewerken door het doen verlenen van de nodige vergunningen.

Paragraaf 3.

Deviezenrechtelijk eigendom van vermogenswaarden van filialen enz. in het andere gebiedsdeel.

1. Zonder ten aanzien van de vraag, welke vermogenswaarden als behorende aan de in het ene gebiedsdeel gevestigde filialen, bijkantoren of bedrijven van ingezetenen van het andere gebiedsdeel dienen te worden beschouwd en derhalve tot de deviezenhuishouding van het ene gebiedsdeel dienen te worden gerekend, een principiële formule op te stellen, wordt om practische redenen de volgende werkbasis aanvaard:

a. als vermogenswaarde van een in Indonesië gevestigd filiaal, bijkantoor of bedrijf van een ingezetene van

Nederland worden beschouwd de per 10 Mei 1940 aan bedoeld filiaal, bijkantoor of bedrijf voor de directe bedrijfsuitoefening ter beschikking staande vermogenswaarden, alsmede alle waarden welke sedertdien door deze bedrijfsuitoefening in Indonesië zijn of worden verkregen, voorzover niet deze vermogenswaarden in overeenstemming met de Indonesische deviezenvoorschriften ter beschikking van de ingezetene van Nederland zijn gesteld;

b. als vermogenswaarden van een in Nederland gevestigd filiaal, bijkantoor of bedrijf van een ingezetene van Indonesië worden beschouwd de per 10 Mei 1940 aan bedoeld filiaal, bijkantoor of bedrijf voor de directe bedrijfsuitoefening ter beschikking staande vermogenswaarden alsmede alle waarden, welke sindsdien door deze bedrijfsuitoefening in Nederland zijn of worden verkregen, voorzover niet deze vermogenswaarden in overeenstemming met de Nederlandse deviezenvoorschriften ter beschikking van de ingezetene van Indonesië zijn gesteld.

2. Ingeval de toepassing van de onder 1 vermelde werkbasis tot aperte onbillijkheden zou leiden, zullen De Nederlandsche Bank en het Deviezeninstituut voor Indonesië in onderling overleg van geval tot geval een beslissing nemen.

Paragraaf 4.

Deviezenrechtelijk eigendom van vermogenswaarden en bedrijfsresultaten van filialen, bijkantoren enz. buiten Nederland en Indonesië.

1. Ten aanzien van de verdeling tussen Nederland en Indonesië van vermogenswaarden belegd in filialen en bijkantoren buiten deze gebiedsdelen, zomede van de netto bedrijfsresultaten in deviezen, die sedertdien uit deze beleggingen zijn voortgekomen, zal het in paragraaf 3 vastgelegde zogenaamde 10 Mei-criterium van kracht zijn. Deze regel valt te formuleren door in de in genoemde paragraaf 3 weergegeven conclusie onder lid 1, sub *a* en sub *b* achter „welke sedertdien door deze bedrijfsuitoefening in Indonesië (respectievelijk Nederland)" toe te voegen: „of in het buitenland".

2. Wanneer op grond van de in lid 1 vermelde werkbasis vastgesteld is, dat bepaalde zich in het buitenland bevindende, vermogenswaarden tot het Indonesische deviezenvermogen behoren, zal worden nagegaan, of er voor Nederland aanleiding bestaat, dat Indonesisch belang over te nemen tegen restitutie van de daarvoor uitgelegde deviezen c.q. de waarde der investatie. Deze aanleiding wordt verondersteld aanwezig te zijn, wanneer het object buiten de Indonesische economische sfeer is gelegen, ofschoon dit voor Nederland geenszins een verplichting tot overname inhoudt. Elk geval zal op zijn eigen mérites worden bezien. Indonesië is daarbij bereid om in nader overleg verrekening in vreemde valuta uit te stellen, indien de deviezenpositie van Nederland zulks wenselijk maakt.

Paragraaf 5.

Positie handelshuizen in Japan.

1. Er zal naar worden gestreefd dat de met de betrokken Amerikaanse autoriteiten te treffen regelingen ruimte laten voor eventuele vestiging van Nederlandse handelshuizen, al dan niet in het kader van een trustmaatschappij.

2. Op grond van het feit, dat de in Japan te vestigen handelshuizen feitelijk als aan- en verkoopkantoren van in Indonesië gevestigde handelshuizen moeten worden beschouwd, zullen voor zover ten behoeve van hun oprichting en instandhouding door Indonesië deviezen zijn verstrekt, deze huizen, zolang deze factoren gelden, tot het deviezenvermogen van Indonesië behoren.

HOOFDSTUK XIII.

FINANCIERING VAN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN IN INDONESIË DOOR NEDERLAND OF DOOR INDONESIË.

1. De financiering van Indonesische dochtermaatschappijen van Nederlandse ondernemingen dient achtereenvolgens op de volgende wijze te geschieden:

a. door aanwending van de saldi in Indonesië;

b. door financiering door Indonesische banken met korte bedrijfscredieten en met langere bedrijfscredieten tegen

in Indonesië aanwezig onderpand in de mate, waarin dit ook reeds vóór 1940 placht te geschieden en/of door transfer uit Nederland ten laste van de moedermaatschappijen.

2. Nederland zal van Overheidswege aan de uitvoering van deze bepaling steun verlenen door in voorkomende gevallen moedermaatschappijen, die niet bereid zijn tot investering over te gaan, daartoe aan te sporen.

3. In beginsel zal tegenover buitenlandse maatschappijen dezelfde als in lid 1 genoemde gedragslijn worden gevolgd.

4. Erkend wordt, dat in zeer bijzondere gevallen afwijkingen van de hoofdregel noodzakelijk kunnen zijn, met name indien de moedermaatschappij weigerachtig blijft te investeren en het betrokken bedrijf voor Indonesië van vitaal belang is.

HOOFDSTUK XIV.

EFFECTENVERKEER INDONESIË—NEDERLAND.

Paragraaf 1.

Obligaties met pari-clausule.

Wat betreft de mogelijkheid tot opzending naar Nederland van obligaties met pari-clausule is bepaald dat:

a. de nog niet uitbetaalde lossingen en achterstallige coupons uitsluitend in Indonesië betaalbaar zijn, terwijl de overmaking van deze gelden geschiedt binnen het kader van het transfer-schema;

b. met betrekking tot de nog aanwezige obligaties onderscheid wordt gemaakt tussen:

1. obligaties, die het eigendom zijn van niet-Indonesische deviezeningezetenen;
2. obligaties, die het eigendom zijn van Indonesische deviezeningezetenen;
3. obligaties, die het eigendom zijn van Indonesische deviezeningezetenen, rechtspersonen;

waarbij als regel is aanvaard, dat voor de opzending naar Nederland van de sub 1 en sub 2 bedoelde stukken onvoorwaardelijke vergunning wordt verleend, van de sub 3 bedoelde stukken in het algemeen geen vergunning zal worden verleend.

Daarbij wordt aangetekend, dat genoemde facaliteit voor zover zij natuurlijke personen betreft, uitsluitend zal gelden voor de oorspronkelijke houders van de obligatiën.

Paragraaf 2.

Buitenlandse effecten van Indonesische ingezetenen.

1. Het is in het kader van de samenwerking tussen Nederland en Indonesië uitermate gewenst, dat de Nederlandse banken zoveel mogelijk medewerking verlenen aan de uitvoering van de Indonesische deviezenbepalingen, hetgeen o.a. inhoudt, dat bij het beschikken over buitenlandse effecten door een Indonesische ingezetene, de bank, waar deze effecten in depôt liggen, aan genoemd persoon vraagt de vergunning van het Deviezeninstituut voor Indonesië over te leggen.

2. Hoewel De Nederlandsche Bank de Nederlandse bankinstellingen niet tot deze medewerking kan verplichten, is zij bereid gevonden aan de Nederlandse bankinstellingen een mededeling hieromtrent te doen uitgaan. Mocht desondanks het nagestreefde doel niet worden bereikt, dan zal het Deviezeninstituut voor Indonesië tot concentrering van alle buitenlandse effecten van Indonesische ingezetenen ten name van deviezenbanken in Indonesië overgaan.

3. Bij verkoop van buitenlandse effecten, liggend in een depôt bij een bank in Nederland, door een Indonesisch ingezetene, zal de overdracht van de buitenlandse valuta door Nederland aan Indonesië plaats vinden tegen betaling door Indonesië ten laste van de F- respectievelijk C-rekening, zodat de Indonesische ingezetene afrekening in Nederlands courant ontvangt.

DELEGATIE
REPUBLIEK INDONESIË

No. 8/E.L.

DELEGATIE
B.F.O.

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben de eer U de ontvangst te bevestigen van Uw brief d.d. heden, luidende als volgt:

„Ik heb de eer U mede te delen dat bij de afsluiting van de Financiële en Economische Overeenkomst mede overeenstemming werd bereikt ten aanzien van de volgende zes punten.

1. De Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië erkent de speciale positie van het gewezen overheidspersoneel van Indonesië en de nagelaten betrekkingen van dit personeel en verplicht zich om na de overdracht van de souvereiniteit de tegenwoordige behandeling van genoemde categorieën van personen voort te zetten.

Het bepaalde in de voorafgaande alinea houdt in dat betaling van pensioenen van gewezen overheidspersoneel van Indonesië en van uitkeringen aan de nagelaten betrekkingen van dit personeel, voor zover dit personeel, dan wel de nagelaten betrekkingen in Nederland gevestigd zijn, in Nederlands courant zal plaats vinden, met dien verstande, dat uiterlijk in de maand Maart 1950 onderhandelingen zullen worden gevoerd teneinde tot een redelijke oplossing te geraken.

De tegenwoordige praktijk zal voortgang vinden tot overeenstemming is bereikt.

2. Indien het Internationale Monetaire Fonds na de souvereiniteitsoverdracht, doch voordat de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië het lidmaatschap van dat Fonds heeft verkregen, rechtstreeks aan de Republiek der

Verenigde Staten van Indonesië inlichtingen vraagt of indien dat Fonds een onderzoek wenst in te stellen, zal de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië de gevraagde inlichtingen verstrekken en het gevraagde onderzoek toestaan, indien en voor zover zulks krachtens de terzake geldende procesregelen vereist wordt voor de beoordeling van verzoeken ter verkrijging van het lidmaatschap van het Fonds.

3. Met betrekking tot het HG-crediet is overeengekomen dat de bestaande regeling zal blijven doorlopen totdat een nieuwe regeling in overeenstemming tussen beide partijen tot stand zal zijn gekomen. Het overleg daartoe zal zo spoedig mogelijk worden geopend en met ernst zal ernaar worden gestreefd vóór ultimo Maart 1950 gereed te komen.

4. De Generale Scheepvaart Overeenkomst met inbegrip van de daarbij behorende bijlagen voor de uitvoering daarvan zal van kracht blijven tot 31 Maart 1950, met dien verstande dat, wanneer de tegenwoordige regelingen bepalen dat eenzijdige beslissingen door een der partijen kunnen worden genomen, deze beslissingen door beide partijen in onderlinge overeenstemming zullen worden genomen. Onderhandelingen over de wijzigingen, in deze overeenkomst aan te brengen, zullen zo spoedig mogelijk plaatsvinden.

5. De in het kader van het Coördinatie-College Nederland-Indonesië gemaakte afspraken van deviezentechnische aard — waarvoor moge worden verwezen naar de hierbij gevoegde Hoofdstukken XI, XIII en XIV van de Samenvatting van de Conclusies van het Coördinatie-College. Financiële Sector — blijven van kracht zolang zij niet in gemeenschappelijk overleg tussen Nederland en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië worden gewijzigd. Dit overleg zal in het eerste kwartaal van 1950 plaatsvinden.

6. Na de souvereiniteitsoverdracht zal een middel worden geschapen teneinde aan de handelspolitieke samenwerking een practisch hanteerbare uitwerking te geven.

Ik zal het op prijs stellen te vernemen of U zich hiermede kunt verenigen."

Wij delen U mede, dat wij ons met de inhoud van deze brief kunnen verenigen.

Wij hebben de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaren,

MOHAMMAD HATTA,
Voorzitter der Republikeinse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

HAMID,
Voorzitter der B.F.O.-Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

Aan de Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie,
s'-Gravenhage.

NEDERLANDSE DELEGATIE TER
RONDE TAFEL CONFERENTIE

Secretariaat

No. 846

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Aan de Voorzitters van de Delegaties der Regering van de Republiek Indonesia en van de Bijeenkomst voor Federaal Overleg.

Mijne Heren Voorzitters,

Ik heb de eer U het volgende mede te delen.

De Nederlandse Regering is bereid, afstand te doen van de tussen de rechtspersoon Staat der Nederlanden en de rechtspersoon Indonesië gesloten tinovereenkomst (tin pledge). Zij veroorlooft zich in verband daarmede voor te stellen, dat na de souvereiniteitsoverdracht een regeling zal worden getroffen, welke Nederland vrijwaart voor risico's van door Nederland ten behoeve van schulden van Indonesië gegeven garanties en dat in deze regeling onder meer zal worden opgenomen, dat andere crediteuren door Indonesië op het gebied van zekerheden voor de nakoming van door Indonesië aangegane of aan te gane schulden niet in een gunstiger positie zullen worden gebracht dan Nederland. Zij stelt zich voor, dat het overleg omtrent deze regeling zo spoedig mogelijk na de souvereiniteitsoverdracht in Unieverband zal plaats vinden.

Ik zal het op prijs stellen van U te mogen vernemen, dat U met het vorenstaande kunt instemmen.

Ik heb de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaar,

J. H. VAN MAARSEVEEN,

Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

DELEGATIE
REPUBLIEK INDONESIË

No. 9/E.L.

DELEGATIE
B.F.O.

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben de eer U mede te delen, dat het onze Delegaties tot voldoening stemt, dat de Nederlandse Regering bereid is afstand te doen van de tussen de rechtspersoon Staat der Nederlanden en de rechtspersoon Indonesië gesloten tinovereenkomst (tin pledge).

Zij kunnen er zich volkomen mee verenigen, dat na de souvereiniteitsoverdracht in Unieverband zo spoedig mogelijk besprekingen worden geopend teneinde na te gaan op welke wijze zal kunnen worden tegemoetgekomen aan Uw wens dat Nederland worde gevrijwaard voor risico's van door Nederland ten behoeve van schulden van Indonesië gegeven garanties.

Dezerzijds kan geheel worden ingestemd met de zienswijze, dat andere crediteuren op het gebied van de zekerheden voor de nakoming van door Indonesië aangegane of aan te gane schulden niet in een gunstiger positie zullen worden gebracht dan Nederland.

Hopende Uw schrijven van heden hiermede naar genoegen te hebben beantwoord, hebben wij de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaren,

MOHAMMAD HATTA,
Voorzitter der Republikeinse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

HAMID,
Voorzitter der B.F.O.-Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

Aan de Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie, s'-Gravenhage.

NEDERLANDSE DELEGATIE TER RONDE TAFEL CONFERENTIE

Secretariaat

No. 872

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Aan de Voorzitters van de Delegatie der Regering van de Republiek Indonesia en van de Bijeenkomst voor Federaal Overleg.

Mijne Heren Voorzitters,

Ik heb de eer U mede te delen, dat de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie zich op het standpunt stelt, dat tussen de Delegaties ter Conferentie is overeengekomen, dat de deelgenoten in de Unie zich verplichten tot wederzijds overleg alvorens bepalingen in hun nationaliteitswetgeving op te nemen, waardoor tussen hun wetgevingen nationaliteitsconflicten zouden kunnen ontstaan.

Ik zal het op prijs stellen te vernemen, of U zich hiermede kunt verenigen.

Ik heb de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaar,

J. H. VAN MAARSEVEEN,

Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

DELEGATIE
REPUBLIEK INDONESIË

No. 4/E.L.

DELEGATIE
B.F.O.

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben de eer de ontvangst te erkennen van Uw terzake handelend schrijven en kunnen U mededelen, dat de Delegaties van de Republiek Indonesië en de Bijeenkomst voor Federaal Overleg ter Ronde Tafel Conferentie zich op het standpunt stellen, dat tussen de Delegaties ter Conferentie is overeengekomen, dat de deelgenoten in de Unie zich verplichten tot wederzijds overleg alvorens bepalingen in hun nationaliteitswetgeving op te nemen, waardoor tussen hun wetgevingen nationaliteitsconflicten zouden kunnen ontstaan.

Wij hebben de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaren,

MOHAMMAD HATTA,
Voorzitter der Republikeinse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

HAMID,
Voorzitter der B.F.O.-Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

Aan de Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie,
s'-Gravenhage.

NEDERLANDSE DELEGATIE TER RONDE TAFEL CONFERENTIE

Secretariaat

No. 876

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Aan de Voorzitters van de Delegaties der Regering van de Republiek Indonesia en van de Bijeenkomst voor Federaal Overleg.

Mijne Heren Voorzitters,

Ik heb de eer U mede te delen, dat de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie zich op het standpunt stelt, dat tussen de Delegaties ter Conferentie het volgende is overeengekomen.

Elk der deelgenoten zal in zijn eigen nationaliteitswetgeving bepalen, dat dienstneming door zijn staatsburgers bij de andere deelgenoot of bij een publiekrechtelijk lichaam binnen diens rechtsgebied geen verlies of beperking van nationaliteit ten gevolge heeft.

Ik zal het op prijs stellen te vernemen, of U zich hiermede kunt verenigen.

Ik heb de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaar,
J. H. VAN MAARSEVEEN,
Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

DELEGATIE
REPUBLIEK INDONESIË

No. 6/E.L.

DELEGATIE
B.F.O.

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben de eer de ontvangst te erkennen van Uw terzake handelend schrijven en kunnen U mededelen, dat de Delegaties van de Republiek Indonesië en de Bijeenkomst voor Federaal Overleg ter Ronde Tafel Conferentie zich op het standpunt stellen, dat tussen de Delegaties ter Conferentie het volgende is overeengekomen.

Elk der deelgenoten zal in zijn eigen nationaliteitswetgeving bepalen, dat dienstneming door zijn staatsburgers bij de andere deelgenoot of bij een publiekrechtelijk lichaam binnen diens rechtsgebied geen verlies of beperking van nationaliteit ten gevolge heeft.

Wij hebben de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaren,

MOHAMMAD HATTA,
Voorzitter der Republikeinse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

HAMID,
Voorzitter der B.F.O.-Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

Aan de Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie,
s'-Gravenhage.

NEDERLANDSE DELEGATIE TER
RONDE TAFEL CONFERENTIE

Secretariaat

No. 849

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Aan de Voorzitters van de Delegaties der Regering van de Republiek Indonesia en van de Bijeenkomst voor Federaal Overleg.

Mijne Heren Voorzitters,

Ik heb de eer U mede te delen, dat de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie zich op het standpunt stelt, dat tussen de Delegaties ter Conferentie het volgende is overeengekomen.

Zolang tussen de deelgenoten in de Unie geen nadere regeling is getroffen, zullen zij, wat betreft processuele rechten, geen onderscheid maken ten opzichte van eigen staatsburgers en van staatsburgers van de deelgenoot.

Ik zal het op prijs stellen te vernemen, of U zich hiermede kunt verenigen.

Ik heb de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaar,
J. H. VAN MAARSEVEEN,
Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

DELEGATIE
REPUBLIEK INDONESIË

No. 7/E.L.

DELEGATIE
B.F.O.

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben de eer de ontvangst te erkennen van Uw schrijven nopens de processuele rechten van staatsburgers en kunnen U mededelen, dat de Delegaties van de Republiek Indonesië en de Bijeenkomst voor Federaal Overleg ter Ronde Tafel Conferentie zich op het standpunt stellen, dat tussen de Delegaties ter Conferentie het volgende is overeengekomen.

Zolang terzake tussen de deelgenoten in de Unie geen nadere regeling is getroffen, zullen zij, wat betreft processuele rechten, geen onderscheid maken ten opzichte van eigen staatsburgers en van staatsburgers van de deelgenoot.

Wij hebben de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaren,

MOHAMMAD HATTA,
Voorzitter der Republikeinse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

HAMID,
Voorzitter der B.F.O.-Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

Aan de Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie,
s'-Gravenhage.

NEDERLANDSE DELEGATIE TER RONDE TAFEL CONFERENTIE

Secretariaat

No. 873

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Aan de Voorzitters van de Delegaties der Regering van de Republiek Indonesië en van de Bijeenkomst voor Federaal Overleg.

Mijne Heren Voorzitters,

Ik heb de eer U mede te delen, dat de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie verstaat, dat ted uitwerking van het gestelde in artikel 25 van het ontwerp-Uniestatuut nopens de uitwisseling van Hoge Commissarissen tussen de Delegaties ter Conferentie het volgende is overeengekomen.

Artikel 1.

De Hoge Commissarissen zullen de voorrechten en immuniteiten genieten van Ambassadeurs van vreemde mogendheden.

Artikel 2.

Alvorens de Regering van een der deelgenoten tot benoeming van een Hoge Commissaris overgaat, zal zij zich er van vergewissen of de Regering van de andere deelgenoot met deze benoeming kan instemmen.

Artikel 3.

Zodra een Hoge Commissaris is benoemd, wordt daarvan mededeling gedaan aan de Regering van de andere deelgenoot. Een benoemde Hoge Commissaris ontvangt een door zijn Staatshoofd ondertekende inleidingsbrief, welke na aankomst op zijn post door hem persoonlijk wordt aangeboden aan het Staatshoofd van de andere deelgenoot. De datum waarop deze aanbieding plaats heeft zal gelden als de datum van ambtsaanvaarding.

Artikel 4.

De rangsverhouding tot vreemde Ambassadeurs zal worden bepaald door de datum van ambtsaanvaarding.

Artikel 5.

De deelgenoten zijn bevoegd om op daartoe nader overeen te komen plaatsen Commissarissen te benoemen, die hun werkzaamheden uitoefenen onder toezicht van de Hoge Commissarissen. Zij hebben de status van consulaire vertegenwoordigers en bezitten de rang van Consul-Generaal of Consul.

Artikel 6.

De Commissarissen zullen de voorrechten en immuniteiten genieten van beroeps consulaire vertegenwoordigers van vreemde mogendheden.

Artikel 7.

Van de benoeming van een Commissaris wordt door zijn Regering mededeling gedaan aan de Regering van de andere deelgenoot, door tussenkomst van de daarbij geaccrediteerde Hoge Commissaris, met verzoek om hem in de uitoefening van zijn functies te bevestigen.

Artikel 8.

De rangsverhouding tot vreemde consulaire vertegenwoordigers zal worden bepaald door de datum van ambtsaanvaarding.

Artikel 9.

Op de Hoge Commissariaten zullen ambtenaren werkzaam zijn met diplomatieke status. Zij zullen de titel dragen van plaatsvervangend Hoge Commissaris, 1e, 2e of 3e Secretaris.

Op de Commissariaten zullen ambtenaren werkzaam zijn met consulaire status. Zij zullen de titel dragen van 1e, 2e of 3e Secretaris.

Ik zal het op prijs stellen te vernemen, of U zich hiermede kunt verenigen.

Ik heb de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaar,

J. H. Van Maarseveen,

Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

DELEGATIE
REPUBLIEK INDONESIE

No. 3/E.L.

DELEGATIE
B.F.O.

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben de eer de ontvangst te erkennen van Uw schrijven nopens de uitwisseling van Hoge Commissarissen en kunnen U mededelen, dat de Delegaties van de Republiek Indonesië en de Bijeenkomst voor Federaal Overleg ter Ronde Tafel Conferentie zich op het standpunt stellen, dat ter uitwerking van het gestelde in artikel 25 van het ontwerp-Uniestatuut tussen de Delegaties ter Conferentie het volgende is overeengekomen.

Artikel 1.

De Hoge Commissarissen zullen de voorrechten en immuniteiten genieten van Ambassadeurs van vreemde mogendheden.

Artikel 2.

Alvorens de Regering van een der deelgenoten tot benoeming van een Hoge Commissaris overgaat, zal zij zich er van vergewissen of de Regering van de andere deelgenoot met deze benoeming kan instemmen.

Artikel 3.

Zodra een Hoge Commissaris is benoemd, wordt daarvan mededeling gedaan aan de Regering van de andere deelgenoot. Een benoemde Hoge Commissaris ontvangt een door zijn Staatshoofd ondertekende inleidingsbrief, welke na aankomst op zijn post door hem persoonlijk wordt aangeboden aan het Staatshoofd van de andere deelgenoot. De datum waarop deze aanbieding plaats heeft zal gelden als de datum van ambtsaanvaarding.

Artikel 4.

De rangsverhouding tot vreemde Ambassadeurs zal worden bepaald door de datum van ambtsaanvaarding.

Artikel 5.

De deelgenoten zijn bevoegd om op daartoe nader overeen te komen plaatsen Commissarissen te benoemen, welke hun werkzaamheden uitoefenen onder toezicht van de Hoge Commissarissen. Zij hebben de status van consulaire vertegenwoordigers en bezitten de rang van Consul-Generaal of Consul.

Artikel 6.

De Commissarissen zullen de voorrechten en immuniteiten genieten van beroeps consulaire vertegenwoordigers van vreemde mogendheden.

Artikel 7.

Van de benoeming van een Commissaris wordt door zijn Regering mededeling gedaan aan de Regering van de andere deelgenoot, door tussenkomst van de daarbij geaccrediteerde Hoge Commissaris, met verzoek om hem in de uitoefening van zijn functies te bevestigen.

Artikel 8.

De rangsverhouding tot vreemde consulaire vertegenwoordigers zal worden bepaald door de datum van ambtsaanvaarding.

Artikel 9.

Op de Hoge Commissariaten zullen ambtenaren werkzaam zijn met diplomatieke status. Zij zullen de titel dragen van plaatsvervangend Hoge Commissaris, 1e, 2e of 3e Secretaris.

Op de Commissariaten zullen ambtenaren werkzaam zijn met consulaire status. Zij zullen de titel dragen van 1e, 2e of 3e Secretaris.

Wij hebben de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaren,

MOHAMMAD HATTA,
Voorzitter der Republikeinse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

HAMID,
Voorzitter der B.F.O.-Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

Aan de Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie,
s'-Gravenhage.

NEDERLANDSE DELEGATIE TER RONDE TAFEL CONFERENTIE

Secretariaat

No. 874

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Aan de Voorzitters van de Delegaties der Regering van de Republiek Indonesia en van de Bijeenkomst voor Federaal Overleg.

Mijne Heren Voorzitters,

Ik heb de eer U mede te delen, dat de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie zich op het standpunt stelt, dat tussen de Delegaties ter Conferentie het volgende is overeengekomen.

Met het oog op het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de ontwerp-Overgangsovereenkomst en de instelling der Hoge Commissariaten achten de Delegaties het noodzakelijk, dat ten spoedigste in onderlinge overeenstemming nadere regelingen worden getroffen betreffende het comptabel beheer en de financiering van de uitgaven in elkanders rechtsgebied, waarbij credietverlening in rekening-courant over en weer onder nader overeen te komen voorwaarden in overweging kan worden genomen.

In die overeenkomst kan, voor zover nodig, onder daarin te stellen voorwaarden worden voorzien in een tijdelijke terbeschikkingstelling aan de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië ten behoeve van de Gedelegeerde in Nederland van Nederlandse overheidsdienaren, die thans nevens overheidsdienaren van Indonesië werkzaam zijn in het Commissariaat voor Indonesische Zaken.

Tevens zijn de Delegaties overeengekomen, dat, voor het geval de in artikel 9 van de ontwerp-Overgangsovereenkomst bedoelde Gedelegeerde van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zijn functie in Nederland op het ogen-

blik van de souvereiniteitsoverdracht nog niet heeft aanvaard, tot deze aanvaarding zijn functie zal worden waargenomen door de huidige Gecommitteerde voor Indonesische Zaken, die daarbij verantwoordelijk zal zijn aan en bindende aanwijzingen in acht zal nemen van de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Ik zal het op prijs stellen te vernemen, of U zich hiermede kunt verenigen.

Ik heb de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaar,
J. H. VAN MAARSEVEEN,

Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

DELEGATIE
REPUBLIEK INDONESIE

No. 1/E.L.

DELEGATIE
B.F.O.

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben de eer de ontvangst te erkennen van Uw terzake handelend schrijven en kunnen U mededelen, dat de Delegaties van de Republiek Indonesië en de Bijeenkomst voor Federaal Overleg ter Ronde Tafel Conferentie zich op het standpunt stellen, dat tussen de Delegaties ter Conferentie het volgende is overeengekomen.

Met het oog op het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de ontwerp-Overgangsovereenkomst en de instelling der Hoge Commissariaten achten de Delegaties het noodzakelijk, dat ten spoedigste in onderlinge overeenstemming nadere regelingen worden getroffen betreffende het comptabel beheer en de financiering van de uitgaven in elkanders rechtsgebied, waarbij credietverlening in rekening-courant over en weer onder nader overeen te komen voorwaarden in overweging kan worden genomen.

In die overeenkomst kan, voor zover nodig, onder daarin te stellen voorwaarden worden voorzien in een tijdelijke terbeschikkingstelling aan de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië ten behoeve van de Gedelegeerde in Nederland van Nederlandse overheidsdienaren, die thans nevens overheidsdienaren van Indonesië werkzaam zijn in het Commissariaat voor Indonesische Zaken.

Tevens zijn de Delegaties overeengekomen, dat, voor het geval de in artikel 9 van de ontwerp-Overgangsovereenkomst bedoelde Gedelegeerde van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zijn functie in Nederland op het ogenblik van de souvereiniteitsoverdracht nog niet heeft aanvaard, tot deze aanvaarding zijn functie zal worden waargenomen door de huidige Gecommitteerde voor Indonesische Zaken,

die daarbij verantwoordelijk zal zijn aan en bindende aanwijzingen in acht zal nemen van de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Wij hebben de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaren,

MOHAMMAD HATTA,

Voorzitter der Republikeinse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

HAMID,

Voorzitter der B.O.F.-Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

Aan de Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie, te 's-Gravenhage.

NEDERLANDSE DELEGATIE TER RONDE TAFEL CONFERENTIE

Secretariaat

No. 843

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Aan de Voorzitters van de Delegaties der Regering van de Republiek Indonesia en van de Bijeenkomst voor Federaal Overleg.

Mijne Heren Voorzitters,

Ik heb de eer U mede te delen, dat de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie zich op het standpunt stelt, dat tussen de Delegaties ter Conferentie het volgende is overeengekomen.

1. De drie Delegaties in de Commissie voor Militaire Aangelegenheden zijn eenstemmig van oordeel, dat het, met het oog op een ordelijke uitvoering van de ter Ronde Tafel Conferentie genomen besluiten betreffende het terugtrekken dan wel reorganiseren van de onder Nederlands bevel staande luchtstrijdkrachten, aanbeveling verdient, dat zo spoedig mogelijk na het beëindigen van de Ronde Tafel Conferentie een voorbereidende Commissie wordt gevormd.
Deze Commissie zal o.a. haar aandacht moeten wijden aan het probleem van vrijwillige overgang van personeel van de Nederlandse luchtstrijdkrachten naar de Luchtmacht van de Republiek van de Verenigde Staten van Indonesië, ten einde deze overgang zo spoedig mogelijk na de souvereiniteitsoverdracht te doen plaatsvinden.

2. De drie Delegaties in de Commissie voor Militaire Aangelegenheden zijn eenstemmig van oordeel, dat het, met het oog op een ordelijke uitvoering van de ter Ronde Tafel Conferentie genomen besluiten, neergelegd in de Marine-overeenkomst, aanbeveling verdient, dat zo spoedig mogelijk na het beëindigen van de Ronde Tafel Conferentie een Commissie van voorbereiding wordt gevormd.

De drie Delegaties bevelen aan, dat deze Commissie in Indonesië zal worden samengesteld uit vertegenwoordigers der Nederlandse en Republikeinse Regeringen en van de Bijeenkomst Federaal Overleg.

Ik heb de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaar,
J. H. VAN MAARSEVEEN,

Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

DELEGATIE
REPUBLIEK INDONESIE

No. 13/E.L.

DELEGATIE
B.F.O.

's-Gravenhage, 2 November 1949.

Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben de eer U mede te delen, dat de Indonesische Delegaties ter Ronde Tafel Conferentie zich op het standpunt stellen, dat tussen de Delegaties ter Conferentie het volgende is overeengekomen.

1. De drie Delegaties in de Commissie voor Militaire Aangelegenheden zijn eenstemmig van oordeel, dat het, met het oog op een ordelijke uitvoering van de ter Ronde Tafel Conferentie genomen besluiten betreffende het terugtrekken dan wel reorganiseren van de onder Nederlands bevel staande luchtstrijdkrachten, aanbeveling verdient, dat zo spoedig mogelijk na het beëindigen van de Ronde Tafel Conferentie een voorbereidende Commissie wordt gevormd.

Deze Commissie zal o.a. haar aandacht moeten wijden aan het probleem van vrijwillige overgang van personeel van de Nederlandse luchtstrijdkrachten naar de Luchtmacht van de Republiek van de Verenigde Staten van Indonesië, ten einde deze overgang zo spoedig mogelijk na de souvereiniteitsoverdracht te doen plaatsvinden.

2. De drie Delegaties in de Commissie voor Militaire Aangelegenheden zijn eenstemmig van oordeel, dat het, met het oog op een ordelijke uitvoering van de ter Ronde Tafel Conferentie genomen besluiten, neergelegd in de Marine-overeenkomst, aanbeveling verdient, dat zo spoedig mogelijk na het beëindigen van de Ronde Tafel Conferentie een Commissie van voorbereiding wordt gevormd.

De drie Delegaties bevelen aan, dat deze Commissie in Indonesië zal worden samengesteld uit vertegenwoordigers

der Nederlandse en Republikeinse Regeringen en van de Bijeenkomst Federaal Overleg.

Wij hebben de eer te zijn,

Uw dienstwillige dienaren,

MOHAMMAD HATTA,
Voorzitter der Republikeinse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

HAMID,
Voorzitter der B.F.O.-Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie.

Aan de Voorzitter van de Nederlandse Delegatie ter Ronde Tafel Conferentie, te 's-Gravenhage.

COVERING RESOLUTION.

The Delegations of:

1. The Kingdom of the Netherlands,
2. The Government of the Republic Indonesia,
3. The Federal Consultative Assembly,

Considering that they have assemblad at the Round Table Conference to achieve at the earliest possible time, an appropriate and lasting solution of the Indonesian conflict by reaching agreement between the participants on the way of transferring real, complete and unconditional sovereignty to the Republic of the United States of Indonesia, in accordance with the Renville-principles;

Considering that this aim has been achieved in good cooperation;

Considering that the United Nations Commission for Indonesia has given valuable assistance;

Have reached the following decision:

I. the results of the Round Table Conference are embodied in draft agreemenst and in letters, which documents are attached to this resolution.

II. A. The draft agreements are the following:

1. the draft Charter of Transfer of Sovereignty;
2. the draft Union Statute including appendix and special agreements on the principal subjects of future cooperation;
3. the draft Agreement on Transitional Measures including special agreements on the settlement of those subjects, which require provision as a result of the transfer of sovereignty.

B. The Delegations have expressed their respective points of view on a number of separate issues in an exchange of letters.

III. The documents enumerated under A and B are drawn up in the Netherlands and in the Indonesian languages. Both texts have equal value.
The official English text will prevail in case of divergent interpretation of the Netherlands and Indonesian texts.

IV. The acceptance of this resolution by the Kingdom of the Netherlands on the one side and the territories acceding to the Republic of the United States of Indonesia on the other side will be considered the ratification of the documents attached to this resolution. The ratification by party will loose validity, if any other party does not ratify this resolution.

V. The agreements referred to under II will come into force at the moment of the transfer of sovereignty which will take place at a formal ceremony at Amsterdam, to be held not later than 30 December 1949.

VI. The United Nations Commission for Indonesia or an other United Nations Agency shall observe in Indonesia the implementation of the agreements reached at the Round Table Conference.

The Delegation of the Federal Consultative Assembly,

HAMID.

Chairman.

The Delegation of the Kingdom of the Netherlands,

J. H. VAN MAARSEVEEN.

Chairman.

W. DREES.

The Chairman of the Round Table Conference.

The Delegation of the Government of the Republic Indonesia,

MOHAMMAD HATTA.

Chairman.

M. J. PRINSEN.
The Secretary General of the Round Table Conference.

The United Nations Commission for Indonesia,

R. HERREMANS.
Chairman of the week.

H. MERLE COCHRAN.
Member.

TH. K. CRITCHLEY.
Member.

F. A. ROMANOS.
Principal Secretary.

Note. In the English text the covering resolution has been signed first by the Chairman of the Delegation of the Federal Consultative Assembly, in the Indonesian language it has been signed first by the Chairman of the Delegation of the Government of the Republic Indonesia, and in the Netherlands text it has been signed first by the Chairman of the Delegation of the Kingdom of the Netherlands.

DRAFT CHARTER OF TRANSFER OF SOVEREIGNTY.

Article 1.

1. The Kingdom of the Netherlands unconditionally and irrevocably transfers complete sovereignty over Indonesia to the Republic of the United States of Indonesia and thereby recognizes said Republic of the United States of Indonesia as an independent and sovereign State.

2. The Republic of the United States of Indonesia accepts said sovereignty on the basis of the provisions of its Constitution which as a draft has been brought to the knowledge of the Kingdom of the Netherlands.

3. The transfer of sovereignty shall take place at the latest on 30 December 1949.

Article 2.

With regard to the residency of New Guinea is decided:

a. in view of the fact that it has not yet been possible to reconcile the views of the parties on New Guinea, which remain, therefore, in dispute,

b. in view of the desirability of the Round Table Conference concluding successfully on 2 November 1949,

c. in view of the important factors which should be taken into account in settling the question of New Guinea,

d. in view of the limited research that has been undertaken and completed with respect to the problems involved in the question of New Guinea,

e. in view of the heavy tasks with which the Union partners will initially be confronted, and

f. in view of the dedication of the parties to the principle of resolving by peaceful and reasonable means any differences that may hereafter exist or arise between them,

that the status quo of the residency of New Guinea shall be maintained with the stipulation that within a year from the date of transfer of sovereignty to the Republic of the United States of Indonesia the question of the political status of New Guinea be determined through negotiations between the Republic of the United States of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands.

DRAFT UNION STATUTE.

The Kingdom of the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia,

having resolved on a basis of free will, equality and complete independence to bring about friendly cooperation with each other and to create the Netherlands Indonesian Union with a view to effectuate this future cooperation,

have agreed to lay down in this Statute of the Union the basis of their mutual relationship as independent and sovereign States,

thereby holding that nothing in this Statute shall be construed as excluding any form of cooperation not mentioned therein or cooperation in any field not mentioned therein, the need of which may be felt in the future by both partners.

CHARACTER OF THE UNION.

Article 1.

1. The Netherlands Indonesian Union effectuates the organized cooperation between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia on the basis of free will and equality in status with equal rights.

2. The Union does not prejudice the status of each of the two partners as an independent and sovereign State.

PURPOSE OR THE UNION.

Article 2.

1. The Union aims at cooperation of the partners for the promotion of their common interests.

2. This cooperation shall take place with respect to subjects lying primarily in the field of foreign relations and defence, and as far as necessary, finance, and also in regard of subjects of an economic and a cultural nature.

Article 3.

1. The two partners undertake to base their form of government on the principles of democracy and to aim at an independent judiciary.

2. The two partners shall recognize the fundamental human rights and freedoms enumerated in the Appendix to this Statute.

PROCEDURE OF THE UNION.

Article 4.

All decisions in the Union shall be taken in agreement between the two partners.

HEAD OF THE UNION.

Article 5.

1. At the head of the Union shall be Her Majesty Queen Juliana, Princess of Orange Nassau, and in case of succession Her lawful successors in the Crown of the Netherlands.

2. In case of minority of the Head of the Union, or in case the Head of the Union is unable to perform His office and further in case the Head of the Union temporarily ceases to perform His office, both partners shall make the necessary provision in common agreement.

Such provision may be made in common agreement in advance.

Article 6.

The Head of the Union effectuates the spirit of voluntary and lasting cooperation between the partners.

THE ORGANS OF THE UNION.

Article 7.

For the implementation of the purposes of the Union the ministers or persons vested by the respective constitutions of the partners with equal or similar responsibility, having been designated for this purpose by each of the partners, shall hold conferences twice a year and further as often as the partners shall deem necessary.

Unless otherwise agreed, three ministers of each partner will participate in these conferences.

Article 8.

The ministers participating in the conference remain responsible to the respective organs of the partners on the basis of the respective constitutions of the partners.

Article 9.

The conference of ministers shall institute committees as circumstances may require, in which each of the two partners shall appoint members on a basis of parity.

Article 10.

1. The two partners shall effectuate good contact and regular cooperation between the parliaments of the partners.
2. The first discussion between representatives of the parliaments shall take place within eight months after the coming into being of the provisional parliament of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 11.

1. The Union shall be served by a permanent secretariat. Each of the partners shall appoint a secretary-general, each of whom shall take charge of the secretariat by yearly rotation.
2. The other personnel shall be appointed in agreement between the two secretaries-general in accordance with an instruction drawn up jointly by the two partners.

DECISIONS AND JOINT REGULATIONS.

Article 12.

1. Decisions of the conference of ministers shall be taken by unanimity of votes between the representation of the Kingdom of the Netherlands on the one side and that of the Republic of the United States of Indonesia on the other.
2. Decisions of the conference may be given effect in accordance with the following procedure.

3. Decisions taken at the conference of ministers for the enactment of joint regulations require approval by the respective parliaments of the partners. After approval by the two parliaments, the Head of the Union shall state that agreement exists between the two partners and the joint regulation shall thereupon be promulgated in the official Statute Book of each of the partners. By this promulgation the joint regulation shall have force of law. The joint regulations are inviolable.

4. In respect of other decisions of the conference the Head of the Union, upon request of the conference, may likewise state that agreement exists between the two partners.

UNION COURT OF ARBITRATION.

Article 13.

1. There shall be a Union Court of Arbitration for the settlement of matters of law and justice in the name of the Head of the Union.

2. The Court shall take cognizance of legal disputes, brought before the Court by one of the partners against the other, or jointly by both partners, arising from the Union Statute, from any agreement between the partners or from joint regulations.

Article 14.

1. The Union Court of Arbitration shall consist of three members appointed by the Kingdom of the Netherlands and three members appointed by the Republic of the United States of Indonesia.

2. The members of the Court shall be appointed for a period of ten years. They shall resign in any case once they reach the age of sixty five years.

3. The chairman shall be elected, every year a Netherlander and an Indonesian in turn, by and from amongst the members of the Court.

4. Prior to taking up their office, the members of the Court shall, before the Head of the Union, take the oath or make the promise in accordance with their religious faith, that they

shall fulfil their office honestly, scrupulously and impartially and shall comport themselves in the exercise of their duties as befits a good member of the Union Court of Arbitration.

Article 15.

1. The Union Court of Arbitration shall decide by majority of votes.

2. In case votes are equally divided the Court shall, unless the two partners otherwise request, call upon the President of the International Court of Justice or upon an other international authority, to be designated by majority of votes, with the request to appoint a person of an other nationality as special member of the Union Court of Arbitration, who, having the rights of an ordinary member, shall take part in a renewed consideration of the dispute and in the decision thereon.

Article 16.

Further provisions concerning the rules of procedure, the organization and regulation of the activities of the Union Court of Arbitration shall be established in a joint regulation. As long as such a joint regulation does not exist, the Court itself shall determine its rules of procedure and the organization and regulation of its activities, paragraph 2 of the preceding article being applicable if no agreement can be reached in this matter.

Article 17.

The two partners undertake to comply with the decisions of the Union Court of Arbitration and to implement such decisions under their own authority and responsibility each within his own territory.

Article 18.

In case of conflict between provisions of the law of the partners and of the public bodies within their jurisdiction on the one side and the Union Statute or any agreement between the partners or a joint regulation on the other, the latter category of provisions shall prevail.

Article 19.

The two partners reserve all their rights under international law or otherwise to solicit the decision of an international court or arbitrator in cases where both partners consider the Union Court of Arbitration incompetent or in cases where the Court declares itself incompetent.

FOREIGN RELATIONS.

Article 20.

Provisions concerning the cooperation between the partners in the field of foreign relations are set forth in the agreement attached to the present Statute.

DEFENCE.

Article 21.

Provisions concerning the cooperation between the partners in the field of defence are set forth in the agreement attached to the present Statute.

FINANCIAL AND ECONOMIC RELATIONS.

Article 22.

Provision concerning the cooperation between the partners in the field of financial and economic relations are set forth in the agreement attached to the present Statute.

CULTURAL RELATIONS.

Article 23.

Provisions concerning the cooperation between the partners in the cultural field are set forth in the agreement attached to the present Statute.

NATIONALITY.

Article 24.

1. Without prejudice to the provisions made or still to be made in special agreements between the partners, with regard to the exercise of political and other rights by nationals of one partner within the jurisdiction of the other partner, the following shall apply:

a. the nationality of one partner shall not constitute an objection against serving officially within the jurisdiction of the other partner, except for:

1*a.* offices, the holder of which is responsible to a representative body, unless the law should provide otherwise;

2*a.* those political, authoritative, judicial and leading offices which are specified as such by law;

b. with regard to the exercise of civil rights and social activities, each partner shall always fully appreciate the special interests within his jurisdiction of the nationals and corporate bodies of the other partner, and therefore shall make no appreciable discrimination between their respective nationals and corporate bodies, without prejudice to the power of either partner to establish regulations required for the protection of their national interests or for the protection of economically weak groups.

2. On no account shall the nationals and corporate bodies of either of the partners receive within the jurisdiction of the other partner treatment less favourable than nationals and corporate bodies of a third State.

SPECIAL PROVISIONS.

Article 25.

To further the interests of the partners within each other's territory the Governments of the partners shall appoint High Commissioners. These shall have the status of diplomatic representatives with the rank of ambassador.

Article 26.

1. Unless otherwise agreed each partner shall bear one half of the expenses of the Union.

2. Further provisions in respect of the expenses of the Union shall be established by joint regulation. As long as such a joint regulation does not exist, the conference of ministers shall make the necessary provisions.

Article 27.

1. All official documents, issued by the conference of ministers or by other Union organs shall be in the Netherlands and Indonesian languages.

2. Both texts shall be equally authentic.

Article 28.

The Union Statute and the agreements pertaining thereto as well as the joint regulations and future agreements may be presented to the Secretariat of the United Nations for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations.

APPENDIX TO THE DRAFT UNION STATUTE.

The fundamental human rights and freedoms recognized by the partners in virtue of article 3 of the Union Statute and which everyone is entitled to exercise and to enjoy without discrimination of any kind on the ground of race, colour, sex, language, religion, national or social origin, property or birth, are:

1. (1) Everyone is recognized as a person before the law.
   (2) All are entitled to equal treatment and equal protection of the law.
   (3) All are entitled to equal protection against any discrimination and against any incitement to such discrimination.
2. All persons within the territory of the State are entitled to equal protection of person and property.
3. (1) Everyone has the right to liberty of movement and residence within the borders of the State.
   (2) Everyone has the right to leave the country and — being citizen or resident — to return to his country.
4. No one shall be arrested or detained except upon the orders of the officer authorized thereto by law and in the cases and in the manner as established by law.
5. (1) Everyone's home is inviolable.
   (2) No premises or home shall be entered against the will of its occupant except in cases provided for by a law applicable to that occupant.
6. The freedom and secrecy of correspondence are inviolable, except by order of the judiciary or officers authorized by law in the cases defined by law.
7. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance of the commandments and prescriptions and by educating the children in the faith or belief of their parents.

8. Everyone has the right to freedom of opinion and expression.

9. The right of the residents to freedom of peaceful association and assembly is recognized and as far as necessary guaranteed by law.

10. (1) Everyone has the right to own property alone or jointly with others.

(2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.

11. (1) Everyone, according to his ability, has the right to available work, to free choice of employment and to just conditions of work.

(2) Everyone who works has the right to just remuneration ensuring for himself and his family an existence in accordance with human dignity.

12. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

13. (1) Teaching is free, subject to the supervision to be exercised by public authorities in accordance with the law.

(2) The choice of education is free.

14. The State shall promote social security to the extent of its ability, in particular by ensuring and guaranteeing favourable conditions of employment and of work by preventing and checking unemployment and by promoting reasonable old age provisions and care for widows and orphans.

15. (1) The raising of the prosperity of the population is an object of continuous concern of the State, the aim of which shall be that everyone be ensured a standard of living for himself and his family in accordance with human dignity.

(2) Except where the law imposes limitations which are in the general interest, opportunity to take part in the development of the sources of prosperity of the country shall, to the greatest possible extent, be offered to all on an equal footing in accordance with character, disposition and ability.

16. The family has a right to protection by society and by the State.

17. (1) The State shall promote as much as possible the spiritual and physical development of the population.

(2) The authorities provide where necessary for public education to be given on a basis of tolerance and equal respect of everyone's religious conviction and with the opportunity, during school hours, for religious teaching according to the wishes of the parents.

(3) The pupils of a private school which complies with the standards of efficiency imposed by law on public education shall have the same rights as those accorded to pupils of public schools.

(4) The freedom is recognized to perform social and charitable work, to set up organizations therefore as well as for private education and to acquire and own property to these ends.

18. The promotion of public hygiene and public health are an object of continuous concern of the State.

19. The State shall grant equal protection to all recognized religious communities and organizations.

Each partner shall maintain within his jurisdiction the free exercise of the fundamental human rights and freedoms set forth in this appendix, and shall observe the international treaties and internationally acknowledged principles of law concerning the exercise thereof.

The exercise of the rights and freedoms set forth in this appendix, may be restricted for no other reason than to consider the rights and freedoms of others, morals, public order and the general welfare in a democratic constitutional order.

DRAFT AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF THE UNITED STATES OF INDONESIA AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS TO REGULATE THEIR COOPERATION IN THE FIELD OF FOREIGN RELATIONS.

The Republic of the United States of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands inspired by an equal desire to achieve cooperation in the field of their foreign relations,

have decided to conclude the following agreement to regulate such cooperation.

Article 1.

The Netherlands Indonesian Union shall effectuate cooperation in the field of foreign relations.

Where both partners feel that it is in their interest and so decide, the conference of ministers may provide for joint or common representation in international intercourse.

Article 2.

On the primary consideration of the principle that each of the partners conducts his own foreign relations and determines his own foreign policy, they shall aim at coordinating their foreign policy as much as possible and at consulting each other thereon.

Article 3.

Neither partner shall conclude a treaty, nor shall he perform any other juridical act in international intercourse, involving the interests of the other partner, unless after consultation with said partner.

Article 4.

In case one of the partners has not accredited a diplomatic representation in a foreign country, he shall have his interests represented by preference by the diplomatic representation of the other partner to said foreign country.

Article 5.

In case one of the partners requests technical or other co-operation for the conduct of his foreign relations, the other partner shall extend such cooperation to the best of his ability.

DRAFT AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLES 2 AND 21 OF THE UNION STATUTE.

The Kingdom of the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia,

in pursuance of the provisions contained in articles 2 and 21 of the Union Statute,

have agreed as follows.

Article 1.

Each of the partners shall bear full responsibility for the defence of his own territory.

Provisions to this effect shall be made by each of the partners.

Article 2.

The joint regulations referred to in article 12 of the Union Statute shall be implemented independently by each of the partners within his own area of jurisdiction.

Article 3.

Without prejudice to the provision of article 2, the cooperation may find expression in assistance to be given by one partner to the other, if so requested, in so far as in the former's opinion the assistance applied for is compatible with his capacity and his own needs, and in particular with the interests of his own defence.

Article 4.

The assistance referred to in article 3, may inter alia consist of:

a. training and higher training of officers, non-commissioned officers, specialized military personnel and civilian auxiliary personnel;

b. making personnel available;

c. making materiel available;

d. offering facilities and rendering assistance for the maintenance and repair of materiel of the other partner.

Article 5.

Should one of the partners request to make available in his area of jurisdiction units of the armed forces of the other partner, the partners may conclude an agreement to this effect.

Article 6.

If, in pursuance of articles 4 and 5, one partner renders assistance to the other, the expenses involved in rendering such assistance shall, unless otherwise agreed in special cases, be borne by the partner who has applied for said assistance.

Article 7.

The partners shall exchange military missions. The conditions under which said exchange shall take place, the composition and the terms of reference of these missions, shall be regulated by the Governments of the partners in mutual consultation.

A partner, contemplating to invite or receive a military mission of a third power, shall previously consult the other partner in this respect.

Article 8.

The two partners shall consult with one another in the event of threat of aggression to both partners or to one of the partners.

Article 9.

If a partner wishes to procure materiel for his armed forces from outside his own territory he shall consult the other partner as much as possible as to the manner in which they may assist each other in this respect.

Article 10.

If a partner gives information concerning his defence to the other partner, the latter is — also in regard of an ally — committed to secrecy, unless he is explicitly exempted from this obligation by the former partner.

If personnel of one partner, by reason of the cooperation visualized in this agreement, is admitted to the area of jurisdiction or to organizations of the other partner, the former partner shall do his utmost in order that said personnel maintain secrecy on all defence matters of the other partner which may come to their knowdledge.

Article 11.

The partners shall effect an arrangement on the law on military penal procedure, the military penal law and the law on military discipline, to be applied to military personnel of a partner, which personnel, by reason of the performance of duties arising out of the cooperation between the partners, is within the area of jurisdiction of the other partner.

In effecting said arrangement the partners shall take into consideration similar arrangements in other countries.

Article 12.

Unless the partners agree otherwise, merchant vessels and civil aircraft under the flag of a partner may, if one of the pertners is involved or is in danger of becoming involved in a war, be requisitioned or militarized only by the latter and not by the former, irrespective of the location of said ships and aircraft.

The former partner however shall in this case consult the other partner if the merchantmen or the civil aircraft is within the latter's area of jurisdiction.

Article 13.

The partners shall make arrangements concerning the rules which shall apply, when naval units or military aircraft of one partner are present in or near the area of jurisdiction of the other partner and call at ports or airports in said area of jurisdiction.

Article 14.

Pending an arrangement between the partners concerning the compulsory military service of their respective subjects, the subjects of one partner shall not be compelled to serve in the armed forces of the other partner.

As long as any resident of either partner shall have the right of option in respect of his future nationality, under the provisions accepted at the Round Table Conference, this person shall not be called for military service by one of the partners.

Article 15.

This agreement shall not prejudice upon the rights and obligations of the partners under the Charter of the United Nations of under international arrangements based thereon.

Article 16.

As soon as possible the partners shall consult with one another on the elaboration of the principles contained in the foregoing articles, and undertake such measures as may be considered useful by the Governments concerned in mutual consultation for the correct achievement of the aims of the Union Statute and of the present agreement on defence matters.

DRAFT FINANCIAL & ECONOMIC AGREEMENT.

The Kingdom of the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia guided by the desire to regulate the new relations in the financial and economic field created by the transfer of sovereignty and to reach cooperation in this field;

In consideration of articles 2 and 22 of the Union Statute;

Have resolved to conclude the following agreement.

SECTION A.

RIGHTS, CONCESSIONS, LICENCES AND OPERATION OF BUSINESS ENTERPRISE.

Article 1.

1. In respect of the recognition and restoration of the rights, concessions and licences properly granted under the law of the Netherlands Indies (Indonesia) and still valid on the date of transfer of sovereignty, the Republic of the United States of Indonesia will adhere to the basic principle of recognizing such rights, concessions und licences. The Republic of the United States of Indonesia also recognizes, in so far as this has not yet been done, that the rightful claimants be restored to the actual exercise of their rights under the proviso referred to in the following paragraphs of this article.

2. The Republic of the United States of Indonesia reserves the right to conduct an investigation in respect of important rights, concessions and licences granted after 1 March 1942 which may influence the economic policy of the Republic of the United States of Indonesia, for the purpose of considering whether the application of article 2 is desirable.

3. Account shall be taken of:

a. The situation resulting from the fact that, during the Japanese occupation and the subsequent period of revolution, estate grounds, on which the crops were removed for the benefit of food-cultivation or to make way for housing, were

occupied by the population — with the approval of the Japanese authorities during the occupation — and that in certain cases the removal of the population concerned from these grounds without further consideration and the return of such grounds to the estates concerned would create too much unrest and that such a return is often impossible. Each case shall be judged on its own merits and a solution shall be sought acceptable for all parties concerned.

b. The necessity that certain private properties remain (are) temporarily requisitioned against indemnity for government service in the interest of the country.

c. The withdrawal under the Undang-undang Republik Indonesia 1948 Nr. 13 of the conversion rights in the residencies of Jogjakarta and Surakarta which was necessitated by changed conditions in general and changed views of the population in particular. In this case, the Republic of the United States of Indonesia will arrange for the legal provisions required to ensure the enterprises concerned the greatest possible security in respect of the acquisition of the lands required for these enterprises.

4. The possibility that public utilities, such as privately owned rail- and tramways and powerplants (gas and electricity) will be nationalized by the Republic of the United States of Indonesia which will be carried out by way of expropriation c.q. „naasting", shall have no influence upon the reinstatement of the rightful claimants in the actual exercise of their rights. In this legal restoration, account may be taken of the form of management of the rail- and transways at the time of transfer of sovereignty.

Article 2.

The rights, concessions and licences referred to in article 1, paragraph 1, may be infringed upon only in the public interest, including the welfare of the people, and through amicable settlement with the rightful claimants, and if the latter can not be achieved, by expropriation for the public benefit such in accordance with the provisions of article 3.

Article 3.

Expropriation, nationalization, liquidation, compulsory cession or transfer of properties or rights, shall take place exclusively for the public benefit, in accordance with the procedure prescibed by law and, in the absence of an agreement between the parties, against previously enjoyed or guaranteed indemnity to be fixed by judicial decision at the real value of the object involved, such in accordance with provisions to be prescribed by law.

The conditions of previously received or previously guaranteed indemnity due do not apply in cases where war, threat of war, insurrection, fire, floods, earthquake, volcanic eruption or other emergencies require immediate seizure.

Article 4.

On behalf of existing and new enterprises and estates, the possibility will be made available for an extension, a renewal or the granting of rights, concessions and licences required for their operation. This will take place at such conditions, and for a period and at a time so as to enable the enterprises remaining or being operated on a sound business basis and the lawful owners being guaranteed a continuity making possible the investments required for normal long term business operations, except in those cases which are in contravention with the public interest including the general economic policy of the Republic of the United Staten of Indonesia.

Article 5.

The enterprises and estates will cooperate with and enable participation of Indonesian capital subject to this being justified from a business point of view.

Article 6.

The Republic of the United States of Indonesia will make the provisions required to safeguard the lawful owners exercising their rights, concessions and licences referred to in article 1, first paragraph, to promote resumption and lastingness of economic activity. In this respect, however, it shall

be borne in mind that the general economic policy to be pursued by the Republic of the United States of Indonesia shall in the first place be focused on the economic building up of the Indonesian community as a whole, in the sense that the interests and material and spiritual progress of the Indonesian people as a whole are best served by creating a maximum of effective purchasing power and raising the standard of living of the people.

Article 7.

In regard to all rights, concessions and licenses referred to in article 1, paragraph 1, which could not be exercised as a result of the war, occupation and the subsequent abnormal conditions, the possibility will be made available that at the request of the lawful owners, these rights, concessions and licences be extended for a corresponding period except in those cases where such an extension is in contravention with the public interest including the general economic policy of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 8.

The burdens imposed on business as a consequence of fiscal measures and social and other measures customary in a modern country will be kept within such reasonable limits that under normal circumstances business can be carried on, permitting normal replacements, depreciations and reserves and permitting a reasonable profit for the capital invested in the enterprises.

Article 9.

The manner of operating enterprises and the freedom of commerce, enterprise and monetary intercourse can be restricted by law only.

Article 10.

Parties acknowledge the necessity of an independent fiscal judiciary. They will make regulations to prevent double taxation.

Article 11.

Netherlands nationals, corporate bodies, products, vessels and other objects enjoy no less favourable treatment in Indonesia than that accorded to any third country.

Foreigners of all nations will have equal rights in the participation of trade with Indonesia and in the economic activity and industrial development of that country. The Republic of the United States of Indonesia however recognizes that the special interests of Netherlands nationals and corporate bodies within Indonesia will be fully taken into account and further that no discrimination will take place in respect of the interests referred to, without prejudice to the right of the Republic of the United States of Indonesia to make such regulations as are necessary for the protection of national interests or economically weak groups.

The provisions made in this article on behalf of the Netherlands apply mutually between the Netherlands and Indonesia.

Article 12.

1. Apart from the general obligation that employers in respect of their enterprises have to submit to the laws of the country, the enterprises (estates) shall—in the interest of social peace and order and for the improvement of social conditions—cooperate in applying provisions such as:

a. aiming at the institution of organized consultation between employers and employees in the entire field of labour relations;

b. promoting gradually the achievement of joint interests between the employers and labourers, c.q. landowners, in order that the interests to be pursued will grow together and that those labourers and landowners attain a higher standard of living;

c. improvement of housing and other social welfare arrangements for labourers;

d. the inclusion within the earliest possible period of eligible Indonesians into the direction (and management) and staffs of the enterprises, and cooperation in establishing

training courses with the objective that after a reasonable period, the predominant part of the leading staff personnel of the enterprises will consist of Indonesian nationals;

e. the residing in Indonesia of organs vested with full power of those enterprises which main field of operations is in Indonesia.

2. Employers, on matters referred to under *a*—*d* inclusive, also shall display initiative on the understanding however that the Government requirements in this field in respect of foreign investments shall not go beyond those stipulated for Indonesian enterprises of a similar nature and size.

Article 13.

In the event of any alteration in the existing agrarian regulations in the public interest, the interests of the lawful owners and in particular the security of enterprise will be taken into account.

SECTION B.

FINANCIAL RELATIONS.

Article 14.

The Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia shall each aim at a sound monetary system based on the principles expressed in the Bretton Woods agreements. This requires, inter alia, that in each country a single circulationbank shall operate. The monetary policy of each of the two countries shall aim at achieving and maintaining a stable internal and external value of the currency and shall aim at promoting free convertibility of exchange.

Article 15.

As long as the Republic of the United States of Indonesia has not yet acquired membership to the International Monetary Fund, the Republic of the United States of Indonesia shall adhere to the rules to be observed by a member of the Fund.

Furthermore consultations shall be held between the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia to enable the latter to become at the earliest possible date a member of the International Monetary Fund.

Article 16.

Previous consultation shall be held between the two countries concerning any alteration of the rate of exchange of the currency of the Netherlands and of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 17.

As long as the international or internal circumstances necessitate foreign exchange control, the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia shall consult each other on foreign exchange policy in respect of matters which are of real importance to the other party.

Article 18.

1. Subject to the proviso referred to in paragraph 5, the Republic of the United States of Indonesia allows transfer to the Netherlands:

a. for enterprises constituting an active Netherlands investment, of:

I. the expenditures required in the Netherlands on behalf of the enterprise in Indonesia;

II. the contributions to pensionfunds, or funds for invalids, widows and orphans and other social provisions for personnel to the extent that the premiums and contributions are required to cover payments to Netherlanders;

III. interests and contractually fixed amortization of loans committed in the Netherlands on behalf of the enterprise in Indonesia;

IV. annual profits and depreciations in accordance with sound business practice;

b. of dividends concerning passive investments from the Netherlands;

c. for premiums to life insurance companies and for contributions to pensionfunds, and funds for invalids, widows and orphans and other social provisions, by employer as well as employee, required to cover payments to Netherlanders;

d. to Netherlanders working or having worked in Indonesia, for their savings and for sums destined for the support of persons residing outside Indonesia for whose alimentation they are bound legally or morally;

e. for Netherlanders working or having worked in Indonesia c.q. their surviving relatives, residing outside Indonesia, for pensions, leave allowances and other similar periodical social payments inasfar as they are not covered by the funds referred to under *a* and *c*;

f. of interest and amortization on debenture loans issued and private loans ("ondershandse leningen") contracted by lower public bodies or by other corporate bodies set up on high authority as far as payment of said interest and amortization are not or will not be lawfully suspended in connection with the financial position of public bodies and other corporate bodies referred to.

2. The provisions of the first paragraph can be further worked out by the contracting parties for special cases or groups of cases.

3. Without prejudice to the provisions of the first and second paragraphs the Republic of the United States of Indonesia shall allow transfers to the Netherlands and other countries abroad in accordance with the Articles of Agreement of the International Monetary Fund.

4. To enterprises operating partly with Indonesian capital in Indonesia, the provisions referred to in the preceding paragraphs will apply inasfar as actual circumstances demand.

5. In respect of the transfer of money referred to in the first paragraph, the Republic of the United States of Indonesia reserves the right to impose such restrictions as it deems necessary in view of its foreign exchange position. These restrictions are subject to previous consultations

between the Republic of the United States of Indonesia and the Netherlands which consultations will take place through a technical committee to be set up at a later date unless the Government of the Republic of the United States of Indonesia and of the Netherlands agree otherwise.

6. The transfer of interest and amortization resulting from the liabilities assumed by the Republic of the United States of Indonesia at the transfer of sovereignty is governed by the agreements made or to be made regarding these liabilities.

7. The provisions of the preceding paragraphs are correspondingly applicable to the transfer from the Netherlands to Indonesia.

8. In case of expropriation, nationalization, etc. c.q. "naasting" the Republic of the United States of Indonesia allouws transfer of the indemnity c.q. compensation ("naastingsprijs") within the period of three years after the right to indemnity c.q. compensation arises. In case the Republic of the United States of Indonesia deems it impossible to transfer within three years the indemnity c.q. compensation, the Republic of the United States of Indonesia shall make this fact known before taking steps toward expropriation, nationalization, etc. An arbitration committee consisting of a representative of the Republic of the United States of Indonesia, a representative of the rightful claimant and a third member to be appointed in mutual consultation by both the two abovementioned representatives shall give a binding decision on the question of whether an exception can be made to said term of three years and to what extent.

In case immediate transfer does not take place, the indemnity c.q. compensation expressed in Indonesian currency shall be credited in the currency of the country from which the invested capital originates at the rate of exchange on the date the right arises.

Article 19.

1. As long as the Republic of the United States of Indonesia has liabilities toward the Netherlands including the guarantees given by the Netherlands on behalf of the

liabilities of Indonesia, the Republic of the United States of Indonesia shall consult the Netherlands in advance, both regarding intended alterations in the Coinage Act and the Java Bank Act prevailing at the time of transfer of sovereignty and regarding a new coinage act and circulation bank act to be enacted by the Republic of the United States of Indonesia and possible alterations to be made therein.

Furthermore, the Republic of the United States of Indonesia shall, as long as the liabilities referred to exist, consult the Netherlands in general should the former consider taking important measures in the monetary and financial field insofar as the interests of the Netherlands are concerned.

2. The liabilities and guarantees referred to in paragraph 1 are those liabilities c.q. guarantees which exist at the transfer of sovereignty.

3. The Republic of the United States of Indonesia shall until the new circulation bank act becomes effective consult the Netherlands regarding the appointment and discharge of the president and managing directors of the circulation bank and regarding credits to be provided to the government by the circulation bank.

4. In order that the consultation referred to in the first paragraph can be implemented as smoothly as possible, the Netherlands Government will attach to the staff of the High Commissioner in Indonesia, an adviser appointed by the Netherlands Government on matters in the field of monetary system and circulation banking.

SECTION C

RELATIONS IN AND COOPERATION IN TRADE POLICY.

Article 20.

1. In accordance with the principles of independence and sovereignty, the Governments of the Netherlands and of the Republic of the United States of Indonesia shall bear the ultimate responsibility for their own trade policy, both domestic and foreign.

2. Based on these principles, voluntary cooperation between the two countries in their foreign trade relations can be of mutual benefit. This cooperation will be promoted by close contact and continuous consultation between the two countries regarding the various aspects of foreign trade. As far as it is considered profitable and beneficial to both parties joint action shall be taken. Each of the two parties shall take into close account the economic interests for which the other is responsible.

3. It should be borne in mind that economically, geographically and politically the Netherlands belong to the European sphere and Indonesia to the Asian sphere. Historically close economic relations have existed and up to the present day exist between Europe and Asia in general and between the Netherlands and Indonesia in particular. As a result of history, the Netherlands have considerable economic and financial interests in Indonesia. The Republic of the United States of Indonesia will take due account of such interests.

Article 21.

1. The foreign trade relations of the Netherlands with other countries shall be regulated and supervised by the Netherlands Government or by its appropriate agencies, on its or their exclusive authority.

The foreign trade relations of Indonesia with other countries shall be regulated and supervised by the Government of the Republic of the United States of Indonesia or its appropriate agencies on its or their exclusive authority.

2. With regard to the countries of Europe, the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia shall cooperate in the field of trade policy. In the last quarter of 1950 new consultations shall be held in connection with the continuation of this cooperation and the way in which it shall be effectuated, both parties being free to determine their standpoints anew.

3. Each of the two parties retains the ultimate decision in such cooperation as well as the ultimate decision on the disposal of its own products with respect to foreign trade. Each of the two parties determines what products and what quantities it desires to offer and the compensation it expects.

This implies that in a specific case, one of the parties can take a small part only or even no part at all in a specific trade agreement; in the latter case the other party will nevertheless be entitled to conclude an agreement in view of its own interests. The non-participating party however shall refrain from separately concluding a trade agreement with the third country involved. Once a joint trade agreement has been concluded, neither of the parties shall make alterations therein without previous consultation with the other.

4. In the negotiations with third countries the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia, though forming two separate delegations, act in coordination vis-à-vis the third country. Previous mutual agreement shall be attained on a joint policy.

5. The trade agreements will be signed by or on behalf of the Government of the Netherlands, by or on behalf of the Government of the Republic of the United States of Indonesia on the one hand, and by the third country concerned on the other hand.

6. It shall be previously decided who will act on behalf of the coordinated delegations. The guiding principle will be that the chairman be appointed from the delegation having the greater interest in the discussions concerned.

7. The trade- and monetary agreements in force at the transfer of sovereignty shall, as far as these agreements concern Indonesia, be taken over and implemented by the Government of the Republic of the United States of Indonesia. An enumeration of these agreements is contained in the attached list.

Article 22.

1. With regard to trade intercourse between the Netherlands and Indonesia, both countries are prepared to consider a system of mutual preferential treatment. Such a system will be to the advantage of both parties and shall not be in contravention with international agreements.

2. Both parties act upon the principle that they shall not pay each other higher prices than prevail elsewhere under like conditions for like products.

3. With regard to imports into both countries, the Republic of the United States of Indonesia as well as the Netherlands will respectively draw up lists of import requirements, in accordance with the needs of either country of consumer goods and of goods for rehabilitation and reconstruction and based on the foreign exchange available. With regard to exports from both countries the Netherlands and the Republic of the United States of Inlonesia will reserve and allocate export goods to the other country.

4. Based on the first and third paragraphs of this article the two parties shall at regular times for a period to be agreed upon, conclude agreements for mutual trade. The modus vivendi (now to be called trade agreement) for the period 1 October 1949—1 October 1950 is provisionally accepted by both parties. In the first quarter of 1950 discussions shall be held between the two parties as to the implementation and possible alterations of this agreement.

5. During the period for which certain quotas prevail, in principle no import-, export- or foreign exchange licences shall be refused, inasfar as they concern a transaction agreed upon between the buyer and the seller, falling within the scope of the quotas agreed upon. If special circumstances necessitate deviation from this priciple, previous consultation with the other party shall be held.

6. With regard to trade intercourse and matters connected therewith, the Netherlands and Indonesia may call upon each other for assistance and cooperation. Both parties agree that each shall render such assistance if and when required and considered advisable.

7. In case alterations or amendments in the quotas agreed upon be deemed neccessary, both parties shall decide to this effect in mutual consultation.

Article 23.

1. The regulation existing between the Netherlands and Indonesia, according to which payments between the two countries and payments with a number of other countries are effectuated as much as necessary via a commercial account (called C-account new style) remains provisionally in force after the transfer of sovereignty.

2. At the discussions to be held in the first quarter of 1950 (see article 22, paragraph 4) between the two countries, consultation shall be held if and to what extent alterations are desired in the prevailing system.

As far as possible alterations can be arranged between the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia, these shall come into effect as soon as possible; as far as they concern the relations with third countries, consultation shall be held within the framework of the existing agreements.

Article 24.

1. It is recommended that the Netherlands appoint a trade representation with the Netherlands High Commissioner in Indonesia to represent its Government, to maintain close contact with the economic agencies of the Government of the Republic of the United States of Indonesia and to render assistance if and when required or considered advisable. It is recommended that the Republic of the United States of Indonesia appoint a trade representation with the Indonesia High Commissioner in the Netherlands to represent its Government, to maintain close contact with the economic agencies of the Netherlands Government and to render assistance if and when required or considered advisable.

2. The administration of the import- and exportquotas and the foreign exchange-licences pertaining thereto in the Netherlands is vested in the Netherlands Government and in the agencies designated to this effect; the same administration in Indonesia is vested in the Government of the Republic of the United States of Indonesia, and in the agencies designated to this effect.

SECTION D.

SETTLEMENT OF DEBTS.

Article 25.

The Republic of the United States of Indonesia shall assume the following debts:

A. The following consolidated loans, calculated as of December 31, 1949:

1. The Netherlands-Indies Loan 1935 bearing interest at the rate of 3½%, issued under the Netherlands-Indies Loan Act 1934 (*Staatsblad* no. 558) j°. the Netherlands-Indies Conversionloan Act 1934 (*Staatsblad* no. 425), as amended by Act of 1 November 1934 (*Staatsblad* no. 559). Amount outstanding as of 31 December 1949, ƒ 36 650 000.—. Remaining duration 21 years.

2. The Netherland-Indies Conversion-loan 1937 bearing interest at the rate of 3%, issued under the Netherlands-Indies Conversionloan Act 1934 (*Staatsblad* no. 245). Amount outstanding as of 31 December 1949 ƒ 90 000 000.—. Remaining duration 18 years.

3. The Netherlands-Indies Loan 1937 A bearing interest at the rate of 3%, issued under the Netherlands-Indies Conversionloan Act 1937 (*Staatsblad* no. 904). Amount outstanding as of 31 December 1949 ƒ 616 250 000.—. Remaining duration 25 years.

4. Indonesia's share of the Netherlands National Consolidated Debt 1896 bearing interest at the rate of 3% (Act of 30 December 1895, *Staatsblad* no. 236). Amount outstanding as of 31 December 1949, ƒ 3 300 000.—. Remaining duration 3 years.

5. The 3% Indonesian Loan 1962—1964 (Agreement of 19 May/8 June 1949) being Indonesia's share converted under paragraph 2, article 4 of the Agreement of 8—14 April 1938, in the 3—3½% Netherlands Government Loan 1938, which loan was converted under the Conversionloan Act 1948 (*Staatsblad* no. I 115) and the Loan Act 1946 (*Staatsblad* no. G 143), amended by the Acts of 23 November 1946 (*Staatsblad* no. G 333) and of 12 February 1948 (*Staatsblad* no. I 52). Amount outstanding as of 31 December 1949, ƒ 79 912 000.—, which amount must be redeemed in full on 1 June 1946.

6. Loans contracted with „De Nederlandsche Bank" and „De Javasche Bank" bearing interest at the rate of 3% (Agreements of 14 and 16 January 1932, amended on 28 December 1932) against collateral of Netherlands Treasury Bills set at the disposal of Indonesia under the Act of 25 July 1932 (*Staatsblad* no. 393), amended by the Act of

15 March 1933 (*Staatsblad* no. 99). Amount outstanding as of 31 December 1949, total ƒ 44 624 775.—. Remaining duration 13½ years.

B. The debts to third countries, calculated as of 31 December 1949:

1. Loan Export-Import Bank on behalf of Indonesia within the framework of the E.C.A. aid (Agreement of 28 October 1948). Amount outstanding as of 31 December 1949 U.S. $ 15 000 000.—. Remaining duration 24 years. Interest at the rate of 2½%, as from 30 June 1952.

2. A line of credit granted by The United States Government to the Netherlands Indies Government for the purchase of United States Surplus Property (Agreement of 28 May 1947). Amount outstanding as of 31 December 1949, U.S. $ 62 550 412.—. Remaining duration 31½ years. Interest at the rate of 2%.

3. Loan from Canada (Agreement of 9 October 1945). Amount outstanding as of 31 December 1949, Can. $ 15 452 188,21. Remaining duration 6 years. Interest at the rate of 2¼%.

4. Settlement between the Government of Australia and the Government of Indonesia (Agreement of 17 August 1949). Amount outstanding as of 31 December 1949, A. £ 8 500 000/—/—. Remaining duration 10 years. Free of interest.

C. The following debts to the Kingdom of the Netherlands, calculated as of 31 December 1949, up to the maximum amounts specified hereunder:

1. Indonesia's share in the swing provided in the British Monetary Agreement, ad £ 5 000 000/—/— (ƒ 53 500 000.—).

2. A swing to the C-account of ƒ 40 000 000.—.

3. The debit balance on the HG/HI-account of ƒ 80 000 000.—.

4. The debit balance on the Bretton Woods accounts, of ƒ 95 000 000.— (opposite this is an asset of the same amount as participation in Interfund and Interbank).

D. All internal debts of Indonesia at the date of transfer of sovereignty.

Article 26.

The Government of the Republic of the United States of Indonesia assumes responsibility for payment of both interest and amortization of the debts referred to in previous article and acquires as regards the debts under C the rights under the existing agreements.

Article 27.

The remaining debts of the Body-Corporate of Indonesia to the Kingdom of the Netherlands at the date of transfer of sovereignty shall be deemed cancelled after the debts of the Kingdom of the Netherlands to the Body-Corporate of Indonesia at the same date have been offset, which involves a reduction of the external debt due to the Netherlands by the sum calculated as of 31 December 1949, of 2 000 000 000 Netherlands guilders.

SECTION E.

FINAL PROVISION.

The provisions of this agreement as far as the Kingdom of the Netherlands is concerned, shall have reference to the Netherlands exclusively.

APPENDIX TO THE DRAFT FINANCIAL & ECONOMIC AGREEMENT

Behoort bij Wet van 21 December 1949, *Staatsblad* No. J 570.

LIST OF TRADE- AND MONETARY AGREEMENTS IN WHICH INDONESIA PARTICIPATES

Countries	Trade Agreements Term	Monetary Agreements Term	Term of Notice
1. The Argentines	1- 4-'48—31-12-'52	1- 4-'48 — 31-12-'52.	—
2. Belgium	1- 7-'49—30- 6-'50	21-10-'43 — indefinite; terminable from 1-1-'49 on the 1st January of each year.	2 years
3. Bulgaria	1- 1-'49—31-12-'49	1- 1-'49 — 31-12-'49 implying yearly renewal.	3 months
4. Denmark	1- 7-'49—30- 6-'50	31- 1-'46 — indefinite.	3 months
5. Eastern-Germany	1- 7-'49—30- 6-'50	1- 7-'49 — 30-6-'50.	—
6. Western-Germany	1- 9-'49—31- 8-'50	1- 9-'49 — 31-12-'50 implying six monthly renewal.	2 months
7. United Kingdom.	1- 1-'49—31-12-'49	7- 9-'45 — 7-9-'50.	3 months
8. Finland	1- 6-'49—31- 5-'50	1- 6-'49 — indefinite.	6 months
9. France	1- 8-'49—30- 6-'50	9- 4-'46 — indefinite.	3 months
10. Hungary	1- 1-'49—31-12-'49	1- 2-'49 — 31-12-'49 wit a one-year renewal subject to notice.	3 months
11. Israël	1- 2-'49—31- 1-'50	1- 2-'49 — 31-1-'50.	3 months
12. Italy	1- 4-'49—31- 3-'50	30- 6-'48 — indefinite. [3]	1 month
13. Yugo-Slavia ...	1- 6-'49—31-10-'49 [1]	1- 2-'48 — indefinite (notice can be given before 1-2-'51).	—
14. Norway	1- 1-'48—31-12-'49	6-11-'45 — 1 year implying indefinite renewal.	12 months
15. Austria	4-12-'48— 7- 2-'50	3-12-'46 — indefinite.	—
16. Poland	1- 1-'49—31-12-'49	1- 1-'49 — 31-12-'49 implying renewal.	3 months before the end of each year
17. Portugal	1- 7-'49—30- 6-'50	1- 3-'46 — 1 year implying renewal.	3 months
18. Russia	10- 6-'48—10- 6-'49 [2]	10- 6-'48 — indefinite.	3 months
19. Spain	1- 6-'49—31- 5-'50	21-10-'46 — indefinite.	6 months
20. Czechoslovakia .	10- 5-'49— 1- 5-'50	15-11-'46 — indefinite.	2 months
21. Sweden	1- 3-'49—28- 2-'50	30-11-'45 — 31-12-'49, unless otherwise agreed.	3 months
22. Switzerland	1-10-'49—30- 9-'50	24-10-'45 — for 3 years, thereafter implying yeanly renewal.	3 months
23. Brazil	—	1- 9-'48 — indefinite; provisional agreement.	2 months
24. Uruguay	15- 7-'48— indefinite	12- 6-'47 — 1 year implying renewal.	3 months
25. Turkey	6- 9-'49— 1- 7-'50	6- 9-'49 — 1-7-'50 subject to implying renewal.	3 months
26. Canada	—	28- 1-'48 — indefinite. [3]	—

1) Negotiations on a new treaty are now being held.

2) Pending future negotiations the commodity quota's continue indefinitely.

3) Services.

DRAFT CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF THE UNITED STATES OF INDONESIA AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS.

The Republic of the United States of Indonesia, and the Kingdom of the Netherlands animated by the same desire to promote their mutual relations regarding education, science and culture in general have decided to conclude an agreement concerning the cultural relations between both States.

CHAPTER I.

BASIS AND CHARACTER.

Article 1.

The cultural relations between the Republic of the United States of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands shall be based on complete freedom, volition and reciprocity.

The cultural relations between the Republic of the United States of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands shall bear a universal character and aim at the realization of the free expansion of the free human mind.

CHAPTER II.

PURPOSE.

Article 2.

Purpose of the agreement is the promotion of the cultural relations between the Republic of the United States of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands.

CHAPTER III.

MEANS TO ACHIEVE THE PURPOSE.

Article 3.

A joint committee of fourteen members shall be set up, on which the Government of each partner shall appoint seven members.

Article 4.

The committee shall be entrusted with the promotion of the realization of the cooperation on the basis of this agreement. Directives for the implementation of this task shall be given in an instruction to be drawn up jointly by the Governments of the two partners. This instruction shall further stipulate that the joint committee be authorized to set up working committees for the consideration of special subjects. Persons who are not members of the committee may be appointed in these working committees.

Article 5.

Each of the two Parties in the joint committee shall submit to its own Government the recommendations and proposals concerning the matters mentioned in articles 6, 12 and 14 on which agreement has been reached in the joint committee.

Each of the two Governments may subsequently submit these proposals and recommendations to the conference of ministers.

Article 6.

The two partners shall aim at the promotion in their own country of a reasonable knowledge of the fundamental elements of the other partner's culture.

This aim shall further be realized by means of radio, film, press, libraries, distribution of reading matter, edueation and manifestations of art.

Article 7.

The two partners undertake to promote the exchange of radio broadcasts in the cultural field and of news.

Article 8.

The two partners undertake to support each other, in the interest of the development of education and science and in general of the promotion of culture, if either partner so requests.

Article 9.

Without prejudice to the provision of article 8 the two partners shall promote the exchange of professors, teachers, experts in the field of science, education, tuition and arts.

Articles 10.

The two partners may establish and maintain in each other's territory institutes of education and art and of other cultural nature, subject to the legal provisions prevailing in the country of establishment.

Article 11.

The establishment and maintenance of institutes of education, spiritual care, social care and in general of institutes of a cultural nature in the territory of the other partner by corporations, foundations, societies or private persons, shall not be impeded, notwithstanding the right of each of the two Governments to make provisions for the public security and the moral welfare of the people in society and state, which are not in violation of the human rights as recognized by the United Nations.

Article 12.

The joint committee shall study the problem of qualified competence mutually recognized on the basis of certificates and degrees held, as well as the possibilities of adapting various kinds of education of one country to those of the other country.

Article 13.

The two partners shall create the opportunity, and if necessary give their assistance, for scientific research to be made in the one country by persons from the other country.

Such research may be made subject to the condition that the Government of the country where the research is carried out shall be informed of the results thereof.

Article 14.

The two partners shall promote the granting of scholarships in order to enable students or researchworkers from both countries to initiate or continue their studies or research in the other country.

They shall further promote enabling students of science, technics or art of the one country, to spend a term in the other country.

Article 15.

The two partners shall promote the establishment of contacts between organizations recognized by the respective countries and active in the cultural field, including youth organizations, taking into account the interests of public security and moral welfare of the people in society and state.

Article 16.

The two partners deem it desirable that books, newspapers and periodicals published in one of the two countries be freely admitted to the territory of the other country and shall aim at freedom of duties and of other restrictive measures in this respect. The import of such material may be restricted only by reason of measures in the interest of public security and moral welfare of the people in society and state.

Article 17.

The two partners shall promote to the extent of their ability the translation of publications issued in the language (languages) of the one country into the language (languages) of the other country.

Article 18.

The two partners shall cooperate in drawing up an inventory of the state of science with regard to Indonesia at the transfer of sovereignty, in particular with respect to natural science, technics, medical science, history, language, economics and adat law.

CHAPTER IV.

TRANSFER OF OBJECTS OF CULTURAL VALUE.

Article 19.

Objects of cultural value originating form Indonesia and which have come into the possession of the Netherlands Government or of the former Netherlands-Indies Government otherwise than by reason of private law shall be transferred to the Government of the Republic of the United States of Indonesia in consequence of the transfer of sovereignty from the Kingdom of the Netherlands to the Republic of the United States of Indonesia.

For the implementation of the provision of the preceding paragraph the joint committee shall propose a separate regulation on the basis of article 5. In this regulation provisions shall be included concerning a possible exchange of objects of cultural or historical value being the property or in the possession of the one country and originating from or of importance to the other country.

CHAPTER V.

ANNUAL REPORT.

Article 20.

The joint committee shall report on its activities yearly and in writing to each of the two Governments.

DRAFT AGREEMENT ON TRANSITIONAL MEASURES.

Article 1.

The Kingdom of the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia agree to an assignment of citizens as provided for in the Agreement attached to the present Agreement on Transitional Measures.

Article 2.

1. The division of the Republic of the United States of Indonesia into component states shall be established finally by the Constituent Assembly in conformity with the provisions of the Provisional Constitution of the Republic of the United States of Indonesia with the understanding that a plebiscite will be held among the population of territories thereto indicated by the Government of the Republic of the United States of Indonesia upon the recommendation of the United Nations Commission for Indonesia or of an other organ of the United Nations, under supervision of the United Nations Commission for Indonesia or the other United Nations organ referred to, on the question whether they shall form a separate component state.

2. Each component state shall be given the opportunity to ratify the final Constitution. In case a component state does not ratify that Constitution, it will be allowed to negotiate about a special relationship towards the Republic of the United States of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands.

Article 3.

1. The Kingdom of the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia recognize and accept that all powers and obligations of the Governor-General of Indonesia, arising out of the contracts concluded by him with self-governing territories shall, by virtue of the transfer of sovereignty, be transferred to the Republic of the United States of Indonesia or to any of its component States in case the constitutional law of the Republic of the United States of Indonesia so provides.

2. By the transfer of sovereignty to the Republic of the United States of Indonesia the Rulers of the self-governing territories are ipso iure liberated from their oath of allegiance to Her Majesty the Queen of the Netherlands.

3. The Republic of the United States of Indonesia recognizes the special status of the self-governing territories on the basis of the pertinent provisions in its Constitution and in the Constitutions of its component States, whereby legal disputes concerning the status of self-governing territories are adjudicated by an independent organ of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 4.

1. The Kingdom of the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia recognize and accept that all rights and obligations of Indonesia, under private and public law, are ipso iure transferred to the Republic of the United States of Indonesia, unless otherwise provided for in the special agreements included in the Union Statute.

2. The Republic of the United States of Indonesia shall be responsible for the fulfilment of the obligations of the public bodies which previously had a legal status in Indonesia and which are now merged in the Republic of the United States of Indonesia or in its component parts and further guarantees the fulfilment of the obligations of public bodies which continue to exist as such, unless otherwise provided for in the financial and economic agreement.

3. The provision in the preceding paragraphs is not applicable to the residency of New Guinea in view of the fact, as set forth in article 2 of the Charter of Transfer of Sovereignty, that it has not yet been possible to reconcile the views of the parties on New Guinea.

Article 5.

1. The Kingdom of the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia understand that, under observance of the provisions of paragraph 2 hereunder, the rights and obligations of the Kingdom arising out of treaties

and other international agreements concluded by the Kingdom shall be considered as the rights and obligations of the Republic of the United States of Indonesia only where and inasmuch as such treaties and agreements are applicable to the jurisdiction of the Republic of the United States of Indonesia and with the exception of rights and duties arising out of treaties and agreements to which the Republic of the United States of Indonesia cannot become a party on the ground of the provisions of such treaties and agreements.

2. Without prejudice to the power of the Republic of the United States of Indonesia to denounce the treaties and agreements referred to in paragraph 1 above or to terminate their operation for its jurisdiction by other means as specified in the provisions of those treaties and agreements, the provisions of paragraph 1 above shall not be applicable to treaties and agreements in respect of which consultations between the Republic of the United States of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands shall lead to the conclusion that such treaties and agreements do not fall under the stipulations of paragraph 1 above.

Article 6.

Provisions concerning the position of the civil Government officials in connection with the transfer of souvereignty are contained in the agreement attached to the present Agreement on Transitional Measures.

Article 7.

The withdrawal of the Netherlands armed forces from Indonesia and the reorganization of the armed forces in Indonesia organized and equipped by or on the authority of the Government of Indonesia (Netherlands-Indonesian Government) are regulated or provided for in the Regulations on military affairs attached to the present Agreement on Transitional Measures.

Article 8.

1. All stipulations in existing legal regulations and administrative ordinances inasmuch as they are not incompatible with the transfer of sovereignty or with the provisions

of the Union Statute, or of the present Agreement on Transitional Measures or of any other agreement concluded between the parties, remain in force without modification as regulations and ordinances of the Kingdom of the Netherlands and of the Republic of the United States of Indonesia respectively, as long as they are not revoked or modified by the competent organs of the Kingdom of the Netherlands or the competent organs of the Republic of the United States of Indonesia respectively.

2. Whenever these legal regulations and administrative ordinances mention Netherlands subjects, this term shall be held to mean citizens of the Kingdom of the Netherlands and of the Republic of the United States of Indonesia.

3. Whenever these legal regulations and administrative ordinances refer to ships or aircraft entitled to fly the Netherlands flag, they refer equally to ships or aircraft entitled to fly the flag of the Kingdom of the Netherlands and to those entitled to fly the flag of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 9.

The powers which, according to the existing legal regulations and administrative ordinances concerning the general rule over Indonesia, are vested in the Netherlands in Netherlands organs shall, pending further provisions by the competent organs of the Republic of the United States of Indonesia, be wielded by a Delegate appointed for that purpose by the Government of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 10.

The Kingdom of the Netherlands shall promote membership of the Republic of the United States of Indonesia in the United Nations.

DRAFT AGREEMENT CONCERNING THE ASSIGNMENT OF CITIZENS.

The Kingdom of the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia,

considering that at the transfer of sovereignty it shall be determined whether persons who up to that time were subjects of the Kingdom of the Netherlands including those who, under the law of the Republic Indonesia were, in the eyes of the Republic of the United States of Indonesia, citizens of the Republic Indonesia, are to be assigned Netherlands or Indonesian nationality;

agree, that at the transfer of sovereignty the following provisions shall come into effect.

Article 1.

Under the terms of the present agreement are deemed to be of age those who reached the age of eighteen years or those who were married at an earlier age.

Those whose marriage was dissolved before they had reached the age of eighteen years shall continue to be deemed of age.

Article 2.

Where the present agreement applies to persons who, under the law of the Republic Indonesia on nationality are citizens of the latter Republic immediately before the transfer of sovereignty, the Republic of the United States of Indonesia understands that the terms „acquiring" or „preserving" Indonesian nationality, as hereafter used in the present agreement imply that Republican nationality shall be converted into Indonesian nationality; and that the terms „retaining" the Netherlands nationality and „rejecting" Indonesian nationality as hereafter used in the present agreement imply the loss of Republican nationality.

Article 3.

Netherlands nationals who are of age shall retain their nationality, but, if born in Indonesia or if residing in Indonesia for at least the last six months, they shall, within the

time limit therefor stipulated, be entitled to state that they prefer Indonesian nationality.

Article 4.

1. Without prejudice to the provisions of paragraph 2 below, Netherlands subjects-non-Netherlanders (Nederlandse onderdanen-niet Nederlanders) who are of age and who, immediately before transfer of sovereignty belonged to the indigenous population (orang-orang jang asli) of Indonesia shall acquire Indonesian nationality but if they are born outside Indonesia and reside in the Netherlands or in a territory not under the jurisdiction of either partner in the Union, they shall, within the time limit therefor stipulated, be entitled to state that they prefer Netherlands nationatily.

2. The subjects of the Netherlands referred to in paragraph 1 above who are residents of Surinam or of the Netherlands Antilles shall

a. if they were born outside the Kingdom, acquire Indonesian nationality but may, within the time limit therefor stipulated, state that they prefer Netherlands nationality;

b. if they were born within the Kingdom, retain Netherlands nationality but may within the time limit therefor stipulated, state that they prefer Indonesian nationality.

Article 5.

Persons who, immediately before the transfer of sovereignty, are of age and are Netherlands subjects of foreign origin-non-Netherlanders (uitheemse Nederlandse onderdanen-niet-Nederlanders) and who were born in Indonesia or reside in the Republic of the United States of Indonesia shall acquire Indonesian nationality but may, within the time limit therefor stipulated, reject Indonesian nationality;

if, immediately before the transfer of sovereignty, such persons had no other nationality than the Netherlands nationality, they shall regain Netherlands nationality;

if, immediately before the transfer of sovereignty such persons possessed simultaneously an other nationality, they shall, when rejecting Indonesian nationality, regain Netherlands nationality only on the strength of a statement made by them to that effect.

Article 6.

Persons who, immediately before the transfer of sovereignty, are of age and are Netherlands subjects of foreign origin-non-Netherlanders (uitheemse Nederlandse onderdanen-niet-Nederlanders) and who were not born in Indonesia and reside within the Kingdom, shall retain Netherlands nationality but may, within the time limit therefor stipulated, state that they prefer Indonesian nationality and reject Netherlands nationality;

those who, at the transfer of sovereignty simultaneously possess a foreign nationality, may simply reject Netherlands nationality, on the understanding that the right to reject Netherlands nationality, connected or not with the right to prefer Indonesian nationality, shall not belong to inhabitants of Surinam of Indian or Pakistani origin.

Article 7.

Those who, at the transfer of sovereignty are of age and are Netherlands subjects of foreign origin-non-Netherlanders (uitheemse Nederlands onderdanen-niet-Nederlanders) and who reside outside a territory under the jurisdiction of either partner in the Union and who were born in the Netherlands, in Surinam or the Netherlands Antilles, shall retain Netherlands nationality;

if these persons are born from parents who were Netherlands subjects by birth in Indonesia, they may, within the time limit therefor stipulated, state that they prefer Indonesian nationality and reject Netherlands nationality;

if, at the transfer of sovereignty, these persons simultaneously possess a foreign nationality, they may simply reject Netherlands nationality.

If these persons are born outside a territory under the jurisdiction of either partner in the Union, they fall under the terms of the present article or under the terms of article 5 above, according to the place of birth of either father or mother, with due observance of the distinctions established by the provisions of article 1 of the Act of 1892 on Netherlandership and residentship (ingezetenschap);

if the parents were also born outside a territory under the jurisdiction of either partner in the Union, the place of the birth of the father or of the mother shall be decisive.

Article 8.

With due observance of the distinction established by the provisions of article 1 of the Act of 1892 referred to in article 7 above, persons not of age shall follow the nationality of their father or mother, provided either parent is a Netherlands subject and living at the transfer of sovereignty.

Article 9.

With due observance of the distinctions established by the provisions of article 1 of the Act of 1892 referred to in articles 7 and 8 above, persons not of age whose father or mother is, at the transfer of sovereignty, not a Netherlands subject, or is deceased, shall fall directly under the terms of the preceding articles;

if these persons have no living parent, their domicile shall be deemed to be their place of actual residence and, in all cases where a statement on their part is provided for, such statements may be made on their behalf by their lawful representative. In the absence of a lawful representative the above provisions shall become applicable at the time such a lawful representative is appointed.

Article 10.

The married woman shall follow the status of her husband. In case the marriage is dissolved she shall, within the time limit of one year thereafter, be entitled to make a statement by which she may acquire or reject the nationality she would or could have acquired or rejected by a statement, had she not been married at the transfer of sovereignty.

Article 11.

The exercise of the right to prefer or reject a nationality shall not nullify any act previously performed and which would be valid if this rigth had not been exercised according to the above provisions.

EXECUTIVE REGULATIONS.

Article 12.

Statements by persons to the effect that they prefer or reject a nationality under the terms of the preceding articles shall be made before or addressed to

a. the High Commissioners of the Parties,

or *b.* the ordinary judiciary to whose normal jurisdiction these persons belong,

or c. the officials further to be designated by the competent authorities of both states.

Statements of the kind referred to in the preceding paragraph by persons abroad may be made before, or sent to diplomatic or consular authorities of either Party and under whose jurisdiction the person concerned is domiciled.

Signatures or fingerprints appearing on a written statement shall be duly legalized.

A person making or sending a statement as above referred to shall at once receive a certificate thereof.

Statements as referred to above made in the course of a given calendar month shall be published in the course of the following month in the offical Gazette of the State whose officials have received such statements; duplicates or certified copies thereof shall be forwarded monthly to the Government of the other State.

Both Parties shall give ample publicity to the conditions on which such statements may be made. These statements and certificates thereof shall be free from stamp duty or cost.

Article 13.

Wherever the preceding articles mention „the time limit therefor stipulated", these words shall apply to a period of two years from the transfer of sovereignty.

Article 14.

Decisions concerning the exercise or the prevention of exercise of the right of option may be requested from the ordinary judiciary under whose jurisdiction the interested party resides. If the latter resides abroad, the District Court

(Arrondissements Rechtbank) of Amsterdam and the ordinary judiciary at Batavia (Djakarta) shall be competent.

Persons concerned in such decisions shall, as in civil law, have the right of appeal and of any other legal recourse. A decision having obtained legal validity shall be notified by the Government of the Party under whose jurisdiction such decision was taken to the Government of the other Party by whom it shall be recognized as binding.

NOTE.

None of the provisions in this agreement shall apply to the nationality of the inhabitants of the residency of New Guinea in case the sovereignty over this territory is not transferred to the Republic of the United States of Indonesia.

DRAFT AGREEMENT CONCERNING THE POSITION OF THE CIVIL GOVERNMENT OFFICIALS IN CONNECTION WITH THE TRANSFER OF SOVEREIGNTY.

The Republic of the United States of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands have agreed as follows.

Article 1.

At the transfer of sovereignty the Government of the Republic of the United States of Indonesia shall take over into its service all civil government officials then employed by the Government of Indonesia in permanent or temporary service or on a short-term contract, including the personnel of the autonomous communities instituted on the footing of articles 119, 121 and 123 of the Indies Fundamental Law (Indische Staatsregeling), as far as this personnel resorts under the Government of Indonesia.

Article 2.

Subject to the provisions in articles 3, 4 and 5, the Government of the Republic of the United States of Indonesia shall accept all rights and obligations which Indonesia has at the transfer of sovereignty in respect of the government officials referred to in article 1 and the former government officials and also the surviving dependants of these officials and former officials.

Article 3.

The Government of the Republic of the United States of Indonesia shall, for a period of two years after the transfer of sovereignty, make no unfavourable alterations in the provisions prevailing at the transfer of sovereignty, concerning the legal position of the government officials referred to in article 1, in so far and as long as they have Netherlands nationality.

Article 4.

The Government of the Republic of the United States of Indonesia shall have the right to regroup and select the civil government officials referred to in article 1 immediately after the transfer of sovereignty.

Article 5.

Without prejudice to the principle that a discharge shall always be granted if so requested, also during the transition period referred to in article 3, the following shall prevail in respect of the government officials referred to in the same article, in case of a premature termination of service.

a. In case of an honourable discharge, both during and after the transition period, given — not at the request of the official concerned — by the Government of the Republic of the United States of Indonesia in the interest of the service, through no fault or doing of the official referred to, the discharge regulation prevailing at the moment of discharge, applies. The cost thereof is for account of the Republik of the United States of Indonesia. The discharge regulations set forth in the appendix hereto shall apply to discharges in the transition period as referred to.

b. In case of discharge granted during the transition period, at the request of the official concerned, that official shall not be entitled to any payment by or on behalf of the Government of the Republic of the United States of Indonesia.

c. In case discharge upon request is granted to an official after the termination of the transition period, as a consequence of such alterations in the conditions of service that, in the opinion of the Government of the Republic of the United States of Indonesia, continuation of service cannot reasonably be required of that official, a discharge regulation in force at the time of discharge shall apply.

Article 6.

The government officials referred to in the previous articles do not include the minister of religion who were paid as officials by the Government of Indonesia in their office.

The Government of the Kingdom of the Netherlands and of the Republic of the United States of Indonesia shall enter into consultation at a later date, as regards the status of this group as well as of those who have been pensioned off by virtue of the special instructors pension regulation (Pensioenreglement voor bijzondere leerkrachten).

APPENDIX TO THE DRAFT AGREEMENT CONCERNING THE POSITION OF THE CIVIL GOVERNMENT OFFICIALS IN CONNECTION WITH THE TRANSFER OF SOVEREIGNTY.

CONDITIONS OF DISCHARGE.

A. Government officials in permanent service.

The termination of service involves a non activity allowance for a maximum of five years or as much less as is necessary to attain the term or service and age required in accordance with the prevailing provisions for the granting of a normal pension. The non activity allowance amounts for the first two years, to 60% of the first ƒ 500,— and 40% of the balance of the last full pay, and thereafter to 40% of the latter, in both cases with a maximum of ƒ 750,— per month.

After termination of the period of non activity allowance, if then a term of service counting for pension of at least ten years, has been attained, a pension is granted irrespective of age, calculated in accordance with the existing pensions, increased by 4% of the pension basis, in so far as in this way a total of 40% of that basis is not exceeded.

B. Government officials in temporary service and having entered the service before 1 March 1942.

The termination of service involves, in case of a term of service of at least ten years, the granting of a subsidy by way of non activity allowance for a maximum of one year or as much less as is necessary to attain, if the persons concerned had been in permanent service, the term of service and age required for the granting of a normal pension. The subsidy by way of non activity allowance amounts to 30% of the full pay, with a maximum of ƒ 175,— per month, irrespective of cost-of-living bonus and family allowances. After the termination of the period of non activity allowance, which is to count, if spent in the tropics, in full, and outside the tropics, half, as term of service, a subsidy by way of pension is granted, irrespective of age, if by that time a term of service of at least 15 years is

attained, to the amount of four fifths of the pension which would in corresponding cases accrue in virtue of the provision sub A, to government officials in permanent service.

C. Short-term officials.

The termination of service involves the consequences contractually stipulated of an interim termination of the service, exclusively for reasons of service.

D. The existing terms of notice of discharge are as follows:
in respect of officials in permanent service one month;
in respect of officials in temporary service, who retain pay after their discharge two months;
in respect of officials in temporary service, who after their discharge are entirely pay (i.e. the post-war temporary officials) one month plus one month for each full year of service, with a maximum of three months.

E. To the officials on non activity allowance and those pensioned, as referred to sub A, who comply with the criteria embodied in the articles 2 and 3 of the Foreign Leave Regulation (Buitenlands Verlofreglement) in so far as they cannot yet make such claims in virtue of the Passage Regulation (Overtochtsreglement) free return passage to the Netherlands is to be granted on the footing of the provisions prevailing in this respect, all possible claims to free return to Indonesia having lapsed.

F. 1. From a proportionate pension or subsidy by way of pension, nonactivity allowance or subsidy by way of non activity allowance, granted in virtue of this regulation, an amount is deducted calculated in accordance with a percentage of the pay for work equal to the percentage of the basis applied for the calculation of the payment on behalf of the Government.

2. Officials who enjoy pay granted on behalf of the Government as referred to in the preceding paragraph may, as long as they have not reached the age of 55 years, be obliged to accept suitable work.

3. In case the suitable work is not accepted a same percentage as referred to in the first paragraph shall be deducted from the foregone pay.

DRAFT AGREEMENT ON RENDERING ASSISTANCE WITH REGARD TO PERSONNEL BY THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON BEHALF OF THE CIVIL SERVICE OF THE REPUBLIC OF THE UNITED STATES OF INDONESIA AND VICE-VERSA.

The Republic of the United States of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands have agreed as follows.

Article 1.

The Republic of the United States of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands may freely recruit personnel for their civil services amongst each other's nationals and in each other's jurisdiction.

The Republic of the United States of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands shall cooperate in the recruitment of personnel and temporary assigment of officials for each other's civil services.

Article 2.

The Republic of the United States of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands shall consult each other on the manner in which such mutual assistance can further be promoted in the most efficient manner.

Article 3.

In case the Republic of the United States of Indonesia on behalf of its representation in the Netherlands and the Kingdom of the Netherlands on behalf of its representation in Indonesia wish to employ personnel belonging to each other's service, the Parties shall previously consult each other and endeavour to oblige.

DRAFT REGULATIONS ON MILITARY AFFAIRS.

The regulations on Military Affairs referred to in article 7 of the Agreement on Transitional measures are divided into the following subjects:

I.

Regulations on the Netherlands naval forces in Indonesia after the transfer of sovereignty.

II.

Regulations on the land forces in Indonesia under Netherlands command after the transfer of sovereignty.

III.

Regulations on the air forces in Indonesia under Netherlands command after the transfer of sovereignty.

I.

Regulations on the Netherlands naval forces in Indonesia after the transfer of sovereignty.

Chapter I. General principles.

Chapter II. Tasks to be executed by the Royal Netherlands Navy on behalf of the Government of the Republic of the United States of Indonesia during the period of withdrawal of the Royal Netherlands Navy.

Chapter III. Assistance in building up the Navy of the Republic of the United States of Indonesia.

Chapter IV. Manner of and regulations on the withdrawal of the Royal Netherlands Navy.

Chapter V. Regulation on the naval base Surabaja.

Chapter VI. Agreements on the execution of the regulations agreed upon in the preceding chapters.

CHAPTER I.

GENERAL PRINCIPLES.

Article 1.

As a consequence of the transfer of sovereignty the Republic of the United States of Indonesia shall be exclusively responsible for the naval protection of Indonesia.

Article 2.

There shall be no Netherlands task in Indonesia for the Royal Netherlands Navy as a Netherlands instrument, for which reason the Royal Netherlands Navy shall be withdrawn from Indonesia.

Article 3.

By reason of the preceding articles the naval protection shall be the task of the naval forces of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 4.

The Netherlands Government is prepared at the request of the Government of the Republic of the United States of Indonesia to render assistance in the execution of the naval tasks as referred to in article 7, in so far as the Republic of the United States of Indonesia is not yet able to fulfil these tasks by own means.

This assistance is to cease gradually.

Article 5.

The Netherlands Government is prepared at the request of the Government of the Republic of the United States of Indonesia to render assistance in building up the Navy of the Republic of the United States of Indonesia, so that within the shortest possible time the Republic of the United States of Indonesia shall be able to execute its naval tasks by own means.

Article 6.

The period within which the Netherlands naval forces are to be withdrawn from the United States of Indonesia is fixed at one year, unless the sovereign Governments agree otherwise in mutual consultation.

CHAPTER II.

TASKS TO BE EXECUTED BY THE ROYAL NETHERLANDS NAVY ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF THE UNITED STATES OF INDONESIA DURING THE PERIOD OF WITHDRAWAL OF THE ROYAL NETHERLANDS NAVY.

Article 7.

At the request of the Government of the Republic of the United States of Indonesia the Royal Netherlands Navy shall during the period of its withdrawal execute the following tasks on behalf of the Republic of the United States of Indonesia:

a. assistance to the maritime services of the Republic of the United States of Indonesia entrusted with the patrol service;

b. minesweeping and minedisposal service, diving and salvage operations;

c. hydrography;

d. assistance with units of the Netherlands Naval Air Force.

Article 8.

The Netherlands Government is prepared to transfer on the day of the transfer of sovereignty two corvettes of the Royal Netherlands Navy into the property of the Government of the Republic of the United States of Indonesia. Further, the Netherlands Government is prepared, in consultation with the Government of the Republic of the United States of Indonesia, to transfer as soon as possible after the transfer of sovereignty two additional corvettes, and further other seagoing and airborne craft.

Finally the Netherlands Government is prepared to transfer, one year after the transfer of sovereignty, one destroyer into the property of the Republic of the United States of Indonesia.

The financial and other (zakelijke) conditions on which this transfer of ships and aircraft shall take place shall be a subject of consultation between the sovereign Governments.

Article 9.

With regard to the taking-over by the Government of the Republic of the United States of Indonesia of the maintenance facilities and supplies of the Royal Netherlands Navy, the following shall be observed:

a. at the moment of the transfer of sovereignty the properties of the present Government of Indonesia are transferred to the Government of the Republic of the United States of Indonesia;

b. The Netherlands Government shall, as soon as possible after the transfer of sovereignty, enter into consultation with the Government of the Republic of the United States of Indonesia, concerning time and financial and other (zakelijke) conditions of transfer of the Netherlands properties considered suitable for such transfer.

Article 10.

1. The naval establishments in Indonesia outside the naval base Surabaja which are under the management of the Royal Netherlands Navy, prior to the transfer of sovereignty remain provisionally under the management of the Royal Netherlands Navy.

In mutual consultation the management is gradually transferred to the Navy of the Republic of the United States of Indonesia, with the observance of the following:

a. the naval establishment shall remain in function in order to guarantee a good execution of the naval task;

b. by reason of this agreement and irrespective of whether the Navy of the Republic of the United States of Indonesia or the Royal Netherlands Navy manages an establishment, said establishment shall remain in function on

behalf of the Navy of the Republic of the United States of Indonesia and the units of the Royal Netherlands Navy present in Indonesia.

II. Insofar as establishments to be indicated in mutual consultation and situated within the naval base Surabaja are suitable, the provision of the preceding paragraph on naval establishments in Indonesia outside the naval base Surabaja is applicable.

Article 11.

The Netherlands Government is prepared, within its capacity, at the request of the Government of the Republic of the United States of Indonesia, to make personnel available for the management of the naval establishment referred to in the preceding article.

Article 12.

The personnel and the units of the Royal Netherlands Navy during the period referred to in article 6, shall be under the command of the Flag-officer of the Royal Netherlands Navy in Indonesia (V.K.M.I.), who, in respect of the tasks referred to in article 7, is bound to observe the directives and orders of the Government of the Republic of the United States of Indonesia and is responsible to the Government of the Republic of the United States of Indonesia for the execution of the tasks referred to.

Article 13.

The units of the Royal Netherlands Navy in the execution of the tasks referred to in article 7 fly the Netherlands flag and pennant and from the yard the flag of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 14.

On board the units of the Royal Netherlands Navy entrusted with the execution of the tasks referred to in article 7, liaison-officers of the Republic of the United States of Indonesia may be stationed who may be vested with the authority to investigate.

CHAPTER III.

ASSISTANCE IN BUILDING UP THE NAVY OF THE REPUBLIC OF THE UNITED STATES OF INDONESIA.

Article 15.

It is agreed in principle that at the request of the Government of the Republic of the United States of Indonesia a naval section as part of the Netherlands Military Mission will be sent out, in which section for the training of Naval personnel of the Republic of the United States of Indonesia and for the naval establishments advisers, instructors and technical personnel will be included.

Article 16.

The Netherlands Government is prepared to extend all possible facilities in its training-establishments on behalf of the training of the naval personnel of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 17.

The Netherlands Government is prepared to offer every possible opportunity on board the ships of the Royal Netherlands Navy for the training of the naval personnel of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 18.

The Netherlands Government is prepared to extend to the Republic of the United States of Indonesia all possible facilities and assistance in purchasing ships, airplanes and supplies for the Navy of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 19.

I. The Netherlands Government is prepared to permit the Indonesian regular personnel of the Royal Netherlands Navy to enter voluntarily into the service of the Republic of the United States of Indonesia on conditime to be further defined by the Republic of the United States of Indonesia.

II. Further, the Netherlands Government is prepared to promote Netherlands personnel and former personnel of the Royal Netherlands Navy entering on a voluntary basis into the service of the Navy of the Republic of the United States of Indonesia.

CHAPTER IV.

MANNER OF AND REGULATIONS ON THE WITHDRAWAL OF THE ROYAL NETHERLANDS NAVY.

Article 20.

At the withdrawal of the Royal Netherlands Navy, the Netherlands and Indonesian authorities shall in mutual cooperation take care, that the transfer of the naval tasks be made in the right manner.

Pending the gradual withdrawal the Royal Netherlands Navy shall not be employed operationally unless a request in this respect is made by the sovereign Government of the Republic of the United States of Indonesia and unless the Netherlands Government approves the employment.

Article 21.

The same provisions apply to the units of the Royal Netherlands Marine Corps with regard to the period of withdrawal as apply to the units of the Royal Netherlands Army.

Article 22.

The Navy Department shall be transferred to the Government of the Republic of the United States of Indonesia, the office of the Commander in Chief ceasing to exist as such on the day of the transfer of sovereignty and the liquidation thereof passing to the bureau of the Flag-officer of the Royal Netherlands Navy in Indonesia (V.K.M.I.).

CHAPTER V.

REGULATION ON THE NAVAL BASE SURABAJA.

Article 23.

The Naval Base Surabaja, hereinafter to be called the base, comprises — with the exception of private properties — the land- and sea-territory, and also the shipyards, camps, harbours, aerodromes, establishments, installations, etc. situated thereon, within the boundaries as indicated on the map attached to this agreement.

Article 24.

At the transfer of sovereignty the base becomes a naval base of the Republic of the United States of Indonesia with due regard to the provisions in respect of the properties of the Royal Netherlands Navy referred to in article 9 sub *b*.

Article 25.

From the moment at which the sovereignty is transferred an officer of the Royal Netherlands Navy shall be appointed manager of the base by the Government of the Republic of the United States of Indonesia. This appointment is made from a list of three names submitted by the Netherlands Government.

Article 26.

The manager of the base is directly responsible for the management to the Minister of Defence of the Republic of the United States of Indonesia, or if necessary through the intermediary of the head of the Naval Section of the Netherlands Military Mission, if the latter acts as adviser to the Minister of Defence of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 27.

The manager of the base is responsible for maintaining order and security within the base. To this end the Government of the Republic of the United States of Indonesia shall place at his disposal a policeforce taking the wishes of the

manager into full account. The commanding officers of the ships and establishments within the base are bound to follow the directives of the manager in maintaining order and security.

Article 28.

The authority to be vested in the manager of the base, shall be laid down in an instruction to be issued by the Minister of Devence of the Republic of the United States of Indonesia. In this matter the advice of the Head of the Naval Section of the Netherlands Military Mission shall be requested.

CHAPTER VI.

AGREEMENTS ON THE EXEIUTION OF THE REGULATIONS AGREED UPON IN THE PRECEDING CHAPTERS.

Article 29.

Use of the base and its services shall be made by the forces of the Republic of the United States of Indonesia and units of the Royal Netherlands Navy, present in Indonesia by reason of this agreement in conformity with rules which are identical for both Navies.

Article 30.

1. At the transfer of sovereignty, the Government of the United States of Indonesia takes into its service all the civil personnel then employed by the Government of Indonesia, either permanently or temporarily or on short-term contract and working with the Royal Netherlands Navy, in the same manner and the same conditions as agreed in respect of the other civil government officials of the Government of Indonesia.

2. At the moment referred to under paragraph 1 the civil personnel working with the Royal Netherlands Navy in Indonesia on a Netherlands contract of employment remains in the employment of the Royal Netherlands Navy on the existing conditions.

Article 31.

1. The cost of the Royal Netherlands Navy, including the Royal Netherlands Marine Corps, from 1 January 1950 until the end of the period of withdrawal, shall be for account of the Netherlands.

2. Insofar as the Royal Netherlands Navy renders assistance to the Republic of the United States of Indonesia during this period, the provision of article 6 of the agreement for the implementation of articles 2 and 21 of the Union statute shall apply.

3. For the year 1950 the total amount for the account of the Government of the Republic of the United States of Indonesia as a consequence of the preceding paragraph is to be fixed through previous consultations between the sovereign Governments on the understanding that this amount shall not exceed the exploitation cost of the Royal Netherlands Navy in Indonesia during 1949 (the cost of the Royal Netherlands Marine Corps not included), whereby possible devaluation influences shall be taken into account.

4. The Government of the Republic of the United States of Indonesia shall periodically make avaible the Indonesian and foreign currencies required for the expenditure of the Royal Netherlands Navy on the basis of a yearly cash-budget respectively foreign currency-budget. This expenditure, insofar as the second paragraph is not applicable, shall be settled later between the Governments of the Netherlands and of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 32.

Within the boundaries of the establishments referred to in article 10, authority is exercised by the commanding officers concerned. These commanding officers shall guard the establishments with their own means, or, insofar as necessary, with the assistance of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 33.

The commanding officers of the establishments referred to in article 10, shall render full assistance to the competent authorities of the Republic of the United States of Indonesia

as regards the tracing, arresting and bringing up to trial of persons coming under the Indonesian jurisdiction who are suspected of being guilty of an offence and who are within the establishments.

Article 34.

Members of the military personnel of the Royal Netherlands Navy who are staying in Indonesia by reason of any agreement with the Republic of the United States of Indonesia, shall be subject to the Netherlands law on military penal procedure and to Netherlands military penal law, Netherlands law on military discipline and further to Indonesian common penal law insofar as military penal law referred to above contains no regulations.

The law on military discipline shall be applied by or on behalf of the commanding officer concerned of the Royal Netherlands Navy.

At their request, the Indonesian authorities shall be informed which dispositions have been made in respect of serious offences committed by the military personnel referred to, whereby the interests of the Republic of the United States of Indonesia or of its subjects are concerned.

Article 35.

Use of Indonesian ports, aerodromes and of their services, shall be made by the forces of the Republic of the United States of Indonesia and units of the Royal Netherlands Navy present in Indonesia by reason of this agreement in conformity with the rules which are identical for both Navies.

II

Regulations on the land forces in Indonesia under Netherlands command after the transfer of sovereignty.

Chapter I. General principles.

Chapter II. The concentration of the land forces under Netherlands command.

Chapter III. Shipment of the troops of the Royal Netherlands Army from Indonesia.

Chapter IV. The reorganization of the land forces which have been formed and equipped by or under the authority of the Government of Indonesia (Netherlands-Indonesian Government).

Chapter V. Social provisions.

Chapter VI. Transfer of the movables and immovables used by the Royal Netherlands-Indonesian Army.

Chapter VII. Finance.

Chapter VIII. Executive regulations.

CHAPTER I.

GENERAL PRINCIPLES.

Article 1.

The land forces under Netherlands command shall be withdrawn from Indonesia or be reorganized as soon as possible, in accordance with the directives given hereinafter.

Article 2.

In consequence of the transfer of sovereignty the responsibility for the internal and external security of Indonesia shall rest with the sovereign Government of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 3.

1. During the withdrawal of the land forces under Netherlands command the Netherlands and Indonesian authorities concerned shall attend in mutual cooperation to the orderly transfer of territorial military responsibility.

2. The land forces under Netherlands command which are awaiting shipment or are being reorganized shall not be used for any operation unless upon a request to this effect by the sovereign Government of the Republic of the United States of Indonesia and with the consent of the Netherlands Government.

Article 4.

Members of the armed forces which at the time of the transfer of sovereignty are present in Indonesia and which have been formed or equipped by or under the authority of the Government of Indonesia (the Netherlands-Indonesian Government), may be incorporated in the military forces of the Republic of the United States of Indonesia according to provisions to be determined at a later date.

Article 5.

The transfer of the appropriate movables and immovables shall take place in mutual consultation in an orderly and businesslike way.

CHAPTER II.

THE CONCENTRATION OF THE LAND FORCES UNDER NETHERLANDS COMMAND.

Article 6.

1. Insofar as this has not been carried out at the time of the transfer of sovereignty the armed forces referred to in article 1 shall be assembled as soon as possible, in areas (rayons) to be determined in mutual consultation.

2. As such may be considered areas in the neighbourhood of ports and areas which offer sufficient accommodation for troops.

3. In order to promote the orderly transfer of the territorial military responsibility the possibility of the reorganization of the armed forces referred to in article 4 taking place also the rayons must be considered.

Article 7.

For each rayon a Netherlands commander shall be appointed who shall be in command of the members of the armed forces referred to in article 1 present in this rayon.

Article 8.

The armed forces referred to in article 1 have the status of guests who are in the territory of a friendly nation; the Government of the Republic of the United States of Indonesia shall grant all possible facilities.

Article 9.

The armed forces referred to in article 1 shall remain under the command of their own officers.

Article 10.

The armed forces referred to in article 1 shall retain their organic armament and equipment unless the competent Netherlands military authorities decide otherwise.

Article 11.

Without prejudice to the provisions of this chapter the Government of the Republic of the United States of Indonesia shall remain responsible for the maintenance of law and order within the rayons.

Article 12.

The members of the armed forces referred to in article 1 shall be subject to the Netherlands law on military penal procedure and to Netherlands military penal law, Netherlands law on military discipline and further to Indonesian common penal law, insofar as military penal law referred to above contains no regulations.

The law on military discipline shall be applied by or on behalf of the officer in command of the armed forces referred to in article 1. At their request the Indonesian authorities shall be informed of the punishment for grave offences which have been committed by the aforementioned members of the armed forces and in which the interests of the Republic of the United States of Indonesia or its subjects are involved.

Article 13.

The members of the armed forces referred to in article 1 shall be at liberty to move freely within the rayons. Whenever they want to leave the rayons they shall have a valid pass bearing the signature of the commanding officer referred to in article 7 and visaed by a military authority to be appointed by the Republic of the United States of Indonesia. With due regard to article 3, paragraph 2, they shall refrain from all military activities; they shall, however, have the opportunity to train in accordance with regulations to be laid down in mutual consultation.

Article 14.

1. In the rayons law and order among the members of the armed forces referred to in article 1 shall be enforced by the competent Netherlands military authorities who, if necessary, send out patrols for this purpose.

2. These patrols are allowed to take action exclusively against the members of the armed forces referred to in article 1.

Article 15.

Within the boundaries of the encampments of the armed forces referred to in article 1 the authority shall rest with the officers in command of the units encamped there. These officers shall guard their encampments with their own means.

Article 16.

The officers in command referred to in article 15 shall render full assistance to the Government of the Republic of the United States of Indonesia as regards the tracing, arrest-

ing and bringing up to trial of persons under Indonesian jurisdiction, who are suspected of being guilty of an offence and who are within the encampment.

Article 17.

As regards the carrying of arms in public when off duty the rules obtaining between sovereign states in peacetime shall apply. In special cases the military authorities concerned shall consult each other on this matter.

Article 18.

1. The armed forces referred to in article 1 shall retain such services as are necessary for their maintenance.

2. These maintenance services shall have freedom of movement outside the rayons insofar as required for the performance of their duties and they shall attend to their security with their own means. Further rules for the execution of the provisions of this article shall be established in mutual consultation.

Article 19.

Changes in the dislocation of the armed forces referred to in article 1, with the exception of the modifications which are necessary for their shipment, shall take place exclusively in mutual consultation.

CHAPTER III.

SHIPMENT OF THE TROOPS OF THE ROYAL NETHERLANDS ARMY FROM INDONESIA.

Article 20.

After the transfer of sovereignty the Royal Netherlands Army shall be withdrawn from Indonesia within the shortest possible time.

Article 21.

To this end the Governments of the Kingdom of the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia shall cooperate to take advantage of all means available.

Article 22.

Should it become evident as the Netherlands Government regretfully foresees that lack of shipping or other technical difficulties will prevent the completion of the withdrawal within six months after the transfer of sovereignty, the Netherlands Government will gladly give the authorities of the Republic of the United States of Indonesia free access to details of the arrangements and endeavours of the Netherlands Government for the repatriation of the Royal Netherlands Army.

Article 23.

A joint technical committee shall be established to study the technical possibilities of repatriating the Royal Netherlands Army and ways and means of overcoming difficulties.

Article 24.

Under its terms of reference, and as anticipated by agreement in the memorandum of 22 June 1949, the United Nations Commission for Indonesia or its successor shall be in a position to assist.

CHAPTER IV.

REORGANIZATION OF THE LAND FORCES FORMED AND EQUIPPED BY OR UNDER THE AUTHORITY OF THE GOVERNMENT OF INDONESIA

(THE NETHERLANDS-INDONESIAN GOVERNMENT).

Article 25.

1. From the date of the transfer of sovereignty the officer commanding the armed forces referred to in article 1 shall be entrusted with the reorganization of the armed forces referred to in article 4. This reorganization shall have as its primary aim to afford the opportunity to eligible members of said forces to join as soon as possible the military forces of the Republic of the United States of Indonesia.

2. The word reorganization as used in this agreement, means reorganization in the sense of paragraph 1 of this article.

Article 26.

During the reorganization of the aforementioned armed forces the administrative and judicial powers which the Indonesian legislation in force before the transfer of sovereignty conferred on the High Commissioner of the Crown with regard to the armed forces referred to in article 4, shall be executed by or on behalf of the King of the Netherlands.

Article 27.

1. During the reorganization every endeavour shall be made in order that members of the armed forces referred to in article 4 join as far as possible unitwise the military forces of the Republic of the United States of Indonesia.

2. With regard to the transfer of maintenance services further regulations shall be established in mutual consultation.

Article 28.

1. Those units which prior to the transfer of sovereignty have been composed and prepared for this purpose by the commanding officers of the armed forces referred to in article 4 from members of said forces, shall become members of the military forces of the Republic of the United States of Indonesia the day after the transfer of sovereignty.

2. Other units thus formed shall be transferred as soon as they have been prepared for this purpose by the commanding officers of the armed forces referred to in article 4.

Article 29.

In effecting said reorganization the officer in command of the armed forces referred to in article 1 shall observe the directives jointly established by or on behalf of the Governments of the Netherlands and of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 30.

The officer in command of the armed forces referred to in article 1 and the officer in command of the military forces of the Republic of the United States of Indonesia shall jointly attend to the execution of this reorganization.

Article 31.

1. The reorganization shall take place within a period of six months from the day of the publication of the conditions of enlistment in the armed land forces of the Republic of the United States of Indonesia.

2. During this period the provisions concerning the legal status of the military personnel of the armed forces referred to in article 4, in force on the day preceding the transfer of sovereignty shall remain in force without any modification thereof without prejudice to the further provisions laid down in the present agreement.

3. In mutual consultation the Governments of the Kingdom of the Netherlands and of the Republic of the United States of Indonesia may determine that after the completion of the reorganization certain services or sections of services will be continued for the performance of certain tasks and for a definite period.

4. On completion of the reorganization the Royal Netherlands Indonesian Army shall cease to exist. If after the completion of the reorganization a further winding up of the armed forces referred to in article 4 proves necessary, the Governments of the Kingdom of the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia shall consult each other on this matter in good time.

Article 32.

After the transfer of sovereignty the military personnel of the armed forces referred to in article 4 shall be destined:

a. party to enter the service of the Republic of the United States of Indonesia;

b. partly to enter the service of the Kingdom of the Netherlands;

c. for the remainder to leave the services.

Article 33.

Acceptance of the arrangements referred to in the previous article under *a* and *b* shall be voluntary.

Article 34.

If members of the military personnel of the Royal Netherlands Indonesian Army enter the service either of the Republic of the United States of Indonesia or of the Kingdom of the Netherlands without any interruption, the period of service in the Royal Netherlands Indonesian Army shall be fully taken into account.

Article 35.

Without prejudice to the two preceding articles, the conditions required for entering the service referred to in article 32 sub a shall be laid down by the Government of the Republic of the United States of Indonesia and the conditions required for entering the service referred to in article 32 sub *b* shall be laid down by the Government of the Kingdom of the Netherlands. For joining the armed forces of the Republic of the United States of Indonesia Indonesian nationality is required.

Article 36.

Organizations or associations whose members are involved in the reorganization shall be afforded the opportunity to advocate the interests of their members.

Article 37.

Leaving the services involves discharge in conformity with the principles laid down in Chapter V.

CHAPTER V.

SOCIAL PROVISIONS.

Article 38.

The military personnel of the Royal Netherlands-Indonesian Army who do not enter the service either of the Kingdom of the Netherlands or of the Republic of the United States of Indonesia shall be discharged with due observance of the provisions mentioned hereinafter.

Article 39.

Those who are in permanent service and who, at the time of their discharge under the provisions in force on the day preceding the transfer of sovereignty are entitled to a pension, shall receive a pension computed in accordance with these provisions.

Article 40.

Those who are in permanent service and can derive no claim from the provisions of article 39, but who for the assesment of their pension have completed a period of service of fifteen years or more, shall receive a pension computed in accordance with the regulation laid down in the "Indonesisch Staatsblad" 1948, no. 13.

Article 41.

1. Those who have no claim based on the provisions of articles 39 and 40 shall receive non activity allowance computed in accordance with the provisions of the following paragraphs of this article.

2. This non activity allowance shall be paid during a period of two-fifths of the time served, on the understanding that it shall be enjoyed for at least one year and at most five years.

3. The sum to be paid monthly amounts to:

during the first six months 80%,
during the next twelve months 60%,
during the remaining months 40%

of the full pay last received or of the full pay which those concerned would receive in virtue of their period of service.

4. For the purpose of computing the non activity allowance for corporals, privates 1st class and privates 2nd class their monthly full pay is fixed ad ƒ 200, ƒ 160 and ƒ 140 respectively.

5. Should application of the arrangement set forth in the previous paragraphs of this article appear to be less profitable to the person concerned than application of the regulation set forth in article 42, he may demand that the latter regulation be applied to him.

Article 42.

1. Those who have been on short term contracts of service and have completed the period contracted for shall receive the payments to which they are entitled on the strength of the regulations effective on the day preceding the transfer of sovereignty.

2. Those who have not yet completed such service period shall receive the payments referred to in the first paragraph — in proportion to the period served — but increased by 20%.

Article 43.

The conscripts and reserve conscripts (reserveplichtigen) shall receive the payments and enjoy the special social provisions to which they are entitled on the strength of the regulations in force on the day preceding the transfer of sovereignty.

Article 44.

The special provisions effective on the day preceding the transfer of sovereignty, which apply to personnel leaving the military service, shall be carried out.

Article 45.

A cut may be applied in the case of cumulation of income to the proportional pensions referred to in article 40 and to the non activity allowance referred to in article 41, as agreed upon in the arrangement of the position of civil servants.
With regard to soldiers on pay (soldijgenietenden) a fair percentage shall be established for the computation of this cut.

Article 46.

1. Without prejudice to the provision in the second paragraph, the obligation to accept suitable civil employment may be imposed on those receiving proportional pensions or non activity allowance in accordance with this regulation.

2. The provision laid down in the first paragraph does not apply to those who have reached the age of 55.

Article 47.

1. At the date of the transfer of sovereignty civil servants, whether militarized or not, who are under the authority of the Department of War shall pass into the service of the Republic of the United States of Indonesia in accordance with the agreement on the position of officials employed at the civil departments.

2. However during the reorganization this personnel shall continue — as far as necessary — its work in the existing relation.

3. The militarized personnel shall be demilitarized as soon as possible, but at the latest immediately prior to their accepting a function with the Republic of the United States of Indonesia. Up to the moment of demilitarization this personnel shall remain subject to the regulations of the law on military penal procedure to the military penal law and to the law on military discipline applicable to them prior to the transfer of sovereignty.

CHAPTER VI.

TRANSFER OF MOVABLES AND IMMOVABLES IN USE WITH THE ROYAL NETHERLANDS INDONESIAN ARMY.

Article 48.

A plan shall be drawn up for the transfer of the movables and immovables in use with the Royal Netherlands Indonesian Army in mutual consultation between the Commander of the Netherlands forces and the Minister of Defence of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 49.

In drawing up this plan the following considerations shall be taken into account:

a. the safety of the forces of both parties;

b. the tasks to be performed by these forces;

c. the object to be attained, viz. that by a gradual transfer of all movables in use with the Netherlands Indonesian Army at the end of the reorganization period of the Royal Netherlands Indonesian Army all the movables and immovables in use with the Royal Netherlands Indonesian Army shall be transferred to the Republic of the United States of Indonesia.

Article 50.

The execution of the plan mentioned under article 48 is an object of common concern of both the Commander of the Netherlands forces in Indonesia and the Commander of the forces of the Republic of the United States of Indonesia. The Commander of the Netherlands forces in Indonesia shall be responsible for the movables and immovables in use with the Royal Netherlands Indonesian Army until their transfer.

CHAPTER VII.

FINANCE.

Article 51.

1. After the transfer of sovereignty the cost of the Royal Netherlands Army shall be borne by the Kingdom of the Netherlands.

2. Periodically the Government of the Republic of United States of Indonesia shall place at the disposal of the Commander of the Netherlands Army in Indonesia or of the authorities to be appointed by him the Indonesian currency required for payment of salaries etc. of the Royal Netherlands Army; the Government of the Republic of the United States of Indonesia shall also provide the means for feeding, lodging, clothing etc. of the Royal Netherlands Army. Afterwards the account of these expenses shall be settled between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia.

Article 52.

If and insofar as units of the Royal Netherlands Army and of the Netherlands Air Force (L.S.K.) render services to the Government of the Republic of United States of In-

donesia at the latter's request, the cost of these units during the period concerned shall be chargeable to the Republic of the United States of Indonesia in accordance with an arrangement, if possible previously to be agreed upon.

Article 53.

If and insofar as materiel belonging to the Royal Netherlands Army and the Netherlands Air Force at the request of the authorities appointed by the Government of the Republic of the United States of Indonesia is transferred to the Republic of the United States of Indonesia, the payment shall be arranged by mutual and as far as possible previous consultation.

Article 54.

1. The cost of the Royal Netherlands Indonesian Army during the period between the transfer of sovereignty and the completion of the reorganization shall be paid by the Republic of the United States of Indonesia.

2. The cost of pensions, non activity allowance, lumpsums (uitkeringen ineens) and other social of former personnel and personnel of the Royal Netherlands Indonesian Army shall be borne by the Republic of the United States of Indonesia.

Consequently insofar as members of the personnel of the Royal Netherlands Indonesian Army enter the service of the Netherlands Government, a settlement shall be made between the Governments of the Kingdom of the Netherlands and of the Republic of the United States of Indonesia in accordance with an arrangement to be agreed upon with regard to their acquired rights.

Those members of the Royal Netherlands Indonesian Army who have entered the service of the Royal Netherlands Indonesian Army since March 1942 and who do not acquire Indonesian nationality before the completion of the reorganization shall be exempted from the provisions laid down in this paragraph. The cost of the social provisions of those members of the Royal Netherlands Indonesian Army shall be borne by the Government of the Kingdom of the Netherlands.

3. During the period of reorganization the Government of the Republic of the Unted States of Indonesia shall periodically place at the disposal of the Commander of the Netherlands Armed Forces in Indonesia the funds he requires for the execution of this reorganization.

CHAPTER VIII.

EXECUTIVE REGULATIONS.

Article 55.

The supervision of the execution of the decisions taken at the Round Table Conference in the military field shall be exercised from the date of the transfer of sovereignty in a manner to be agreed upon in mutual consultation between both governments, without prejudice to the provisions concerning general supervision of the execution of the agreements reached at the Round Table Conference.

Article 56.

With regard to the execution of the present agreement the military authorities of the Kingdom of the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia shall cooperate in such a way as to ensure its expedient and complete implementation in the military technical field. For this purpose they shall make use of liaison officers.

III.

Regulations on the air forces in Indonesia under Netherlands command after the transfer of sovereignty.

Article 1.

As a consequence of the transfer of sovereignty, the Republic of the United States of Indonesia shall be exclusively responsible for the air protection in Indonesia.

Article 2.

The task of the air protection in the military sense is, by reason of the foregoing, therefor the task of the Air Force of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 3.

There shall be no further Netherlands task in Indonesia for the air forces under Netherlands command as a Netherlands instrument, for which reason the air forces referred to shall be withdrawn from Indonesia.

Article 4.

The Netherlands Government is prepared at the request of the Government of the Republic of the United States of Indonesia to render assistance by way of making available personnel and material insofar as the Republic of the United States of Indonesia is not yet sufficiently able to execute its tasks by own means. This assistance is to cease gradually.

Article 5.

The Netherlands Government is prepared at the request of the Republic of the United States of Indonesia to render assistance through a mission as a section of the Netherlands Military Mission in building up the Air Force of the Republic of the United States of Indonesia so that within the shortest possible time the Republic of the United States of Indonesia shall be able to execute its tasks with own means.

Article 6.

The assistance referred to in articles 4 and 5 may comprise:

a. assistance in building up and training the Air Force of the Republic of the United States of Indonesia;
b. offering opportunity for and assistance in the purchase maintenance and repairs of materiel;
c. personnel on behalf of the air traffic-control on aerodromes which are to be indicated later;
d. the execution of special tasks.

Article 7.

All provisions in recpect of assistance to be rendered as referred to in the articles 4 and 5, applicable to the forces of which the air forces are parts, shall as far as possible apply to the air forces in a corresponding manner.

Article 8.

All provisions in respect of the reorganization and withdrawal of the forces of which the air forces are parts, shall apply in a corresponding manner to the air forces, as far as these need not to be deviated from in view of the independent position of the Airforce of the Republic of the United States of Indonesia and the organic interwoveness of the parts of the Netherlands Air Forces (L.S.K.) in Indonesia and the Military Airforce of the Royal Netherlands-Indonesian Army. It shall be the aim to complete the reorganization of the air forces within six months after the transfer of sovereignty.

Article 9.

The safety of the Netherlands personnel, employed at airbases which are under command of the Republic of the United States of Indonesia shall be the responsibility of the Government of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 10.

Within a period of three months after the transfer of sovereignty, the Government of the Republic of the United States of Indonesia shall inform the Netherlands Government of the number and kind of personnel of the Netherlands air forces which it considers necessary for the tasks referred to in articles 4, 5 and 6.

Article 11.

All provisions for the take-over of personnel and materiel of the forces of which the air forces are parts, shall apply in a corresponding manner to the air forces.

In this respect the significant importance is pointer out of continued functionning in accordance with normal peace-time requirements of the airtraffic service on the aerodromes which will be considered necessary for the civil aviation of the Republic of the United States of Indonesia.

Furthermore it is to be observed that this take-over will be completed within the period referred to in article 8 paragraph 2.

NETHERLANDS DELEGATION
TO THE ROUND TABLE
CONFERENCE

Secretariat

No. 875

The Hague, 2 November 1949.

To the Chairmen of the Delegations of the Government of the Republic Indonesia and of the Federal Consultative Assembly.

Sirs,

I have the honour to inform you that the Netherlands Delegation to the Round Table Conference states that the following has been agreed upon by the Delegation to the Conference.

The clause in article 2 of the Draft Charter of Transfer of Sovereignty reading: „the status quo of the residency of New Guinea shall be maintained" means: „through continuing under the Government of the Netherlands".

I shall appreciate learning if you can agree to the foregoing.

I have the honour to be,

Your obedient servant,

J. H. VAN MAARSEVEEN.

Chairman of the Netherlands Delegation to the Round Table Conference.

DELEGATION OF THE REPUBLIC INDONESIA

F.C.A.-DELEGATION

No. 2/E.L.

The Hague, 2 November 1949.

Sir,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter and we can inform you that the Delegations of the Republic Indonesia and the Federal Consultative Assembly to the Round Table Conference state that the following has been agreed upon by the Delegations to the Conference.

The clause in article 2 of the Draft Charter of Transfer of Sovereignty reading: „the status quo of the residency of New Guinea shall be maintained" means: „through continuing under the Government of the Netherlands".

We have the honour to be,

Your obedient servants,

MOHAMMAD HATTA,
Chairman of the Republican Delegation to the Round Table Conference.

HAMID,
Chairman of the F.C.A.-Delegation to the Round Table Conference.

To the Chairman of the Netherlands Delegation to the Round Table Conference, The Hague.

NETHERLANDS DELEGATION
TO THE ROUND TABLE
CONFERENCE

Secretariat

No. 871

The Hague, 2 November 1949.

To the Chairmen of the Delegations of the Government of the Republic Indonesia and of the Federal Consultative Assembly.

Sirs,

I have the honour to inform you that the Netherlands Delegation to the Round Table Conference takes the view that the following has been agreed upon by the Delegations to the Conference.

The Netherlands can act as partner in the Union in and on behalf of the Kingdom of the Netherlands should the outcome of the continued consultation with Surinam and the Netherlands Antilles give cause thereto.

The status of the Kingdom of the Netherlands as a partner in the Union shall remain unaffected thereby.

I shall appreciate learning if you can agree to the foregoing.

I have the honour to be,

Your obedient servant,

J. H. VAN MAARSEVEEN.

Chairman of the Netherlands Delegation to the Round Table Conference.

DELEGATION OF THE
REPUBLIC INDONESIA

F.C.A.-
DELEGATION

No. 5/E.L.

The Hague, 2 November 1949.

Sir,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter and we can inform you that the Delegations of the Republic Indonesia and the Federal Consultative Assembly to the Round Table Conference take the view that the following has been agreed upon by the Delegations to the Conference.

The Netherlands can act as partner in the Union in and on behalf of the Kingdom of the Netherlands should the outcome of the continued consultation with Surinam and the Netherlands Antilles give cause thereto.

The status of the Kingdom of the Netherlands as a partner in the Union shall remain unaffected thereby.

We have the honour to be,

Your obedient servants,

MOHAMMAD HATTA,
Chairman of the Republican Delegation to the Round Table Conference.

HAMID,
Chairman of the F.C.A.-Delegation of the Round Table Conference.

To the Chairman of the Netherlands Delegation to the Round Table Conference, The Hague.

NETHERLANDS DELEGATION
TO THE ROUND TABLE
CONFERENCE

Secretariat

No. 844

The Hague, 2 November 1949.

To the Chairmen of the Delegations of the Government of the Republic Indonesia and of the Federal Consultative Assembly.

Sirs,

I have the honour to inform you that the Netherlands Delegation to the Round Table Conference takes the view that the following has been agreed upon by the Delegations to the Conference.

In mutual consultation, the Netherlands Government and the Government of the Republic of the United States of Indonesia shall establish regulations with regard to the tracing of graves of those who fell, as well as with regard to the exhumation, identification, registration and reburial of the remains of such persons.

Moreover, in mutual consultation, they shall establish regulations concerning the foundation, upkeep and maintenance of the field of honour of Peutjut at Kuta Radja and the fields of honour which are now being administered or laid out by the Army Graves Service in Indonesia.

I have the honour to be,

Your obedient servant,

J. H. VAN MAARSEVEEN.

Chairman of the Netherlands Delegation to the Round Table Conference.

DELEGATION OF THE REPUBLIC INDONESIA

F.C.A.-DELEGATION

No. 10/E.L.

The Hague, 2 November 1949.

Sir.

We have the honour to inform you that the Indonesian Delegations to the Round Table Conference take the view that the following has been agreed upon by the Delegations to the Conference.

In mutual consultation, the Netherlands Government and the Government of the Republic of the United States of Indonesia shall establish regulations with regard to the tracing of graves of those who fell, as well as with regard to the exhumation, identification, registration and reburial of the remains of such persons.

Moreover, in mutual consultation, they shall establish regulations concerning the foundation, upkeep and maintenance of the field of honour of Peutjut at Kuta Radja and the fields of honour which are now being administered or laid out by the Army Graves Service in Indonesia.

We have the honour to be,

Your obedient servants,

MOHAMMAD HATTA,
Chairman of the Republican Delegation to the Round Table Conference.

HAMID,
Chairman of the F.C.A.-Delegation of the Round Table Conference.

To the Chairman of the Netherlands Delegation to the Round Table Conference, The Hague.

NETHERLANDS DELEGATION
TO THE ROUND TABLE
CONFERENCE

Secretariat

No. 850

The Hague, 2 November 1949.

To the Chairmen of the Delegations of the Government of the Republic Indonesia and of the Federal Consultative Assembly.

Sirs,

I have the honour to inform you that the Netherlands Delegation to the Round Table Conference takes the view that the following has been agreed upon by the Delegations to the Conference.

a. Not until after the transfer of sovereignty can the composition and the definition of the tasks of the military missions to be exchanged by the partners of the Netherlands-Indonesian Union be regulated by the respective Governments in mutual consultation in accordance with article 7 of the draft agreement attached to the Draft Union Statute for the implementation of the articles 2 and 21 of the Statute referred to.

b. However as of the transfer of sovereignty referred to above a Netherlands military mission shall be active in Indonesia, the task of which mission shall be to assist in building up and training the forces of the Republic of the United States of Indonesia and further to act as advisers on matters of a military nature.

c. In view of the agreement under *b* and pending a regulation referred to under *a*, the Committee for Military Affairs to the Round Table Conference has drawn up a draft agreement on the Military Mission as represented hereinafter, to which agreement parties shall adhere until the regulation referred to under *a* shall have been established.

DRAFT AGREEMENT ON THE MILITARY MISSION.

CHAPTER I.

TASK AND DURATION.

Article 1.

The task of the Netherlands Military Mission shall be to assist the Government of the Republic of the United States of Indonesia in building up and training the forces of the Republic of the United States of Indonesia and to act as adviser on matters of a military nature.

Article 2.

The agreement is concluded for a period of three years, effective from the date of signing the present agreement unless previously terminated or extended in accordance with rules set forth hereinafter.

Article 3.

The two Governments shall consult each other at least one year before the expiration of the period referred to in article 2 concerning possible extension of stay of the mission or concerning possible alteration in the composition and tasks thereof.

Article 4.

The present agreement may be terminated before the expiration of the period referred to in article 2 or before the expiration of the extension agreed upon in accordance with article 3, by means of notification in writing from one of the two Governments whereby a term of notice of six months shall be observed.

Article 5.

Upon the initiative of one of the two Governments the present agreement may be terminated immediately and unconditionally, should either Government be involved in internal disturbances or external hostilities or for reasons of general interest to the Kingdom of the Netherlands or to the Republic of the United States of Indonesia.

CHAPTER II.
COMPOSITION.

Article 6.

The Netherlands Military Mission shall form a single entity; it shall comprise a naval section, an army section and an air force section.

Article 7.

The Government of the Republic of the United States of Indonesia shall inform the Government of the Kingdom of the Netherlands of its desires regarding the composition of the Military Mission in connection with the tasks to be carried out by said Mission, whereupon the composition shall be determined by the two Governments in mutual consultation.

Article 8.

Alterations in the composition of the Military Mission shall not be made except by mutual consultation of the two Governments.

Article 9.

Any member of the Military Mission may be relieved of his membership at any time by the Government of the Kingdom of the Netherlands, the Government of the Kingdom of the Netherlands undertaking to provide a substitute member.

CHAPTER III.
ACTIVITIES AND RANKS.

Article 10.

The personnel of the Military Mission shall carry out instructions on the nature of which and the manner of carrying out agreement exists between the Minister of Defence of the Republic of the United States of Indonesia and the Head of the Military Mission.

Article 11.

On subjects which might prove or may be expected to bear a political character, consultations shall be held between the

Government of the Republic of the United States of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands.

Article 12.

Each member of the Mission shall carry out his duties in the Mission in the rank he holds with the forces of the Kingdom of the Netherlands and shall wear the prescribed Netherlands uniform and distinctives pertaining thereto.

Article 13.

The members of the Mission shall remain personnel of the Netherlands forces and in consideration thereof remain bound to their obligations towards the Kingdom of the Netherlands.

Article 14.

Within the scope of the fulfilment of their task, the members of the Military Mission shall be obliged to follow the directives and instructions of the competent military authorities, respectively for the navy, army and air force, of the Republic of the United States of Indonesia and as such shall be responsible to the Government of the Republic of the United States of Indonesia through the intermediary of the Head of the Military Mission.

Article 15.

The members of the Military Mission shall as much as possible be organized in groups.

The competent military authorities of the Republic of the United States of Indonesia shall consult the senior officer of each group concerning the directives and instructions within the scope of the fulfilment of their task.

Article 16.

The members of the Military Mission shall be entitled to all the honours and privileges which the laws and regulations concerning the forces of the Republic of the United States of Indonesia grant to personnel of a corresponding rank.

Article 17.

Members of the military personnel belonging to the Military Mission shall be subject to the Netherlands law on Military Penal Procedure and to Netherlands Military Penal Law, Netherlands Law on Military Discipline and further to Indonesian common Penal Law insofar as military penal law referred to above contains no regulations.

The Law on Military Discipline shall be applied by or on behalf of the Head of the Military Mission. At their request the Indonesian Authorities shall be informed which dispositions have been made in respect of serious offences committed by the military personnel referred to, whereby the interest of the Republic of the United States of Indonesia or of its subjects are concerned.

Article 18.

Diplomatic immunity shall be enjoyed by the Head of the Military Mission and by some members of the Mission to be designated in consultation with the Government of the Republic of the United States of Indonesia.

CHAPTER IV.

FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE PROVISIONS.

Article 19.

1. The members of the Military Mission shall fall under the financial and administrative management of the Netherlands.

2. The cost of the Mission composed in accordance with articles 6, 7, 8 and 9, and of the tasks performed by the Mission as agreed upon in accordance with articles 10 and 11, shall be borne by the Republic of the United States of Indonesia.

3. The Government of the Republic of the United States of Indonesia shall periodically put the necessary funds at the disposal of the Head of the Netherlands Military Mission on the basis of a yearly cash-budget drawn up by the Head of that Mission and approved by the Government of the

Republic of the United States of Indonesia. The foreign currency required for the expenditure of the Mission shall also be made available periodically and on the basis of a yearly foreign currency budget drawn up by the Head of the Mission and approved by the Government of the Republic of the United States of Indonesia.

If necessary alterations in the cash-budget respectively the foreign currency budget can be proposed by the Head of the Mission.

Article 20.

1. The financial position of the personnel of the Military Mission shall be subject to Netherlands regulations. Insofar as these regulations refer particularly to the service of Netherlands military personnel in the Netherlands Military Mission, they shall be maintained, respectively introduced or altered after consultation with the Republic of the United States of Indonesia.

2. Article 19, paragraph 2, in respect of salaries and emoluments, shall be effective from the day of departure from the Netherlands for members of the Military Mission and shall prevail until the day of arrival in the Netherlands after termination of service in the Military Mission, and eventually thereafter until the day of termination of each leave to which the members of the Mission are entitled as a consequence of the attachment to the Military Mission.

3. The second paragraph of article 19 shall also be applicable to cost of transport of personnel and of their families from the Netherlands to Indonesia and back.

4. Expences for travelling in ships and airplanes of the Royal Netherlands Navy will not be charged.

Article 21.

1. Members of the Mission shall be exempt from taxes of the Republic of the United States of Indonesia in accordance with an arrangement to be made between the two partners, which arrangement shall be drawn up in analogy with the internationally usual arrangements in this respect.

2. A similar arrangement shall be made regarding import and export duties and other taxes and excises levied on certain goods intended for or in use of the Mission.

3. Should a member of the Mission die, his succession shall be arranged fiscally as if he had died in the Netherlands.

Article 22.

The Government of the Republic of the United States of Indonesia shall grant travel and hotel allowances for tours of duty within the jurisdiction of the Republic of the United States of Indonesia, such tours of duty to be made in accordance with the provisions for accomodation also applicable to military personnel in the service of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 23.

In case of death of one of the members of the Military Mission or of one of the members of the family of a member of the Military Mission, if the family of the deceased desires that the deceased be transported to the Netherlands, the Republic of the United States of Indonesia shall bear the cost of and render assistance in such transport.

CHAPTER V.

SPECIAL PROVISIONS.

Article 24.

The Government of the Republic of the United States of Indonesia shall extend proper facilities to the members of the Military Mission.

Article 25.

Any reference in this agreement made to families shall apply to wife and children only.

Article 26.

The members of the Military Mission shall be entitled to an annual leave of one month.

Any unused part of said leave shall be cumulative from year to year during the period of attachment in the Military Mission.

Without prejudice to the general facilities prevailing for military personnel regarding the use of public conveyances, travelling expenses during leave shall not be borne by the Republic of the United States of Indonesia.

Article 27.

The Head of the Military Mission shall grant leave as referred to in article 26, taking into account the interests of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 28.

The Government of the Republic of the United States of Indonesia shall provide for complete and proper medical care of the members of the Military Mission and their families.

Article 29.

Members of the Military Mission who, on account of ill health are unable to carry out their duties for any length of time shall be replaced.

I have the honour to be,

Your obedient servant,

J. H. VAN MAARSEVEEN.

Chairman of the
Netherlands Delegation to the
Round Table Conference.

Nr 2, 1950

DELEGATION OF THE
REPUBLIC INDONESIA

F.C.A.-
DELEGATION

No. 11/E.L.

The Hague, 2 November 1949.

Sir,

We have the honour to inform you that the Indonesian Delegations to the Round Table Conference take the view that the following has been agreed upon by the Delegations to the Conference.

a. Not until after the transfer of sovereignty can the composition and the definition of the tasks of the military missions to be exchanged by the partners of the Netherlands-Indonesian Union be regulated by the respective Governments in mutual consultation in accordance with article 7 of the draft agreement attached to the Draft Union Statute for the implementation of the articles 2 and 21 of the Statute referred to.

b. However as of the transfer of sovereignty referred to above a Netherlands military mission shall be active in Indonesia, the task of which mission shall be to assist in building up and training the forces of the Republic of the United States of Indonesia and further to act as advisers on matters of a military nature.

c. In view of the agreement under *b* and pending a regulation referred to under *a*, the Committee for Military Affairs to the Round Table Conference has drawn up a draft agreement on the Military Mission as represented hereinafter, to which agreement parties shall adhere until the regulation referred to under *a* shall have been established.

To the Chairman of the Netherlands Delegation
to the Round Table Conference,
The Hague.

DRAFT AGREEMENT ON THE MILITARY MISSION.

CHAPTER I.

TASK AND DURATION.

Article 1.

The task of the Netherlands Military Mission shall be to assist the Government of the Republic of the United States of Indonesia in building up and training the forces of the Republic of the United States of Indonesia and to act as adviser on matters of a military nature.

Article 2.

The agreement is concluded for a period of three years, effective from the date of signing the present agreement unless previously terminated or extended in accordance with rules set forth hereinafter.

Article 3.

The two Governments shall consult each other at least one year before the expiration of the period referred to in article 2 concerning possible extension of stay the mission or concerning possible alteration in the composition and tasks thereof.

Article 4.

The present agreement may be terminated before the expiration of the period referred to in article 2 or before the expiration of the extension agreed upon in accordance with article 3, by means of notification in writing from one of the two Governments whereby a term of notice of six months shall be observed.

Article 5.

Upon the initiative of one of the two Governments the present agreement may be terminated immediately and unconditionally, should either Government be involved in internal disturbances or external hostilities or for reasons of general interest to the Kingdom of the Netherlands or to the Republic of the United States of Indonesia.

CHAPTER II.
COMPOSITION.

Article 6.

The Netherlands Military Mission shall form a single entity; it shall comprise a naval section, an army section and an air force section.

Article 7.

The Government of the Republic of the United States of Indonesia shall inform the Government of the Kingdom of the Netherlands of its desires regarding the composition of the Military Mission in connection with the tasks to be carried out by said Mission, whereupon the composition shall be determined by the two Governments in mutual consultation.

Article 8.

Alterations in the composition of the Military Mission shall not be made except by mutual consultation of the two Governments.

Article 9.

Any member of the Military Mission may be relieved of his membership at any time by the Government of the Kingdom of the Netherlands, the Government of the Kingdom of the Netherlands undertaking to provide a substitute member.

CHAPTER III.
ACTIVITIES AND RANKS.

Article 10.

The personnel of the Military Mission shall carry out instructions on the nature of which and the manner of carrying out agreement exists between the Minister of Defence of the Republic of the United States of Indonesia and the Head of the Military Mission.

Article 11.

On subjects which might prove or may be expected to bear a political character, consultations shall be held between the Government of the Republic of the United States of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands.

Article 12.

Each member of the Mission shall carry out his duties in the Mission in the rank he holds with the forces of the Kingdom of the Netherlands and shall wear the prescribed Netherlands uniform and distinctives pertaining thereto.

Article 13.

The members of the Mission shall remain personnel of the Netherlands forces and in consideration thereof remain bound to their obligations towards the Kingdom of the Netherlands.

Article 14.

Within the scope of the fulfilment of their task, the members of the Military Mission shall be obliged to follow the directives and instructions of the competent military authorities, respectively for the navy, army and air force, of the Republic of the United States of Indonesia and as such shall be responsible to the Government of the Republic of the United States of Indonesia through the intermediary of the Head of the Military Mission.

Article 15.

The members of the Military Mission shall as much as possible be organized in groups.

The competent military authorities of the Republic of the United States of Indonesia shall consult the senior officer of each group concerning the directives and instructions within the scope of the fulfilment of their task.

Article 16.

The members of the Military Mission shall be entitled to all the honours and privileges which the laws and regulations concerning the forces of the Republic of the United States of Indonesia grant to personnel of a corresponding rank.

Article 17.

Members of the military personnel belonging to the Military Mission shall be subject to the Netherlands law on Mili-

tary Penal Procedure and to Netherlands Military Penal Law, Netherlands Law on Military Discipline and further to Indonesian common Penal Law insofar as military penal law referred to above contains no regulations.

The Law on Military Discipline shall be applied by or on behalf of the Head of the Military Mission. At their request the Indonesian Authorities shall be informed which dispositions have been made in respect of serious offences committed by the military personnel referred to, whereby the interests of the Republic of the United States of Indonesia or of its subjects are concerned.

Article 18.

Diplomatic immunity shall be enjoyed by the Head of the Military Mission and by some members of the Mission to be designated in consultation with the Government of the Republic of the United States of Indonesia.

CHAPTER IV.

FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE PROVISIONS.

Article 19.

1. The members of the Military Mission shall fall under the financial and administrative management of the Netherlands.

2. The cost of the Mission composed in accordance with articles 6, 7, 8 and 9, and of the tasks performed by the Mission as agreed upon in accordance with articles 10 and 11, shall be borne by the Republic of the United States of Indonesia.

3. The Government of the Republic of the United States of Indonesia shall periodically put the necessary funds at the disposal of the Head of the Netherlands Military Mission on the basis of a yearly cash-budget drawn up by the Head of that Mission and approved by the Government of the Republic of the United States of Indonesia. The foreign currency required for the expenditure of the Mission shall also be made available periodically and on the basis of a yearly foreign currency budget drawn up by the Head of te Mission and approved by the Government of the Republic of the United States of Indonesia.

If necessary alterations in the cash-budget respectively the foreign currency budget can be proposed by the Head of the Mission.

Article 20.

1. The financial position of the personnel of the Military Mission shall be subject to Netherlands regulations. Insofar as these regulations refer particularly to the service of Netherlands military personnel in the Netherlands Military Mission, they shall be maintained, respectively introduced or altered after consultation with the Republic of the United States of Indonesia.

2. Article 19, paragraph 2, in respect of salaries and emoluments, shall be effective from the day of departure from the Netherlands for members of the Military Mission and shall prevail until the day of arrival in the Netherlands after termination of service in the Military Mission, and eventually thereaftes until the day of termination of each leave to which the members of the Mission are entitled as a consequense of the attachment to the Military Mission.

3. The second paragraph of article 19 shall also be applicable to cost of transport of personnel and of their families from the Netherlands to Indonesia and back.

4. Expences for travelling in ships and airplanes of the Royal Netherlands Navy will not be charged.

Article 21.

1. Members of the Mission shall be exempt from taxes of the Republic of the United States of Indonesia in accordance with an arrangement to be made between the two partners, which arrangement shall be drawn up in analogy with the internationally usual arrangements in this respect.

2. A similar arrangement shall be made regarding import and export duties and other taxes and excises levied on certain goods intended for or in use of the Mission.

3. Should a member of the Mission die, his succession shall be arranged fiscally as if he had died in the Netherlands.

Article 22.

The Government of the Republic of the United States of Indonesia shall grant travel and hotel allowances for tours of duty within the juridisdiction of the Republic of the United States of Indonesia, such tours duty to be made in accordance with the provisions for accomodation also applicable to military personnel in the service of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 23.

In case of death of one of the members of the Military Mission or of one of the members of the family of a member of the Military Mission, if the family of the deceased desires that the deceased be transported to the Netherlands, the Republic of the United States of Indonesia shall bear the cost of and render assistance in such transport.

CHAPTER V.

SPECIAL PROVISIONS.

Article 24.

The Government of the Republic of the United States of Indonesia shall extend proper facilities to the members of the Military Mission.

Article 25.

Any reference in this agreement made to families shall apply to wife and children only.

Article 26.

The members of the Military Mission shall be entitled to an annual leave of one month.

Any unused part of said leave shall be cumulative from year to year during the period of attachment in the Military Mission.

Without prejudice to the general facilities prevailing for military personnel regarding the use of public conveyances, travelling expenses during leave shall not be borne by the Republic of the United States of Indonesia.

Article 27.

The Head of the Military Mission shall grant leave as referred to in article 26, taking into account the interests of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 28.

The Government of the Republic of the United States of Indonesia shall provide for complete and proper medical care of the members of the Military Mission and their families.

Article 29.

Members of the Military Mission who, on account of ill health are unable to carry out their duties for any length of time shall be replaced.

We have the honour to be,

Your obedient servants,

MOHAMMAD HATTA,

Chairman of the Republican Delegation to the Round Table Conference.

HAMID,

Chairman of the F.C.A.-Delegation to the Round Table Conference.

NETHERLANDS DELEGATION TO THE ROUND TABLE CONFERENCE

Secretariat

No. 848

The Hague, 2 November 1949.

To the Chairmen of the Delegations of the Government of the Republic Indonesia and of the Federal Consultative Assembly.

Sirs,

I have the honour to inform you that the Netherlands Delegation to the Round Table Conference takes the view that the following has been agreed upon by the Delegations to the Conference.

With reference to the agreement entered into by the parties, in which inter alia the period for the withdrawal from Indonesia of the Royal Netherlands Navy has been fixed at one year, the Chairmen of the two Indonesian Delegations confirm their agreement with the Chairman of the Netherlands Delegation that immediately after transfer of sovereignty discussions will be initiated between the Government of the Republic of the United States of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands on the maritime contribution to be made by the Netherlands to the Republic of the United States of Indonesia on the basis of articles 4 and 5 of the draft agreement for the implementation of articles 2 and 21 of the Draft Union Statute.

The Delegations of the Republic Indonesia and of the Federal Consultative Assembly are convinced of the necessity of such discussions. They realize that for technical reasons it will not be possible for the Netherlands to give the assistance referred to in article 3 of the draft agreement for the implementation of articles 2 and 21 of the Draft Union Sta-

tute for a period longer than one year should the above discussions not result in an agreement at the latest four months after transfer of sovereignty.

I have the honour to be,

Your obedient servant,

J. H. VAN MAARSEVEEN.

Chairman of the Netherlands Delegation to the Round Table Conference.

DELEGATION OF THE
REPUBLIC INDONESIA

No. 12/E.L.

F.C.A.-
DELEGATION

The Hague, 2 November 1949.

Sir,

We have the honour to inform you that the Indonesian Delegations to the Round Table Conference take the view that the following has been agreed upon by the Delegations to the Conference.

With reference to the agreement entered into by the parties, in which inter alia the period for the withdrawal from Indonesia of the Royal Netherlands Navy has been fixed at one year, the Chairmen of the two Indonesian Delegations confirm their agreement with the Chairman of the Netherlands Delegation that immediately after transfer of sovereignty discussions will be initiated between the Government of the Republic of the United States of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands on the maritime contribution to be made by the Netherlands to the Republic of the United States of Indonesia on the basis of articles 4 and 5 of the draft agreement for the implementation of articles 2 and 21 of the Draft Union Statute.

The Delegations of the Republic Indonesia and of the Federal Consultative Assembly are convinced of the necessity of such discussions. They realize that for technical reasons it will not be possible for the Netherlands to give the assistance referred to in article 3 of the draft agreement for the implementation of articles 2 and 21 of the Draft Union Statute for a period longer than one year should the above dis-

cussions not result in an agreement at the latest four months after transfer of sovereignty.

We have the honour to be,

Your obedient servants,

MOHAMMAD HATTA,
Chairman of the Republican Delegation to the Round Table Conference.

HAMID,
Chairman of the F.C.A.-Delegation to the Round Table Conference.

To the Chairman of the Netherlands Delegation to the Round Table Conference,
The Hague.

NETHERLANDS DELEGATION TO THE ROUND TABLE CONFERENCE

Secretariat

No. 847

The Hague, 2 November 1949.

To the Chairmen of the Delegations of the Government of the Republic Indonesia and of the Federal Consultative Assembly.

Sirs,

I have the honour to inform you that agreement has also been reached at the conclusion of the Financial and Economic Agreement, on the following six points:

1. The Government of the Republic of the United States of Indonesia recognizes the special position of former government personnel of Indonesia and of their surviving relatives and undertakes to continue the present treatment of said categories of persons after the transfer of sovereignty.

The provisions of the preceding paragraph involve that payment of pensions of former government personnel of Indonesia and payments to their surviving relatives, as far as such personnel or surviving relatives are domiciled in the Netherlands, shall be effected in Netherlands currency with the understanding that negotiations be undertaken not later than March 1950, in order to arrive at an equitable solution. The present practice shall remain in force until agreement is reached.

2. Should the International Monetary Fund request direct information from the Republic of the United States of Indonesia after the transfer of sovereignty but before the Republic of the United States of Indonesia has acquired membership to that Fund, or should the Fund desire to

make an investigation, the Republic of the United States of Indonesia will submit the information and permit the investigation requested, if and inasfar as this is required under the rules of procedure for the consideration of applications for membership to the Fund.

3. In respect of the HG-credit, it is agreed that the prevailing regulation be continued until a new regulation shall have been made in agreement between the two parties. Consultation to this effect shall be entered into as soon as possible. Serious efforts will be made to complete the consultation before the end of March 1950.

4. The General Shipping Agreement, including the Appendices pertaining thereto for the implementation thereof, shall continue in force until the end of March 1950, on the understanding that wherever the present regulations provide for unilateral decisions by one of the parties, such decisions shall be made by the two parties in mutual agreement. Negotiations to revise this agreement shall be undertaken as soon as possible.

5. The arrangements regarding foreign exchange regulations made within the framework of the ,,Coördinatie-College Nederland-Indonesië" — whereby reference is made to the attached Chapters XI, XIII and XIV of the Summary of Conclusions of said Coördinatie-College, Financial Sector — remain in force as long as they are not modified in mutual consultation between the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia. Said consultation shall take place in the first quarter of 1950.

6. After the transfer of sovereignty, means will be created for the purpose of a practical operation with regard to the cooperation in trade policy.

I shall appreciate learning if you can agree to the foregoing.

I have the honour to be,

Your obedient servant,

J. H. VAN MAARSEVEEN.

Chairman of the
Netherlands Delegation to the
Round Table Conference.

APPENDIX referred to in point 5 of the letter of the Chairman of the Netherlands Delegation to the Round Table Conference of 2 November 1949, no. 847, and of the letter of the Chairmen of the Delegations of the Republic Indonesia and of the Federal Consultative Assembly of 2 November 1949, no. 8/E.L.

Chapters XI, XIII and XIV of the Summary of the Conclusions of the Coördinatie-College, Financial Sector.

HOOFSTUK XI

DEVIEZENINGEZETENSCHAP EN DEVIEZENRECHTELIJK EIGENDOM VAN VERMOGENSWAARDEN.

Paragraaf 1.

Deviezeningezetenschap.

1. Onder „ingezetenen" wordt verstaan:

a. natuurlijke personen, die hun woonplaats in het binnenland hebben, dan wel gewoonlijk aldaar verblijven;

b. rechtspersoon en vennootschappen, die in het binnenland zijn gevestigd of worden bestuurd dan wel — in nader door De Nederlandsche Bank respectievelijk het Deviezeninstituut voor Indonesië te bepalen gevallen —, aldaar kantoor houden;

c. filialen, bijkantoren en bedrijven in het binnenland van een niet-ingezetene, ongeacht of zij al dan niet rechtspersoonlijkheid bezitten.

2. Onder „niet-ingezetenen" wordt verstaan:

a. natuurlijke en rechtspersonen en vennootschappen, niet vallende onder de omschrijving „ingezetenen";

b. filialen, bijkantoren en bedrijven in het buitenland van een ingezetene, ongeacht of zij al dan niet rechtspersoonlijkheid bezitten, tenzij zij in het binnenland worden bestuurd.

3. Het deviezeningezetenschap van natuurlijke personen, woonachtig in Nederland respectievelijk Indonesië wordt als

regel geacht te zijn verkregen of te zijn verloren gegaan na verblijf van 1 jaar in het binnenland respectievelijk het andere gebiedsdeel, tenzij reeds dadelijk of na enige tijd als zeker kan worden aangenomen, dat dit verblijf langer dan één jaar zal duren, in welk geval het ingezetenschap ingaat of eindigt op het moment, dat zulks als zeker wordt aangenomen. In twijfelgevallen zal De Nederlandsche Bank respectievelijk het Deviezeninstituut voor Indonesië zelfstandig een beslissing nemen ten aanzien van het ingezetenschap van personen afkomstig uit Indonesië respectievelijk Nederland, van welke beslissing beide instanties elkaar terstond mededeling zullen doen.

Paragraaf 2.

Beschikkingsrecht over vermogenswaarden luidende in Nederlands en Indonesisch courant.

1. Nederland en Indonesië zien af van vordering van niet-commerciële vermogenswaarden luidende in Indonesisch respectievelijk Nederlands courant.

2. Indonesië staat aan natuurlijke personen, deviezeningezetenen van Indonesië, toe te beschikken over de hun toebehorende vermogenswaarden in Nederland. Nederland zal zoveel mogelijk hieraan medewerken door het doen verlenen van de nodige vergunningen.

Paragraaf 3.

Deviezenrechtelijk eigendom van vermogenswaarden van filialen enz. in het andere gebiedsdeel.

1. Zonder ten aanzien van de vraag, welke vermogenswaarden als behorende aan de in het ene gebiedsdeel gevestigde filialen, bijkantoren of bedrijven van ingezetenen van het andere gebiedsdeel dienen te worden beschouwd en derhalve tot de deviezenhuishouding van het ene gebiedsdeel dienen te worden gerekend, een principiële formule op te stellen, wordt om practische redenen de volgende werkbasis aanvaard:

a. als vermogenswaarde van een in Indonesië gevestigd filiaal, bijkantoor of bedrijf van een ingezetene van Nederland worden beschouwd de per 10 Mei 1940 aan bedoeld filiaal, bijkantoor of bedrijf voor de directe

bedrijfsuitoefening ter beschikking staande vermogenswaarden, alsmede alle waarden welke sedertdien door deze bedrijfsuitoefening in Indonesië zijn of worden verkregen, voorzover niet deze vermogenswaarden in overeenstemming met de Indonesische deviezenvoorschriften ter beschikking van de ingezetene van Nederland zijn gesteld;

b. als vermogenswaarden van een in Nederland gevestigd filiaal, bijkantoor of bedrijf van een ingezetene van Indonesië worden beschouwd de per 10 Mei 1940 aan bedoeld filiaal, bijkantoor of bedrijf voor de directe bedrijfsuitoefening ter beschikking staande vermogenswaarden alsmede alle waarden, welke sindsdien door deze bedrijfsuitoefening in Nederland zijn of worden verkregen, voorzover niet deze vermogenswaarden in overeenstemming met de Nederlandse deviezenvoorschriften ter beschikking van de ingezetene van Indonesië zijn gesteld.

2. Ingeval de toepassing van de onder 1 vermelde werkbasis tot aperte onbillijkheden zou leiden, zullen De Nederlandsche Bank en het Deviezeninstituut voor Indonesië in onderling overleg van geval tot geval een beslissing nemen.

Paragraaf 4.

Deviezenrechtelijk eigendom van vermogenwaarden en bedrijfsresultaten van filialen, bijkantoren enz. buiten Nederland en Indonesië.

1. Ten aanzien van de verdeling tussen Nederland en Indonesië van vermogenswaarden belegd in filialen en bijkantoren buiten deze gebiedsdelen, zomede van de netto bedrijfsresultaten in deviezen, die sedertdien uit deze beleggingen zijn voortgekomen, zal het in paragraaf 3 vastgelegde zogenaamde 10 Mei-criterium van kracht zijn. Deze regel valt te formuleren door in de in genoemde paragraaf 3 weergegeven conclusie onder lid 1, sub a en sub b achter „welke sedertdien door deze bedrijfsuitoefening in Indonesië (respectievelijk Nederland)" toe te voegen: „of in het buitenland".

2. Wanneer op grond van de in lid 1 vermelde werkbasis vastgesteld is, dat bepaalde zich in het buitenland bevindende, vermogenswaarden tot het Indonesische deviezenver-

mogen behoren, zal worden nagegaan, of er voor Nederland aanleiding bestaat, dat Indonesisch belang over te nemen tegen restitutie van de daarvoor uitgelegde deviezen c.q. de waarde der investatie. Deze aanleiding wordt verondersteld aanwezig te zijn, wanneer het object buiten de Indonesische economische sfeer is gelegen, ofschoon dit voor Nederland geenszins een verplichting tot overname inhoudt. Elk geval zal op zijn eigen mérites worden bezien. Indonesië is daarbij bereid om in nader overleg verrekening in vreemde valuta uit te stellen, indien de deviezenpositie van Nederland zulks wenselijk maakt.

Paragraaf 5.

Positie handelshuizen in Japan.

1. Er zal naar worden gestreefd dat de met de betrokken Amerikaanse autoriteiten te treffen regelingen ruimte laten voor eventuele vestiging van Nederlandse handelshuizen, al dan niet in het kader van een trustmaatschappij.

2. Op grond van het feit, dat de in Japan te vestigen handelshuizen feitelijk als aan- en verkoopkantoren van in Indonesië gevestigde handelshuizen moeten worden beschouwd, zullen voor zover ten behoeve van hun oprichting en instandhouding door Indonesië deviezen zijn verstrekt, deze huizen, zolang deze factoren gelden, tot het deviezenvermogen van Indonesië behoren.

HOOFDSTUK XIII.

FINANCIERING VAN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN IN INDONESIE DOOR NEDERLAND OF DOOR INDONESIE.

1. De financiering van Indonesische dochtermaatschappijen van Nederlandse ondernemingen dient achtereenvolgens op de volgende wijze te geschieden:

a. door aanwending van de saldi in Indonesië;

b. door financiering door Indonesische banken met korte bedrijfscredieten en met langere bedrijfscredieten tegen in Indonesië aanwezig onderpand in de mate, waarin dit ook reeds vóór 1940 placht te geschieden en/of door transfer uit Nederland ten laste van de moedermaatschappijen.

2. Nederland zal van Overheidswege aan de uitvoering van deze bepaling steun verlenen door in voorkomende gevallen moedermaatschappijen, die niet bereid zijn tot investering over te gaan, daartoe aan te sporen.

3. In beginsel zal tegenover buitenlandse maatschappijen dezelfde als in lid 1 genoemde gedragslijn worden gevolgd.

4. Erkend wordt, dat in zeer bijzondere gevallen afwijkingen van de hoofdregel noodzakelijk kunnen zijn, met name indien de moedermaatschappij weigerachtig blijft te investeren en het betrokken bedrijf voor Indonesië van vitaal belang is.

HOOFDSTUK XIV.

EFFECTENVERKEER INDONESIË—NEDERLAND.

Paragraaf 1.

Obligaties met pari-clausule.

Wat betreft de mogelijkheid tot opzending naar Nederland van obligaties met pari-clausule is bepaald dat:

a. de nog niet uitbetaalde lossingen en achterstallige coupons uitsluitend in Indonesië betaalbaar zijn, terwijl de overmaking van deze gelden geschiedt binnen het kader van het transfer-schema;

b. met betrekking tot de nog aanwezige obligaties onderscheid wordt gemaakt tussen:

1. obligaties, die het eigendom zijn van niet-Indonesische deviezeningezetenen;

2. obligaties, die het eigendom zijn van Indonesische deviezeningezetenen;

3. obligaties, die het eigendom zijn van Indonesische deviezeningezetenen, rechtspersonen;

Waarbij als regel is aanvaard, dat voor de opzending naar Nederland van de sub 1 en sub 2 bedoelde stukken onvoorwaardelijke vergunning wordt verleend, van de sub 3 bedoelde stukken in het algemeen geen vergunning zal worden verleend.

Daarbij wordt aangetekend, dat genoemde faciliteit voor zover zij natuurlijke personen betreft, uitsluitend zal gelden voor de oorspronkelijke houders van de obligatiën.

Paragraaf 2.

Buitenlandse effecten van Indonesische ingezetenen.

1. Het is in het kader van de samenwerking tussen Nederland en Indonesië uitermate gewenst, dat de Nederlandse banken zoveel mogelijk medewerking verlenen aan de uitvoering van de Indonesische deviezenbepalingen, hetgeen o.a. inhoudt, dat bij het beschikken over buitenlandse effecten door een Indonesische ingezetene, de bank, waar deze effecten in depôt liggen, aan genoemd persoon vraagt de vergunning van het Deviezeninstituut voor Indonesië over te leggen.

2. Hoewel De Nederlandsche Bank de Nederlandse bankinstellingen niet tot deze medewerking kan verplichten, is zij bereid gevonden aan de Nederlandse bankinstellingen een mededeling hieromtrent te doen uitgaan. Mocht desondanks het nagestreefde doel niet worden bereikt, dan zal het Deviezeninstituut voor Indonesië tot concentrering van alle buitenlandse effecten van Indonesische ingezetenen ten name van deviezenbanken in Indonesië overgaan.

3. Bij verkoop van buitenlandse effecten, liggend in een depôt bij een bank in Nederland, door een Indonesisch ingezetene, zal de overdracht van de buitenlandse valuta door Nederland aan Indonesië plaats vinden tegen betaling door Indonesië ten laste van de F- respectievelijk C-rekening, zodat de Indonesische ingezetene afrekening in Nederlands courant ontvangt.

DELEGATION OF THE
REPUBLIC INDONESIA

F.C.A.-
DELEGATION

No. 8/E.L.

The Hague, 2 November 1949.

Sir,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date reading as follows:

„I have the honour to inform you that agreement has also been reached at the conclusion of the Financial and Economic Agreement, on the following six points:

1. The Government of the Republic of the United States of Indonesia recognizes the special position of former government personnel of Indonesia and of their surviving relatives and undertakes to continue the present treatment of said categories of persons after the transfer of sovereignty.

The provisions of the preceding paragraph involve that payment of pensions of former government personnel of Indonesia and payments to their surviving relatives, as far as such personnel or surviving relatives are domiciled in the Netherlands, shall be effected in Netherlands currency with the understanding that negotiations be undertaken not later than March 1950, in order to arrive at an equitable solution. The present practice shall remain in force until agreement is reached.

2. Should the International Monetary Fund request direct information from the Republic of the United States of Indonesia after the transfer of sovereignty but before the Republic of the United States of Indonesia has acquired membership to that Fund, or should the Fund desire to make an investigation, the Republic of the United States of Indonesia will submit the information and permit the investigation requested, if and inasfar as this is required under the rules of procedure for the consideration of applications for membership to the Fund.

3. In respect of the HG-credit, it is agreed that the prevailing regulation be continued until a new regulation shall have been made in agreement between the two parties. Consultation to this effect shall be entered into as soon as possible. Serious efforts will be made to complete the consultation before the end of March, 1950.

4. The General Shipping Agreement, including the Appendices pertaining thereto for the implementation thereof, shall continue in force until the end of March 1950, on the understanding that wherever the present regulations provide for unilateral decisions by one of the parties, such decisions shall be made by the two parties in mutual agreement. Negotiations to revise this agreement shall be undertaken as soon as possible.

5. The arrangements regarding foreign exchange regulations made within the framework of the „Coördinatie-College Nederland-Indonesië"—whereby reference is made to the attached Chapters XI, XIII and XIV of the Summary of Conclusions of said Coördinatie-College. Financial Sector—remain in force as long as they are not modified in mutual consultation between the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia. Said consultation shall take place in the first quarter of 1950.

6. After the transfer of sovereignty, means will be created for the purpose of a practical operation with regard to the cooperation in trade policy.

I shall appreciate learning if you can agree to the foregoin."

We have the pleasure of informing you that we fully concur with the contents of this letter.

We have the honour to be,

Your obedient servants,

MOHAMMAD HATTA,
Chairman of the
Republican Delegation to the
Round Table Conference.

HAMID,
F.C.A.-Delegation to the
Chairman of the
Round Table Conference.

To the Chairman of the Netherlands Delegation
to the Round Table Conference,
The Hague.

NETHERLANDS DELEGATION
TO THE ROUND TABLE
CONFERENCE

Secretariat

No. 846

The Hague, 2 November 1949.

To the Chairmen of the Delegations of the Government of the Republic Indonesia and of the Federal Consultative Assembly.

Sirs,

I have the honour to inform you as follows.

The Netherlands Government is prepared to annul the tin-agreement (so-called tin pledge) contracted between the body-corporate State of the Netherlands and the body-corporate Indonesia. The Netherlands Government proposes in this connection that after the transfer of sovereignty an arrangement be made to safeguard the Netherlands against risks emanating from guarantees given by the Netherlands in regard of debts of Indonesia and that in this arrangement inter alia be incorporated that other creditors shall not be placed by Indonesia in a more favourable position than the Netherlands with regard to securities for due payment of debts contracted or to be contracted by Indonesia. The Netherlands Government proposes the consultation concerning this arrangement to take place in the frame of the Union as soon as possible after the transfer of sovereignty.

I shall appreciate learning if you can agree to the foregoing.

I have the honour to be,

Your obedient servant,

J. H. VAN MAARSEVEEN.

Chairman of the Netherlands Delegation to the Round Table Conference.

DELEGATION OF THE REPUBLIC INDONESIA

F.C.A.-DELEGATION

No. 9/E.L.

The Hague, 2 November 1949.

Sir,

We have the honour to inform you that our Delegations are gratified to learn that the Netherlands Government is prepared to annul the tin-agreement (so-called tin pledge) contracted between the body-corporate State of the Netherlands and the body-corporate Indonesia. Our Delegations fully agree that after the transfer of sovereignty discussions be opened as soon as possible in the frame of the Union in order to find out in what way your request to safeguard the Netherlands against risks emanating from guarantees given by the Netherlands in regard of debts of Indonesia can be met with. Our Delegations fully share the view that other creditors shall not be placed by Indonesia in a more favourable position than the Netherlands with regard to securities for due payment of debts contracted or to be contracted by Indonesia.

Hoping to have given a satisfactory reply to your letter of to-day, we have the honour to be,

Your obedient servants,

MOHAMMAD HATTA,
Chairman of the Republican Delegation to the Round Table Conference.

HAMID,
Chairman of the F.C.A.-Delegation to the Round Table Conference.

To the Chairman of the Netherlands Delegation to the Round Table Conference, The Hague.

NETHERLANDS DELEGATION
TO THE ROUND TABLE
CONFERENCE

Secretariat

No. 872

The Hague, 2 November 1949.

To the Chairmen of the Delegations of the Government of the Republic Indonesia and of the Federal Consultative Assembly.

Sirs,

I have the honour to inform you that the Netherlands Delegation to the Round Table Conference takes the view that it has been agreed by the Delegations to the Conference that the partners in the Union commit, themselves to mutual consultation before including provisions in their legislation on nationality which might cause nationality conflicts between their legislations.

I would appreciate learning if you can agree to the foregoing.

I have the honour to be,

Your obedient servant,

J. H. VAN MAARSEVEEN.

Chairman of the
Netherlands Delegation to the
Round Table Conference.

DELEGATION OF THE REPUBLIC INDONESIA

F.C.A.-DELEGATION

No. 4/E.L.

The Hague, 2 November 1949.

Sir,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter and can inform you that the Delegations of the Republic Indonesia and the Federal Consultative Assembly to the Round Table Conference take the view that the Delegations to the Conference have agreed that the partners in the Union commit themselves to mutual consultation before including provisions in their legislation on nationality which might cause nationality conflicts between their legislations.

We have the honour to be,

Your obedient servants,

MOHAMMAD HATTA,
Chairman of the Republican Delegation to the Round Table Conference.

HAMID,
Chairman of the F.C.A.-Delegation to the Round Table Conference.

To the Chairman of the Netherlands Delegation to the Round Table Conference, The Hague.

NETHERLANDS DELEGATION
TO THE ROUND TABLE
CONFERENCE

Secretariat

No. 876

The Hague, 2 November 1949.

To the Chairmen of the Delegations of the Government of the Republic Indonesia and of the Federal Consultative Assembly.

Sirs,

I have the honour to inform you that the Netherlands Delegation to the Round Table Conference takes the view that the following has been agreed upon by the Delegations to the Conference.

Each of the partners shall provide in his legislation on nationality that the entering by his nationals into the service of the other partner or of a public body within the jurisdiction of that partner shall not entail loss or limitation of nationality.

I shall appreciate learning if you can agree to the foregoing.

I have the honour to be,

Your obedient servant,

J. H. VAN MAARSEVEEN.
Chairman of the
Netherlands Delegation to the
Round Table Conference.

DELEGATION OF THE REPUBLIC INDONESIA

F.C.A.-DELEGATION

No. 6/E.L.

The Hague, 2 November 1949.

Sir,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter and can inform you that the Delegations of the Republic Indonesia and the Federal Consultative Assembly to the Round Table Conference take the view that the following has been agreed upon by the Delegations to the Conference.

Each of the partners shall provide in his legislation on nationality that the entering by his nationals into the service of the other partner or of a public body within the jurisdiction of that partner shall not entail loss or limitation of nationality.

We have the honour to be,

Your obedient servants,

MOHAMMAD HATTA,
Chairman of the Republican Delegation to the Round Table Conference.

HAMID,
Chairman of the F.C.A.-Delegation to the Round Table Conference.

To the Chairman of the Netherlands Delegation to the Round Table Conference, The Hague.

NETHERLANDS DELEGATION
TO THE ROUND TABLE
CONFERENCE

Secretariat

No. 849

The Hague, 2 November 1949.

To the Chairmen of the Delegations of the Government of the Republic Indonesia and of the Federal Consultative Assembly.

Sirs,

I have the honour to inform you that the Netherlands Delegation to the Round Table Conference takes the view that the following has been agreed upon by the Delegations to the Conference.

As long as no further regulation on this subject has been made between the partners in the Union, they shall not differentiate between their own nationals and nationals of the partner in regard to the rights concerning civil procedure.

I shall appreciate learning if you can agree to the foregoing.

I have the honour to be,

Your obedient servant,

J. H. VAN MAARSEVEEN,

Chairman of the
Netherlands Delegation to the
Round Table Conference.

DELEGATION OF THE REPUBLIC INDONESIA

F.C.A.-DELEGATION

No. 7/E.L.

The Hague, 2 November 1949.

Sir,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter on the rights of citizens concerning civil procedure and can inform you that the Delegations of the Republic Indonesia and the Federal Consultative Assembly to the Round Table Conference take the view that the following has been agreed upon by the Delegations to the Conference.

As long as no further regulation on this subject has been made between the partners in the Union, they shall not differentiate between their own nationals and nationals of the partner in regard to the rights concerning civil procedure.

We have the honour to be,

Your obedient servants,

MOHAMMAD HATTA,
Chairman of the Republican Delegation to the Round Table Conference.

HAMID,
Chairman of the F.C.A.-Delegation to the Round Table Conference.

To the Chairman of the Netherlands Delegation to the Round Table Conference, The Hague.

NETHERLANDS DELEGATION TO THE ROUND TABLE CONFERENCE

Secretariat

No. 873

The Hague, 2 November 1949.

To the Chairmen of the Delegations of the Government of the Republic Indonesia and of the Federal Consultative Assembly.

Sirs.

I have the honour to inform you that the Netherlands Delegation to the Round Table Conference understands that in consequence of the provisions contained in article 25 of the Draft Union Statute, concerning the exchange of High Commissioners, the following has been agreed upon by the Delegations to the Conference.

Article 1.

The High Commissioners shall enjoy the privileges and immunities of Ambassadors of foreign powers.

Article 2.

Before the Government of one of the partners proceeds to the appointment of a High Commissioner, it shall ascertain whether the Government of the other partner agrees to that appointment.

Article 3.

As soon as a High Commissioner has been appointed, the Government of the other partner shall be informed thereof. A High Commissioner thus appointed shall receive an introductory letter signed by the Head of his State, which he shall present in person to the Head of State of the other upon arrival at his post. The date on which this presentation takes place shall be held to be the date of assumption of office.

Article 4.

The order of precedence in relation to foreign Ambassadors shall be determined by the date of assumption of office.

Article 5.

The partners shall be authorized to appoint Commissioners who will function under the supervision of the High Commissioners in localities to be agreed upon. They shall have the status of consular representatives and shall have the rank of Consul-General or Consul.

Article 6.

The Commissioners shall enjoy the privileges and immunities of career consular representatives of foreign powers.

Article 7.

The Government of each partner shall inform the Government of the other partner through the High Commissioner accredited to that Government of the appointment of a Commissioner with the request to confirm him in the exercise of his office.

Article 8.

The order of precedence in relation to foreign consular representatives shall be determined by the date of assumption of office.

Article 9.

In the office of the High Commissioners officials shall be in function with diplomatic status. They shall have the title of deputy High Commissioner, 1st, 2nd or 3rd Secretary.

In the office of the Commissioners officials shall be in function with consular status. They shall have the title of 1st, 2nd or 3rd Secretary.

I shall appreciate learning if you can agree to the foregoing.

I have the honour to be,

Your obedient servant,

J. H. VAN MAARSEVEEN,

Chairman of the
Netherlands Delegation to the
Round Table Conference.

DELEGATION OF THE REPUBLIC INDONESIA

F.C.A.- DELEGATION

No. 3/E.L.

The Hague, 2 November 1949.

Sir,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter concerning the exchange of High Commissioners and can inform you that in consequence of the provisions contained in article 25 of the Draft Union Statute the Delegations of the Republic Indonesia and the Federal Consultative Assembly to the Round Table Conference take the view that the following has been agreed upon by the Delegations to the Conference.

Article 1.

The High Commissioners shall enjoy the privileges and immunities of Ambassadors of foreign powers.

Article 2.

Before the Government, of one of the partners proceeds to the appointment of a High Commissioner, it shall ascertain whether the Government of the other partner agrees to that appointment.

Article 3.

As soon as a High Commissioner has been appointed, the Government of the other partner shall be informed thereof. A High Commissioner thus appointed shall receive an introductory letter signed by the Head of his State, which he shall present in person to the Head of State of the other partner upon arrival at his post. The date on which this presentation takes place shall be held to be the date of assumption of office.

Article 4.

The order of precedence in relation to foreign Ambassadors shall be determined by the date of assumption of office.

Article 5.

The partners shall be authorized to appoint Commissioners who will function under the supervision of the High Commissioners in localities to be agreed upon. They shall have the status of consular representatives and shall have the rank of Consul-General or Consul.

Article 6.

The Commissioners shall enjoy the privileges and immunities of career consular representatives of foreign powers.

Article 7.

The Government of each partner shall inform the Government of the other partner through the High Commissioner accredited to that Government of the appointment of a Commissioner with the request to confirm him in the exercise of his office.

Article 8.

The order of precedence in relation to foreign consular representatives shall be determined by the date of assumption of office.

Article 9.

In the office of the High Commissioners officials shall be in function with diplomatic status. They shall have the title of deputy High Commissioner, 1st, 2nd or 3rd Secretary.

In the office of the Commissioners officials shall be in function with consular status. They shall have the title of 1st, 2nd or 3rd Secretary.

We have the honour to be,

Your obedient servants,

MOHAMMAD HATTA,
Chairman of the Republican Delegation to the Round Table Conference.

HAMID,
Chairman of the F.C.A.-Delegation to the Round Table Conference.

To the Chairman of the Netherlands Delegation to the Round Table Conference, The Hague.

NETHERLANDS DELEGATION
TO THE ROUND TABLE
CONFERENCE

Secretariat

No. 874

The Hague, 2 November 1949.

To the Chairmen of the Delegations of the Government of the Republic Indonesia and of the Federal Consultative Assembly.

Sirs,

I have the honour to inform you that the Netherlands Delegation to the Round Table Conference takes the view that the following has been agreed upon by the Delegations to the Conference.

In view of the provisions in articles 8 and 9 of the Draft Agreement on Transitional Measures and the institution of the Offices of the High Commissioners, the Delegations deem it necessary that further regulations be made in mutual consultation as soon as possible concerning financial management and financing of expenditures in each other's jurisdiction whereby a granting of credit on current account should be considered on conditions further to be agreed upon.

In said agreement provisions can be made as far as necessary and under conditions to be included therein, to place temporarily at the disposal of the Government of the Republic of the United States of Indonesia on behalf of the Delegate in the Netherlands of Netherlands Government officials who are at present working at the Commissariat for Indonesian Affairs along with Government officials of Indonesia.

The Delegations further agreed that, in case the Delegate of the Republic of the United States of Indonesia referred to in article 9 of the Draft Agreement on Transitional Measures

has not yet assumed his duties at the moment of transfer of sovereignty until then his duties will be carried out by the present Commissioner for Indonesian Affairs who thereby will be responsible to and will observe binding instructions from the Government of the Republic of the United States of Indonesia.

I shall appreciate learning if you can agree to the foregoing.

I have the honour to be,

Your obedient servant,

J. H. VAN MAARSEVEEN,

Chairman of the
Netherlands Delegation to the
Round Table Conference.

DELEGATION OF THE
REPUBLIC INDONESIA

No. 1/E.L.

F.C.A.-
DELEGATION

The Hague, 2 November 1949.

Sir,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter and can inform you that the Delegations of the Republic Indonesia and the Federal Consultative Assembly to the Round Table Conference take the view that the following has been agreed upon by the Delegations to the Conference.

In view of the provisions in articles 8 and 9 of the Draft Agreement on Transitional Measures and the institution of the Offices of the High Commissioners, the Delegations deem it necessary that further regulations be made in mutual consultation as soon as possible concerning financial management and financing of expenditures in each other's jurisdiction whereby a granting of credit on current account should be considered on conditions further to be agreed upon.

In said agreement provisions can be made as far as necessary and under conditions to be included therein, to place temporarily at the disposal of the Government of the Republic of the United States of Indonesia on behalf of the Delegate in the Netherlands of Netherlands Government officials who are at present working at the Commissariat for Indonesian Affairs along with Government officials of Indonesia.

The Delegations further agreed that, in case the Delegate of the Republic of the United States of Indonesia referred to in article 9 of the Draft Agreement on Transitional Measures has not yet assumed his duties at the moment of transfer of sovereignty until then his duties will be carried out by the present Commissioner for Indonesian Affairs who thereby

will be responsible to and will observe binding instructions from the Government of the Republic of the United States of Indonesia.

We have the honour to be,

Your obedient servants,

MOHAMMAD HATTA,
Chairman of the Republican Delegation to the Round Table Conference.

HAMID,
Chairman of the F.C.A.-Delegation to the Round Table Conference.

To the Chairman of the Netherlands Delegation to the Round Table Conference, The Hague.

NETHERLANDS DELEGATION
TO THE ROUND TABLE
CONFERENCE

Secretariat

No. 843

The Hague, 2 November 1949.

To the Chairmen of the Delegations of the Government of the Republic Indonesia and of the Federal Consultative Assembly.

Sirs,

I have the honour to inform you that the Netherlands Delegations to the Round Table Conference takes the view that the following has been agreed upon by the Delegations to the Conference.

1. The three Delegations in the Committee for Military Affairs are unanimously of the opinion that with a view to an orderly execution of the decisions taken at the Round Table Conference concerning the withdrawal or reorganization of the air forces under Netherlands command, it is recommended that a Preparatory Committee be formed as soon as possible after the termination of the Round Table Conference.

This Committee shall inter alia pay attention to the problem of voluntary enlistment of Netherlands Air Force personnel with the Air Force of the Republic of the United States of Indonesia in order that said enlistment may take place as soon as possible after the transfer of sovereignty.

2. The three Delegations in the Committee for Military Affairs are unanimously of the opinion that with a view to an orderly execution of the decisions taken at the Round Table Conference and laid down in the Naval Agreement, it is recommended that a Preparatory Committee be formed as soon as possible after the termination of the Round Table Conference.

The three Delegations recommend that this Committee in Indonesia be composed of representatives of the Netherlands and Republican Governments and of the Federal Consultative Assembly.

I have the honour to be,

Your obedient servant,

J. H. VAN MAARSEVEEN,

Chairman of the
Netherlands Delegation to the
Round Table Conference.

DELEGATION OF THE
REPUBLIC INDONESIA

No. 13/E.L.

F.C.A.-
DELEGATION

The Hague, 2 November 1949.

Sir,

We have the honour to inform you that the Indonesian Delegations to the Round Table Conference take the view that the following has been agreed upon by the Delegations to the Conference.

1. The three Delegations in the Committee for Military Affairs are unanimously of the opinion that with a view to an orderly execution of the decisions taken at the Round Table Conference concerning the withdrawal or reorganization of the air forces under Netherlands command, it is recommended that a Preparatory Committee be formed as soon as possible after the termination of the Round Table Conference.

This Committee shall inter alia pay attention to the problem of voluntary enlistment of Netherlands Air Force personnel with the Air Force of the Republic of the United States of Indonesia in order that said enlistment may take place as soon as possible after the transfer of sovereignty.

2. The three Delegations in the Committee for Military Affairs are unanimously of the opinion that with a view to an orderly execution of the decisions taken at the Round Table Conference and laid down in the Naval Agreement, it is recommended that a Preparatory Committee be formed as soon as possible after the termination of the Round Table Conference.

The three Delegations recommend that this Committee in Indonesia be composed of representatives of the Netherlands

and Republican Governments and of the Federal Consultative Assembly.

We have the honour to be,

Your obedient servants,

MOHAMMAD HATTA,
Chairman of the Republican Delegation to the Round Table Conference.

HAMID,
Chairman of the F.C.A.-Delegation to the Round Table Conference.

To the Chairman of the Netherlands Delegation to the Round Table Conference, The Hague.

MAKLUMAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

dan

KOMITE NASIONAL PUSAT.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bersama-sama

KOMITE NASIONAL PUSAT.

Dengan memaklumi, bahwa selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949 kedaulatan jang sesungguh-sungguhnja, sempurna dan tiada bersjarat akan diserahkan pada sidang di Amsterdam oleh Keradjaan Nederland kepada Republik Indonesia Serikat, jang diakui oleh Keradjaan itu sebagai negara merdeka-berdaulat.

Dengan memaklumi pula, bahwa Delegasi Republik Indonesia telah menjetudjui Rantjangan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dengan membubuh tanda-tangan parap dalam rapat di Scheveningen pada Piagam Persetudjuan bertanggal 29 Oktober 1949 antara Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal (Bijeenkomst Federaal Overleg) tentang rantjangan Konstitusi itu.

Maka semendjak saat Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatannja jang sesungguh-sungguhnja, sempurna, tidak bersjarat dan tak dapat ditjabut lagi atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat menjatakan:

Pertama. Mengakui hanjalah negara Republik Indonesia Serikat jang merdeka-berdaulat sepenuh-penuhnja atas seluruh daerah Indonesia.

Kedua: Menjumbangkan kepada Republik Indonesia Serikat segala alat-perlengkapan pemerintahan Republik Indonesia jang diperlukan untuk menegakkan dan menjempurnakan Republik Indonesia Serikat jang merdeka-berdaulat.

Ketiga: Maklumat ini mulai berlaku pada hari di-umumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta,
pada tanggal 14 Desember 1949.

Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Perdana-Menteri Republik Indonesia,

MOHD. HATTA.

Ketua Komite Nasional Pusat,

ASSAÄT.

Diumumkan,
pada tanggal 14 Desember 1949.
Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.

Pada hari ini, tanggal dua puluh tudjuh Desember tahun seribu sembilan ratus ampat puluh sembilan, djam lima petang, Kami,

ANTONIUS HERMANUS JOHANNES LOVINK,

Wakil Tinggi Mahkota di Indonesia, dan

SULTAN HAMENGKU BUWONO IX,
IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG,
Meester MOHAMMAD RUM,
Meester MOHAMMAD KOSASIH PURWANEGARA,

masing-masing Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara dan Menteri Sosial Republik Indonesia Serikat, telah bersidang di Istana di Gambir di Djakarta,

U n t u k:

Membatja Piagam Penjerahan Kedaulatan, sebagaimana dilampirkan pada Induk-Persetudjuan, jang diterima pada tanggal 2 Nopember 1949 oleh persidangan Umum Konperensi Medja Bundar dikota 's-Gravenhage;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 1949, djam 10 pagi, dikota Amsterdam kedaulatan Keradjaan Nederland atas Indonesia telah diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat;

Mendengar pembatjaan putusan Keradjaan tertanggal 14 Desember 1949, No. 33, jang memberi kuasa kepada Wakil Tinggi Mahkota untuk meletakkan djabatannja sesudah dilakukan penjerahan kedaulatan Keradjaan Nederland atas Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat, dan pula pembatjaan putusan Presiden Republik Indonesia Serikat tertanggal 20 Desember 1949, jang memberi kuasa kepada Sultan Hamengku Buwono IX, Ide Anak Agung Gde Agung, Mr. Mohammad Rum dan Mr. Mohammad Kosasih Purwanegara, masing-masing Menteri Pertahanan, Menteri

Dalam Negeri, Menteri Negara dan Menteri Sosial Republik Indonesia Serikat, untuk menerima pemerintahan Indonesia atas nama Republik Indonesia Serikat;

M e n e r a n g k a n:

bahwa Wakil Tinggi Mahkota di Indonesia dengan ini meletakkan djabatannja, jang didjalankannja atas nama Seri Baginda Ratu Nederland;

bahwa Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan ini menerima pemerintahan Indonesia.

Wakil Tinggi Mahkota di Indonesia,

A. H. J. LOVINK.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat,

HAMENGKU BUWONO IX.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat,

IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG.

Menteri Negara Republik Indonesia Serikat,

Mr. MOH. RUM.

Menteri Sosial Republik Indonesia Serikat,

MOH. KOSASIH PURWANEGARA.

jang menanda-tangani protokol ini djuga atas nama deputasi, jang ditundjuk, dengan putusan Presiden Republik Indonesia Serikat, tertanggal 26 Desember 1949.

PROTOKOL.

Dr. W. Drees, Perdana-Menteri, Menteri Urusan Umum Keradjaan Nederland,

dan

Drs. Mohammad Hatta, Perdana-Menteri, Menteri Urusan Luar Negeri u.s. Republik Indonesia Serikat, Pemimpin Delegasi jang mewakili Republik Indonesia Serikat pada penjerahan kedaulatan,

bersidang dengan segala upatjara dikota Amsterdam pada tanggal 27 Desember 1949;

Mengingat

pasal 211 Undang-undang Dasar untuk Keradjaan Nederland serta jang ditentukan pada IV Induk-Persetudjuan jang diterima oleh Sidang Umum Konperensi Medja Bundar dikota 's-Gravenhage pada tanggal 2 Nopember 1949 dan lagi pasal 197 Rantjangan Undang-undang Dasar Peralihan jang bernama Konstitusi Republik Indonesia Serikat;

Mengingat pula

Staatsblad Keradjaan Nederland tahun 1949 nomor J 570, diterbitkan pada tanggal 21 Desember 1949, jang termuat padanja pengumuman Undang-undang Penjerahan Kedaulatan Indonesia tertanggal 21 Desember 1949, serta hal Induk-Persetudjuan termaksud pada Undang-undang tersebut telah diterima oleh

Negara Republik Indonesia,

Negara Indonesia Timur,

Negara Pasundan,

Negara Djawa Timur,

Negara Madura,

Negara Sumatera Timur,
Negara Sumatera Selatan,
Daerah Djawa Tengah,
Daerah Banka,
Daerah Belitung,
Daerah Riau,
Daerah Istimewa Kalimantan Barat,
Daerah Dajak Besar,
Daerah Bandjar,
Daerah Kalimantan Tenggara,
Daerah Kalimantan Timur.

Menimbang

bahwa Drs. Mohammad Hatta telah menerangkan:

pertama, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Rantjangan Undang-undang Dasar Peralihan jang bernama Konstitusi Republik Indonesia Serikat jang bersangkutan telah dipilih mendjadi Presiden Ir. Sukarno, telah diangkat mendjadi Perdana-Menteri, Menteri Urusan Luar Negeri u.s., Drs. Mohammad Hatta, lagi pula telah diangkat mendjadi: Menteri Urusan Dalam Negeri, Ide Anak Agung Gde Agung, Menteri Pertahanan, S. P. Hamengku Buwono IX, Menteri Keuangan, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Urusan Ekonomi, Ir. Djuanda, Menteri Perhubungan Lalu-lintas, Tenaga Listrik dan Air dan Pekerdjaan Umum, Ir. Herling Laoh, Menteri Kesehatan, Dr. Johannes Leimena, Menteri Urusan Sosial, Mr. Kosasih Purwanegara, Menteri Urusan Peburuhan, Mr. Wilopo, Menteri Pengadjaran, Seni dan Pengetahuan, Dr. Abu Hanifah, Menteri Urusan Agama, Kjai Hadji Wachid Hasjim, Menteri Pengadilan, Mr. Dr. Supomo, Menteri Penerangan Rakjat, Arnold Mononutu, Menteri bertugas istimewa, Dr. Suparmo, Menteri bertugas istimewa, Mr. Mohammad Rum, Menteri bertugas istimewa, S. P. Hamid II;

kedua, bahwa dengan keputusan Ir. Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, telah diangkat mendjadi Pemimpin Delegasi jang mewakili Republik Indonesia Serikat pada penjerahan kedaulatan Drs. Mohammad Hatta, diangkat mendjadi Anggota Delegasi itu Mr. Dr. Supomo, S.P. Hamid II, Dr. Suparmo, Mr. Dr. Kusuma Atmadja, Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Mr. Sujono Hadinoto;

Memahamkan

pertama, bahwa Induk-Persetudjuan bersama dengan rantjangan persetudjuan-persetudjuan dan surat-surat jang ditukar, jang segala-galanja itu telah diterima oleh Sidang Umum Konperensi Medja Bundar dikota 's-Gravenhage pada tanggal 2 Nopember 1949, sekarang telah djadi diterima oleh Keradjaan Nederland dipihak satu dan oleh segala daerah jang berhimpun dalam Republik Indonesia Serikat dipihak lain, sehingga oleh karena itu dokumen-dokumen tersemat pada Induk-Persetudjuan itu haruslah dipandang telah diratipikasi, djadi karena itulah tertib-hukum baru telah dikabulkan sesuai dengan jang ditentukan pada Undang-undang Dasar untuk Keradjaan Nederland pasal 211 ajat pertama;

kedua, bahwa Delegasi jang mewakili Republik Indonesia Serikat pada penjerahan kedaulatan dan jang Pemimpinnja Drs. Mohammad Hatta, jang Anggotanja Mr. Dr. Supomo, S. P. Hamid II, Dr. Suparmo, Mr. Dr. Kusuma Atmadja, Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Mr. Sujono Hadinoto, berkuasalah akan mewakili Republik Indonesia Serikat.

Termaktub dikota Amsterdam pada tanggal 27 Desember 1949, pada surat empat helai, jang duanja berbahasa Belanda, duanja lagi berbahasa Indonesia. Protokol ini akan dipindahkan kepada bahasa Inggeris, sedang terdjemahan jang resmi itu dua helai akan ditandai sah oleh kedua Menteri jang terdahulu membubuh tanda-tangannja pada Protokol ini.

MOHAMMAD HATTA.

Jang hadir pula Anggota-anggota Delegasi jang mewakili Republik Indonesia Serikat pada penjerahan kedaulatan,

W. DREES.

Jang hadir pula Para Menteri Keradjaan Nederland,

SUPOMO.
HAMID II.
SUPARMO.
KUSUMA ATMADJA.
SUKIMAN
WIRJOSANDJOJO.
SUJONO HADINOTO.

J. R. H. VAN SCHAIK.
J. H. VAN MAARSEVEEN.
GÖTZEN.
STIKKER.
WIJERS.
TEULINGS.
TH. RUTTEN.
P. LIEFTINCK.
SCHOKKING.
J. IN 'T VELD.
D. G. W. SPITZEN.
VAN DEN BRINK.
MANSHOLT.
A. M. JOEKES,

dan Wakil-wakil dari Suriname serta dari Antillen Belanda di Nederland,

R. H. POS.
M. P. GORSIRA.

Op heden, de zeven en twintigste December negentien honderd negen en veertig, des namiddags om vijf ure, zijn Wij,

ANTONIUS HERMANUS JOHANNES LOVINK,

Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië, en

SULTAN HAMENGKU BUWONO IX,
IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG,
Meester MOHAMMAD RUM,
Meester MOHAMMAD KOSASIH PURWANEGARA,

onderscheidenlijk Minister van Defensie, van Binnenlandse Zaken, zonder Portefeuille en van Sociale Zaken van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, ten paleize aan het Koningsplein te Batavia bijeengekomen,

Ten einde:

Gelezen het Charter van souvereiniteitsoverdracht, zoals dit is gehecht aan de op 2 November 1949 door de Algemene Vergadering van de Ronde Tafel Conferentie te 's-Gravenhage aangenomen Mantelresolutie;

Overwegende dat op 27 December 1949, deze voormiddags om 10 ure, te Amsterdam de souvereiniteit van het Koninkrijk der Nederlanden over Indonesië is overgedragen aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië;

Gehoord de voorlezing van het Koninklijk besluit van 24 December No. 33, houdende machtiging van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië om zijn waardigheid neer te leggen nadat de overdracht van de souvereiniteit van het Koninkrijk der Nederlanden over Indonesië aan de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zal hebben plaats gevonden, alsmede van het besluit van de President van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië van 20 December 1949, houdende machtiging van Sultan Hamengku Buwono IX, Ide Anak Agung Gde

Agung, Mr. Mohammad Rum en Mr. Mohammad Kosasih Purwanegara, onderscheidenlijk Minister van Defensie, van Binnenlandse Zaken, zonder Portefeuille en van Sociale Zaken van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië om namens de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië het bestuur van Indonesië te aanvaarden;

Mitsdien te verklaren:

dat de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië bij deze Zijn waardigheid, dewelke Hij in naam van de Koningin der Nederlanden uitoefent, neerlegt;

dat de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië bij deze het bestuur van Indonesië aanvaardt.

De Hoge Vertegenwoordiger
van de Kroon in Indonesië,
A. H. J. LOVINK.

De Minister van Defensie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië,
HAMENGKU BUWONO IX.

De Minister van Binnenlandse Zaken van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië,
IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG.

De Minister zonder Portefeuille van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië,
Mr. MOH. RUM.

De Minister van Sociale Zaken van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië,
Mr. MOH. KOSASIH PURWANEGARA.

PROTOCOL.

Dr. W. Drees, Minister-President, Minister van Algemene Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden,

en

Drs. Mohammad Hatta, Minister-President, Minister van Buitenlandse Zaken a.i. van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, Leider van de Delegatie ter vertegenwoordiging van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië bij de souvereiniteitsoverdracht,

in plechtige bijeenkomst te Amsterdam op 27 December 1949;

Gelet op

artikel 211 van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, het bepaalde onder IV van de Mantelresolutie, welke door de Algemene Vergadering van de Ronde Tafel Conferentie te 's-Gravenhage op 2 November 1949 is aangenomen en artikel 197 van het ontwerp der Overgangsgrondwet, genaamd Constitutie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië;

Voorts gelet op

het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 1949, nummer J 570, uitgegeven de dato 21 December 1949, houdende afkondiging van de Wet Souvereiniteitsoverdracht Indonesië van 21 December 1949 en de aanvaarding van de in genoemde wet bedoelde Mantelresolutie door

de Negara Republik Indonesia,
de Negara Indonesia Timur,
de Negara Pasundan,
de Negara Djawa Timur,
de Negara Madura,
de Negara Sumatera Timur,

de Negara Sumatera Selatan,
de Daerah Djawa Tengah,
de Daerah Banka,
de Daerah Belitung,
de Daerah Riau,
de Daerah Istimewa Kalimantan Barat,
de Daerah Dajak Besar,
de Daerah Bandjar,
de Daerah Kalimantan Tenggara,
de Daerah Kalimantan Timur.

Overwegende

dat Drs. Mohammad Hatta heeft verklaard:

ten eerste, dat op de voet van de desbetreffende bepalingen van het ontwerp der Overgangsgrondwet, genaamd Constitutie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, tot President is gekozen Ir. Sukarno, tot Minister-President, Minister van Buitenlandse Zaken a.i. is benoemd Drs. Mohammad Hatta en voorts tot Minister zijn benoemd onderscheidenlijk van Binnenlandse Zaken, Ide Anak Agung Gde Agung, van Defensie, Z.H. Hamengku Buwono IX, van Financiën, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, van Economische Zaken, Ir. Djuanda, van Verkeer, Energie en Openbare Werken, Ir. Herling Laoh, van Gezondheid, Dr. Johannes Leimena, van Sociale Zaken, Mr. Kosasih Purwanegara, van Arbeid, Mr. Wilopo, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Dr. Abu Hanifah, van Godsdienst, Kjai Hadji Wachid Hasjim, van Justitie, Mr. Dr. Supomo, van Voorlichting, Arnold Mononutu, zonder Portefeuille, Dr. Suparmo, zonder Portefeuille, Mr. Mohammad Rum, zonder Portefeuille, Z. H. Hamid II,

ten tweede, dat bij besluit van Ir. Sukarno, als President van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, zijn benoemd tot Leider van de Delegatie ter vertegenwoordiging van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië

de Negara Sumatera Selatan,
de Daerah Djawa Tengah,
de Daerah Banka,
de Daerah Belitung,
de Daerah Riau,
de Daerah Istimewa Kalimantan Barat,
de Daerah Dajak Besar,
de Daerah Bandjar,
de Daerah Kalimantan Tenggara,
de Daerah Kalimantan Timur.

Overwegende

dat Drs. Mohammad Hatta heeft verklaard:

ten eerste, dat op de voet van de desbetreffende bepalingen van het ontwerp der Overgangsgrondwet, genaamd Constitutie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, tot President is gekozen Ir. Sukarno, tot Minister-President, Minister van Buitenlandse Zaken a.i. is benoemd Drs. Mohammad Hatta en voorts tot Minister zijn benoemd onderscheidenlijk van Binnenlandse Zaken, Ide Anak Agung Gde Agung, van Defensie, Z.H. Hamengku Buwono IX, van Financiën, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, van Economische Zaken, Ir. Djuanda, van Verkeer, Energie en Openbare Werken, Ir. Herling Laoh, van Gezondheid, Dr. Johannes Leimena, van Sociale Zaken, Mr. Kosasih Purwanegara, van Arbeid, Mr. Wilopo, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Dr. Abu Hanifah, van Godsdienst, Kjai Hadji Wachid Hasjim, van Justitie, Mr. Dr. Supomo, van Voorlichting, Arnold Mononutu, zonder Portefeuille, Dr. Suparmo, zonder Portefeuille, Mr. Mohammad Rum, zonder Portefeuille, Z. H. Hamid II,

ten tweede, dat bij besluit van Ir. Sukarno, als President van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, zijn benoemd tot Leider van de Delegatie ter vertegenwoordiging van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië

bij de souvereiniteitsoverdracht Drs. Mohammad Hatta en tot Leden dier Delegatie Mr. Dr. Supomo, Z. H. Hamid II, Dr. Suparmo, Mr. Dr. Kusuma Atmadja, Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Mr. Sujono Hadinoto;

Verstaan

ten eerste, dat de Mantelresolutie met ontwerp-overeenkomsten en briefwisseling, welke door de Algemene Vergadering van de Ronde Tafel Conferentie te 's-Gravenhage op 2 November 1949 is aangenomen, door het Koninkrijk der Nederlanden enerzijds en de tot de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië toetredende gebieden anderzijds is aanvaard en dat mitsdien de aan deze resolutie gehechte bescheiden moeten worden beschouwd als te zijn geratificeerd, zijnde daardoor de nieuwe rechtsorde overeenkomstig het eerste lid van artikel 211 van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden aanvaard;

ten tweede, dat de Delegatie ter vertegenwoordiging van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië bij de souvereiniteitsoverdracht, bestaande uit Drs. Mohammad Hatta als Leider en Mr. Dr. Supomo, Z. H. Hamid II, Dr. Suparmo, Mr. Dr. Kusuma Atmadja, Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Mr. Sujono Hadinoto als Leden, tot die vertegenwoordiging bevoegd is.

Gedaan te Amsterdam, de 27ste December 1949, in vier exemplaren, waarvan twee in de Nederlandse en twee in de Indonesische taal, zullende van dit Protocol een officiële Engelse vertaling in twee exemplaren worden vervaardigd, welke door de eerste beide ondertekenaars van dit Protocol zullen worden gewaarmerkt.

MOHAMMAD HATTA.

in tegenwoordigheid van de leden van de Delegatie ter vertegenwoordiging van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië bij de souvereiniteitsoverdracht,

W. DREES.

in tegenwoordigheid van de Ministers van het Koninkrijk der Nederlanden,

SUPOMO.
HAMID II.
SUPARMO.
KUSUMA ATMADJA.
SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.
SUJONO HADINOTO.

J. R. H. VAN SCHAIK.
J. H. VAN MAARSEVEEN.
GÖTZEN.
STIKKER.
WIJERS.
TEULINGS.
TH. RUTTEN.
P. LIEFTINCK.
SCHOKKING.
J. IN 'T VELD.
D. G. W. SPITZEN.
VAN DEN BRINK.
MANSHOLT.
A. M. JOEKES,

en van de Vertegenwoordigers van Suriname en van de Nederlandse Antillen in Nederland,

R. H. POS.
M. P. GORSIRA.

PROTOCOL.

Dr. W. Drees, Prime Minister, Minister of General Affairs of the Kingdom of the Netherlands,

and

Drs. Mohammad Hatta, Prime Minister, Minister of Foreign Affairs a.i. of the Republic of the United States of Indonesia, Leader of the Delegation representing the Republic of the United States of Indonesia at the transfer of sovereignty,

at the formal ceremony at Amsterdam on 27 December 1949;

Taking into consideration

article 211 of the Constitution for the Kingdom of the Netherlands, the provisions under point IV of the Covering Resolution which has been accepted by the Plenary Meeting of the Round Table Conference at The Hague on 2 November 1949 and article 197 of the draft of the Provisional Constitution, called Constitution of the Republic of the United States of Indonesia;

And taking into consideration

the Statute Book of the Kingdom of the Netherlands, issue 1949, number J 570 published 21 December 1949, containing the proclamation of the Law Transfer of Sovereignty Indonesia of 21 December 1949 and the acceptance of the Covering Resolution referred to in the aforementioned Law by

the Negara Republik Indonesia,
the Negara Indonesia Timur,
the Negara Pasundan,
the Negara Djawa Timur,
the Negara Madura,
the Negara Sumatera Timur,
the Negara Sumatera Selatan,
the Daerah Djawa Tengah,

the Daerah Bangka,
the Daerah Belitung,
the Daerah Riau,
the Daerah Istimewa Kalimantan Barat,
the Daerah Dajak Besar,
the Daerah Bandjar,
the Daerah Kalimantan Tenggara,
the Daerah Kalimantan Timur.

Considering

Drs. Mohammad Hatta having declared:

firstly, that on the strength of the relative provisions of the draft of the Provisional Constitution, called Constitution of the Republic of the United States of Indonesia, Ir. Sukarno has been elected President, Drs. Mohammad Hatta has been appointed Prime Minister, Minister of Foreign Affairs a.i. and that further have been appointed respectively as Minister of Home Affairs Ide Anak Agung Gde Agung, of Defence H. H. Hamengku Buwono IX, of Finance Sjafruddin Prawiranegara, of Economic Affairs Ir. Djuanda, of Transport, Power and Public Works Ir. Herling Laoh, of Health Dr. Johannes Leimena, of Social Affairs Mr. Kosasih Purwanegara, of Labour Mr. Wilopo, of Education, the Arts and Science Dr. Abu Hanifah, of Public Worship Kjai Hadji Wachid Hasjim, of Justice Mr. Dr. Supomo, of Information Arnold Mononutu, without Portfolio Dr. Suparmo, without Portfolio Mr. Mohammad Rum, without Portfolio H. H. Hamid II.

secondly, that by decree of Ir. Sukarno as President of the Republic at the United States of Indonesia, Drs. Mohammad Hatta has been appointed Leader of the Delegation representing the Republic of the United States of Indonesia at the transfer of sovereignty and Mr. Dr. Supomo, H. H. Hamid II, Dr. Suparmo, Mr. Dr. Kusuma Atmadja, Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Mr. Sujono Hadinoto have been appointed Members of this Delegation;

Understand

firstly, that the Covering Resolution with draft agreements and exchanged letters accepted by the Plenary Meeting of the Round Table Conference at The Hague on 2 November 1949, has been accepted by the Kingdom of the Netherlands on the one side and the territories acceding to the Republic of the United States of Indonesia on the other side, and that in consequence thereof the documents attached to this Resolution must be considered ratified, in consequence of which the new order of law is accepted in accordance with the first paragraph of article 211 of the Constitution for the Kingdom of the Netherlands;

secondly, that the Delegation representing the Republic of the United States of Indonesia at the transfer of sovereignty, consisting of Drs. Mohammad Hatta as Leader and Mr. Dr. Supomo, H. H. Hamid II, Dr. Suparmo, Mr. Dr Kusuma Atmadja, Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Mr. Sujono Hadinoto as Members, is authorised to act as such representation.

Given this twenty seventh day of December 1949 at Amsterdam, in four originals, of which two in the Netherlands and two in the Indonesian language, of which Protocol an official English translation in duplicate shall be made which shall be authenticated by both the first signatories of this Protocol.

(Drs. Mohammad Hatta).

in the presence of the Members of the Delegation representing the United States of Indonesia at the transfer of sovereignty,

(Mr. Dr. Supomo).
(H. H. Hamid).
(Dr. Suparmo).
(Mr. Dr. Kusuma Atmadja).
(Dr. Sukiman Wirjosandjojo).

(Dr. W. Drees).

in the presence of the Ministers of the Netherlands,

(Mr. J. R. H. van Schaik).
(Mr. J. H. van Maarseveen).
(L. Götzen).
(Mr. D. U. Stikker).
(Mr. Th. R. J. Wijers).

(Mr. Sujono Hadinoto).

(Mr. F. G. C. J. M. Teulings).
(Dr. F. J. Th. Rutten).
(Mr. P. Lieftinck).
(Mr. W. F. Schokking).
(Mr. Dr. J. In 't Veld).
(Mr. D. G. W. Spitzen).
(Dr. J. R. M. van den Brink).
(S. L. Mansholt).
(Mr. A. M. Joekes).

and of the Representatives of Surinam and of the Netherlands Antilles in the Netherlands,

(Mr. Dr. R. H. Pos).
(M. P. Gorsira).

Voor eensluidende officiële vertaling in het Engels:

MOHAMMAD HATTA. W. DREES.

AKTE
PENJERAHAN KEDAULATAN SERTA PENGAKUAN.

KAMI JULIANA, KARENA RACHMAT ALLAH RATU NEDERLAND, PUTERI ORANJE-NASSAU, DST., DST., DST.

Pada hari ini, tanggal dua puluh tudjuh bulan Desember tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan, tengah bersidang dengan segala upatjara di Istana Radja dikota Amsterdam;

Mengingat pasal 211 Undang-undang Dasar dan bunji Protokol tertanggal hari ini, jang ditanda-tangani pada sidang jang dengan segala upatjara ini oleh Perdana-Menteri Kami, Menteri Urusan Umum, dan oleh Perdana-Menteri, Menteri Urusan Luar Negeri u.s. Republik Indonesia Serikat, Pemimpin Delegasi jang mewakili Republik Indonesia Serikat pada penjerahan kedaulatan;

Mengingat pula hal Kami membenarkan — ialah pada sidang jang dengan segala upatjara ini — tertib-hukum baru sebagaimana terkandung dalam Induk-Persetudjuan beserta dengan rantjangan persetudjuan-persetudjuan dan surat-surat jang ditukar, jang segala-galanja itu telah diterima oleh Sidang Umum Konperensi Medja Bundar dikota 's-Gravenhage pada tanggal 2 Nopember 1949;

MEMAHAMKAN

bahwa oleh karena itu pada hari ini tanggal dua puluh tudjuh Desember tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan:

penjerahan kedaulatan sesuai dengan Piagam Penjerahan Kedaulatan tersemat pada Induk-Persetudjuan tersebut, mendjadi sah;

Uni Nederland-Indonesia jang adalah Kami di puntjaknja dan pada pergantian-Tachta ahli-waris Kami jang sah pada Mahkota Nederland turun-temurun, telah diadakan;

semua hasil Konperensi Medja Bundar lain dari pada itu, jang termuat pada dokumen-dokumen lampiran Induk-Persetudjuan tersebut, telah mulai berlaku, ja'ni menurut jang ditentukan pada Induk-Persetudjuan itu pada V;

MENJURUH

maktubkan Akte ini empat helai, jang duanja berbahasa Belanda, duanja lagi berbahasa Indonesia, disahkan dengan tanda-tangan Kami dan ditanda-tangani pula oleh sekalian Menteri Kami, sedang akan diperbuat terdjemahannja berbahasa Inggeris dua helai;

simpan Akte ini sehelai berbahasa Belanda dan sehelai berbahasa Indonesia serta pula terdjemahannja berbahasa Inggeris sehelai pada Kabinet Kami, dan terimakan tiga helai jang sama bunjinja dengan tiga helai tersebut tadi kepada Delegasi jang diutus kesidang jang dengan segala upatjara ini oleh Presiden Republik Indonesia Serikat supaja diundjukkannja kepada Presiden itu;

Menteri Pengadilan Kami mengirimkan salinan Akte ini, berbahasa Belanda dan berbahasa Indonesia, jang ditandai sah kepada kedua Kamer Staten-Generaal, kepada Mahkamah Agung Nederland (Hoge Raad der Nederlanden), kepada Gubernur dan Staten Suriname serta kepada Gubernur dan Staten Antillen Nederland.

Termaktub dikota Amtersdam,
pada tanggal 27 Desember 1949.

JULIANA.

Perdana-Menteri, Menteri Urusan Umum,

W. DREES.

Menteri bertugas istimewa,

J. R. H. VAN SCHAIK.

Menteri Daerah-daerah Seberang,

J. H. VAN MAARSEVEEN.

Menteri bertugas istimewa,
GÖTZEN.

Menteri Urusan Luar Negeri,
STIKKER.

Menteri Pengadilan,
WIJERS.

Menteri Urusan Dalam Negeri,
TEULINGS.

Menteri Pengadjaran, Seni dan Pengetahuan,
TH. RUTTEN.

Menteri Keuangan,
P. LIEFTINCK.

Menteri Peperangan,
SCHOKKING.

Menteri Angkatan Laut,
SCHOKKING.

Menteri Pembangunan kembali dan Perumahan Rakjat,
J. IN 'T VELD.

Menteri Perhubungan Lalu-lintas dan Pengairan,
D. G. W. SPITZEN.

Menteri Urusan Perekonomian,
VAN DEN BRINK.

Menteri Pertanian, Perikanan dan Penjediaan Makanan,
MANSHOLT.

Menteri Urusan Sosial,
A. M. JOEKES.

Drs. Mohammad Hatta, Pemimpin Delegasi Republik Indonesia Serikat, dan Anggota-anggota Delegasi itu Mr. Dr. Supomo, S. P. Hamid II, Dr. Suparmo, Mr. Dr. Kusuma Atmadja, Dr Sukiman Wirjosandjojo, Mr. Sujono Hadinoto

menerangkan atas nama Republik Indonesia Serikat bahwa sesuai dengan bunji Akte jang diatas ini mereka telah menerima kedaulatan, mereka sepakat dengan terdjadinja Uni Nederland-Indonesia antara Keradjaan Nederland dan Republik Indonesia Serikat, lagi dengan jang dipahamkan pada Akte ini lain dari pada itu.

Amsterdam, 27 Desember 1949.

MOHAMMAD HATTA.
SUPOMO.
HAMID II.
SUPARMO.
KUSUMA ATMADJA.
SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.
SUJONO HADINOTO.

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN, DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op heden de zeven en twintigste December negentienhonderd negen en veertig, in plechtige bijeenkomst op het Koninklijk Paleis te Amsterdam;

Gelet op artikel 211 der Grondwet;

Gelet voorts op de inhoud van het op heden gedagtekende, in deze plechtige bijeenkomst door Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en de Minister-President, Minister van Buitenlandse Zaken a.i. van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, Leider van de Delegatie ter vertegenwoordiging van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië bij de souvereiniteitsoverdracht ondertekende Protocol;

Overwegende

dat de Mantelresolutie met ontwerp-overeenkomsten en briefwisseling, welke door de Algemene Vergadering van de Ronde Tafel Conferentie te 's-Gravenhage op 2 November 1949 is aangenomen, door het Koninkrijk der Nederlanden enerzijds en de tot de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië toetredende gebieden anderzijds is aanvaard;

dat mitsdien, overeenkomstig het onder IV van de Mantelresolutie bepaalde, de aan deze resolutie gehechte bescheiden zijn geratificeerd en de nieuwe rechtsorde door Ons kan worden bevestigd;

Bevestigen

de nieuwe rechtsorde, zoals deze is vervat in de bovenvermelde Mantelresolutie met ontwerp-overeenkomsten en briefwisseling, welke nieuwe rechtsorde plechtig zal worden afgekondigd door plaatsing van deze Onze bevestiging en van de overige in deze bijeenkomst ondertekende bescheiden in het *Staatsblad* en in een buitengewoon nummer van de *Nederlandse Staatscourant;*

Bevelen

dat van deze Onze Bevestiging, in dubbel opgemaakt, met Onze handtekening bekrachtigd, van het grootzegel van het Koninkrijk der Nederlanden voorzien en mede-ondertekend

door alle in deze plechtige bijeenkomst aanwezige Ministers van het Koninkrijk, een exemplaar in het Kabinet der Koningin zal worden bewaard en een exemplaar in handen zal worden gesteld van de Leider van de Delegatie ter vertegenwoordiging van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië bij de souvereiniteitsoverdracht, ter overhandiging aan de President van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en dat authentieke afschriften van deze Onze Bevestiging zullen verzonden worden aan de beide Kamers der Staten-Generaal, aan de Hoge Raad der Nederlanden, aan de Gouverneur en de Staten van Suriname en aan de Gouverneur en de Staten van de Nederlandse Antillen.

Gedaan te Amsterdam, op de 27ste December 1949.

JULIANA.

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,

W. DREES.

De Minister zonder Portefeuille,

J. R. H. VAN SCHAIK.

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen,

J. H. VAN MAARSEVEEN.

De Minister zonder Portefeuille,

GÖTZEN.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

STIKKER.

De Minister van Justitie,

WIJERS.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

TEULINGS.

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,

TH. RUTTEN.

De Minister van Financiën,
P. LIEFTINCK.

De Minister van Oorlog,
SCHOKKING.

De Minister van Marine,
SCHOKKING.

De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting,
J. IN 'T VELD.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
D. G. W. SPITZEN.

De Minister van Economische Zaken,
VAN DEN BRINK.

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,
MANSHOLT.

De Minister van Sociale Zaken,
A. M. JOEKES.

AKTE VAN SOUVEREINITEITSOVERDRACHT EN ERKENNING.

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Op heden, de zeven en twintigste December negentienhonderd negen en veertig in plechtige bijeenkomst op het Koninklijk Paleis te Amsterdam;

Gelet op artikel 211 der Grondwet en op de inhoud van het op heden gedagtekende, in deze plechtige bijeenkomst door Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en de Minister-President, Minister van Buitenlandse Zaken a.i. van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, Leider van de Delegatie ter vertegenwoordiging van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië bij de souvereiniteitsoverdracht ondertekende Protocol;

Gelet voorts op Onze Bevestiging in deze plechtige bijeenkomst van de nieuwe rechtsorde, zoals deze is vervat in de door de Algemene Vergadering van de Ronde Tafel Conferentie te 's-Gravenhage op 2 November 1949 aangenomen Mantelresolutie met ontwerpovereenkomsten en briefwisseling;

Verstaan

dat mitsdien op heden, de zeven en twintigste December negentienhonderd negen en veertig:

de souvereiniteitsoverdracht overeenkomstig het aan voormelde Mantelresolutie gehechte Charter van Souvereiniteitsoverdracht rechtskracht verkrijgt;

de Nederlands-Indonesische Unie, aan welks hoofd staan Wij, en bij opvolging Onze wettige opvolgers in de Kroon der Nederlanden, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek derVerenigde Staten van Indonesië is tot stand gekomen;

alle bijkomende resultaten van de Ronde Tafel Conferentie, vervat in de bij voormelde Mantelresolutie behorende bescheiden, krachtens het onder V van die Mantelresolutie bepaalde in werking zijn getreden;

Bevelen

dat van deze Akte vier exemplaren worden opgemaakt, waarvan twee in de Nederlandse en twee in de Indonesische taal, met Onze handtekening bekrachtigd, en mede-ondertekend door alle Onze Ministers, zullende van deze Akte een Engelse vertaling in tweevoud worden vervaardigd;

dat een exemplaar in de Nederlandse en een exemplaar in de Indonesische taal alsmede een vertaling in het Engels zullen worden bewaard in Ons Kabinet, en gelijke exemplaren in handen zullen worden gesteld van de door de President van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië naar deze plechtige bijeenkomst afgevaardigde Delegatie, ter overhandiging aan genoemde President;

en dat door Onze Minister van Justitie gewaarmerkte afschriften van deze Akte in de Nederlandse en in de Indonesische taal zullen worden verzonden aan de beide Kamers der Staten-Generaal, aan de Hoge Raad der Nederlanden, aan de Gouverneur en de Staten van Suriname alsmede aan de Gouverneur en de Staten van de Nederlandse Antillen.

Gedaan te Amsterdam, de 27ste December 1949.

JULIANA.

De *Minister-President,*
Minister van Algemene Zaken,
W. DREES.

De *Minister zonder Portefeuille,*
J. R. H. VAN SCHAIK.

De *Minister van Overzeese Gebiedsdelen,*
J. H. VAN MAARSEVEEN.

De *Minister zonder Portefeuille,*
GÖTZEN.

De *Minister van Buitenlandse Zaken,*
STIKKER.

De Minister van Justitie,

WIJERS.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

TEULINGS.

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,

TH. RUTTEN.

De Minister van Financiën,

P. LIEFTINCK.

De Minister van Oorlog,

SCHOKKING.

De Minister van Marine,

SCHOKKING.

De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting,

J. IN 'T VELD.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

D. G. W. SPITZEN.

De Minister van Economische Zaken,

VAN DEN BRINK.

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,

MANSHOLT.

De Minister van Sociale Zaken,

A. M. JOEKES.

Drs. Mohammad Hatta, Leider van de Delegatie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, en de

Leden dier Delegatie Mr. Dr. Supomo, Z. H. Hamid II, Dr. Suparmo, Mr. Dr. Kusuma Atmadja, Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Mr. Sujono Hadinoto verklaren namens de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië overeenkostig te inhoud van bovenstaande Akte de souvereiniteit te hebben aanvaard, in te stemmen met de totstandkoming van de Nederlands-Indonesische Unie tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en met hetgeen verder in deze Akte is verstaan.

Amsterdam, 27 Desember 1949.

MOHAMMAD HATTA.
SUPOMO.
HAMID II.
SUPARMO.
KUSUMA ATMADJA.
SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.
SUJONO HADINOTO.

PIAGAM PENJERAHAN KEDAULATAN.

Pasal 1.

1. Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dengan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara jang merdeka dan berdaulat.

2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja; rantjangan konstitusi itu telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland.

3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949.

Pasal 2.

Tentang kerseidenan Irian (Nieuw-Guinea) telah tertjapai persetudjuan sebagai berikut:

a. disebabkan hal persesuaian antara pendirian masing-masing pihak tentang Irian belum dapat ditjapai, sehingga soal itu masih mendjadi pokok pertikaian;

b. disebabkan keharusan Konperensi Medja Bundar diachiri dengan berhasil pada tanggal 2 Nopember 1949;

c. mengingat faktor penting-penting jang harus diperhatikan pada pemetjahan masalah Irian itu;

d. mengingat singkatnja penjelidikan jang telah dapat diadakan dan diselesaikan perihal soal-soal jang bersangkutan dengan masalah Irian itu;

e. mengingat sukarnja tugas-kewadjiban jang akan dihadapi dengan segera oleh peserta Uni, dan

f. mengingat kebulatan hati pihak-pihak jang bersangkutan hendak mempertahankan asas supaja semua perselisihan jang mungkin ternjata kelak atau timbul diselesaikan dengan djalan patut dan rukun,

maka status quo keresidenan Irian (Nieuw-Guinea) tetap berlaku seraja ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penjerahan kedaulatan kepada Republik Indo-

nesia Serikat masalah kedudukan-kenegaraan Irian akan diselesaikan dengan djalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland.

Amsterdam, 27 Desember 1949.

Perdana-Menteri, Menteri Urusan Luar Negeri u.s. Republik Indonesia Serikat,

MOHAMMAD HATTA.

Perdana-Menteri, Menteri Urusan Umum Keradjaan Nederland,

W. DREES.

CHARTER VAN SOUVEREINITEITSOVERDRACHT.

Artikel 1.

1. Het Koninkrijk der Nederlanden draagt de volledige souvereiniteit over Indonesië onvoorwaardelijk en onherroepelijk over aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en erkent deze mitsdien als een onafhankelijk en souvereine Staat.

2. De Republiek der Verenigde Staten van Indonesië aanvaardt deze souvereiniteit op de voet van de bepalingen van haar Constitutie, welke in ontwerp ter kennis is gebracht van het Koninkrijk der Nederlanden.

3. De overdracht van de souvereiniteit zal plaats hebben uiterlijk 30 December 1949.

Artikel 2.

Ten aanzien van de residentie Nieuw-Guinea is overeengekomen:

a. gezien het feit, dat het nog niet mogelijk is gebleken de standpunten van partijen nopens Nieuw-Guinea overeen te brengen, waardoor deze in geschil blijven.

b. gezien de wenselijkheid om de Ronde Tafel Conferentie met goed resultaat te beëindigen op 2 November 1949.

c. gezien de belangrijke factoren, die in ogenschouw moeten worden genomen bij de oplossing van het vraagstuk Nieuw-Guinea.

d. gezien het beperkte onderzoek, dat kon worden ingesteld en voltooid ten aanzien van de problemen, die samenhangen met het vraagstuk Nieuw-Guinea,

e. gezien de moeilijke taak, waarvoor de deelgenoten in de Unie zich al dadelijk zullen zien gesteld, en,

f. gezien de beslotenheid van partijen tot handhaven van het beginsel om door vredelievende en redelijke middelen alle geschillen op te lossen, die later mochten blijken te bestaan of te rijzen,

dat de status quo van de residentie Nieuw-Guinea zal worden gehandhaafd met de bepaling, dat binnen een jaar na

de datum van overdracht van de souvereiniteit aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië het vraagstuk van de staatkundige status van Nieuw-Guinea zal worden bepaald door onderhandelingen tussen de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en het Koninkrijk der Nederlanden.

Amsterdam, 27 December 1949.

De Minister-President, Minister van Buitenlandse Zaken a.i. van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië,

MOHAMMAD HATTA.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden,

W. DREES.

CHARTER OF TRANSFER OF SOVEREIGNTY.

Article 1.

1. The Kingdom of the Netherlands unconditionally and irrevocably transfers complete sovereignty over Indonesia to the Republic of the United States of Indonesia and thereby recognizes said Republic of the United States of Indonesia as an independent and sovereign State.

2. The Republic of the United States of Indonesia accepts said sovereignty on the basis of the provisions of its Constitution which as a draft has been brought to the knowledge of the Kingdom of the Netherlands.

3. The transfer sovereignty shall take place at the latest on 30 December 1949.

Article 2.

With regard to the residency of New Guinea it is decided:

a. in view of the fact it has not yet been possible to reconsile the views of the parties on New Guinea, which remain, therefore, in dispute,

b. in view of the desirability of the Round Table Conference concluding successfully on 2 November 1949,

c. in view of the important factors which should be taken into account in settling the question of New Guinea,

d. in view of the limited research that has been undertaken and completed with respect to the problems involved in the question of New Guinea,

e. in view of the heavy tasks with which the Union partners will initially be confronted, and

f. in view of the dedication of the parties to the principle of resolving by peaceful and reasonable means any differences that may hereafter exist or arise between them,

that the status quo of the residency of New Guinea shall be maintained with the stipulation that within a year from the date of transfer of sovereignty to the Republic of the United States of Indonesia the question of the political

status of New Guinea be determined through negotiations between the Republic of the United States of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands.

Amsterdam, 27 December 1949.

The Prime Minister, Minister of Foreign Affairs a.i. of the Republic of the United States of Indonesia,

MOHAMMAD HATTA.

The Prime Minister, Minister of General Affairs of the Kingdom of the Netherlands,

W. DREES.

STATUT-UNI.

Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland,

telah memutus mengadakan kerdjasama dengan persahabatan atas dasar kesukaralaan, persamaan dan kemerdekaan sepenuh-penuhnja dan membentuk Uni Indonesia-Nederland, ja'ni dengan maksud mewudjudkan kerdjasama itu dimasa depan,

telah sepakat akan meletakkan dasar perhubungannja sebagai negara-negara jang merdeka dan berdaulat pada Statut-Uni ini,

seraja berpendapatan bahwa tidak suatu apa pada Statut-Uni boleh ditafsirkan begini, bahwa diketjualikan sesuatu tjara kerdjasama jang tidak disebut padanja ataupun kerdjasama di sesuatu lapangan jang tidak disebut padanja, jang sekiranja dirasa perlu oleh kedua peserta dimasa depan.

Tjorak Uni.

Pasal 1.

1. Uni Indonesia-Nederland mewudjudkan kerdjasama berbadan-perlengkapan jang teratur antara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland atas dasar sukarela dan persamaan status dengan hak-hak jang sama.
2. Uni tidak memperkurang status tiap-tiap peserta sebagai negara jang merdeka dan berdaulat.

Maksud Uni.

Pasal 2.

1. Maksud Uni ialah kerdjasama kedua peserta guna mengurus kepentingannja jang bersama.
2. Kerdjasama itu akan berlangsung terutama dalam hal-hal dilapangan perhubungan luar negeri, pertahanan dan sekadar perlu keuangan, serta pula dalam hal-hal jang bertjorak perekonomian dan kebudajaan.

Pasal 3.

1. Kedua peserta berdjandji akan memperdasarkan ketatanegaraannja pada asas-asas kerakjatan dan akan mengusahakan mengedjar pengadilan jang bebas.

2. Kedua peserta akan mengakui hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia jang termaktub pada lampiran Statut ini.

Tjara Uni berlaku.

Pasal 4.

Semua keputusan dalam Uni diambil atas persetudjuan antara kedua peserta.

Kepala Uni.

Pasal 5.

1. Dipuntjak Uni adalah Seri Baginda Ratu Juliana, Puteri Oranje-Nassau, dan, pada pergantian-Tachta, ahli waris Baginda jang sah pada Mahkota Nederland turun-temurun.

2. Apabila Kepala Uni belum dewesa atau apabila Kepala Uni tidak sanggup lagi menjelenggarakan djabatannja, begitupun djikalau Kepala Uni meletakkan djabatannja untuk sementara waktu, maka kedua peserta dengan sepakat mengatur perwakilannja.

Dengan semupakat bolehlah peraturan sedemikian itu diadakan lebih dahulu.

Pasal 6.

Kepala Uni mendjelmakan lambang kerdjasama dengan sukarela dan jang landjut-lama antara kedua peserta.

Badan-Badan perlengkapan Uni.

Pasal 7.

Untuk melaksanakan Uni maka dua kali setahun, lagi pula seberapa kali dianggap perlu oleh kedua peserta, diadakanlah konperensi oleh menteri-menteri atau orang-orang jang mempunjai pertanggungan-djawab jang sama atau serupa menurut ketatanegaraan peserta itu; menteri-menteri dan orang-orang itu ditundjukkan oleh masing-masing peserta.

Ketjuali djika sudah bermupakat lain, maka dari tiap-tiap peserta tiga orang menteri akan menghadiri konperensi itu.

Pasal 8.

Menteri-menteri jang menghadiri konperensi tetap bertanggung-djawab kepada badan-badan perlengkapan peserta masing-masing, menurut ketatanegaraan masing-masing peserta.

Pasal 9.

Konperensi menteri itu menbentuk panitia-panitia sekadar perlu; jang diangkat mendjadi anggota panitia tadi diangkat oleh kedua peserta dengan angka jang sama.

Pasal 10.

1. Kedua peserta akan mengadakan hubungan berpadanan dan kerdjasama jang tetap antara parlemen-parlemen peserta masing-masing.
2. Perundingan pertama para wakil parlemen-parlemen akan diadakan didalam waktu delapan bulan setelah parlemen sementara Republik Indonesia Serikat terbentuk.

Pasal 11.

1. Uni menpunjai sekertariat jang tetap. Tiap-tiap peserta menundjuk seorang sekertaris-umum; seorang diantaranja memegang pimpinan sekertariat bergiliran setahun seorang.
2. Sekalian pegawai lain diangkat dengan sepakat kedua sekertaris-umum menurut seputjuk istruksi jang disusun bersama-sama oleh kedua peserta.

Keputusan dan peraturan bersama.

Pasal 12.

1. Pada konperentie menteri tersebut diambil keputusan dengan sepakat perwakilan Republik Indonesia Serikat pada suatu pihak dan perwakilan Keradjaan Nederland pada pihak jang lain.
2. Keputusan konperensi dapat diperlakukan menurut atjara sebagai berikut.
3. Keputusan-keputusan hendak mengadakan peraturan-peraturan bersama jang diambil pada konperensi menteri perlu disahkan oleh parlemen peserta masing-masing. Setelah keputusan itu disahkan oleh kedua parlemen, maka Kepala Uni

akan mentjatat (konstatir) bahwa adalah persetudjuan antara kedua peserta dan selandjutnja peraturan bersama itu akan diumumkan dalam Surat-berita Negara resmi masing-masing peserta. Karena pengumuman itu maka peraturan bersama mendapat kekuatan hukum. Peraturan-peraturan bersama tidak boleh dibanding (onschendbaar).

4. Tentang keputusan konperensi jang lain maka atas permohonan konperensi dapat pula Kepala Uni mentjatat bahwa sudah ada persetudjuan antara kedua peserta.

Mahkamah-Arbitrasi Uni.

Pasal 13.

1. Ada sebuah Mahkamah-Arbitrasi Uni jang mendjalankan pengadilan atas nama Kepala Uni.

2. Mahkamah itu mengadili pertikaian hukum jang dihadapkan kepadanja oleh salah satu peserta terhadap peserta jang lain ataupun oleh kedua peserta bersama dan jang timbul dari pada Statut-Uni, dari pada sesuatu persetudjuan antara peserta atau dari pada peraturan bersama.

Pasal 14.

1. Mahkamah-Arbitrasi Uni beranggota tiga orang jang diangkat mendjadi anggota oleh Republik Indonesia Serikat dan lagi tiga orang jang diangkat mendjadi anggota oleh Keradjaan Nederland.

2. Anggota-anggota Mahkamah diangkat mendjadi anggota untuk masa sepuluh tahun lamanja. Apabila sudah berusia 65 tahun tak boleh tidak mereka harus meletakkan djabatannja.

3. Bergiliran seorang Indonesia dan seorang Belanda maka tiap-tiap tahun seorang diantara anggota Mahkamah tersebut dipilih mendjadi ketua oleh Mahkamah itu.

4. Sebelum memangku djabatannja maka anggota-anggota Mahkamah itu bersumpah atau berdjandji menurut agamanja dihadapan Kepala Uni bahwa mereka akan memenuhi segala kewadjiban djabatannja dengan djudjur, teliti dan adil dan tengah mendjalankan kewadjibannja akan bertingkah-laku dengan patut, sebagaimana seharusnja bagi seorang anggota Mahkamah-Arbitrasi Uni jang baik.

Pasal 15.

1. Mahkamah-Arbitrasi Uni mengambil keputusan dengan suara terbanjak.

2. Djika suara jang berlawanan sama banjaknja, maka — ketjuali djika kedua peserta meminta lain — Mahkamah itu akan menghadapkan permintaan kepada Presiden Mahkamah Djustisi Internasional atau kepada badan internasional lain jang ditundjuk dengan suara terbanjak, supaja diangkat sebagai orang berkebangsaan lain mendjadi anggota luar biasa pada Mahkamah-Arbitrasi Uni; anggota itu akan turut mengulangi bermusjawarat tentang pertikaian hukum itu serta memutuskannja, ialah dengan segala hak anggota biasa.

Pasal 16.

Ketentuan-ketentuan landjut tentang atjara Mahkamah-Arbitrasi Uni dan hal menjusun dan mengatur pekerdjaan Mahkamah itu akan ditetapkan dengan peraturan bersama. Selama peraturan bersama sedemikian itu belum ada, maka Mahkamah sendirilah jang mengatur atjara, susunan dan aturan pekerdjaannja. Djika hal itu Mahkamah tadi tidak dapat mentjapai persetudjuan, maka berlakulah ajat kedua pasal tadi.

Pasal 17.

Kedua peserta berdjandji akan menurut keputusan Mahkamah-Arbitrasi Uni; mereka akan mendjalankan keputusan itu atas kuasa dan tanggung-djawab sendiri, masing-masing di-dalam lingkungan daerah-hukumnja.

Pasal 18.

Djika ketentuan-ketentuan pada hukum salah satu peserta atau pada hukum badan-badan hukum-publik didalam lingkungan daerah-hukumnja dipihak satu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pada Statut-Uni, pada sesuatu persetudjuan antara peserta ataupun pada sesuatu peraturan bersama dipihak lain, maka jang akan diutamakan ialah golongan ketentuan jang tersebut kudian itu.

Pasal 19.

Kedua peserta tidaklah kehilangan keleluasaan mendjalankan segala hak jang ada padanja menurut hukum bangsa-bangsa atau lain-lain perihal meminta keputusan sesuatu hakim atau hakim internasional dalam hal-hal Mahkamah Arbitrasi Uni itu menurut pendapat kedua peserta tidak berkuasa ataupun dalam hal-hal Mahkamah itu menjatakan dirinja tidak berkuasa.

Pasal 20.

Aturan mengenai kerdjasama kedua peserta di lapangan perhubungan luar negeri diberikan pada persetudjuan jang dilampirkan pada Statut ini.

Pertahanan.

Pasal 21.

Aturan mengenai kerdjasama kedua peserta di lapangan pertahanan diberikan pada persetudjuan jang dilampirkan pada Statut ini.

Perhubungan keuangan dan perekonomian.

Pasal 22.

Aturan mengenai kerdjasama kedua peserta di lapangan perhubungan keuangan dan perekonomian diberikan pada persetudjuan jang dilampirkan pada Statut ini.

Perhubungan kebudajaan.

Pasal 23.

Aturan mengenai kerdjasama kedua peserta di lapangan kebudajaan diberikan pada persetudjuan jang dilampirkan pada Statut ini.

Kewarganegaraan.

Pasal 24.

1. Dengan tidak mengurangi segala apa jang sudah atau lagi akan ditentukan pada persetudjuan chusus-chusus antara kedua peserta, maka hal hak-hak kenegaraan dan lain-lain didjalankan oleh warganegara peserta jang satu didaerah-hukum peserta jang lain, akan berlaku ditentukan dibawah ini:

a. kebangsaan warganegara peserta jang satu tidak akan mendjadi halangan hal berdjabatan didaerah-hukum peserta jang lain, melainkan terhadap kepada:

1°. djabatan-djabatan jang pemangkunja bertanggung-djawab kepada suatu badan perwakilan, melainkan jang sekiranja diketjualikan undang-undang;

2°. segala djabatan politik, berkuasa, kehakiman dan jang bersifat pemimpin jang ditundjukkan undang-undang;

b. hal mendjalankan hak-hak sipil dan bekerdja dilapangan kemasjarakatan, tiap-tiap peserta senantiasa akan mengindahkan sepenuh-penuhnja segala kepentingan chusus didalam lingkungan daerah-hukumnja jang ada pada warganegara dan badan-badan hukum peserta jang lain, dan karena itu tidaklah seberapa ia akan membedakan antara warganegara dan badan-badan hukum masing-masing peserta, dengan tidak mengurangi kekuasaan tiap-tiap peserta akan menetapkan peraturan-peraturan jang perlu, baik guna mendjaga kepentingnja jang bersifat kebangsaan, maupun guna melindungi golongan-golongan jang lemah perekonomiannja.

2. Sekali-kali tidak boleh terdjadi warganegara dan badan-badan hukum peserta jang satu didaerah-hukum peserta jang lain dibawa setjara jang kurang sempurna dari pada tjara membawa warganegara dan badan-badan hukum Negara asing.

Ketentuan-ketentuan chusus.

Pasal 25.

Untuk mengurus kepentingan peserta jang satu didaerah-hukum peserta jang lain Pemerintah peserta mengangkat Komisaris Agung. Mereka itu berkedudukan wakil diplomatik serta berpangkat Duta Besar (Ambassadeur).

Pasal 26.

1. Sekadar tidak ada persetudjuan jang menetapkan lain, maka belandja Uni seperdua ditanggung tiap-tiap peserta.

2. Aturan-aturan landjut mengenai belandja Uni akan ditetapkan dengan peraturan bersama. Selama belum diadakan peraturan bersama sedemikian, maka konperensi menteri itu akan mengadakan aturan-aturan seperlunja.

Pasal 27.

1. Semua surat-surat resmi jang terbit dari pada konperensi menteri dan badan-badan perlengkapan Uni akan dikarang berbahasa-bahasa Indonesia dan Belanda.

2. Kedua naskah itu sama kekuatannja.

Statut-Uni dan persetudjuan-persetudjuan jang bersangkutan, serta peraturan-peraturan bersama dan persetudjuan-persetudjuan jang akan diadakan, boleh dikirimkan ke Sekertariat Perserikatan Bangsa-bangsa untuk didaftarkan sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa pasal 102.

Amsterdam, 27 Desember 1949.

Perdana-Menteri, Menteri Urusan Luar Negeri u.s. Republik Indonesia Serikat,

MOHAMMAD HATTA.

Perdana-Menteri, Menteri Urusan Umum Keradjaan Nederland,

W. DREES.

UNIESTATUUT.

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië,

besloten hebbende op basis van vrijwilligheid, gelijkheid en volledige onafhankelijkheid een vriendschappelijke samenwerking tot stand te brengen tussen elkander en tot verwezenlijking van de toekomstige samenwerking in het leven te roepen de Nederlands-Indonesische Unie,

zijn overeengekomen in dit Uniestatuut de grondslag te leggen van hun onderlinge verhouding als onafhankelijke en souvereine staten,

daarbij van oordeel zijnde, dat niets in dit Statuut aldus mag worden uitgelegd, dat enige daarin niet genoemde vorm van samenwerking, of samenwerking op enig daarin niet genoemd gebied, waaraan de beide deelgenoten in de toekomst de behoefte mochten gevoelen, zullen zijn uitgesloten.

Karakter van de Unie.

Artikel 1.

1. De Nederlands-Indonesische Unie verwezenlijkt de georganiseerde samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië op basis van vrijwilligheid en gelijkheid in status met gelijke rechten.

2. De Unie doet geen afbreuk aan de status van elk van de beide deelgenoten als onafhankelijke en souvereine staat.

Doel van de Unie.

Artikel 2.

1. De Unie stelt zich ten doel samenwerking der deelgenoten ter behartiging van hun gemeenschappelijke belangen.

2. Deze samenwerking zal plaats hebben ter zake van onderwerpen in de eerste plaats liggende op het gebied der buitenlandse betrekkingen en defensie, en voorzover nodig financiën, alsmede ten aanzien van onderwerpen van economische en culturele aard.

Artikel 3.

1. Beide deelgenoten verbinden zich hun staatsbestel te baseren op de beginselen der democratie en te streven naar een onafhankelijke rechtspraak.

2. Beide deelgenoten zullen de in de Bijlage van dit Statuut vermelde fundamentele menselijke rechten en vrijheden erkennen.

Werking der Unie.

Artikel 4.

Alle beslissingen in de Unie worden genomen bij overeenstemming tussen beide deelgenoten.

Hoofd der Unie.

Artikel 5.

1. Aan het hoofd der Unie staat Hare Majesteit Koningin Juliana, Prinses van Oranje-Nassau, en bij opvolging Hare wettige opvolgers in de Kroon der Nederlanden.

2. In geval van minderjarigheid van het Hoofd der Unie, of in geval het Hoofd der Unie buiten staat geraakt zijn functies te vervullen, zomede indien het Hoofd der Unie tijdelijk zijn functies neerlegt, voorzien de beide deelgenoten in onderlinge overeenstemming in de waarneming.

In onderlinge overeenstemming kan een dergelijke voorziening bij voorbaat worden getroffen.

Artikel 6.

Het Hoofd der Unie verwezenlijkt de idee van vrijwillige en duurzame samenwerking tussen de deelgenoten.

De organen der Unie.

Artikel 7.

Voor de uitvoering van de doelstellingen der Unie houden de daartoe door elk der deelgenoten aangewezen ministers, of personen, die naar de eigen staatsinstellingen der deelgenoten gelijke of gelijksoortige verantwoordelijkheid dragen, tweemaal per jaar, en voorts zo dikwijls de deelgenoten zulks nodig achten, conferenties.

Tenzij anders overeengekomen zullen daaraan drie ministers van iedere deelgenoot deelnemen.

Artikel 8.

De ministers ter conferentie blijven verantwoordelijk aan de eigen organen der deelgenoten op de voet van de eigen staatsinstellingen der deelgenoten.

Artikel 9.

De conferentie van ministers stelt naar gelang van de behoeften commissies in, waarin de beide deelgenoten op basis van pariteit leden benoemen.

Artikel 10.

1. De beide deelgenoten zullen een goed contact en een geregelde samenwerking tussen de wederzijdse parlementen van de deelgenoten bewerkstelligen.
2. De eerste bespreking van vertegenwoordigers van de parlementen zal plaats hebben binnen acht maanden na de totstandkoming van het voorlopige parlement van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 11.

1. De Unie beschikt over een parlement secretariaat. Elk der deelgenoten wijst een secretaris-generaal aan, welke beide voor één jaar om beurten de leiding van het secretariaat op zich nemen.
2. De benoeming van het overige personeel geschiedt in overeenstemming tussen de beide secretarissen-generaal volgens een door de beide deelgenoten gezamenlijk opgestelde instructie.

Besluiten en gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 12.

1. Besluiten worden op de conferentie van ministers genomen bij eenparigheid van stemmen tussen de vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden enerzijds en die van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië anderzijds.

2. Met besluiten van de conferentie kan op de volgende wijzen worden gehandeld.

3. Besluiten genomen op de conferentie van ministers tot het uitvaardigen van gemeenschappelijke regelingen behoeven goedkeuring door de wederzijdse parlementen der deelnoten. Na goedkeuring door de beide parlementen zal het Hoofd der Unie constateren, dat overeenstemming bestaat tussen beide deelgenoten en wordt de gemeenschappelijke regeling vervolgens in het officiële Staatsblad van elk der deelgenoten afgekondigd. Door die afkondiging verkrijgt de gemeenschappelijke regeling rechtskracht. De gemeenschappelijke regelingen zijn onschendbaar.

4. Ten aanzien van andere besluiten van de conferentie kan het Hoofd der Unie op verzoek van de conferentie eveneens constateren, dat overeenstemming bestaat tussen beide deelgenoten.

Unie-Hof van Arbitrage.

Artikel 13.

1. Er is een Unie-Hof van Arbitrage, rechtsprekende in naam van het Hoofd der Unie.

2. Het Hof neemt kennis van rechtsgeschillen door één der deelgenoten tegen de andere deelgenoot dan wel door beide deelgenoten gezamenlijk aanhangig gemaakt, welke hun grondslag vinden in het Uniestatuut, in enige overeenkomst tussen de deelgenoten, of in gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 14.

1. Het Unie-Hof van Arbitrage bestaat uit drie door het Koninkrijk der Nederlanden en drie door de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië benoemde leden.

2. De leden van het Hof worden benoemd voor tien jaar. Zij treden in ieder geval af, indien zij de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.

3. Tot voorzitter wordt jaarlijks bij afwisseling een Nederlander en een Indonesiër door en uit de leden van het Hof gekozen.

4. Alvorens hun ambt te aanvaarden leggen de leden van het Hof ten overstaan van het Hoofd der Unie op de wijze hunner godsdienstige gezindheid de eed of belofte af, dat zij hun ambt met eerlijkheid, nauwgezetheid en onpartijdigheid zullen vervullen en zich in de uitoefening hunner bediening zullen gedragen, zoals een goed lid van het Unie-Hof van Arbitrage betaamt.

Artikel 15.

1. Het Unie-Hof van Arbitrage beslist bij meerderheid van stemmen.

2. Bij staking van stemmen zal, tenzij beide deelgenoten anders verzoeken, het Hof zich tot de President van het Internationaal Hof van Justitie of tot een andere bij meerderheid van stemmen aan te wijzen internationale instantie wenden met het verzoek iemand van een andere nationaliteit tot bijzonder lid van het Unie-Hof van Arbirtage te benoemen, die met de rechten van een gewoon lid aan een hernieuwde beraadslaging over het rechtsgeschil en aan de beslissing daarvan zal deelnemen.

Artikel 16.

Nadere bepalingen nopens de rechtsgang bij en de organisatie en regeling van werkzaamheden van het Unie-Hof van Arbitrage zullen bij gemeenschappelijke regeling worden vastgesteld. Zolang zulk een gemeenschappelijke regeling niet bestaat, regelt het Hof zelf de rechtsgang en de organisatie en regeling van zijn werkzaamheden, waarbij, indien het terzake niet tot overeenstemming kan komen, het tweede lid van het voorgaande artikel van overeenkomstige toepassing zal zijn.

Artikel 17.

De beide deelgenoten verbinden zich om de beslissingen van het Unie-Hof van Arbitrage na te komen en zullen deze op hun eigen gezag en verantwoordelijkheid ten uitvoer leggen, ieder binnen eigen rechtsgebied.

Artikel 18.

In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen van het recht van de deelgenoten en van publiekrechtelijke lichamen

binnen hun rechtsgebied enerzijds, en bepalingen van het Uniestatuut, enige overeenkomst tussen de deelgenoten of enige gemeenschappelijke regeling anderzijds, zal de laatstgenoemde categorie van bepalingen de voorrang hebben.

Artikel 19.

De beide deelgenoten behouden zich alle rechten voor, die hun volgens het volkenrecht of anderszins toekomen nopens het inroepen van de beslissing van enige internationale rechter of arbiter in die gevallen, waarin het Unie-Hof van Arbitrage naar het oordeel van beide deelgenoten onbevoegd is dan wel in die gevallen, waarin het Hof zich onbevoegd verklaart.

Buitenlandse betrekkingen.

Artikel 20.

Regelingen omtrent de samenwerking tussen de deelgenoten op het gebied der buitenlandse betrekkingen worden gegeven in de aan dit Statuut gehechte overeenkomst.

Defensie.

Artikel 21.

Regelingen omtrent de samenwerking tussen de deelgenoten op het gebied der defensie worden gegeven in de aan dit Statuut gehechte overeenkomst.

Financiële en economische betrekkingen.

Artikel 22.

Regelingen omtrent de samenwerking tussen de deelgenoten op het gebied van de financiële en economische betrekkingen worden gegeven in de aan dit Statuut gehechte overeenkomst.

Culturele betrekkingen.

Artikel 23.

Regelingen omtrent de samenwerking tussen de deelgenoten op cultureel gebied worden gegeven in de aan dit Statuut gehechte overeenkomst.

Staatsburgerschap.

Artikel 24.

1. Onverminderd hetgeen is of zal worden bepaald in bijzondere overeenkomsten tussen de deelgenoten, zal ten aanzien van de uitoefening van staatkundige en andere rechten door staatsburgers van de ene deelgenoot in het rechtsgebied van de andere deelgenoot het hieronder bepaalde gelden:

a. de nationaliteit van staatsburgers van de ene deelgenoot zal geen bezwaar zijn voor het bekleden van ambten in het rechtsgebied van de andere deelgenoot, behoudens ten aanzien van:

1°. ambten, waarvan de bekleder verantwoordelijk is tegenover een vertegenwoordigend lichaam, behoudens uitzonderingen, die de wet mocht bepalen;

2°. die politieke, gezagdragende, rechterlijke en leidende ambten, die door de wet worden aangewezen;

b. ten aanzien van de uitoefening van burgerlijke rechten en de werkzaamheid op maatschappelijk terrein zal elk der deelgenoten zich steeds ten volle rekenschap geven van de speciale belangen binnen zijn rechtsgebied van de staatsburgers en rechtspersonen van de andere deelgenoot en deswege geen noemenswaard onderscheid maken tussen de wederzijdse staatsburgers en rechtspersonen, onverkort de bevoegdheid van iedere deelgenoot om regelingen vast te stellen, die nodig zijn, hetzij voor de bescherming van zijn nationale belangen, hetzij voor de bescherming van economisch zwakke groepen.

2. In geen geval zullen de staatsburgers en rechtspersonen van de ene deelgenoot in het rechtsgebied van de andere deelgenoot een ongunstiger behandeling ondervinden dan staatsburgers en rechtspersonen van een derde Staat.

Bijzondere bepalingen.

Artikel 25.

Ter behartiging van de belangen der deelgenoten in elkanders rechtsgebied worden door de Regeringen der deelgenoten Hoge Commissarissen benoemd. Zij hebben de status van diplomatieke vertegenwoordigers en bezitten de rang van ambassadeur.

Artikel 26.

1. Voorzover bij overeenkomst niet anders is bepaald, worden de kosten der Unie door ieder der deelgenoten voor de helft gedragen.

2. Verdere voorzieningen betreffende de kosten der Unie worden bij gemeenschappelijke regeling getroffen. Zolang zulk een gemeenschappelijke regeling niet bestaat, zal de conferentie van ministers de nodige voorzieningen treffen.

Artikel 27.

1. Alle officiële bescheiden, welke van de conferentie van ministers en van andere Unieorganen uitgaan, worden in de Nederlandse en Indonesische taal gesteld.

2. Beide teksten hebben gelijke kracht.

Artikel 28.

Het Uniestatuut en de daarbij behorende overeenkomsten, alsmede de gemeenschappelijke regelingen en te sluiten overeenkomsten kunnen ter registratie aan het Secretariaat der Verenigde Naties worden aangeboden overeenkomstig artikel 102 van het Handvest der Verenigde Naties.

Amsterdam, 27 December 1949.

De Minister-President, Minister van Buitenlandse Zaken a.i. van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië,

MOHAMMAD HATTA.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden,

W. DREES.

UNION STATUTE.

The Kingdom of the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia,

having resolved on a basis of free will, equality and complete independence to bring about friendly cooperation with each other and to create the Netherlands Indonesian Union with a view to effectuate this future cooperation,

have agreed to lay down in this Statute of the Union the basis of their mutual relationship as independent and sovereign States,

thereby holding that nothing in this Statute shall be construed as excluding any form of cooperation not mentioned therein or cooperation in any field not mentioned therein, the need of which may be felt in the future by both partners.

Character of the Union.

Article 1.

1. The Netherlands Indonesian Union effectuates the organized cooperation between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia on the basis of free will and equality in status with equal rights.

2. The Union does not prejudice the status of each of the two partners as an independent and sovereign State.

Purpose of the Union.

Article 2.

1. The Union aims at cooperation of the partners for the promotion of their common interests.

2. This cooperation shall take place with respect to subjects lying primarily in the field of foreign relations and defence, and as far as necessary, finance, and also in regard of subjects of an economic and a cultural nature.

Article 3.

1. The two partners undertake to base their form of government on the principles of democracy and to aim at an independent judiciary.

2. The two partners shall recognize the fundamental human rights and freedoms enumerated in the Appendix to this Statute.

Procedure of the Union.

Article 4.

All decisions in the Union shall be taken in agreement between the two partners.

Head of the Union.

Article 5.

1. At the head of the Union shall be Her Majesty Queen Juliana, Princess of Orange Nassau, and in case of succession Her lawful successors in the Crown of the Netherlands.

2. In case of minority of the Head of the Union, or in case the Head of the Union is unable to perform His office and further in case the Head of the Union temporarily ceases to perform His office, both partners shall make the necessary provision in common agreement.

Such provision may be made in common agreement in advance.

Article 6.

The Head of the Union effectuates the spirit of voluntary and lasting cooperation between the partners.

The organs of the Union.

Article 7.

For the implementation of the purposes of the Union the ministers or persons vested by the respective constitutions of the partners with equal or similar responsibility, having been designated for this purpose by each of the partners, shall hold conferences twice a year and further as often as the partners shall deem necessary.

Unless otherwise agreed, three ministers of each partner will participate in these conferences.

Article 8.

The ministers participating in the conference remain responsible to the respective organs of the partners on the basis of the respective constitutions of the partners.

Article 9.

The conference of ministers shall institute committees as circumstances may require, in which each of the two partners shall appoint members on a basis of parity.

Article 10.

1. The two partners shall effectuate good contact and regular cooperation between the parliaments of the partners.

2. The first discussion between representatives of the parliaments shall take place within eight months after the coming into being of the provisional parliament of the Republic of the United States of Indonesia.

Article 11.

1. The Union shall be served by a permanent secretariat. Each of the partners shall appoint a secretary-general, each of whom shall take charge of the secretariat by yearly rotation.

2. The other personnel shall be appointed in agreement between the two secretaries-general in accordance with an instruction drawn up jointly by the two partners.

Decisions and joint regulations.

Article 12.

1. Decisions of the conference of ministers shall be taken by unanimity of votes between the representation of the Kingdom of the Netherlands on the one side and that of the Republic of the United States of Indonesia on the other.

2. Decisions of the conference may be given effect in accordance with the following procedure.

3. Decisions taken at the conference of ministers for the enactment of joint regulations require approval by the respective parliaments of the partners. After approval by the two parliaments, the Head of the Union shall state that agreement exists between the two partners and the joint regulation shall thereupon be promulgated in the official Statute Book

of each of the partners. By this promulgation the joint regulation shall have force of law. The joint regulations are inviolable.

4. In respect of other decisions of the conference the Head of the Union, upon request of the conference, may likewise state that agreement exists between the two partners.

Union court of arbitration.

Article 13.

1. There shall be a Union Court of Arbitration for the settlement of matters of law and justice in the name of the Head of the Union.

2. The Court shall take cognizance of legal disputes, brought before the Court by one of the partners against the other, or jointly by both partners, arising from the Union Statute, from any agreement between the partners or from joint regulations.

Article 14.

1. The Union Court of Arbitration shall consist of three members appointed by the Kingdom of the Netherlands and three members appointed by the Republic of the United States of Indonesia.

2. The members of the Court shall be appointed for a period of ten years. They shall resign in any cace once they reach the age of sixty five years.

3. The chairman shall be elected, every year a Netherlander and an Indonesian in turn, by and from amongst the members of the Court.

4. Prior to taking up their office, the members of the Court shall, before the Head of the Union, take the oath or make the promise in accordance with their religious faith, that they shall fulfil their office honestly, scrupulously and impartially and shall comport themselves in the exercise of their duties as befits a good member of the Union Court of Arbitration.

Article 15.

1. The Union Court of Arbitration shall decide by majority of votes.

2. In case votes are equally divided the Court shall, unless the two partners otherwise request, call upon the President of the International Court of Justice or upon an other international authority, to be designated by majority of votes, with the request to appoint a person of an other nationality as special member of the Union Court of Arbitration, who, having the rights of an ordinary member, shall take part in a renewed consideration of the dispute and in the decision thereon.

Article 16.

Further provisions concerning the rules of procedure, the organization and regulation of the activities of the Union Court of Arbitration shall be established in a joint regulation. As long as such a joint regulation does not exist, the Court itself shall determine its rules of procedure and the organization and regulation of its activities, paragrahp 2 of the preceding article being applicable if no agreement can be reached in this matter.

Article 17.

The two partners undertake to comply with the decisions of the Union Court of Arbitration and to implement such decisions under their own authority and responsibility each within his own territory.

Article 18.

In case of conflict between provisions of the law of the partners and of the public bodies within their jurisdiction on the one side and the Union Statute or any agreement between the partners or a joint regulation on the other, the latter category of provisions shall prevail.

Article 19.

The two partners reserve all their rights under international law or otherwise to solicit the decision of an international

court or arbitrator in cases where both partners consider the Union Court of Arbitration incompetent or in cases where the Court declares itself incompetent.

Foreign relations.

Article 20.

Provisions concerning the cooperation between the partners in the field of foreign relations are set forth in the agreement attached to the present Statute.

Defence.

Article 21.

Provisions concerning the cooperation between the partners in the field of defence are set forth in the agreement attached to the present Statute.

Financial and economic relations.

Article 22.

Provisions concerning the cooperation between the partners in the field of financial and economic relations are set forth in the agreement attached to the present Statute.

Cultural relations.

Article 23.

Provisions concerning the cooperation between the partners in the cultural field are set forth in the agreement attached to the present Statute.

Nationality.

Article 24.

1. Without prejudice to the provisions made or still to be made in special agreements between the partners, with regard to the exercise of political and other rights by nationals of one partner within the jurisdiction of the other partner, the following shall apply:

a. the nationality of one partner shall not constitute an objection against serving officially within the jurisdiction of the other partner, except for:

1*a.* offices, the holder of which is responsible to a representative body, unless the law should provide otherwise;

2*a.* those political, authoritative, judicial and leading offices which are specified as such by law;

b. wiht regard to the exercise of civil rights and social activities, each partner shall always fully appreciate the special interests within his jurisdiction of the nationals and corporate bodies of the other partner, and therefore shall make no appreciable discrimination between their respective nationals and corporate bodies, without prejudice to the power of either partner to establish regulations required for the protection of their national interests or for the protection of economically weak groups.

2. On no account shall the nationals and corporate bodies of either of the partners receive within the jurisdiction of the other partner treatment less favourable than nationals and corporate bodies of a thidr State.

Special provisions.

Article 25.

To further the interests of the partners within each other's territory the Governments of the partners shall appoint High Commissioners. These shall have the status of diplomatic representatives with the rank of ambassador.

Article 26.

1. Unless otherwise agreed each partner shall bear one half of the expenses of the Union.

2. Further provisions in respect of the expenses of the Union shall be established by joint regulation. As long as such a joint regulation does not exist, the conference of ministers shall make the necessary provisions.

Article 27.

1. All official documents, issued by the conference of ministers or by other Union organs shall be in the Netherlands and Indonesian languages.

2. Both texts shall be equally authentic.

Article 28.

The Union Statute and the agreements pertaining thereto as well as the joint regulations and future agreements may be presented to the Secretariat of the United Nations for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations.

Amsterdam, 27 December 1949.

The Prime Minister, Minister of Foreign Affairs a.i. of the Republic of the United States of Indonesia,

MOHAMMAD HATTA.

The Prime Minister, Minister of General Affairs of the Kingdom of the Netherlands,

W. DREES.

OVERGANGSOVEREENKOMST.

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië zijn het volgende overeenkomen:

Artikel 1.

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië aanvaarden een toescheiding van staatsburgers overeenkomstig de aan deze overgangsovereenkomst gehechte overeenkomst.

Artikel 2.

1. De indeling van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië in deelstaten zal uiteindelijk worden bepaald door de Constituante in overeenstemming met de bepalingen van de voorlopige Constitutie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, met dien verstande, dat door de bevolkingen van gebieden, die door de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië op aanbeveling van de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië of een ander orgaan van de Verenigde Naties worden aangewezen, een plebisciet onder toezicht van de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië of bedoeld ander orgaan zal worden gehouden over de vraag, of zij zich tot een afzonderlijke deelstaat zullen vormen.

2. Elke deelstaat zal in de gelegenheid worden gesteld de definitieve Constitutie te aanvaarden. Ingeval een deelstaat deze niet aanvaardt, zal hij de bevoegdheid hebben te onderhandelen omtrent een speciale verhouding tot de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel 3.

1. Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië erkennen en aanvaarden, dat alle bevoegdheden en verplichtingen van de Gouverneur-Generaal van Indonesië, voortspruitende uit de contracten door deze met Zelfbesturen gesloten, door de souvereiniteits-

overdracht overgaan op de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, dan wel, indien het staatsrecht van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië daartoe aanleiding geeft, op een deelgebied.

2. Door de overdracht van souvereiniteit aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië worden de Zelfbestuurders van rechtswege ontslagen van hun eed van trouw aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden.

3. De Republiek der Verenigde Staten van Indonesië erkent de bijzondere positie van de Zelfbesturen op de voet van de desbetreffende bepalingen in haar Constitutie en in die harer deelgebieden, waarin rechtsgeschillen inzake de positie der Zelfbesturen worden onderworpen aan de uitspraak van een onafhankelijk orgaan van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 4.

1. Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië erkennen en aanvaarden, dat alle rechten en verplichtingen van Indonesië op de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië overgaan, zowel die van privaatrechtelijke als die van publiekrechtelijke aard, voor zover daaromtrent in de onder het Uniestatuut begrepen bijzondere overeenkomsten niet anders is bepaald.

2. De Republiek der Verenigde Staten van Indonesië is aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de voormalige wettig bestaande publiekrechtelijke gemeenschappen in Indonesië, welke in de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië of haar onderdelen zijn opgelost en garandeert de nakoming der verplichtingen van publiekrechtelijke gemeenschappen, welke als zodanig voortbestaan, voor zover daaromtrent in de financiële en economische overeenkomst niet anders is bepaald.

3. Het bepaalde in de voorgaande leden is niet van toepassing op de residentie Nieuw-Guinea in verband met het feit als vermeld in artikel 2 van het Charter van Souvereiniteitsoverdracht, dat het nog niet mogelijk is geweest de standpunten van partijen nopens Nieuw-Guinea overeen te brengen.

Artikel 5.

1. Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië verstaan, dat, met inachtneming van het tweede lid, de rechten en verplichtingen van het Koninkrijk, welke voortvloeien uit de door het Koninkrijk gesloten verdragen en andere internationale overeenkomsten, geslechts worden aangemerkt als rechten en verplichtingen van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, indien en voorzover deze verdragen en overeenkomsten van toepassing zijn op het rechtsgebied van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, en met uitzondering van de rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit verdragen en overeenkomsten, waarbij de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië uit hoofde van de bepalingen van deze verdragen of overeenkomsten geen partij kan worden.

2. Onverminderd de bevoegdheid van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië om de in het eerste lid bedoelde verdragen en overeenkomsten op te zeggen of de werking daarvan op andere wijze voor haar rechtsgebied overeenkomstig de bepalingen van deze verdragen en overeenkomsten te beëindigen, is het eerste lid niet van toepassing op verdragen en overeenkomsten, ten aanzien waarvan nader overleg tussen de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en het Koninkrijk der Nederlanden tot de conclusie zal leiden, dat deze niet vallen onder de werking van het eerste lid.

Artikel 6.

Voorzieningen betreffende de rechtspositie van de burgerlijke overheidsdienaren in verband met de souvereiniteitsoverdracht zijn opgenomen in de aan deze overgangsovereenkomst gehechte overeenkomst.

Artikel 7.

Het terugtrekken van de Nederlandse strijdkrachten uit Indonesië en de reorganisatie van de door of onder het gezag van de Regering van Indonesië (Nederlands-Indonesische overheid) gevormde en uitgeruste strijdkrachten in Indonesië

worden geregeld als voorgeschreven in de aan deze overgangsovereenkomst gehechte „Regelingen betreffende Militaire Aangelegenheden".

Artikel 8.

1. De bestaande wettelijke regelingen en administratieve voorschriften blijven, voorzover zij niet onverenigbaar zijn met de souvereiniteitsoverdracht, met de bepalingen van het Uniestatuut, van deze overgangsovereenkomst of van enige andere overeenkomst, tussen partijen gesloten, ongewijzigd van kracht als eigen regelingen en voorschriften van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, zolang zij niet door de bevoegde organen van het Koninkrijk der Nederlanden, onderscheidenlijk de bevoegde organen van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië worden buiten werking gesteld of gewijzigd.

2. Waar in deze regelingen en voorschriften wordt gesproken van Nederlandse onderdanen, wordt daaronder verstaan: staatsburgers van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

3. Waar deze regelingen en voorschriften betrekking hebben op schepen of luchtvaartuigen, die gerechtigd zijn tot het voeren van de Nederlandse vlag, hebben zij gelijkelijk betrekking op schepen of luchtvaartuigen, die gerechtigd zijn tot het voeren van de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden en die gerechtigd zijn tot het voeren van de vlag van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 9.

De bevoegdheden, welke volgens de bestaande wettelijke regelingen en administratieve voorschriften in Nederland op het gebied van het algemeen bestuur over Indonesië toekomen aan Nederlandse organen, worden in afwachting van nadere voorzieningen door de bevoegde organen van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië voor deze uitgeoefend door een Gedelegeerde, daartoe aangewezen door de Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

Artikel 10.

Het Koninkrijk der Nederlanden zal bij de Verenigde Naties het lidmaatschap van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië bevorderen.

Amsterdam, 27 Desember 1949.

De Minister-President, Minister van Buitenlandse Zaken a.i. van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië,

MOHAMMAD HATTA.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden,

W. DREES.